

Rekonstruksi Sejarah Umat Islam Di Tanah Papua

DISERTASI

**Diajukan untuk melengkapi persyaratan
mencapai Gelar Doktor dalam Ilmu Agama Islam**

oleh :

**Toni Victor M. Wanggai
02.3.00.1.04.01.0070**

Promotor :

**Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A.
Dr. Uka Tjandrasasmita**



**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2008 M/1429 H**

PERSETUJUAN

Disertasi dengan judul : “Rekonstruksi Sejarah Umat Islam di Tanah Papua” yang ditulis oleh Toni Victor M. Wanggai, NIM. 02.3.00.1.04.01.0070, telah diperbaiki sesuai dengan saran dan komentar dari Tim Penguji pada Ujian Pendahuluan Disertasi tanggal 31 Agustus 2008, dapat disetujui untuk dibawa ke Sidang Promosi Doktor (Ujian Terbuka).

Jakarta, November 2008

Ketua Sidang / merangkap Promotor,

Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A.

PERSETUJUAN

Disertasi dengan judul : “Rekonstruksi Sejarah Umat Islam di Tanah Papua” yang ditulis oleh Toni Victor M. Wanggai, NIM. 02.3.00.1.04.01.0070, telah diperbaiki sesuai dengan saran dan komentar dari Tim Penguji pada Ujian Pendahuluan Disertasi tanggal 31 Agustus 2008, dapat disetujui untuk dibawa ke Sidang Promosi Doktor (Ujian Terbuka).

Jakarta, November 2008

Promotor/ merangkap Penguji,

Dr.Uka Tjandrasasmita

PERSETUJUAN

Disertasi dengan judul : “Rekonstruksi Sejarah Umat Islam di Tanah Papua” yang ditulis oleh Toni Victor M. Wanggai, NIM. 02.3.00.1.04.01.0070, telah diperbaiki sesuai dengan saran dan komentar dari Tim Penguji pada Ujian Pendahuluan Disertasi tanggal 31 Agustus 2008, dapat disetujui untuk dibawa ke Sidang Promosi Doktor (Ujian Terbuka).

Jakarta, November 2008

Penguji,

Prof. Dr. Badri Yatim, M.A.

PERSETUJUAN

Disertasi dengan judul : “Rekonstruksi Sejarah Umat Islam di Tanah Papua” yang ditulis oleh Toni Victor M. Wanggai, NIM. 02.3.00.1.04.01.0070, telah diperbaiki sesuai dengan saran dan komentar dari Tim Penguji pada Ujian Pendahuluan Disertasi tanggal 31 Agustus 2008, dapat disetujui untuk dibawa ke Sidang Promosi Doktor (Ujian Terbuka).

Jakarta, November 2008

Penguji,

Prof. Dr. H. M. Bambang Pranowo, M.A.

PERSETUJUAN

Disertasi dengan judul : “Rekonstruksi Sejarah Umat Islam di Tanah Papua” yang ditulis oleh Toni Victor M. Wanggai, NIM. 02.3.00.1.04.01.0070, telah diperbaiki sesuai dengan saran dan komentar dari Tim Penguji pada Ujian Pendahuluan Disertasi tanggal 31 Agustus 2008, dapat disetujui untuk dibawa ke Sidang Promosi Doktor (Ujian Terbuka).

Jakarta, November 2008

Penguji,

Prof. Dr. Susanto Zuhdi, M.A.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Toni Victor M. Wanggai

NPM : 02.3.00.1.04.01.0070

Konsentrasi : Sejarah dan Peradaban Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi berjudul : **“Rekonstruksi Sejarah Umat Islam di Tanah Papua”** adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiasi kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar Doktor.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 1 November 2008

Yang Menyatakan,

Toni Victor M. Wanggai

Abstrak

Disertasi ini menyimpulkan bahwa kedatangan Islam di Papua pada pertengahan abad XV, tepatnya di kepulauan Raja Ampat-Sorong yang dibawa oleh kesultanan Bacan di Maluku Utara melalui kontak perdagangan, budaya dan politik. Selanjutnya, pada abad XVI dibawah kesultanan Tidore, Islam terlembaga ke dalam struktur kerajaan di kepulauan Raja Ampat (Kerajaan Waigeo, Batanta, Salawati dan Misool) dan juga berdiri sembilan kerajaan atau pertuanan di daerah Fakfak dan Kaimana, antara lain Namatota, Rumbati, dan Patipi. Sedangkan menyangkut perkembangan Islam di Papua, disertasi ini menyimpulkan bahwa posisi dan peran Islam sangat tergantung dengan konteks sosial politik yang berkembang dari waktu ke waktu, mulai era Hindia Belanda hingga era Indonesia. Masuknya pemerintahan Hindia Belanda pada abad XIX, agama Islam berkembang sangat lambat dan umat Islam dibawah tekanan, karena Belanda dan missionaris gencar menyiarkan agama Kristen dan Katholik, yang kemudian menjadi agama mayoritas. Namun, setelah Papua berintegrasi ke Indonesia pada tahun 1963, perkembangan Islam meningkat signifikan. Sebagaimana terlihat pada tahun 2006, umat Islam mencapai sekitar 24 persen dari total penduduk di Tanah Papua yang berjumlah sekitar 2,6 juta jiwa. Dibandingkan dengan era sebelumnya dimana umat Islam hanya terkonsentrasi di daerah Fakfak-Kaimana, Sorong-Raja Ampat, dan Bintuni-Manokwari, maka di era pemerintahan Indonesia, Islam berkembang dan tersebar secara merata di kabupaten/kota di seluruh pulau Papua. Bahkan di sejak era 1970-an Islam mulai dipeluk oleh masyarakat asli Papua di daerah Pegunungan Tengah (Wamena). Pasca kejatuhan Presiden Soeharto pada tahun 1998, umat Islam di Papua menghadapi tantangan. Munculnya kebijakan Otonomi Khusus yang identik dengan Papuanisasi dan Kristenisasi di semua lini yang berdampak pada terpinggirkannya posisi dan peran umat Islam. Namun, kebijakan reformasi yang membuka partisipasi publik yang lebih luas, ternyata telah meningkatkan posisi dan peran sosial politik umat Islam di Papua. Secara khusus pula, identitas muslim asli Papua muncul dan berperan secara aktif untuk mempromosikan nilai dan gagasan yang bersifat moderat, pluralis, dan inklusif.

Disertasi ini membantah kesimpulan J.F Onim dalam penelitian yang telah dibukukan dengan judul *Islam dan Kristen di Tanah Papua: Meniti Jalan Bersama Hubungan Islam-Kristen Dalam Sejarah Penyebaran dan Perjumpaannya di Wilayah Semenanjung Onin Fakfak* (thesis Magister Teologi, STT Jakarta, 2003). Onim berpendapat bahwa Islam mulai masuk di Papua, khususnya di Raja Ampat dan Fakfak pada abad XVII. Sedangkan Disertasi ini berbeda Onim yang membatasi ruang lingkup penelitian sejarah Islam di wilayah Fakfak. Namun, studi ini memberikan perhatian yang lebih luas, baik mencakup kedatangan Islam, penyebaran, dan dinamika perkembangan Islam dari era Hindia Belanda hingga masuknya Papua ke dalam NKRI sampai dinamika sosial politik umat Islam di era Reformasi.

Sumber utama disertasi ini adalah data-data historis Portugis, Spanyol dan Belanda. Juga didukung dengan sumber-sumber lokal Ternate dan Tidore dan sumber tertulis serta lisan dari para keturunan raja di Raja Ampat dan Fakfak. Didukung pula dengan laporan-laporan penelitian arkeologis. Data-data tersebut dibaca menggunakan metode sejarah dengan pendekatan sejarah sosial, terutama ilmu sosiologi dan antropologi.

ABSTRACT

This dissertation concludes that the arrival of Islam in Papua in the mid 15th Century, in the island of Raja Ampat, Sorong to be exactly, was brought by Bacan sultanate of Maluku by means of trade, culture and politic. Then in the 16th Century under the reign of Tidore sultanate, Islam was institutionalized into the structure of a kingdom in Raja Ampat archipelago namely Kerajaan Waigeo, Batanta, Salawati and Misool. There were also nine kingdoms or sultanates found in the area of Fakfak and Kaimana, among others; Namatota, Rumbati, and Patipi. When the Dutch colonial came to the region in the 19th Century, Islam experienced a hard time to develop and the Moslems lived under pressure because the Dutch colonialists and their missionaries propagated Christianity and Catholicism very aggressively, which then became religion of majority. When Papua integrated itself with the Republic of Indonesia in 1963, Islam developed significantly. Data of the 2006 shows that Moslems have reached the figure of 24% of the total population of Papuan land which is 2.6 million people. Compared to the previous time where Moslems were concentrated mostly in the west areas of Papua, namely Sorong, Fakfak and Manokwari, in the era of Indonesian government Islam spread out evenly to Kabupaten/kota (district/city) in Papua Island. Even, in 1970 Islam began to be adhered by indigenous Papuan in midland mountains (Wamena). In post Orde Baru era in 1998, Moslems in Papua were challenged severely by the issuance of new policy granting status of ‘Special Autonomy’ which is identical with Papuanization and Christianization in all layers affecting the marginalization of Moslems. However, the ‘reform policy’, which allowed more open public participation, has caused the increasing position and social political role of the Moslems in Papua. In particular, the genuine Moslem identity of Papuan emerged and took active participation in promoting moderate, pluralistic, and inclusive values and ideas through the Majelis Moslem Papua (MMP).

This dissertation counters the conclusion of J.F. Onim whose research has been published as a book entitled; *“Islam dan Kristen di Tanah Papua: Meneliti Jalan Bersama Hubungan Islam-Kristen Dalam Sejarah Penyebaran dan Perjumpaannya di Wilayah Semenanjung Oni, Fakfak* (thesis for magisterial Theology Program, STT Jakarta, 2003). Onim states that Islam came to Papua, especially in Raja Ampat and Fakfak in the 1th century. This dissertation also differs from that of Onim who limits the scope of research in the region of Fakfak. This study takes broader scope covering the arrival of Islam, the spreading, and its dynamism of development from the era of Hindia Belanda (Dutch), to the era of integration with the Unitary Republic of Indonesia, and up to the era of ‘Reform’.

Main sources of this dissertation are from Portuguese, Spain and the Netherlands. Other supporting sources are from Ternate and Tidore Sultanates and other written documents as well as verbal information from the heirs of Kings in Raja Ampat and Fakfak. Research reports from Archeological sources are also used as supports. Data were read by means of socio-historical approach especially in the domain of sociology and anthropology.

ملخص البحث

تلخص هذه الأطروحة بأن مجيء الإسلام ببابوا كان في منتصف القرن الخامس عشر، وبالتحديد في جزر راجا أمبات سورونج، الذي جاءت به سلطنة باتشان بمالوكو الشمالية عن طريق التواصل والتبادل التجاري والثقافي والسياسي. وبالتالي أصبح الإسلام كيانا ذا مؤسسة في بنية المملكة بجزر راجا أمبات. ومنذ ذلك الحين تأسست مملكة وايجيو، باتانتا، سالواوي، وميصول، كما تأسست تسع مملكات بمنطقة فاكفاك وكيمانا، ومن بينها مملكة ناماتوتا، ورومباتي، وباتيبي. وكان دخول الحكومة الهولندية في القرن التاسع عشر الميلادي له أثر سلب في جعل تطور الإسلام بطيئا، وعندئذ أصبح المسلمون مضطهدين، لأن المستعمرين الهولنديين والمبشرين قاموا بنشر النصرانية والكاثوليكية بشكل مكثف، مما جعل هاتين الديانتين الجديدتين أغلبية الأديان. إلا أن بابوا بعد أن توحدت في دولة إندونيسيا في عام 1963، تطور الإسلام فيها تطورا ملحوظا. ففي عام 2006، بلغ عدد المسلمين فيها حوالي 24% من إجمالي السكان ببابوا الذين بلغ عددهم 2,6 ملايين نسمة. بالمقارنة مع عصر ما سبق، بحيث أن المسلمين تركزوا في الجزء الغربي من بابوا (سورونج، وفاكفاك، ومانوكواري)، فإن الإسلام والمسلمين في عصر الحكومة الإندونيسية قد تطورا وانتشروا بشكل واسع في بلديات بكل أنحاء جزيرة بابوا. بل وكان الإسلام في السبعينات قد أخذ يعتنقه المجتمع الأصلي من بابوا الواقعة بمنطقة جبلية وسطى (وامينا). وبعد عصر النظام الجديد، وبالتحديد في عام 1998 واجه المسلمون تحديات عقب إصدار سياسات خاصة بالحكم الذاتي مماثلة لعملية تحويل جوانب شتى إلى بابوا وعملية التنصير، الأمر الذي أدى إلى تهيمش مكانتهم ودورهم. غير أن السياسات التجديدية التي تسنح فرصة مفتوحة وبصورة أوسع للمشاركة العامة في التنمية ببابوا قد ارتقت بمكانة ودور المسلمين الاجتماعي السياسي. وظهرت أيضا هوية المسلمين الأصلية ولعبوا دورهم الفعال في ترويج القيم والأفكار التوسطية والتعددية والشمولية، وذلك عن طريق تفعيل دور مجلس المسلمين ببابوا.

ترفض هذه الأطروحة الخلاصة التي قدمها ج.ف. أونيم في بحثه، والتي قد أصدرت في كتاب "الإسلام والنصرانية في أرض بابوا: نحو الطريق المشترك في العلاقة بين الإسلام والنصرانية في تاريخ نشر الدعوة والالتقاء بهما في مناطق شبه جزيرة أونين فاكفاك" (رسالة الماجستير في

ثيولوجيا، بالمعهد العالي لثيولوجيا، جاكرتا 2003). رأى أونيم أن الإسلام قد بدأ يدخل في بابوا، وخاصة في راجا أمبات وفاكفاك في القرن السابع عشر. بينما تختلف هذه الأطروحة عن رأي أونيم الذي حدد نطاق بحثه في تاريخ الإسلام بمناطق فاكفاك. أما البحث في هذه الأطروحة فهو يعنى عناية أكبر بدخول الإسلام في بابوا، ونشره، ودينامية تطوره من عصر الاستعمار الهولاندي وحتى دخول بابوا في دولة الوحدة للجمهورية الإندونيسية وإلى دينامية المسلمين الاجتماعية والسياسية في عصر التجديد.

إن المصادر الأساسية لهذه الأطروحة هي مصادر برتغالية وأسبانية وهولاندية، بالإضافة إلى مصادر محلية منبثقة من سلطنة ترناتي وتيدوري، وغيرها من المصادر التحريرية والشفوية المستقاة من أفراد سلالة ملوك راجا أمبات وفاكفاك. وتؤيد هذه المصادر بتقارير البحوث في علم الآثار القديمة. وتم فهم هذه البيانات وقراءتها باستخدام المدخل التاريخي الاجتماعي، وفضلا عن الاستعانة بسوسولوجيا (علم الاجتماع) وأنثروبولوجيا (علم الإنسان). والله أعلم بالصواب.

PEDOMAN TRANSILITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi ‘Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan thesis ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi ‘Ali ‘Audah dengan keterangan sebagai berikut:

A. Ketentuan Umum

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	ṭ (dengan titik di bawah)
ب	b	ظ	ẓ (dengan titik di bawah)
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ (dengan titik di bawah)	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ (dengan titik di bawah)	ي	y
ض	ḍ (dengan titik di bawah)		

B. Ketentuan teknis:

1. Alif (ال) ditulis lengkap sesuai dengan ketentuan bacaan dalam bahasa Arab.

Contoh: البرهان في علوم القرآن, ditulis : *al-Burhân fî ‘Ulûm al-Qur’ân*

2. Vokal tunggal

----- (fathah)

= a misalnya (حدث) ditulis *ḥadatha*

----- (kasrah)

= i misalnya (وقف) ditulis *wuqifa*

----- (ḍammah)

= u misalnya (روي) ditulis *ruwiya*

3. Vokal rangkap

(ي) (fathah dan ya)

= ay, misalnya (نيل) ditulis dengan *Nayl*

- (و) (*fathah* dan *waw*) = *aw*, misalnya (قوم) ditulis dengan *qawm*
4. Vokal panjang (*maddah*)
- (أ) (*fathah* dan *alif*) = â, (a dengan garis di atas)
- (إي) (*kasrah* dan *ya*) = î, (i dengan garis di atas)
- (أو) (*ḍammah* dan *waw*) = û, (u dengan garis di atas)
- misalnya (اختلاف, تخصيص, مجموع) ditulis *ikhtilâf*, *takhṣiṣ*, *majmû‘*

5. Ta' Marbûṭah (ة)

Ta' marbûṭah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transiliterasinya adalah (t), misalnya (المكتبة الإسلامية) ditulis dengan *al-Maktabat al-Islâmiyyah*. Sedangkan *Ta' marbûṭah* mati atau mendapat harakat sukun, transiliterasi adalah (h), misalnya (الرسالة) ditulis dengan *al-Risâlah*.

6. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transiliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya: (العربية) ditulis *al-'Arabiyyah*.

7. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) transiliterasinya adalah (al), misalnya (الفقه الإسلامي وأدلته) ditulis dengan *al-fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*.

8. Hamzah (ء)

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata transiliterasinya adalah ('). Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi *alif*. Misalnya: (القران) ditulis dengan *al-Qur'ân*, (جزئ) ditulis dengan *Juz'î*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa 'Arab ia menjadi *alif*, misalnya (أحكام) *Aḥkâm*.

9. Penulisan Nama

Untuk nama yang dirangkain dengan kata "Allah" seperti: (عبدالله) ditulis 'Abd Allâh dan nama-nama lain seperti:

Abû Hayyan	= أبو حيان
Râsyid Ridâ	= راشد رضا
Zamaksyari	= الزمخشري
Iskâfi	= الإسكافي
Kîrmâni	= الكرمانلي
al-Alûsî	= الألويسي

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas ‘inayah dan hidayah-Nya yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini. Selawat dan salam juga penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat dan pengikutnya sekalian.

Penelitian ini, yang berbentuk disertasi, berjudul “Rekonstruksi Sejarah Umat Islam di Tanah Papua” merupakan salah satu persyaratan untuk penyelesaian studi program doktoral dalam bidang Ilmu Agama Islam, konsentrasi Sejarah dan Peradaban Islam pada Sekolah Pascasarjana Strata 3 (S-3) di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dalam penelitian dan penulisan disertasi ini, penulis banyak melibatkan kalangan yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusinya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

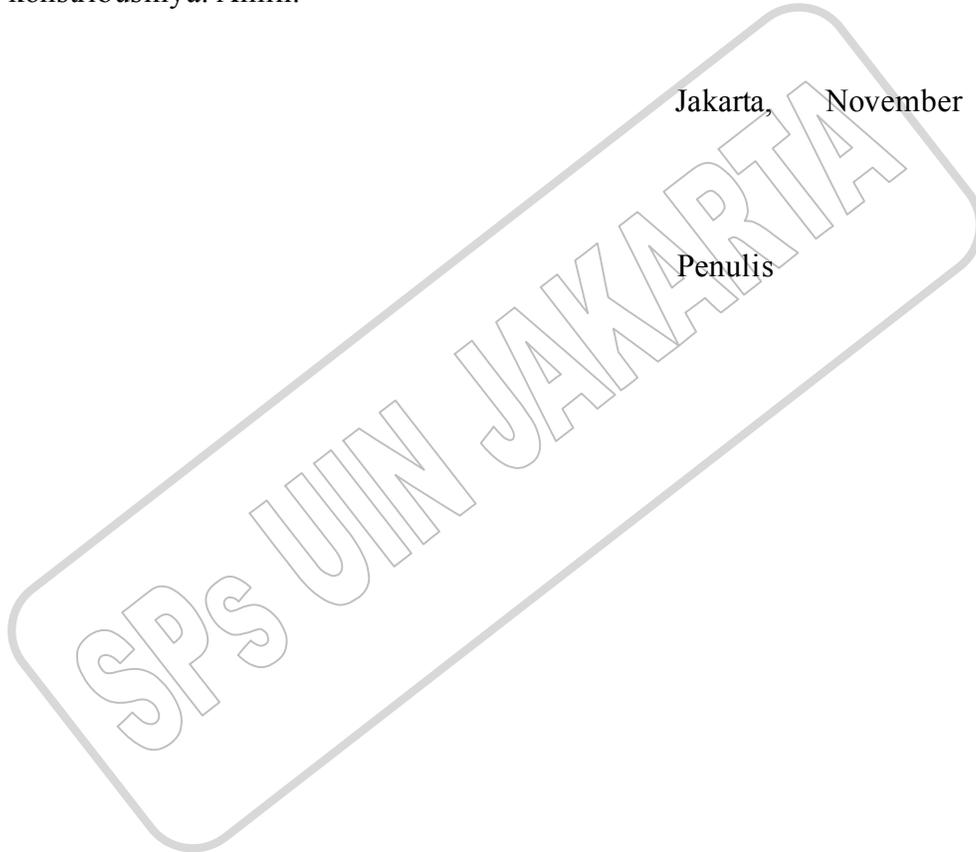
1. Prof. Dr. Komarudin Hidayat, MA. Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Doktor di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
2. Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA selaku Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga Promotor Utama disertasi ini atas perhatian dan arahnya.
3. Dr. Uka Tjandrasasmita selaku Co Promotor yang telah memberikan masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.
4. Rektor UIN Alauddin Makassar dan Rektor Universitas Yapis Papua (UNIYAP) Jayapura yang telah mengizinkan penulis untuk melanjutkan pendidikan pada program doctoral dengan meninggalkan tugas dan kewajiban penulis lain di lembaga tersebut. Dorongan, nasehat, dan bantuan finansial yang diberikan menjadi pemicu semangat bagi penulis untuk menyelesaikan studi ini.

5. Bapak-bapak Dosen Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah atas segala bimbingan, arahan dan dedikasinya selama memberikan kuliah untuk mengantarkan penulis memperoleh wawasan keilmuan secara lebih mendalam.
6. Bapak-bapak dan Ibu karyawan di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah banyak membantu penulis terutama dalam urusan administrasi, keuangan dan perpustakaan.
7. Kepada Menteri Agama RI, Gubernur Propinsi Papua (Alm. DR. Jap Solosa & Barnabas Suebu, SH.), Pimpinan PT. Freeport Indonesia, Ketua Umum Yapis Papua dan semua pihak yang telah memberikan bantuan finansial bagi penyelesaian studi di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
8. Kepada ayahanda dan ibunda tercinta, Alm. H. Sofyan Wanggai dan Ita Nurita, yang telah membesarkan, mendidik, dan membiayai penulis sepanjang perjalanan pendidikan penulis, serta selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan studi.
9. Kepada isteri tercinta, Meily Indriyati dan ketiga anak tersayang M. Amien Rais Wanggai, Tita Dwi Fatimah Wanggai, Chelsea Alyda Tsalisyah Wanggai yang telah menemani penulis dengan penuh kesetiaan, baik di kala suka maupun di kala duka.
10. Kepada saudara-saudaraku tersayang baik kakak maupun adik, terutama Velix V. Wanggai, SIP, MPA, pegawai di Bappenas Jakarta yang senantiasa mengingatkan, membantu, memotivasi dan berdiskusi dalam penyelesaian penulisan disertasi ini. Walaupun beliau sendiri sedang sibuk menyelesaikan disertasinya pada Australia National University, Canberra.
11. Kepada teman-teman penulis khususnya angkatan 2002 Konsentrasi Sejarah dan Peradaban Islam Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan teman-teman di Fakultas Agama Islam Universitas Yapis Papua (Uniyap) Jayapura, juga tidak lupa penulis ucapkan terima kasih atas kebersamaannya terutama dalam mendiskusikan materi-materi perkuliahan, dan penulisan disertasi.

Akhirnya, meskipun dalam penulisan disertasi ini penulis banyak mendapat bantuan dan masukan, namun segala kesalahan dan kekeliruan merupakan tanggungjawab penulis sepenuhnya. Harapan penulis, semoga Allah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya. Amin.

Jakarta, November 2008

Penulis



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	vii
ABSTRAKSI	viii
TRANSLITERASI	xii
UCAPAN TERIMAKASIH	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	9
C. Kajian Pustaka	9
D. Tujuan dan Urgensi Penelitian	13
E. Metodologi Penelitian	13
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KONTEKS SOSIAL HISTORIS TANAH PAPUA	19
A. Kondisi Geografis, Demografis, dan Administrasi Pemerintahan	19
B. Asal Nama Papua	22
C. Struktur Masyarakat Papua	27
D. Sistem Kepemimpinan Tradisional	31
E. Pluralitas Budaya	32
F. Kepercayaan	37
G. Hubungan Papua dengan Bangsa-bangsa lain	39
1. Kontak Awal dengan Bangsa India	40
2. Hubungan dengan Bangsa China	40
3. Hubungan dengan Kerajaan Majapahit	41
4. Hubungan dengan Ternate dan Tidore	45
5. Hubungan dengan Spanyol dan Portugis	51
6. Hubungan dengan Belanda	52
7. Hubungan dengan Jepang	54
BAB III ISLAMISASI AWAL DI TANAH PAPUA	57
A. Kedatangan dan Penerimaan Islam	57
1. Versi Papua	59
2. Versi Aceh	60
3. Versi Arab	64
4. Versi Jawa	66
5. Versi Banda	67

6. Versi Bacan	68
7. Versi Tidore dan Ternate	71
B. Pola Penyebaran Islam	85
1. Saluran Perdagangan.....	85
2. Saluran Sosial Kultural	88
3. Saluran Politik.....	91
4. Saluran Perkawinan	94
5. Saluran Pendidikan	95
C. Timbulnya Kerajaan-Kerajaan (Petuanan) Islam.....	96
1. Kerajaan-Kerajaan Islam di Kepulauan Raja Ampat.....	98
2. Kerajaan-Kerajaan Islam di Fakfak dan Kaimana.....	101
D. Bukti-Bukti Peninggalan Islam.....	105
1. Daerah Fakfak dan Kaimana.....	105
2. Daerah Raja Ampat.....	110
3. Pulau Mansinam-Manokwari.....	112
E. Pengaruh Agama Islam Dalam Kehidupan.....	113
BAB IV UMAT ISLAM PAPUA DI BAWAH KOLONIAL BELANDA	117
A. Kekuasaan Belanda di Papua	117
B. Gerakan Missionaris dan Zending.....	121
C. Kepentingan Bisnis dan Politik Belanda di Papua	124
D. Munculnya Gerakan Sosial Politik	126
E. Munculnya Lembaga Pendidikan dan Organisasi Keagamaan	131
F. Digul (Merauke): Tempat Pengasingan Pejuang Muslim Indonesia...	137
BAB V PERKEMBANGAN UMAT ISLAM DI PAPUA SETELAH BERINTEGRASI DENGAN REPUBLIK INDONESIA	141
A. Konteks Sosial Politik: Masuknya Papua ke dalam NKRI.....	144
B. Politik Pembangunan di Era Pemerintahan Orde Baru	150
1. Ideologi Pembangunan Orde Baru.....	150
2. Pendekatan Pembangunan dan Pemerintahan di Provinsi Papua ..	153
C. Umat Islam Dalam Birokrasi dan Pembangunan di Papua pada Era Orde Baru	154
1. Umat Islam dalam Birokrasi Sipil.....	154
2. Muslim Perantau dalam Struktur Penduduk Papua	157
3. Umat Islam dan Progran Transmigrasi	162
D. Gerakan Sosial Keagamaan	167
1. Muhammadiyah	167
2. Nadhatul Ulama	169

E. Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam	170
1. Yayasan Pendidikan Islam (Yapis)	170
2. Yayasan Pondok Karya Pembangunan	171
3. Hidayatullah	172
F. Perkembangan Islam di Wamena	174
G. Hubungan Umat Islam dengan Agama-Agama lain	176
BAB VI PERKEMBANGAN UMAT ISLAM DI TANAH PAPUA	
PASCA PRESIDEN SOEHARTO, 1998 – 2007	180
A. Posisi Umat Islam Dalam Gejolak Sosial Politik di Papua.....	180
B. Otonomi Khusus: Jalan Tengah bagi Papua	187
C. Peta Umat Islam Dalam Konteks Demografis Papua, 1990 – 2007..	192
1. Peta Umat Islam Provinsi Papua.....	192
2. Peta Umat Islam di Provinsi Papua Barat	197
D. Karakteristik dan Bentuk-bentuk Pergerakan Umat Islam Papua	
Pasca Soeharto	198
1. Figur Thaha Al-Hamid dan Pergerakan Presidium Dewan Papua (PDP).	199
2. Figur H. Sofyan Wanggai dan Komunitas Muslim Asal Irian Jaya.....	200
3. Figur Muhammad Musa'ad dan Formulasi Draft UU Otonomi Khusus..	204
4. Kehadiran Partai - Partai Politik Berbasis Islam dalam Pemilu 2004.....	207
5. Keterwakilan Umat Islam dalam Majelis Rakyat Papua (MRP)	210
6. Keterwakilan Umat Islam dalam PILKADA	213
7. Peran MUI dan Gagasan "Papua Tanah Damai".....	221
8. Forum Komunikasi Muslim Jayawijaya (FKMJ)	226
9. Dari Solidaritas Muslim Papua Menuju Majelis Muslim Papua (MMP)...	230
E. Problematika Hubungan Umat Islam dan Kristen.....	233
1. Kontraversi Kehadiran Laskar Jihad.....	234
2. Munculnya "Islam Baru" dan "Kristen Baru"	237
3. Kontraversi Pembangunan Masjid Raya dan	
Islamic Centre di Manokwari.....	239
4. Kontraversi Rancangan Perda Manokwari sebagai Kota Injil	240
5. Kontraversi Pembangunan STAIN Al-Fatah Jayapura.....	242
BAB VII PENUTUP	245
A. Kesimpulan	245
B. Saran-Saran	254
DAFTAR PUSTAKA	255
LAMPIRAN.....	271
BIODATA	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Pembagian Administrasi Pemerintahan di Provinsi Papua
Tabel 2. Pembagian Administrasi Pemerintahan, Luas Wilayah, dan Jumlah Penduduk di Provinsi Papua Barat Tahun 2006
- Tabel 3. Banyaknya Pemeluk Agama Menurut Golongan Agama di Papua
Tabel 4. Penyebaran Umat Islam Menurut Kabupaten Di Propinsi Papua Tahun 1998
- Tabel 5. Komposisi Penduduk Asli dan Non-Papua tahun 2002
Tabel 6. Data Penempatan Transmigran di Provinsi Papua (Irian Jaya) Dari Pra Pelita sampai dengan tahun 2000
- Tabel 7. Data Penempatan Transmigrasi per Kabupaten Se-Propinsi Papua (Irian Jaya)
Tabel 8. Data Jumlah Transmigran per Daerah Asal dan Daerah Penempatan
Tabel 9. Distribusi Pemeluk Agama Menurut Kabupaten/Kota di Papua di era Orde Baru Tahun 1998
- Tabel 10. Kerangka Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
Tabel 11. Penganut Agama di Provinsi Papua Tahun 2002
Tabel 12. Banyaknya Pemeluk Agama Menurut Golongan Agama dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2005
- Tabel 13. Persentase Pemeluk Agama Islam di Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2005 – 2006
- Tabel 14. Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu untuk DPRD Provinsi Papua Tahun 2004
Tabel 15. Persentase Pemeluk Agama Islam di Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2005 – 2006
Tabel 16. Komposisi Calon Gubernur –Wakil Gubernur dalam Pilkada di Provinsi Papua Barat
Tabel 17. Komposisi Bupati/Wakil Bupati
Tabel 18. Banyaknya Pemeluk Agama Menurut Golongan Agama dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2005
- Tabel 19. Komposisi Bupati/Wakil Bupati
Tabel 20. Komposisi Calon Gubernur Provinsi Papua 2006



DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Pembagian Administrasi Pemerintahan di Provinsi Papua
Tabel 2. Pembagian Administrasi Pemerintahan, Luas Wilayah, dan Jumlah Penduduk di Provinsi Papua Barat Tahun 2006
- Tabel 3. Banyaknya Pemeluk Agama Menurut Golongan Agama di Papua
Tabel 4. Penyebaran Umat Islam Menurut Kabupaten Di Propinsi Papua Tahun 1998
- Tabel 5. Komposisi Penduduk Asli dan Non-Papua tahun 2002
Tabel 6. Data Penempatan Transmigran di Provinsi Papua (Irian Jaya) Dari Pra Pelita sampai dengan tahun 2000
- Tabel 7. Data Penempatan Transmigrasi per Kabupaten Se-Propinsi Papua (Irian Jaya)
Tabel 8. Data Jumlah Transmigran per Daerah Asal dan Daerah Penempatan
Tabel 9. Distribusi Pemeluk Agama Menurut Kabupaten/Kota di Papua di era Orde Baru Tahun 1998
- Tabel 10. Kerangka Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
Tabel 11. Penganut Agama di Provinsi Papua Tahun 2002
Tabel 12. Banyaknya Pemeluk Agama Menurut Golongan Agama dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2005
- Tabel 13. Persentase Pemeluk Agama Islam di Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2005 – 2006
- Tabel 14. Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu untuk DPRD Provinsi Papua Tahun 2004
Tabel 15. Persentase Pemeluk Agama Islam di Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2005 – 2006
Tabel 16. Komposisi Calon Gubernur –Wakil Gubernur dalam Pilkada di Provinsi Papua Barat
Tabel 17. Komposisi Bupati/Wakil Bupati
Tabel 18. Banyaknya Pemeluk Agama Menurut Golongan Agama dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2005
Tabel 19. Komposisi Bupati/Wakil Bupati
Tabel 20. Komposisi Calon Gubernur Provinsi Papua 2006

DAFTAR SINGKATAN

s.w.t.	=	Subhânahû wa ta‘âlâ
s.a.w.	=	Sallâllahu ‘alaihi wasallam
hlm.	=	Halaman
Cet.	=	Cetakan
M.	=	Masehi
H.	=	Hijriyah
terj.	=	Terjemahan
jld.	=	Jilid
Juz.	=	Juz (jilid) buku
t.np.	=	Tanpa nama penerbit
t.tp.	=	Tanpa tempat penerbit
t.t.	=	Tanpa tahun
ed.	=	Editor
GRIB	=	Gerakan Rakyat Irian Barat
Yapis	=	Yayasan Pendidikan Islam
UNCEN	=	Universitas Cenderawasih
MMP	=	Majelis Muslim Papua
FKMJ	=	Forum Komunikasi Muslim Jayawijaya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam di Tanah Papua¹ dalam historiografi Islam di Indonesia, belum banyak terungkap di kalangan sejarawan. Mungkin karena pulau Papua dianggap sebagai daerah pinggiran (*peripheral*) Islam di Nusantara dan belum tersentuh pengaruh Islam. Kesan yang timbul selama ini, penduduk asli Papua identik dengan pemeluk agama Kristen dan Katholik. Pada realitasnya, proses awal Islamisasi di Papua telah terjadi sekitar abad XV –XVI, melalui kontak perdagangan, budaya dan politik dengan kerajaan-kerajaan Islam di Maluku Utara (Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo).² Implikasinya Islam telah dipeluk beberapa abad lalu oleh sebagian besar masyarakat pesisir barat Papua, seperti di kepulauan Raja Ampat (Sorong), Semenanjung Onin (Fakfak), Kaimana, dan Teluk Bintuni, Babo (Manokwari). Sementara agama Kristen baru dikenalkan oleh dua penginjil dari Jerman yakni Ottow dan Geissler yang datang ke pulau Mansinam (Manokwari) pada 5 Februari 1855 yang kedatangannya bahkan diantar pejabat kesultanan Tidore tersebut³

¹ Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, maka nama Provinsi Irian Jaya mengalami perubahan secara resmi menjadi Provinsi Papua. Selanjutnya, pada tahun 2003 Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Percepatan Pelaksanaan UU No. 45/1999 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Timur. Dengan demikian, sejak tahun 2003 di pulau Papua telah berdiri 2 (dua) provinsi, yaitu Provinsi Papua (sebagai provinsi induk) yang beribukota di Jayapura dan Provinsi Papua Barat beribukota di Manokwari.

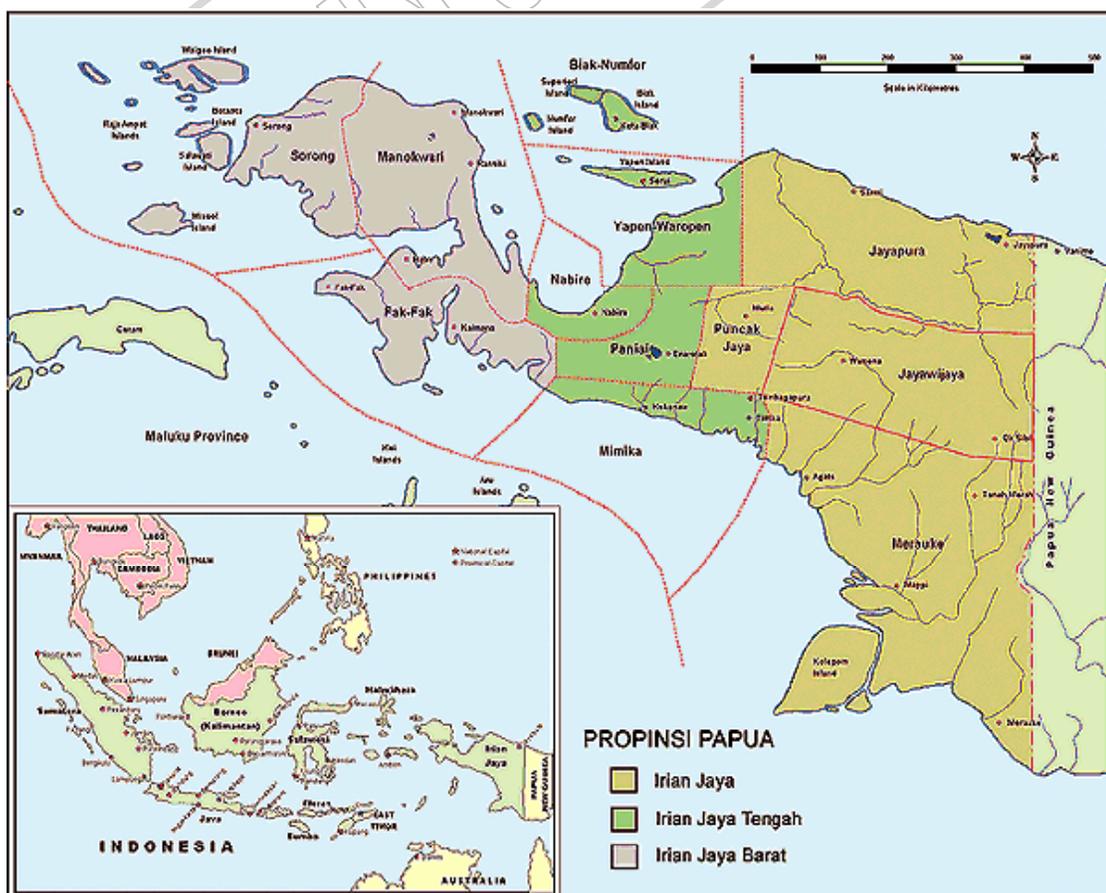
² Proyek Penelitian Purbakala Irian Jaya, *Laporan Penelitian Arkeologi Islam di Kecamatan Kokas, Kabupaten Fakfak*, 1996, hlm. 8 – 9.

³ Paul W. van der Veur, *Deutch New Guinea : Encyclopedia of Papua and New Guinea*, MUP, 1972.

Kontak Papua dengan kesultanan-kesultanan Maluku yang sudah lama berlangsung inilah yang kemudian dijadikan asumsi bahwa Islam telah masuk ke Papua sejak abad XV. Seminar “Masuknya Islam di Irian Jaya” yang diselenggarakan di kabupaten Fakfak tahun 1997 merumuskan bahwa:

1. Agama Islam telah berkembang di Irian Jaya, terutama di daerah Fakfak, Sorong dan sekitarnya pada abad XV.
2. Tata hukum Islam baik yang bersifat *‘ubudiyah* (peribadatan) maupun kemasyarakatan telah mewarnai tata kehidupan bermasyarakat dan dalam tata pemerintahan. Misalnya dalam ibadah shalat, nikah, dan waris (hukum faraidh), penyelenggara jenazah serta pelaksanaan pemerintahan di lingkungan Raja-raja (Petuanan) di Fakfak.

Gambar 1. Peta Pulau Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat)⁴



Namun setidaknya ada sumber yang menginformasikan bahwa pedagang-pedagang Muslim dari Maluku telah berinteraksi dengan penduduk Papua pada pertengahan abad XIV. F.C. Kamma seorang misionaris terkenal menyatakan bahwa penyair Prapanca dalam buku *Negarakertagama* pada abad XIV melukiskan betapa luasnya Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Di dalamnya ada daerah Onin (Fakfak), yaitu sebuah daerah semenanjung yang terbagi atas sejumlah kerajaan mini, ketika itu sudah menghasilkan buah pala. Selain itu, juga budak yang dirampok dari Teluk Berau (Kepala Burung Barat Daya). Perdagangan budak dan buah pala itu rupanya sudah berada di tangan orang-orang Seram dan Goram, negeri asal datangnya raja-raja kecil yang kemudian bersama Ternate dan Tidore beralih masuk Islam.⁶

Berdasarkan cerita rakyat dari Tidore, sebagaimana yang di kutip Koentjaraningrat bahwa sejak abad XV, pulau Biak telah menjadi wilayah Kesultanan Tidore, salah seorang tokoh setempat bernama Gurabesi diangkat sebagai pejabat di Kesultanan Tidore, bahkan dijadikan menantu Sultan. Gurabesi inilah yang kemudian melahirkan Raja-raja di kepulauan Raja Ampat. Demikian pula Sultan banyak mengangkat tokoh-tokoh Biak menjadi pejabat daerah di Biak dan memberikan gelar jabatan seperti *Kapitan, Sangaji, Korano, Dimara, Mayor* dan sebagainya.⁷

Sumber lain juga mengatakan Gurabesi adalah pahlawan asal Raja Ampat (Waigeo) yang membantu Sultan Tidore berperang melawan Sultan Ternate. Atas jasanya, Sultan Tidore memberikan adik perempuannya yang bernama Boki Taiba untuk dikawini dengan syarat tiap tahun harus kembali ke Tidore. Mulai saat itulah terjadi hubungan antara kerajaan-kerajaan di Raja Ampat dengan Kesultanan Tidore. Dalam hubungan ini, raja-raja di Raja Ampat membawa hadiah-hadiah kepada Sultan Tidore, sebaliknya Sultan Tidore memberikan gelar-gelar kepada raja-raja itu. Seperti

⁶ F.C Kamma, *Dit Wonderlijke Werk*, terj. "Ajaib di Mata Kita: Masalah Komunikasi antara Timur dan Barat Selama Seabad Perkabaran Injil Di Irian Jaya, Jilid III, alih bahasa Koesalah Soebagyo Toer Jakarta: Gunung Mulia, 1993, hlm. 428. Kama mengutip dari A. Haga, *Nederlandsch Nieuw Guinea en Papoesche eilanden*, Vol. 2, Den Haag, 1884, hlm. 81.

⁷ Koentjaraningrat (*et. al*), *Penduduk Irian Barat*, Jakarta :Universitas Indonesia, 1963, hlm.93.

gelar *kapitan laut* yang diberikan kepada raja, akhirnya gelar ini disamakan dengan gelar *fun* atau raja oleh masyarakat setempat.⁸

Thomas. W. Arnold mengatakan bahwa pada abad XVI, suku-suku di Papua serta pulau-pulau di sebelah barat lautnya, seperti Waigeo, Misool, Waigama, dan Salawati, telah tunduk kepada Sultan Bacan (1521 M.) yang bernama Zainal Abidin salah seorang Raja Maluku. Selanjutnya Sultan Bacan meluaskan kekuasaannya sampai semenanjung Onin (Fakfak), di barat laut Papua pada tahun 1606 M., melalui pengaruhnya dan para pedagang Muslim maka para pemuka masyarakat pulau-pulau tadi memeluk agama Islam. Meskipun masyarakat pedalaman masih tetap menganut animisme, tetapi rakyat pesisir adalah Islam.⁹ Pada tahun 1663 Nicolas Vinck penemu Teluk Bintuni (Manokwari) sudah melihat adanya Islam disana.¹⁰

Keterangan-keterangan di atas, masih terlalu prematur untuk berteori siapa pembawa Islam pertama ke Papua. Daerah mana yang lebih dulu masyarakatnya memeluk Islam, apakah Sorong atau Fakfak dan kapan pertama Islam datang ke Tanah Papua. Pertanyaan-pertanyaan itu membutuhkan penelitian serius dan pembuktian sumber-sumber sejarah yang valid, sehingga tidak menimbulkan penafsiran sejarah yang subyektif. Maka dalam penelitian ini, akan dibangun suatu teori mengenai kedatangan awal Islam di Papua.

Sewaktu Pemerintah Hindia Belanda menguasai pulau Papua pada tahun 1828, seiring dengan itu masuk pula agama Kristen (1855) dan Katholik (1894). Namun baru pada awal abad XX ada kegiatan misionaris yang berarti. Dalam sebuah laporan Zending disebutkan bahwa betapa sukarnya untuk menjadikan orang Kristen dari suku-suku di Papua, ternyata baru pada tahun 1907 seorang suku di pulau Roon

⁸Johsz R. Mansoben, "Sistem Pemerintahan Tradisional di Salawati Selatan, Raja Ampat", dalam *Majalah Ilmu-Ilmu Sastra Indonesia*, Jilid VIII No. 2, Jakarta: Bhratara, November 1978/1979, hlm. 165-166.

⁹ Thomas W. Arnold, *The Preaching of Islam : A History of The Propagation of the Muslim Faith*, New Delhi : Low Price Publications, 1995, hlm. 402- 4.

¹⁰F.C Kamma, *Dit Wonderlijke Werk*, terj. "Ajaib di Mata Kita:.....hlm.81

(Yapen Waropen) dapat dikristenkan.¹¹ Penyebaran agama Nasrani, di daerah barat dan pesisir Utara Papua didominasi oleh pendeta Kristen, sedangkan di sebelah selatan Papua, oleh pendeta Katholik.¹²

Posisi umat Islam di Papua ketika di bawah kolonial Belanda, sangat terjepit oleh persaingan misi Katholik dan Zending Kristen yang memperbanyak pengikutnya dan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan di hampir semua pelosok Papua. Dalam kondisi demikian, maka sejumlah gerakan dan perjuangan umat Islam yang terorganisir muncul dan lahir, pada tahun 1920 di Merauke berdiri gerakan Kepanduan Hizbul Wathon dari Muhammadiyah. Kemudian di Fakfak, lahir Gerakan Rakyat Irian Barat (GRIB) tahun 1960 yang bernama *Openbaar Vervolg School Islam*. Walaupun pimpinan sekolah tersebut bukan seorang Muslim.¹³

Setelah Papua bergabung secara resmi ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963, perkembangan dan dinamika Islam semakin semarak dengan masuknya imigran spontan terutama dari Sulawesi, Jawa dan Maluku. Juga dengan adanya program transmigrasi (mayoritas orang Jawa) yang ditempatkan di Jayapura, Sorong, Manokwari, Nabire dan Merauke. Seiring dengan kedatangan mereka, lahirlah gerakan-gerakan sosial keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, Darul Da'wah wa al-Irsyad dan lain-lain. Berdiri juga lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti Yapis (Yayasan Pendidikan Islam) yang hampir mempunyai cabang di setiap kabupaten. Lembaga ini mengelola pendidikan mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi Umum dan Agama.

¹¹N. G. J. van Schouwerburg, *Het Geestelijk en Maatschappelijk werk der Zending, Oost en West*, November 1955, hlm. 12., dalam Kheo Soe Khiam, (*et.al*), *Mengenal Sebagian Dari Tanah Air*,.....hlm. 186.

¹²H.W. Bachtiar, "Sejarah Irian Jaya", dalam Koentjaraningrat (*et.al*), *Irian Jaya: Membangun Masyarakat Majemuk* Jakarta: Djembatan, 1994, hlm. 56.

¹³Kasibi Suwiryadi, "Sejarah dan Dinamika Perkembangan Islam di Irian Jaya", dalam *Majalah Rahmah*, Jayapura: Yayasan Dakwah Islam al-Falah, Jumadl Akhir, 1419, No 7. hlm. 17-18.

Dari waktu ke waktu perkembangan umat Islam Papua mengalami peningkatan, baik dalam jumlah maupun kualitas peran sertanya dalam kehidupan sosial di Papua. Pada tahun 2005 penduduk di Provinsi Papua berjumlah 1.875.388 jiwa, dimana penganut agama Kristen Protestan sebanyak 1.154.420 jiwa, Kristen Katolik sebanyak 409.722 jiwa, Islam sebanyak 341.057 jiwa, Hindu 4.267 jiwa, dan Budha 1.625 jiwa. Hal ini berarti bahwa sekitar 61,56 persen penduduk Papua beragama Kristen Protestan, selanjutnya diikuti oleh Katholik sebanyak 21,85 persen dan umat Islam sebanyak 18,19 persen dari penduduk Papua.¹⁴ Sedangkan di Provinsi Papua Barat, tercatat pada tahun 2006 jumlah penduduk Papua Barat sebanyak 702.202 jiwa. Penduduk yang memeluk Kristen Protestan adalah sebesar 55,70 persen, diikuti oleh Islam sebesar 41,27 persen dan Katholik sebesar 7,70 persen.¹⁵

Komunitas Muslim pribumi mayoritas terdapat di daerah-daerah pesisir barat Papua, seperti Kokas, Kaimana, Patipi, Rumbati, Teluk Arguni dan Semenanjung Onin di Kabupaten Fakfak. Juga dijumpai di daerah kepulauan Raja Ampat seperti Waigeo, Misool, Salawati, Doom, dan kawasan pantai Sorong di Teminabuan. Di Manokwari penduduk asli Muslim terkonsentrasi di daerah Babo dan Teluk Bintuni. Sedangkan sebagian masyarakat Walesi di kabupaten Jayawijaya (Wamena) yang terletak di wilayah Pegunungan Tengah mulai memeluk Islam pada akhir tahun 1960 dan awal tahun 1970-an. Tetapi ironisnya mereka jauh dari sentuhan dakwah Islam, sementara komunitas muslim perantau dari Sulawesi, Jawa, Madura dan Maluku mendominasi di perkotaan seperti Jayapura, Manokwari, Sorong, Nabire, Timika dan Merauke.¹⁶

Lambatnya perkembangan umat Islam di Papua mempunyai beberapa alasan yang harus dijawab, antara lain dakwah yang tidak terorganisir, kurangnya para mubaligh, lembaga pendidikan Islam, kurang pendanaan, sarana dan parasarana

¹⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, *Papua Dalam Angka 2006*, Jayapura : BPS Provinsi Papua, 2007.

¹⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, *Papua Barat Dalam Angka 2007*, Manokwari: BPS Provinsi Papua Barat, 2008.

¹⁶ Kasibi Suwiryadi, "Sejarah dan Dinamika Perkembangan Islam di Irian Jaya",.....hlm. 25.

dakwah yang tidak mendukung, sulitnya kondisi geografis dan juga adanya masalah politis. Sedangkan agama Kristen dapat berkembang dengan cepat karena para misionaris dan zending, diorganisir dengan baik dan didukung fasilitas yang lengkap, seperti kesejahteraan, kantor, pesawat terbang dan sebagainya. Para misionaris dan zending yang diutus bukan saja ahli dalam bidang teologi, tetapi didukung dengan perangkat ilmu-ilmu sosial, maka mereka lebih dulu mempelajari adat istiadat, kehidupan rohani penduduk setempat.¹⁷ Juga tidak lepas dari dukungan oleh pemerintah Belanda ketika itu. Permasalahan ini akan dikaji lebih mendalam pada pembahasan berikut.

Hal yang menarik mengenai kehidupan beragama di Papua adalah adanya agama keluarga, maksudnya di dalam satu keluarga bisa terdapat tiga pemeluk agama (Islam, Kristen, dan Katolik). Sehingga sikap toleransi dan penghormatan terhadap agama lain sangat tinggi, dalam sejarah beragama di Papua belum pernah terjadi konflik yang berarti antar umat beragama. Mereka sangat hidup rukun dan damai, walaupun berbeda agama, hubungan kekeluargaan dan adat dapat menyatukan mereka. Kerukunan antar umat beragama di Papua dikenal dengan istilah “satu tungku tiga batu”.

Walaupun penduduk asli Papua telah memeluk Islam maupun Kristen, tetapi di samping itu mereka masih mempertahankan agama lokal. Penduduk Muslim Papua di pedesaan, seperti di Salawati Selatan masih mempercayaimon (jin) yang setiap tahun diadakan upacara pesta *mon*.¹⁸ Di pantai utara sampai titik timur Papua penduduk mempunyai kepercayaan pada *mansren* (seorang penyelamat dunia). Mereka juga percaya pada seorang makhluk yang maha kuasa yakni *uri*, yang mengambil peranan besar dalam mythos di Papua.¹⁹ Di bagian selatan Papua, penduduk percaya pada dema yaitu nenek moyang yang merupakan asal usul mereka,

¹⁷ Khoe Soe Khiam (*et.a.l*), *Mengenal Sebagian Dari Tanah Air*,..... hlm. 184.

¹⁸ Mansoben, ”Sistem Pemerintahan Tradisional” ,..... hlm. 153.

¹⁹ Khoe Soe Khiam (*et. al.*), *Mengenal Sebagian Dari Tanah Air*,..... hlm. 170.

selain *dema* mereka percaya pada totemisme.²⁰ Kondisi semacam ini merupakan tantangan sekaligus kerja keras dan perhatian serius bagi dakwah Islam di Papua.

Terlepas dari persoalan di atas, Islam bukan suatu agama yang asing bagi masyarakat Papua. Karena penduduk Papua telah berinteraksi dengan kerajaan-kerajaan Islam di Maluku dan para pedagang Muslim sejak berabad-abad lalu. Bahkan di daerah di kepulauan Raja Ampat-Sorong, Fakfak dan Kaimana telah berdiri kerajaan-kerajaan Islam dan pengaruh Islam hingga kini masih jelas nampak dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh Kesultanan Tidore juga masih membekas bagi masyarakat Papua yang tidak memeluk Islam, seperti di Biak, Yapen Waropen, Sarmi dan Jayapura. Sebagai misal gelar-gelar yang diberikan Sultan Tidore merupakan suatu kehormatan yang kemudian dipakai menjadi sebuah marga. Begitu juga terhadap nama-nama tempat, bahasa dan pengaruh lainnya dalam kehidupan sosial budaya di Papua.²¹

Berangkat dari permasalahan di atas, maka diperlukan suatu kajian dan penelitian lebih jauh mengenai proses awal kedatangan Islam di Tanah Papua, penerimaan Islam dan pola penyebarannya serta pengaruh Islam dalam berbagai

²⁰Totemisme adalah kepercayaan bahwa binatang atau tumbuh-tumbuhan mempunyai hubungan dengan kehidupan mereka, biasa dianggap sebagai nenek moyang mereka. Lihat: Jan Boelaars, *Manusia Irian: Dahulu-Sekarang-Masa Depan*, Jakarta: Gramedia, 1992.

²¹Di Biak gelar-gelar yang diberikan Sultan Tidore, kemudian dijadikan marga (*fam*) seperti Mayor, Dimara, Sanadi (Sangaji), Kapitarau (Kapitan Laut), Rumbewas, Rumbekwan, Rumbiak dan marga-marga (*fam*) lain yang diawali dengan kata *Rum*, berasal dari bahasa Tidore yang berarti "Rum adalah nama wilayah istana Sultan di Tidore". Di Yapen Waropen pemimpin-pemimpin setempat juga diberi gelar jabatan seperti Mayor dan Korano (*Kolano/Raja*), yang bertugas mengantarkan upeti ke Tidore. Penulis sendiri masih bergelar Mayor, pemberian dari kakek yang hidup akhir abad XIX, ia masih mengantar upeti ke Tidore, sebagai bukti adanya sebuah gong besar yang dihadiahkan Sultan Tidore. Di Jayapura beberapa nama tempat diabadikan pemberian Sultan Tidore diabadikan seperti Gurabesi, Hamadi dan Tobati. Pulau Tobati (Tidore: kata *to* berarti "perintah Sultan", *bati* artinya "batas", maksudnya Sultan telah mematok batas kekuasaannya sampai di pulau itu). Tanjung Hamadi, menurut tutur lisan anak Sultan Jailolo yang bernama Ahmadi melarikan diri sampai ke Jayapura karena perang dengan salah satu kerajaan di Maluku, kemudian kawin dengan perempuan setempat. Sampai kini Hamadi dijadikan salah satu marga (*fam*) masyarakat Port Numbay (Kota Jayapura). Ada juga cerita rakyat Port Numbay yakni dua tokoh muda yang bernama "Dzhor" dan "Makah". Jika dilihat ciri-ciri (orang) marga Hamadi dan orang-orang di pulau Tobati, Nafri dan Enggros, mirip dengan orang Arab, kulitnya lebih putih, badannya tinggi besar dan orangtuanya suka memelihara jenggot. Gaya dan kosa kata bahasa Indonesia yang dipakai di Papua mirip dengan Bahasa Melayu Ternate (Maluku) yang juga dipakai di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.

aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pelacakan terhadap sumber-sumber sejarah Islam yang otentik. Baik berupa tulisan, lisan, keadaan sosial budayanya, maupun peninggalan arkeologis Islam lainnya, yang masih tersebar di Pulau Papua yang begitu besar dan luas. Dengan kajian dan penelitian ini, diharapkan dapat dipahami secara komprehensif mengenai rekonstruksi sejarah umat Islam di Papua.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini, hanya akan dibahas mengenai awal kedatangan Islam di Papua mulai abad XV sampai perkembangannya hingga akhir abad XXI. Penelitian difokuskan ke daerah kantong-kantong Islam awal yaitu kepulauan Raja Ampat-Sorong, Fakfak, Kaimana, Teluk Bintuni (Manokwari). Untuk perkembangan dan dinamika Islam selanjutnya akan dilihat daerah pertumbuhan Islam di masing-masing kabupaten, baik yang tersebar di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Maka kajian ini berupaya menjawab dua pertanyaan pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana proses awal kedatangan Islam, penerimaan dan penyebarannya di Tanah Papua?
2. Bagaimana perkembangan umat Islam dari waktu ke waktu di Tanah Papua, mulai dari era pemerintahan kolonial Belanda hingga wilayah Papua berintegrasi ke dalam negara Indonesia?
3. Bagaimana perkembangan umat Islam di Tanah Papua pada era Pasca Orde Baru?

C. Kajian Pustaka

Dalam penulisan sejarah Islam di Nusantara selama ini, sejarah Islam di Papua belum dikaji secara ilmiah dan menyeluruh, baik oleh sejarawan asing maupun lokal. Diperkirakan hal ini terjadi karena terbatasnya sumber-sumber lokal maupun asing yang menginformasikan tentang Islam di Papua. Mungkin juga karena Papua

tidak mempunyai kerajaan Islam besar dan berpengaruh dalam sejarah Islam di Nusantara, sehingga lepas dari perhatian sejarawan. Bisa juga karena luasnya belantara Papua dan sulit terjangkau, maka menjadi kendala untuk menguak sejarah Islam di Papua.

Dalam ensiklopedi terbaru mengenai sejarah Islam di Indonesia yang ditulis oleh Taufik Abdullah dan kawan-kawan (2002),²² sedikitpun tidak membicarakan keberadaan Islam di Papua. Begitu pula dalam buku *Sejarah Nasional Indonesia* (1977) yang ditulis oleh Nugroho Notosusanto²³ dan kawan-kawan. Sedangkan dalam karya Hamka, *Sejarah Umat Islam* (1981),²⁴ hanya sedikit menyinggung pengaruh Islam Papua yang dibawa oleh Kesultanan Bacan (Maluku), tetapi tidak menerangkan lebih jauh mengenai Islam di Papua. Dalam seminar Sejarah Masuknya Islam di Indonesia, baik yang dilakukan di Medan (1963) maupun di Banda Aceh (1978), juga sama sekali tidak menyinggung masuk dan berkembangnya Islam di Papua.²⁵

Penelitian ilmiah terbaru tentang sejarah Islam di Papua, ditulis oleh J.F. Onim, dalam tesis magisternya yang telah dibukukan dengan judul *Islam & Kristen Di Tanah Papua* (2006).²⁶ Namun, obyek penelitian Islam hanya terbatas di kabupaten Fakfak, sehingga tidak memberikan gambaran secara utuh mengenai sejarah Islam di Tanah Papua.

²² Taufik Abdullah (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Asia Tenggara Jilid V*, Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 2002.

²³ Uka Tjandrasmita (ed.), *Sejarah Nasional Indonesia III*, "Jaman Perutumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia", Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975.

²⁴ Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

²⁵ Ali Hasyimi (ed.), *Masuk Dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Bandung: Ma'arif, 1993.

²⁶ Jusuf Frederik Onim, *Islam & Kristen Di Tanah Papua: Meniti Jalan Bersama Hubungan Islam-Kristen Dalam Sejarah Penyebaran dan Perjumpaannya di Wilayah Semenanjung Onin Fakfak*, Bandung: Jurnal Info Media, 2006.

Adapun penelitian yang lebih serius, pernah dilakukan oleh Pusat Arkeologi Nasional RI di bawah pimpinan Hasan Muarif Ambary pada tahun 1995.²⁷ Namun survey kepurbakalaan Islam itu hanya dilakukan di desa Saonek, Lapintol dan desa Beo di Kecamatan Waigeo, kepulauan Raja Ampat, Kabupaten Sorong. Dari hasil penelitian ditemukan dua jenis data, yaitu *pertama*, data sejarah berupa *dead monument* makam-makam Islam lama, tetapi tidak ditemukan data sejarah yang jelas, karena nisan yang terbuat dari kayu yang telah rusak. Penduduk setempat menginformasikan semua guru-guru agama Islam berasal dari Tidore dan Ternate. Tokoh-tokoh ulama yang dimakamkan seperti Arif Saefudin, Hambali, makam keluarga Lagat diperkirakan meninggal abad XIX atau XX dan Abdurrahim Rafana, yang meninggal tahun 1942.

Kedua data sejarah berupa *Living Monument* yakni Masjid dan peninggalan lainnya. Masjid-masjid yang ditemukan jika dilihat dari bangunannya relatif baru, ada juga masjid yang berpindah tempat, pada umumnya telah mengalami pemugaran berulang kali. Di ketiga masjid yang diteliti terdapat teks-teks purba yang telah lama menjadi teks baku. Hal ini dapat diperhatikan dari penulisan teks khotbah tersebut yang umumnya berasal dari akhir abad XIX atau awal abad XX. Teks-teks tersebut berasal dari Kota Baru, Perak (Malaysia) cetakan tahun 1326 H/1908 M dan Mekkah.

Dari hasil survey di atas, disimpulkan bahwa kemungkinan masuknya Islam di daerah tersebut mulai abad XV atau abad XIV, atau kemungkinan abad sesudahnya, karena itu perlu penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, perlu diadakan satu penelitian pada situs-situs Islam di luar Kepulauan Raja Ampat, seperti Sorong dan Fakfak. Juga situs-situs di Papua secara integral tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan situs-situs Islam di daerah sekelilingnya, seperti Tidore, Ternate, Hitu, Seram, bahkan Sulu, dan Mindanao.²⁸

²⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Survey Kepurbakalaan Islam di Kabupaten Sorong Irian Jaya*, Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 1995.

²⁸Lihat: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Survey Kepurbakalaan Islam*, ...hlm.31-32.

Pada tahun 1996, Badan Purbakala Irian Jaya mengadakan penelitian arkeologi Islam di Kecamatan Kokas, Kabupaten Fakfak. Disimpulkan bahwa telah terjadi kontak dagang antara Ternate dan raja-raja tempatan di Fakfak sekitar abad XV atau abad XVI. Beberapa kerajaan Islam tersebut adalah kerajaan Namatota, Ati-ati, Fatagar, Rumbati, Patipi, Arguni dan Kokas. Ada satu Masjid kuno, tapi tidak disebutkan sejak abad berapa dibangun. Juga tersimpan sebuah naskah kuno berbentuk buku yang bertuliskan huruf Arab dan Latin yang sebagian isinya sudah rusak.²⁹

Penelitian-penelitian di atas, masih terbatas pada satu kecamatan saja di kabupaten Sorong dan Fakfak yang secara geografis lebih dekat dengan Maluku. Penelitian tersebut juga masih sangat sedikit, baik dilihat dari segi kuantitatif maupun kualitatif belum dilaksanakan secara mendalam, sedangkan masih banyak situs-situs di daerah lain yang perlu diperbandingkan untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang Islam di Papua.

Sedangkan pengamat sejarah local Islam di Papua, selama ini intens dilakukan oleh Kasibi Suwiryadi pegawai senior di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan juga sebagai dosen Agama Islam di Universitas Cendrawasih yang terletak di kota Jayapura. Ia telah memulai memburu data sejak akhir tahun 1994, atas dorongan dan desakan dari Ali Hasmy untuk menghadiri Muzakarah di Banda Aceh bulan Januari 1995. Saat itu, makalah yang dipresentasikan oleh Kasibi adalah “*Sejarah Islam dan Masa Depan di Irian Jaya*”. Menurut data-data baru masih harus digali pada sejumlah “daerah kunci dan strategis” untuk memperkuat dan memperkokoh hasil seminar pertama sejarah masuknya Islam di Papua pada tahun 1997, sehingga suatu saat dapat menjadi sebuah buku.³⁰

Oleh karena itu, penelitian mengenai sejarah umat Islam hingga perkembangannya di Papua, selama ini belum pernah dilakukan secara serius dan

²⁹Lihat :Tim Penelitian Purbakala Irian Jaya, *Laporan Penelitian Arkeologi Islam di kecamatan Kokas, kabupaten Fakfak, Irian Jaya*, Proyek Penelitian Purbakala Irian Jaya, 1996.

³⁰ Lihat : Kasibi Suwiryadi, *Sejarah Dakwah Islam di Tanah Papua*, dalam surat laporan kepada Ketua LPTQ/ Ketua Khafilah STQ Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua, Jayapura: 3 Juni 2002.

komprehensif. Penelitian ini akan mengkaji proses Islamisasi awal di Papua dan pengaruh Islam terhadap sistem kerajaan dan kehidupan masyarakatnya serta perkembangan umat Islam di Papua di abad XXI. Diharapkan dari penelitian ini, menjadi sebuah rekonstruksi sejarah umat Islam di Papua yang dipahami lebih komprehensif.

D. Tujuan dan Urgensi Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk merumuskan sejarah awal kedatangan Islam, terbentuknya masyarakat Islam dan implikasi Islam terhadap struktur pemerintahan tradisional serta kehidupan masyarakatnya. Demikian pula, menjelaskan tahapan perkembangan umat Islam di Papua sampai akhir abad XXI, sehingga kajian ini dapat memahami Islam di Papua secara integral dan komprehensif.

Hasil penelitian ini, di samping untuk kepentingan akademis (*academic significance*), juga untuk memberikan sumbangan dan wacana baru dalam historiografi Islam di Nusantara. Karena selama ini penulisan sejarah Islam di Nusantara, belum mengkaji dan meneliti secara utuh sejarah masuk dan perkembangannya Islam di Papua dengan pendekatan sejarah sosial, baik yang dilakukan oleh sejarawan asing maupun lokal.

E. Metodologi Penelitian

1. Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan penggalan data kepustakaan (*library research*) dan data lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen tertulis yang diperoleh dari berbagai sumber-sumber primer berupa: Naskah-naskah (manuskrip), buku-buku, majalah, laporan, dan surat-surat resmi. Sedangkan sumber-sumber sekunder dipergunakan untuk memperkuat analisa.

Sumber-sumber primer lokal yang digunakan adalah naskah-naskah kuno Maluku Utara yang masih tersimpan di Keraton Ternate dan Tidore, juga Perpustakaan Nasional. Naskah-naskah tersebut diperinci menjadi tujuh kelompok, yaitu: (1) Kelompok Geografi dan Etnografi, (2) Sejarah dan Cerita Rakyat, (3) Perjanjian dan Kontrak, (4) Laporan, (5) Perintah, Pemberitahuan dan Pengangkatan, (6) Bahasa, Sastra dan Lain-lain, maupun (7) Gambar dan Peta.³¹ Disamping itu catatan-catatan atau surat-surat dari Kesultanan Tidore yang masih disimpan oleh turunan kerukunan keluarga raja atau pejabat di Papua.

Sumber-sumber Portugis pada abad XVI digunakan seperti bukunya Tome Pires (*The Suma Oriental*)³² Baros (*Decadas da Asia*), Albuquerque (*Cartas de Affonso*), Antonio Galvao (*A Treatise on the Moluccas*)³³ dan lain-lain.³⁴ Sedangkan sumber-sumber Belanda pada abad XVII sampai abad XX yang menulis khusus mengenai Papua dapat dikatakan banyak, antara lain: W.C. Klien (*New Guinea*), P.J.B. Robide van der AA (*Reizen near Nederlandsch Nieuw Guinea*) dan laporan-laporan zending/misionaris lainnya.

Dalam rangka pengumpulan data lapangan, dilakukan pula metode wawancara dengan tokoh-tokoh yang dipandang memiliki pengalaman, informasi, dokumen, dan keterikatan kekeluargaan dengan sejarah Islam di Papua. Dalam hal ini, informasi yang didapatkan adalah berupa sejarah lisan (*oral history*)³⁵. Wawancara dilakukan

³¹Lihat : Titik Pudjiastuti, "Naskah-Naskah Kuno Maluku Utara Koleksi Perpustakaan Nasional" dalam M. Jusuf Abdulrahman (et.al.), *Ternate Bandar Jalur Suterah*, Ternate: LInTas, 2001, hlm.119-138.

³²Lihat : Armando Cortesao (ed). *The Suma Oriental of Tome Pires: An Account of the East form the Red Sea to Japan, written in Malaca and India in 1512-1515 and the book of Farncisco Rodrgues*, London, Hakluyt Society, 1944, (2 Jilid).

³³Lihat Th. Th. M. Jacobs Hubert, *A Treatise on the Moluccas (1554) Probably the Preliminary version of Antonio Galvao's lost Historica das Moluccas*. Edited annotated, and Translate into English from the Portoguese manuscript in the Archivo general de Indias, Seville, Rome-Italy, 1970/1971.

³⁴ Sumber-sumber Portugis ini banyak membicarakan Maluku terutama Ternate, Tidore dan Ambon, Lihat : Soedjatmoko (et al), *Historiografi Indonesia Sebuah Pengantar*, Jakarta : Gramedia, 1995, hlm. 189-203.

³⁵ Sejarah lisan dalam hal-hal tertentu lebih dipercaya dibandingkan sumber-sumber tertulis sebab penutur cerita yang sudah ahli dapat memberikan informasi tanpa kesalahan, tetapi kesalahan

kepada keturunan keluarga raja-raja baik di Papua maupun Maluku Utara serta keturunan pejabat atau tokoh-tokoh masyarakat yang langsung mendengar dari saksi pertama. Metode sejarah lisan ini dipergunakan sebagai metode pelengkap terhadap bahan dokumenter.³⁶ Di samping itu, untuk melengkapi bahan dokumenter juga dilakukan pengamatan, terutama di daerah awal berkembangnya Islam, yaitu di kepulauan Raja Ampat-Sorong, Fakfak, Kaimana, Teluk Bintuni dan Babo.

2. Metode Penelitian dan Pendekatan

Tujuan studi ini adalah untuk mencapai penulisan sejarah, maka upaya merekonstruksi masa lampau dari objek yang diteliti itu ditempuh melalui metode sejarah (*historical method*). Louis Gottchalk³⁷ mensistematiskan langkah-langkah metode sejarah sebagai berikut:

- (1) *Heuristik* yaitu pengumpulan obyek yang berasal dari suatu zaman dan pengumpulan bahan-bahan tertulis dan lisan yang relevan;
- (2) *Verifikasi* atau *Kritik* yaitu menyingkirkan bahan-bahan (atau bagian-bagian dari padanya) yang tidak otentik;
- (3) *Interpretasi* yaitu menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya berdasarkan bahan otentik; dan
- (4) *Historiografi* yaitu penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya itu menjadi suatu kisah atau penyajian yang berarti

Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah sejarah sosial (*social history*). Sejarah sosial ini digunakan karena studi sejarah tidak terbatas pada pengkajian masalah yang informatif tentang apa, siapa, kapan, dimana dan

justru dilakukan penyalinannya. Untuk tradisi yang telah ditulis dapat pula di konfirmasi kembali kepada sumber lisan yang lebih akurat. Lihat Gilbert, S.J. Garaghan, *A Guide to Historical Method*, New York: Fordham University Press, 1957, hlm. 261-2.

³⁶Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1994, hlm. 23.

³⁷Louis Gottchalk, *Understanding of History*, "Mengerti Sejarah", alih bahasa Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI Press. 1983, hlm.. 18.

bagaimana, tetapi ingin melacak berbagai struktur masyarakat, pola kelakuan, kecenderungan proses dalam berbagai bidang, dan lain-lain.³⁸

Dalam dua dekade terakhir ini menurut Azyumardi Azra, sejarah sosial mencakup bidang-bidang: (1) Demografi dan kinship; (2) Kajian masyarakat urban; (3) Kelompok-kelompok dan kelas sosial; (4) Sejarah "mentalis" atau kesadaran kolektif; (5) Transformasi masyarakat; (6) Gerakan sosial atau fenomena protes sosial; (7) Sejarah pendidikan, tradisi keilmuan, ilmu dan kekuatan (*knowledge and power*) dan diskursus intelektual.³⁹

Karena penelitian ini merupakan kajian sejarah sosial, maka pendekatan sosiologis dan antropologis yang lebih diutamakan. Sosiologi agama yang digunakan untuk melihat sebab terjadinya konversi agama, sedangkan antropologi digunakan dalam melukiskan keadaan budaya masyarakatnya. Dengan demikian diharapkan dapat diungkapkan sejarah umat Islam di Papua dan perkembangan serta perubahan-perubahan historis pada masa silam yang lebih akurat dan komprehensif.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan penelitian yang sistematis, maka disusunlah disertasi ini ke dalam tujuh bab, sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan urgensi penelitian, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas konteks sosial historis di Tanah Papua meliputi kondisi geografis, asal nama Papua, struktur masyarakat Papua, sistem kepemimpinan tradisional, pluralitas budaya, kepercayaan dan hubungan Papua dengan bangsa-bangsa lain.

³⁸ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia, 1993, hlm. 120.

³⁹ Azyumardi Azra, *Historiografi Islam Kontemporer: Wacana, Aktualitas, dan Aktor Sejarah*, Jakarta: Gramedia, 2002, hlm. 82.

Bab ketiga membahas proses awal Islamisasi di Tanah Papua meliputi kedatangan dan penerimaan Islam di Papua, pola-pola penyebarannya, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, bukti-bukti peninggalan Islam, dan pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat.

Bab keempat membahas kondisi umat Islam di bawah kolonial Belanda dalam pembahasan ini meliputi: kekuasaan Belanda di Papua pada tahun 1828, gerakan missionaris dan zending di Tanah Papua, kepentingan bisnis dan politik Belanda di Papua, munculnya gerakan sosial politik dan lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan Islam di Papua, serta pengasingan pejuang Indonesia ke Tanah Merah, hulu sungai Digul (Merauke) dan peranannya bagi dakwah Islam di Papua.

Bab kelima membahas perkembangan dan dinamika umat Islam di Papua setelah berintegrasi dengan Indonesia. Pembahasan ini mencakup konteks sosial politik masuknya Papua ke dalam NKRI, politik pembangunan di era Orde Baru, umat Islam dalam birokrasi dan pembangunan di Papua, gerakan sosial keagamaan, lembaga pendidikan Islam di kedatangan perantau dan program transmigrasi, gerakan sosial keagamaan, lembaga-lembaga pendidikan Islam, perkembangan Islam di Wamena, dan hubungan umat Islam dengan agama-agama lain.

Bab keenam membahas karakteristik peran serta umat Islam di Tanah Papua pasca presiden Soeharto (1998-2007). Pembahasan ini meliputi posisi umat Islam dalam gejolak sosial politik, peta umat Islam dalam konteks demografis Papua, karakteristik dan bentuk-bentuk pergerakan umat Islam Papua, serta tantangan umat Islam di Papua.

Sedangkan *bab ketujuh*, merupakan bab penutup. Dalam bab ini dirumuskan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran penulis sehubungan dengan hasil penelitian.

BAB II

KONTEKS SOSIAL HISTORIS DI TANAH PAPUA

Dalam membahas rekonstruksi sejarah sosial dan perkembangan umat Islam di pulau Papua, nampaknya penting untuk memahami latar belakang karakteristik wilayah dan penduduk di pulau Papua. Untuk itu, Bab II akan membahas beberapa hal, yakni kondisi umum wilayah, asal nama Papua, kepercayaan, keanekaragaman budaya, struktur masyarakat Papua, sistem kepemimpinan tradisional, maupun hubungan awal masyarakat Papua dengan bangsa-bangsa lainnya. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan secara singkat karakteristik wilayah dengan setting sosial budaya yang khusus dan berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia¹.

A. Kondisi Geografis, Demografis dan Administrasi Pemerintahan di pulau Papua

Dengan luas sekitar 421.981 km², pulau Papua berada di ujung timur dari wilayah Indonesia.² Dengan potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomis dan strategis telah mendorong bangsa-bangsa asing untuk menguasai pulau Papua. Kabupaten Puncak Jaya berada di ketinggian 1.000 – 3.000 meter di atas permukaan laut merupakan kota tertinggi di pulau Papua. Sedangkan yang terendah adalah kota Merauke dengan ketinggian 3,5 meter di atas permukaan laut. Sebagai daerah tropis dan wilayah kepulauan, pulau Papua memiliki kelembaban udara relatif lebih tinggi

¹ Pulau Papua begitu julukannya adalah salah satu di antara pulau-pulau di dunia yang amat unik dan langka. Ketika dilihat pulau ini, banyak orang mengasosiasikan pulau Papua seluruhnya tampak seperti seekor burung besar. Orang lain mungkin mengasosiasikan bentuk pulau Papua itu dengan seekor binatang dinosaurus pada masa mezozoikum yang sekarang sudah kandas dipermukaan bumi, tetapi adapula yang melihat pulau Papua ini berbentuk seperti seekor burung raksasa pada zaman purba yang sedang duduk santai. Akan tetapi yang kita lihat disini hanyalah sebagian yang meliputi bagian kepala, tengkuk, punggung, leher, dada dan perut dari seekor burung raksasa atau binatang dinosaurus tersebut di atas.

² Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, *Papua Dalam Angka 2006*, Jayapura: BPS Provinsi Papua, 2007.

berkisar antara 80 – 89 %.³ Kondisi geografis yang bervariasi ini mempengaruhi kondisi penyebaran penduduk yang tidak merata. Pada tahun 1990 penduduk di pulau Papua berjumlah 1.648.708 jiwa dan meningkat menjadi sekitar 2,8 juta jiwa pada tahun 2006.⁴

Dalam konteks administrasi pemerintahan, sejak tahun 1969 hingga 1999, di pulau Papua terdapat satu (1) provinsi, yakni provinsi Irian Jaya, dimana pada tahun 2001 berubah menjadi provinsi Papua. Namun, pada tahun 1999, Presiden B.J Habibie dan DPR berinisiatif untuk membagi provinsi Irian Jaya menjadi tiga (3) provinsi melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan provinsi Irian Jaya Barat, provinsi Irian Jaya Tengah, dan provinsi Irian Jaya Timur.⁵ Namun pemekaran provinsi ini menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan dalam politik lokal di pulau Papua. Di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Gus Dur menunda pemberlakuan undang-undang tersebut. Kondisi kepolitikan di pulau Papua mulai berubah ketika era administrasi Megawati-Hamzah Haz. Presiden Megawati mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang percepatan pelaksanaan UU No. 45 Tahun 1999 tentang pembentukan provinsi Irian Jaya Barat, provinsi Irian Jaya Tengah, dan provinsi Irian Jaya Timur. Pada Februari 2003 provinsi Irian Jaya Barat berhasil dideklarasikan dan dibentuk di kota Manokwari, namun provinsi Irian Jaya Tengah belum berhasil dibentuk karena konflik horizontal yang terjadi antara pendukung pemekaran dan kontra-pemekaran yang terjadi di kota Timika pada Agustus 2003.

³ BPS Provinsi Irian Jaya, *Irian Jaya Dalam Angka 1998*, Jayapura: BPS Provinsi Irian Jaya, 1999.

⁴ BPS Provinsi Papua, *Papua Dalam Angka Tahun 2006* (Jayapura: BPS Provinsi Papua, 2007) dan BPS Provinsi Papua Barat, *Papua Barat Dalam Angka Tahun 2007* (Manokwari: BPS Provinsi Papua Barat, 2008).

⁵ Lihat Undang-Undang No. 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, dan Provinsi Irian Jaya Timur.

Dengan demikian, sejak tahun 2003 di pulau Papua terdapat dua (2) provinsi, yakni Provinsi Irian Jaya Barat⁶ dan Provinsi Papua.

Tabel. 1. Pembagian Administrasi Pemerintahan di Provinsi Papua

No.	Provinsi/Kabupaten	Luas wilayah	Jumlah penduduk
1.	Kota Jayapura	940	200.360
2.	Kabupaten Jayapura	15 309	91.990
3.	Kabupaten Sarmi	25 902	44.180
4.	Kabupaten Keerom	9 365	37.927
5.	Kabupaten Pegunungan Bintang	16 908	137.260
6.	Kabupaten Merauke	43 979	155.783
7.	Kabupaten Asmat	18 976	62.002
8.	Kabupaten Boven Digoel	28 471	31.443
9.	Kabupaten Mappi	27 632	66.228
10.	Kabupaten Jayawijaya	12 680	210.654
11.	Kabupaten Tolikara	8 816	88.529
12.	Kabupaten Puncak Jaya	10 852	111.711
13.	Kabupaten Yahukimo	15 771	62.002
14.	Kabupaten Paniai	14 215	112.881
15.	Kabupaten Nabire	16 312	161.519
16.	Kabupaten Biak Numfor	2 360	99.798
17.	Kabupaten Yapen Waropen	3 131	70.744
18.	Kabupaten Waropen	24 628	21.647
19.	Kabupaten Supiori	775	12.709
20.	Kabupaten Mamberamo Raya	-	-
21.	Kabupaten Mimika	20 040	126.430

Sumber: BPS Provinsi Papua, Papua Dalam Angka Tahun 2006

Dalam perkembangannya, tuntutan dari sebagian penduduk Papua untuk memekarkan provinsi Papua menjadi beberapa provinsi Papua semakin marak. Provinsi-provinsi baru tersebut antara lain provinsi Papua Selatan, provinsi Teluk Cenderawasih, provinsi Pegunungan Tengah, maupun provinsi Papua Tengah.

⁶ Dalam perkembangannya Provinsi Irian Jaya Barat dirubah namanya menjadi provinsi Papua Barat melalui PP No. 24 Tahun 2007.

Sedangkan Provinsi Papua Barat terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota. Di wilayah Papua Barat, populasi umat Islam, baik yang pendatang maupun pribumi banyak tersebar di kawasan perkotaan dan perdesaan.

Tabel. 2. Pembagian Administrasi Pemerintahan, Luas Wilayah, dan Jumlah Penduduk di Provinsi Papua Barat Tahun 2006

No.	Kabupaten	Luas (km ²)	Jumlah penduduk
1.	Kabupaten Manokwari	14.448	166.322
2.	Kabupaten Teluk Wondama	4.996	22.293
3.	Kabupaten Teluk Bintuni	18.658	51.783
4.	Kabupaten Kaimana	18.500	40.550
5.	Kabupaten Fakfak	14.320	64.380
6.	Kabupaten Sorong	18.170	95.061
7.	Kabupaten Sorong Selatan	29.811	59.240
8.	Kabupaten Raja Ampat	6.084	39.870
9.	Kota Sorong	1.105	162.703

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, Papua Barat Dalam Angka 2007.

B. Asal Nama Papua

Perkembangan asal usul nama pulau Papua memiliki perjalanan yang panjang seiring dengan sejarah interaksi antara bangsa-bangsa asing dengan masyarakat Papua, termasuk pula dengan bahasa-bahasa lokal dalam memaknai nama Papua.

Interaksi dengan rakyat Papua dengan bangsa-bangsa lain diawali pada awal abad VIII. Menurut H.W. Bachtar bahwa terdapat hubungan, baik langsung atau tidak langsung antara masyarakat Papua dengan Sriwijaya. Hal ini dibuktikan dengan hadiah burung-burung yang berasal dari pulau Papua yang diberikan oleh duta raja Sri Indrawarman untuk dihadiahkan ke Kaisar Tiongkok. Pada masa Sriwijaya, mereka menamakan pulau Papua dengan sebutan “Janggi”. Dalam perkembangannya,

pada abad XIII, seorang musafir dari Tionghoa, yang bernama Chau Yu Kua, menyebut suatu daerah di kepulauan Nusantara bernama Tung-ki⁷

Sedangkan pelaut Portugis memiliki sebutan tersendiri bagi Papua. Pada tahun 1511 Antonio d'Arbau dan Francesco Serano pada tahun 1521 menyebut wilayah besar itu dengan nama Os Papuas atau juga Ilha de Papo. Demikian pula, Don Jorge de Menetes yang pernah singga di Papua pada tahun 1526 – 1527 menyebut pulau dengan nama "Papua"⁸. Pada tahun 1528, Alvaro de Savedra, seorang pimpinan armada laut Spanyol singgah di bagian pulau Papua dan menyebutnya dengan sebutan *Isla de Oro* atau *Island of Gold* yang artinya "Pulau Emas". Nama ini diberikan mengingat penduduk di pulau Papua memiliki kemiripan dengan penduduk Guinea di Afrika barat. Dengan demikian, kedua nama tersebut, baik "Papua" dan "Nieuw Guinea" digunakan secara umum pada abad yang bersamaan.⁹

Nama Papua juga memiliki makna dalam bahasa Tidore dan Ternate. Dalam cerita lisan yang berkembang di pulau Papua bahwa nama "Papua" itu berasal dari bahasa Tidore, yang diartikan sebagai "rambut keriting" sebagaimana juga bahasa Melayu *pua pua* berarti keriting.¹⁰ Wilayah tanah besar beserta pulau-pulaunya oleh Kesultanan Tidore disebut dengan nama *Papo Ua* yang berarti tidak bergabung atau tidak bersatu, tidak bergandengan (*not integrated*). Maksudnya bahwa wilayah luas dan tanah besar ini tidak termasuk ke dalam Kesultanan Tidore atau induk kesultanan Tidore.

⁷ Lihat H.W Bachtar, "Sejarah Irian Jaya" dalam Koentjaraningrat (ed.), *Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk* (Jakarta : Penerbit Djembatan, 1993), hlm. 44.

⁸ Decki Natalis Pigay BIK, Pengantar Lance Castles, *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua (Sebelum, Saat dan Sesudah Integrasi)* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 93-94.

⁹ Idris Yusuf, *Lahirnya Nama Irian Jaya*, dalam Warta Irian Jaya, Biro Humas Setwilda Irian Jaya, Edisi 31/32 tahun 1998, hlm. 9

¹⁰ Lihat H.W. Bachtar, "Sejarah Irian Jaya",hlm. 45.

Bahkan, terdapat kesan bahwa masyarakat Papua diasosiasikan dengan budak yang terkesan merendahkan penduduk asli di pulau Papua. Penamaan Papua tersebut sejalan dengan perjalanan sejarah Kesultanan Tidore di daratan Papua. Dalam arti bahwa daratan Papua itu dahulu merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Tidore. Pengangkatan kepala daerah tertentu dengan pangkat dan atributnya semisalkan *kapitan*, *mayor*, *sangaji*, *dimara* dan sebagainya, pada masa itu dilakukan oleh Sultan Tidore dengan suatu surat keputusan Sultan (*besluit*). Didapatkan misalnya sebuah *besluit* pengangkatan kepala wilayah dengan pangkat kapitan terhadap seorang pejabat bernama Naidama di daerah Ugar, Distrik Sekar di Fakfak, tertanggal 5 Nopember 1929. Sekarang nama jabatan tersebut dilestarikan oleh masyarakat menjadi nama keluarga (marga atau fam). Nama Papua dan nama Nieuw Guinea dikenal secara luas di seluruh dunia, terutama pada abad XIX. Kedua nama tersebut dikenal oleh dunia setelah terdapat pada peta dunia.

Selanjutnya pada tahun 1940-an oleh Residen JP Van Eechoud yang telah membentuk sekolah *bestuur* menganjurkan dan memerintahkan Admoprasojo selaku Direktur sekolah *bestuur* untuk membentuk dewan suku-suku. Di dalam kegiatan dewan ini salah satunya adalah mengkaji sejarah dan budaya Irian, termasuk mengganti nama pulau Papua dengan sebuah nama yang mencerminkan budaya Papua, dan nama tersebut harus digali dari bumi Papua.¹¹

Pertemuan diadakan di Tobati-Jayapura, ide penggantian nama tersebut dibentuk dalam sebuah panitia yang bertugas untuk menelusuri asal usul nama Papua dari daerah Papua dan dapat diterima oleh seluruh suku yang ada. Frans Kaisepo selaku ketua Panitia mengambil sebuah nama dari sebuah mitos Mansren Koreri,

¹¹ Penyelidikan ahli bahasa dan antropolog itu telah didahului oleh para sarjana raksasa seperti Wilhelmi Van Humboldt, v.d. Gabelenz, Fr. Muller, Codrington, Bopps, dan H. Kern dan menimbulkan kesimpulan bahwa bahasa-bahasa penduduk asli di daerah yang dinamainya Bumi Austronesia (artinya Kepulauan Selatan) menunjukkan bahwa persatuan rumpun bahasa ke dalam daerah itu termasuk pulau Madagaskar, Formosa Timur, kepulauan Philpina, Hawaii, dan seluruh kepulauan Indonesia terhitung dengan Irian Barat.

sebuah legenda yang termahsyur dan dikenal luas oleh masyarakat luas Biak, yaitu Irian. Dalam bahasa Biak Numfor yaitu *Iri* artinya tanah, dan *an* artinya panas. Nama tersebut berasal dari kata Iryan dalam bahasa Biak artinya dalam proses memanaskan, suatu arti metaphor bagi wilayah yang sedang memasuki suatu zaman baru dalam sejarahnya dan juga sebagai nama julukan bagi daerah tersebut yang memang beriklim panas.¹²

Nama Irian yang berasal dari Biak (tanah panas) ternyata memiliki makna lain dari daerah-daerah lainnya di Papua. Pada perkembangannya, terdapat beberapa pengertian yang sama di tempat lain seperti di Serui dan Merauke. Dalam bahasa Serui, *Iri* artinya tanah, *an* artinya bangsa, jadi Irian artinya "Tiang Bangsa", sementara dalam bahasa Merauke, *Iri* artinya ditempatkan atau diangkat tinggi, *an* artinya bangsa, jadi Irian adalah bangsa yang diangkat tinggi.

Nama Irian digaungkan oleh Frans Kaisepo pada tanggal 16 Juli 1946 di Konferensi Malino, guna mengganti nama Papua dan Nieuw Guinea dengan nama Irian. Dengan demikian, Frans Kaisepo, adalah seorang putra Papua yang merupakan tokoh pejuang yang pertama kali mengusulkan pemakaian nama "Irian". Namun menurut Mansoben, nama tersebut sebetulnya adalah nama yang diusulkan oleh Markus Kaisepo untuk menggantikan nama Papua, karena nama tersebut seringkali diasosiasikan dengan kata hitam, bodoh, rambut keriting untuk menghina orang Irian oleh para petugas pemerintah dan guru-guru pada waktu itu yang berasal dari Indonesia Timur.¹³ Untuk membedakannya dengan bagian timur pulau Irian yang saat itu merupakan bagian dari Australia, maka bagian barat pulau Irian disebut Irian Barat, dan sejak itu menjadi nama resmi daerah ini.¹⁴ Selanjutnya nama Irian

¹² Mansoben, Josh Robert, "Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya, Indonesia: Studi Perbandingan", *Disertasi*, (Leiden: Universty of Leiden, 1994), hlm. 52-53.

¹³ Soerat Chabar Pejoeloh, 8 September 1946 dan Penjelasan pribadi M W Kaisepo kepada Sollewjn Gelpke, Sollewjn Gelpke JHF, 1993, "On the Origin of the name Papua", BKI, 149:318-332.

¹⁴ Koentjaraningrat (*ed.*), *Irian Jaya Membangun*,..... hlm. 58. Kata Irian mempunyai arti yang berbeda-beda dalam bahasa di Irian Barat. Dalam bahasa Biak Numfor Irian berarti "tanah panas"

dipolitisasi lewat para pejuang merah putih seperti Marthen Indey, Silas Papare dan lain-lain, dengan sebutan "Ikut Republik Indonesia Anti-Nederland".

Di era transisi, dari Belanda ke Indonesia, nama Irian digunakan setelah 1 Mei 1963 dengan sebutan Irian Barat. Kemudian, pada tanggal 1 Maret 1973 sesuai dengan peraturan Nomor 5 tahun 1973 nama Irian Barat resmi diganti oleh Presiden Soeharto dengan nama Irian Jaya. Penggantian nama tersebut dilakukan bersamaan dengan peresmian eksplorasi PT Freeport Indonesia yang pusat eksploitasinya dinamakan Tembagapura.

Setelah kejatuhan Presiden Soeharto pada pertengahan 1998, gelombang reformasi nasional juga berimplikasi di daerah-daerah. Dalam konteks reformasi ini, berbagai demonstrasi terjadi di berbagai kota di pulau Papua menuntut berbagai persoalan ketidakadilan seputar hubungan pusat dan daerah. Salah satunya adalah persoalan nama Irian dituntut untuk diganti menjadi nama Papua. Tuntutan tersebut mendapat respon positif dari Presiden Abdurrahman Wahid. Dengan pendekatan kultural yang akomodatif, Presiden menerima nama Papua dan mendorong rakyat Papua, khususnya aktivis-aktivis pergerakan Papua untuk menggunakan nama Papua dan mengizinkan pengibaran bendera bintang kejora yang diletakkan sedikit dibawah

(Iri= tanah, an = panas), dalam bahasa Serui Irian berarti "Tanah Air"(Iri = tiang pokok, an = bangsa) dalam bahasa Merauke, Irian berarti "Bangsa Utama"(Iri = angkat, an = bangsa). Terlepas dari arti perkataannya dalam berbagai macam bahasa di Irian Barat yang amat berbeda satu dengan lainnya, sebutan itu sudah lama dikenal orang-orang Indonesia yang merantau kedaerah Pantai utara dari Irian. Dewasa ini, nama atau sebutan Papua untuk wilayah Indonesia diujung paling timur sudah biasa kita gunakan. Padahal dalam sejarah kaum Nasionalis, pernah sebutan itu tidak disukai bahkan ditolak keras oleh sebagian penduduk yang mendiami wilayah Papua, karena maknanya dianggap merendahkan martabat rakyat. Frans Kaisepo adalah salah satu Tokoh pejuang Papua yang menolak keras penggunaan nama Papua dan mengusulkan nama Irian sebagai penggantinya Kaisepo tentunya tidak sekedar usul atau mencari sensasi tanpa resiko berarti, justeru sikapnya ini mengundang reaksi keras pihak pemerintah kolonial belanda. Pada waktu itu nama Papua yang kita pakai sekarang ini masih dinamakan *Guinea Baru* barat, dan saat itu Kaisepo adalah seorang pribumi asli asal Biak yang menjadi pegawai *binnenlandsch bestuur* (aministrasi sipil belanda) yang juga terpilih menjadi utusan konferensi Malino 1946 menggantikan tokoh lain seperti Silas Papare asli Serui yang dianggap keras sikapnya terhadap pemerintah Belanda. Penolakan yang dilakukan oleh Frans Kaisepo juga menjadi polemik dengan tendensi politik. Hal ini diungkapkan oleh Residen *Guinea baru Barat, Van Eechoud*, bahwa nama yang diusulkan oleh seorang putra Irian , Frans Kaisepo, yang menjadi delegasi utusan wilayah *Nieuw Ginea* dalam Konferensi Malino 1946, ialah Irian.

bendera Merah Putih. Dalam acara kunjungan resmi kenegaraan Presiden sekaligus menyambut pergantian tahun baru 1999 ke 2000 pagi hari tanggal 1 Januari 2000, Presiden Abdurrahman Wahid memaklumkan bahwa nama Irian Jaya saat itu dirubah namanya menjadi Papua. Hal ini dipertegas lagi dalam Kongres Rakyat Papua II yang dilaksanakan oleh Presidium Dewan Papua (PDP).¹⁵

Pada akhirnya, nama Papua mendapatkan legitimasi resmi melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Sejak awal Gubernur Provinsi Papua membentuk tim khusus yang terdiri dari intelektual Papua di Universitas Cendrawasih, Universitas Negeri Papua, dan sejumlah perguruan tinggi swasta di kota Jayapura untuk terlibat secara intens dalam merumuskan draft undang-undang otonomi khusus. Tim kecil ini kemudian memberikan nama Papua dalam draft undang-undang yang disebut "Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Dalam Bentuk Wilayah Berpemerintahan Sendiri"¹⁶. Melalui proses perdebatan dan lobby yang intens di Panitia Khusus di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), akhirnya draft yang disusun oleh intelektual Papua ini diakomodasi oleh DPR dan kemudian draft ini disahkan oleh DPR pada tanggal 22 Oktober 2001. Sejak saat itu, nama Irian Jaya diganti dengan nama Papua.

C. Struktur Masyarakat Papua

Untuk memahami kultur penduduk Papua, khususnya untuk penduduk pribumi Papua, analisis sosial perlu ditunjukkan pada kondisi persebaran penduduk ke dalam dua hingga empat kelompok-kelompok, atau kelompok geografi atau kawasan yang mencerminkan lokasi tempat tinggal, aktifitas ekonomi, kehidupan sosial dan budaya.

¹⁵ Pelaksanaan KRP II ini dapat dilihat pada buku yang ditulis oleh Origenes Reagen Ijje, SE, *Kongres Rakyat Papua II, Merupakan Resolusi Dasar Menuju Papua Merdeka* (Jakarta : PT. Bumi Intitama Sejahtera, 2003).

¹⁶ Lihat Agus Sumule (ed.), *Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003).

Menurut *mapping* yang dilakukan Bappenas tahun 2005, penduduk asli Papua terdiri dari beragam etnis yang sudah teridentifikasi sebanyak 57 kelompok etnik serta hidup secara berkelompok dalam unit-unit kecil yang memiliki 252 adat, budaya dan bahasa tersendiri yang sangat dihormati oleh masyarakat.¹⁷ Bila kita perhatikan ikhtisar di atas dan bahan-bahan visual yang ada pada kita, maka tampaklah bahwa ciri-ciri ras yang ada pada penduduk Irian Barat ialah ciri-ciri ras Australoid, Weddoid, Negroid/Negritoid, Melanesoid dan sejumlah kecil ras Mongolid. Atas pertanyaan dari manakah datangnya unsur-unsur tersebut atau dari manakah datangnya bangsa-bangsa yang membawa ciri-ciri ras tersebut, Kleiweg de Zwaan menyatakan bahwa itu harus dicari dari arah barat pulau ini, yakni dari arah Benua Asia .

Sesudah mengungkapkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan sejumlah pakar terhadap berbagai daerah dan etnis di berbagai kawasan di Indonesia, akhirnya Amir Sutarga membuat kesimpulan bahwa ciri-ciri ras yang didapatkan sekarang pada penduduk Irian Barat (sekarang Papua), di zaman mesolithicum dan mungkin juga di zaman sebelumnya ialah zaman Palaeolithicum. Atas, terdapat pada bahan palaeo-antropologi yang digali di daerah-daerah bagian barat Indonesia. Sedangkan sampai zaman sekarang, ciri-ciri ras itu banyak terdapat juga pada penduduk dari kawasan timur Indonesia. Demikian anggapan yang menyatakan bahwa asal usul penduduk Papua haruslah dicari dari sebelah baratnya (Benua Asia dan Kepulauan Indonesia) adalah pendapat yang kuat juga.

Tentang jalur penerimaan pengaruh budaya dari luar yang masuk ke arah Papua dilukiskan antara lain sebagai berikut : Teori Riesenfeld menyatakan bahwa Pulau Papua telah menerima pengaruh megalitik dari Asia Tenggara melalui dua jurusan. Pengaruh pertama melalui kepulauan Indonesia sebelah selatan, lewat

¹⁷ Lihat studi Bappenas, (draft akhir), *Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara, Buku Rinci Provinsi Papua* (Jakarta: Bappenas, 2006).

kepulauan Maluku menuju bagian barat Papua. Pengaruh kedua dari Mikronesia melalui Filipina, lalu ke Sulawesi Utara menuju daerah Sepik di Papua New Guinea. Arus dari arah barat mempengaruhi daerah pantai selatan, barat dan utara Papua sampai Mamberamo, sedangkan arus dari arah Mikronesia mempengaruhi seluruh Papua dengan batas baratnya ditentukan di daerah Sentani-Jayapura, karena di Sentani terdapat pula beberapa unsur dari arah utara seperti pemahatan pada batu-batu, adat mas kawin dan atap-atap rumah yang melengkung. Penyebaran arus dari arah Mikronesia diteruskan ke Melanesia dan Polinesia.

Terdapatnya pengaruh-pengaruh tersebut dimungkinkan karena adanya kontak antar pemilik kebudayaan tersebut, baik kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Terutama karena faktor terdapatnya migrasi penduduk yang memiliki unsur-unsur kebudayaan tersebut. Pengaruh itu akan makin kuat bilamana pendukung kebudayaan itu bermigrasi ke suatu daerah, sehingga masyarakat penerima imigran itu mengadopsi kebudayaan yang datang, dan kemudian menjadi bagian dari kebudayaannya yang baru.

Jika dilihat dari karakteristik budaya, mata pencaharian dan pola kehidupannya, penduduk asli Papua itu dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu: (1) Papua pegunungan/pedalaman, dataran tinggi, dan (2) Papua dataran rendah dan pesisir. Pembagian ini dapat dibagi-bagi lagi berdasarkan jenis dan parameter tertentu, seperti tipe pemukiman, jenis mata pencaharian, kesamaan pola budaya dan adat istiadat.¹⁸

1. Penduduk pesisir pantai ; mata pencaharian utamanya adalah nelayan, di samping berkebun dan meramu sagu yang disesuaikan dengan lingkungan pemukiman itu. Komunikasi dengan kota dan masyarakat luar terbangun di kalangan penduduk pesisir.

¹⁸ Lihat studi Bappenas, (draft akhir), *Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara, Buku Rinci Provinsi Papua* (Jakarta: Bappenas, 2006).

2. Penduduk pedalaman yang mendiami dataran rendah ; mereka termasuk peramu sagu, berkebun, menangkap ikan di sungai, berburu di hutan, dan yang ada di lingkungan sekitarnya. Mereka senang mengembara dalam kelompok kecil. Mereka ada yang mendiami tanah kering dan ada yang mendiami rawa dengan payau serta sepanjang aliran sungai. Adat istiadat mereka ketat dan selalu mencurigai pendatang baru.
3. Penduduk pegunungan yang mendiami lembah; mereka bercocok tanam, dan memelihara babi sebagai ternak utama, kadang kala mereka berburu dan memetik hasil hutan. Pola pemukimannya tetap secara berkelompok dengan penampilan yang ramah, bila dibandingkan dengan penduduk tipe kedua. Adat istiadat dijalankan secara ketat dengan “pesta babi” sebagai simbolnya. Ketat dalam memegang dan menepati janji. Balas dendam merupakan suatu tindakan kepahlwanan dalam mencari keseimbangan sosial melalui perang suku yang dapat diibaratkan sebagai pertandingan atau kompetisi. Sifat curiga terhadap orang asing ada, tetapi tidak seketat penduduk tipe kedua di atas.
4. Penduduk pegunungan yang mendiami lereng-lereng gunung; melihat kepada tempat pemukimannya yang tetap di lereng-lereng gunung, memberi kesan bahwa mereka ini menempati tempat yang strategis terhadap jangkauan musuh di mana sedini mungkin selalu mendeteksi setiap makhluk hidup yang mendekati pemukimannya. Adat istiadat mereka sangat ketat. Perang suku merupakan aktifitas untuk mencari keseimbangan sosial, dan curiga pada orang asing sangat tinggi.

D. Sistem Kepemimpinan Tradisional

Demikian pula dalam konteks kepemimpinan di pulau Papua, terdapat karakteristik dari sistem kepemimpinan tradisional. Mansoben membagi ke dalam 4 (empat) tipologi.¹⁹ *Pertama*, sistem kepemimpinan pria berwibawa sebagai tipologi I. Pemimpin ini diperoleh melalui upaya pencapaian. Sumber kekuasaan dalam tipe kepemimpinan ini adalah kemampuan pribadi seseorang yang terwujud nyata dalam keberhasilan ekonomi (kaya), kepandaian berdiplomasi dan berpidato, keberanian memimpin perang, memiliki tubuh yang besar dan tegap, serta memiliki sifat pemurah. Tipologi ini terdapat di orang Muyu, orang Ngalum, orang Dani, orang Asmat, orang Mek, dan orang Meibrat.

Kedua, sistem kepemimpinan raja sebagai tipologi II. Tipe ini bercirikan pewarisan kedudukan pemimpin dari orang tua kepada anak pria yang sulung. Namun jika tidak mampu diberikan kepada anak laki-laki sesudahnya atau ke adik laki-laki dari ayah. Kekuasaan ini diwariskan dan dipertahankan dalam rangka kelompok kekerabatan besar, seperti klen, melalui sistem pewarisan. Ciri dalam sistem ini adanya birokrasi dengan pembagian tugas secara tradisional, baik di bidang keamanan, pemerintahan, agama, maupun ekonomi. Masyarakat tipe ini terdapat di Kepulauan Raja Ampat, daerah semenanjung Onin (Fakfak) dan di daerah Kaimana. Daerah-daerah ini merupakan daerah lintas budaya antara 2 (dua) yakni kebudayaan Maluku dan kebudayaan Papua. Penduduk di wilayah Barat pulau Papua ini telah melakukan interaksi perdagangan dengan penduduk di kepulauan Maluku. Proses interaksi ini akhirnya mempengaruhi pengambilalihan unsur-unsur kebudayaan tertentu, termasuk unsur sistem kepemimpinan.

Ketiga, sistem kepemimpinan yang menganut sistem kepemimpinan kepala klen. Tipologi ini adalah tipologi ke-3 yang mirip dengan sistem kepemimpinan raja

¹⁹ Lihat J.R Mansoben, *Kebhinekaan Sistem Kepemimpinan Tradisional di Irian Jaya*, dalam Koentjaraningrat, *Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk* (Jakarta: Penerbit Djembatan, 1999), hlm. 384 – 391.

dalam hal prinsip pewarisan kekuasaan. Seorang kepala klen hanya memiliki kekuasaan yang terbatas pada satu atau beberapa orang cabang klen saja, dan wilayah kekuasaannya terbatas pada wilayah yang ditempati cabang-cabang klen sendiri. Tipologi ini terdapat di Teluk Jayapura, dimana ditempati oleh orang-orang Tobati, Enggros, Kayubatu, Nafri, Sentani, dan Genyem.

Keempat, sistem kepemimpinan yang bersifat campuran antara tipe kepemimpinan pria berwibawa, tipe raja, dan tipe kepala klen. Dalam konteks ini terdapat pemimpin-pemimpin yang muncul atas kemampuannya sendiri, atau keturunan. Tipologi seperti ini terdapat di masyarakat yang mendiami pantai Teluk Cendrawasih seperti di Biak dan Serui maupun di pantai utara Kepala Burung.

E. Pluralitas Budaya

Sebagaimana dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya, penduduk di Papua ditandai oleh beragam penduduk yang terbagai ke dalam zona ekologis wilayah yang berbeda-beda. Penduduk pribumi Papua adalah rumpun bangsa Papua-Melanesid yang bermukim di daerah Melanesia, yakni sekelompok pulau yang berada disebelah timur laut Australia, terdiri dari kepulauan Bismark, Salomon, Santa Cruz, New Hebriden, Fiji, Lusiade dan New Caledonia. Rumpun bangsa Papua-Melanesid yang hidup di Pulau Papua dan kedudukannya dalam lingkungan diatas mempunyai fungsi sebagai tempat yang sangat besar dan jumlah penduduknya terbanyak diantara pulau-pulau Melanesia yang ciri-ciri penduduknya : berkulit hitam, rambutnya hitam keriting, muka bulat, hidungnya tinggi serta lebar sering melengkung. Badannya agak besar, di daerah pedalaman adalah penduduk suku-bangsa Papua yang hampir mirip dengan suku-bangsa Papua yang hampir mirip dengan suku-bangsa di Afrika²⁰

Seperti kita ketahui, Papua memiliki bahasa-bahasa daerah dan suku-suku bangsa yang terbanyak jumlahnya di negara kita. Hal ini sangat dimungkinkan bahwa

²⁰ Ensiklopedi Indonesia, Penerbit W. Van Hoeve, Bandung, Gravenhage, tt, hlm. 985.

bisa jadi keanekaragaman suku dan bahasa merupakan sebuah penghalang bagi suatu komunikasi yang kongkret untuk pemerintah, karena sebagian besar bahasa tersebut belum ditelaah dan diaksarakan demi kelancaran komunikasi antara pemerintah dan rakyat, dalam rangka pencapaian informasi yang vital, seperti hal-hal yang menyangkut dengan kebersihan dan kesehatan masyarakat, gizi makanan, pembinaan mental, pertanian, pendidikan dan lain-lain, yang diketahui oleh rakyat demi kepentingan mereka sendiri.

Keanekaragaman budaya Papua salah satunya adalah bahasa yang dipergunakan. Bahasa-bahasa di Papua dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) golongan besar, yang oleh para ahli linguistik disebut Phylum (fila), yaitu fila bahasa-bahasa Melanesia dan fila-fila bahasa non Melanesia. Fila bahasa-bahasa Melanesia merupakan bagian tengah selatan dari fila besar bahasa-bahasa Austronesia, seperti yang telah kita ketahui meliputi suatu daerah persebaran yang sangat luas, yang disebelah barat dibatasi oleh bahasa-bahasa Madagaskar, di sebelah utara oleh bahasa-bahasa penduduk asli Taiwan, yang di sebelah selatan dibatasi oleh bahasa-bahasa Melanesia, dan di sebelah timur oleh pulau paskah di Polinesia.

Para ahli linguistik telah melakukan beberapa upaya untuk mengklasifikasikan kebinekaan bahasa Papua, yang salah satunya adalah klasifikasi C. Loukotka (1957 yang kemudian dimuat secara singkat oleh A.M Moelyono. Menurut klasifikasi Loukotka, paling sedikit 31 golongan bahasa di Papua, yang memang memberi kesan mengenai besarnya kebinekaan bahasa Papua. Dalam kenyataan, kebinekaan itu jauh lebih besar lagi, seperti yang tampak dalam indeks bahasa-bahasa Irian susunan para ahli Linguistik. Di dalamnya terdaftar 234 bahasa, yang masih juga diklasifikasikan secara geografikal, yang mendekati pembagian administratif dan provinsi ke dalam 9 kabupaten,²¹ antara lain adalah : 1. Bahasa-

²¹ Klasifikasi geografikal mengikuti pembagian ke dalam 9 Kabupaten, dikurangi dengan Kabupaten Yapen Waropen, tetapi ditambah dengan golongan bahasa Papua Barat-daya dan Tenggara.

bahasa di kabupaten Sorong; 2. Bahasa-bahasa di kabupaten manokwari; 3. Bahasa-bahasa di kabupaten Biak-Numfor; 4. Bahasa-bahasa di kabupaten Paniai; 5. Bahasa-bahasa di kabupaten Fakfak; 6. Bahasa-bahasa di kabupaten Papua Barat-daya; 7. Bahasa-bahasa di kabupaten Jayapura 8. Bahasa-bahasa di kabupaten Jayawijaya; 9. Bahasa-bahasa di kabupaten Merauke, dan; 10. Bahasa-bahasa di kabupaten Papua Tenggara.

Provinsi Papua adalah salah satu Provinsi di wilayah timur Indonesia yang menyimpan banyak sejarah dan kebudayaan. Penelitian pra-sejarah Papua pada taraf permulaan, meskipun sedikit demi sedikit telah mengumpulkan benda-benda pra sejarah terus bertambah, namun masih saja dianggap kurang. Selama belum terselenggara penelitian-penelitian yang teratur, yang disertai dengan penggalian-penggalian yang memperhatikan segi-segi stratigrafi maupun geologi dan lapisan-lapisan bumi tempat benda-benda kebudayaan prasejarah digali, selama itu, sukar pula untuk menentukan secara teliti kronologi dari benda-benda yang ditemukan.²²

Di beberapa daerah sampai saat ini masih ada kelompok orang yang hidup dalam tingkat kebudayaan neolitik., seperti di daerah Pegunungan Jayawijaya yang sukar dicapai orang. Keadaan serupa ini jarang dijumpai bandingannya di tempat lain di dunia dewasa ini. Mereka hidup di desa terbuka atau dalam desa-desa yang dikelilingi pagar batu atau kayu. Sebagai mata pencahariannya mereka mengerjakan ladang secara teratur dengan ubi dan keladi sebagai tanaman utama, disamping mengumpulkan hasil-hasil alam sekitarnya.²³

Dalam perkembangan zaman dan pertambahan populasi penduduk di tanah Papua, dapat dijumpai bahwa kemajemukan penduduk Papua tidak hanya dapat

²² Lihat H.W Bachtiar, dalam Koentjaraningrat (ed.), *Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk*, (Jakarta: Penerbit Djembatan, 1993), hlm. 80.

²³ Lihat H.W Bachtiar, dalam Koentjaraningrat (ed.), *Irian Jaya Membangun,* hlm. 80.

dilihat dari sisi bahasa, suku-suku yang ada di dalamnya, tipologi persebaran penduduknya, mata pencaharian, struktur sosial dan politik masyarakatnya, akan tetapi semakin kompleks jika dikaitkan dengan besar dan luasnya tanah Papua dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit dan arus pendatang yang konsisten berdatangan dan cenderung menguasai kegiatan ekonomi kawasan perkotaan. Bila dilihat dari sisi perspektif yang lain sesungguhnya kemajemukan dan heterogenitas penduduk dan kekayaan alam dimiliki Papua merupakan potensi yang tidak ternilai harganya jika mampu di kelolah dengan baik, harmonis, dan menjunjung tinggi kearifan moral lokal dengan menghargai hak-hak masyarakat adat.

Kondisi penduduk dan masyarakat Papua yang heterogen tersebut dapat menjadi potensi dalam pengembangan pariwisata daerah yang berbasis budaya. Kemajemukan tersebut salah satunya adalah tercermin dari beragam bahasa yang digunakan oleh masing-masing suku, sekalipun secara entisitas, mereka serumpun, yaitu ras Melanesia. Di tanah Papua ada sedikitnya 43 bahasa atau sekitar 19,5 % terdiri dari bahasa-bahasa Austronesia, yakni bahasa-bahasa yang serumpun dengan bahasa daerah lainnya di Indonesia. Sedangkan sisanya terdiri dari bahasa-bahasa non Austronesia.²⁴

Kemajemukan dan keragaman penduduk Papua tersebut biasanya terwujud dalam berbagai aspek budaya, yaitu di dalam kebahasaan, struktur sosial, sistem mata pencaharian hidup, sistem politik, maupun gagasan-gagasan utama yang digunakan untuk berpartisipasi ke dalam kehidupan alam semesta yang dihayatinya.²⁵

Dengan mengutip berbagai pendapat para ahli, Mansoben dalam disertasinya mengungkapkan bahwa secara umum penduduk Papua dapat dibagi dalam dua kelompok besar menurut pembagian bahasa yang digunakannya. Dua kelompok

²⁴ Bappenas, (Draft Akhir), *Rencana Induk Pengelolaan perbatasan Negara, Buku Rinci di Provinsi Papua*, Jakarta: Bappenas, 2006.

²⁵ Mansoben, "Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya, Indonesia: Studi Perbandingan" *Disertasi Leiden*; University of Leiden, 1994, hlm. 31.

bahasa itu ialah bahasa Austronesia dan dan bahasa non Austronesia. Bahasa Austronesia seringkali disebut juga dengan nama bahasa Melanesia, dan bahasa non Austronesia sering disebut dengan bahasa Papua. Dua bahasa ini merupakan bahasa induk yang ke dalamnya tergolong bahasa-bahasa lokal yang ada di Papua, seperti yang dilaporkan oleh ahli-ahli bahasa yang bekerja di Papua dibawah organisasi *Summer Institute for Linguistik* (SIL) adalah berjumlah kurang lebih 240 buah bahasa.²⁶

Selain bahasa, keanekaragaman budaya yang menjadi kemajemukan orang Papua dapat dilihat dari struktur sosialnya, bahwa orang Papua memegang prinsip-prinsip hak ulayat tanah yang mereka kenal. Di antara penduduk Papua terdapat kolektif-kolektif lain yang mengatur hak ulayat tanah melalui klen, jadi, merupakan hak komunal, terdapat pula kolektif-kolektif lain yang mengatur hak ulayatnya melalui keluarga inti atau hak individual. Termasuk kategori pertama, misalnya orang Dani, orang Auwyu, orang Yawa dan orang Waropen. Sebaliknya pada kategori kedua terdapat orang Me.²⁷

Dalam sistem dan struktur politik lokal, masyarakat Papua juga sangat majemuk bentuk, sifat dan polanya. Di tanah Papua setidaknya ada empat sistem atau tipe politik, keempat sistem tersebut adalah sistem *Big Man* atau pria berwibawa, sistem kerajaan, sistem "Ondoafi" dan sistem campuran. Apabila sistem kerajaan-kerajaan tradisional di wilayah Tanah Papua dibagi atau dikelompokkan berdasarkan letak geografinya, maka kerajaan-kerajaan itu terbagi kedalam tiga wilayah geografi utama. Pertama adalah kerajaan-kerajaan yang terdapat di wilayah geografi kepulauan Raja Ampat. Kedua, kerajaan-kerajaan yang terletak di wilayah geografi

²⁶ Mansoben, *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya, Indonesia: Studi Perbandingan* (Leiden; Disertasi University of Leiden, 1994), hlm.31.

²⁷ Mansoben, *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya, Indonesia: Studi Perbandingan* (Leiden; Disertasi University of Leiden, 1994), hlm.31.

semenanjung Onin. Ketiga, kerajaan-kerajaan yang terletak di wilayah geografi Kowiai.

Pada masing-masing wilayah geografi tersebut terdapat satu atau lebih pusat yang berfungsi sebagai pusat kekuasaan bagi daerah-daerah sekitarnya. Meskipun masing-masing masyarakat di wilayah geografi tersebut mempunyai istilah tersendiri untuk menamakan pemimpinnya (raja). Misalnya di kepulauan Raja Ampat, gelar seorang pemimpin atau raja adalah *fun* atau *kolana*, sedang di semenanjung Onin dan Kowiai pemimpin atau raja disebut *rat*, namun istilah raja adalah istilah umum yang digunakan untuk menyebut seorang pemimpin dalam masyarakat di daerah berkebudayaan kerajaan ini.

F. Kepercayaan

Masyarakat yang mendiami kepulauan Papua memiliki pengetahuan agama mencakup dunia sekuler dan sakral. Mereka memiliki suatu pandangan dunia yang integral yang erat kaitannya satu sama lain antara dunia yang material dan spiritual. Mereka tidak memisah-misahkan seperti yang sering dilakukan dalam kekristenan barat. Pandangan dunia masyarakat tradisional Papua mencakup yang material dan spiritual, yang sekuler dan sakral, dan kedua-duanya berfungsi bersama-sama.

Pola kepercayaan agama tradisional masyarakat Papua menyatu dan menyerap segala aspek kehidupan. Pandangan dunia bagi masyarakat tradisional Papua sebelum tersentuh agama samawi, terbagi dalam dua bagian, yakni :

1. Bagian-bagian empiris, yang menyangkut lingkungan alam, sumber-sumber ekonomi, dunia binatang dan dunia manusia. Singkatnya segala sesuatu yang dapat disentuh dan dapat dilihat.

2. Bagian-bagian non empiris, yang mencakup adanya roh-roh, kekuatan ilmu-ilmu gaib tak berkepribadian, dan kadang-kadang totem-totem.²⁸

Bagian gejala kosmos non-empiris selalu terkait erat dengan hal-hal biasa dari dunia material. Karena itu mahluk-mahluk seperti roh-roh halus, leluhur, roh-roh jahat, Totem, dan lain-lain. Di Wamena misalnya, tempat-tempat arwah disebut sebagai *wakunmo*, dan di dalamnya dibangun rumah kecil untuk meletakkan simbol-simbol *biorefani* para arwah yang baru meninggal diletakkan dalam gua-gua tertentu.

Dasar pemahaman akan pandangan dunia orang Papua ataupun Malanesia adalah kesatuan integral yang mencakup orang yang hidup dan yang mati, binatang, tanaman, roh-roh, gunung-gunung, kali-kali, lautan dan lain-lain. Perbedaan antara yang hidup dan yang mati tidak begitu berarti bila berpikir dalam konsep tentang kosmos yang menyatu dan keduanya secara aktif terlibat dalam kehidupan komunitas.

Satu karakteristik penting yang lain dalam agama-agama Melanesia/Ras Papua tradisional adalah kepercayaan kepada roh-roh para leluhur mereka. Namun diakui bahwa pentingnya peranan mereka sangat bervariasi dalam setiap kelompok. Menurut Luzbetak (1954-1956) orang-orang di bagian timur Melanesia dan pedalaman PNG, para arwah yang baru meninggal dipercaya sebagai roh-roh yang berbahaya yang bisa menyebabkan kesakitan dan kemalangan tertentu. Karena itu mereka sangat ditakuti. Dan supaya jangan menyulitkan masyarakat, orang mendekati mereka secara ritual untuk membujuk dan berdamai dengannya.²⁹

Hampir seluruh kawasan Melanesia, terutama dalam kawasan Papua terdapat suatu mitos tentang seorang mahluk ideal dari zaman primordial di dalam sejumlah

²⁸ Darrel Whiteman, *Malannesian Religions: An Overview*”, In *The Book An Introduction to Malanesian Religion*, Pengantar, Agus A. Alua, *Karakteristik Dasar Agama-Agama Malanesia*, Jayapura: STFT Fajar Timur, 2006, hlm. 11.

²⁹ Darrel Whiteman, *Melannesian Religions: An Overview*”, In *The Book An Introduction to Malanesian Religion, et. a.l*, hlm. 25.

suku. Tokoh Mistis itu, misalnya “dema” dalam kepercayaan masyarakat marindanim, adalah sumber dari segala tanaman dan hewan terpenting yang menjadi makanan penduduk setempat. Dari dan kematian tokoh mitis itu menghasilkan sejumlah makanan yang bermutu, dan juga menetapkan sejumlah nilai-nilai hidup didalam masyarakat. Kematian itu juga membawa dampak tertentu terhadap kehidupan komunitas yang mendiami pedalaman Papua, seperti kematian Kamberap, leluhur orang Muyu, dan Mendobo, Koyeidaba pada masyarakat Ekagi, Nakmarugi atau Naurekul bagi masyarakat suku Dani di lembah Bailem.

Dari penjelasan di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa kepercayaan mendasar ras Melanesia/masyarakat pedalaman Papua agama yang khas bukan seperti agama yang dibawa oleh kaum misionaris masuk ke pedalaman wilayah Papua.

G. Hubungan Masyarakat Papua dengan Bangsa-Bangsa Lain

Pada sub-bab ini digambarkan kontak awal masyarakat Papua dengan pihak luar atau bangsa-bangsa asing, baik di Nusantara maupun bangsa-bangsa asing lainnya. Interaksi-interaksi memiliki berbagai macam motif, baik ekonomi perdagangan, kekuasaan wilayah, penyebaran agama, maupun hubungan budaya secara tradisional.

Maps of the "Discovery" of Papua³⁰



³⁰ Lihat <http://www.papuaweb.org/gb/peta/index.html>

1. Kontak awal dengan bangsa India

Interaksi dengan musafir-musafir India dengan Papua pada abad VII. Dilandasi oleh keinginan untuk mewujudkan impian bahwa terdapat bangsa lain di seberang lautan. Keinginan politik untuk mencari daerah jajahan tidak merupakan tujuan dari bangsa India. Orang India menyebut Papua sebagai *Samudranta*, yang artinya adakah Ujung Samudara dan *Dwi Panta* berarti Ujung Pulau. Sebagai ujung daerah, hal ini merupakan persinggahan terakhir dari pelaut-pelaut India. Perkembangan selanjutnya, pada abad VII, salah satu misi para pelaut India adalah mulai menyebarkan agama Hindu. Maka bersamaan dengan penyebaran agama itulah mereka mengenal letak pulau yang disebut Samudranta dan Dwi Panta berada di bagian timur Jawadwipa yang terdapat gunung-gunung Sysyira atau gunung bersalju dan penuh dengan emas dan termasuk di dalamnya tujuh kerajaan. Namun menurut Walmiki sebutan diatas hanya untuk Jawadwipa (pulau Jawa).³¹

Sekalipun di Papua pada saat ini belum dapat ditemukan prasasti-prasasti ataupun bukti sejarah lainnya, namun dapat diduga bahwa pada zaman dahulu terjadi kontak perdagangan dengan bangsa India. Dalam cerita-cerita atau epos Ramayana terutama dalam episode hanoman yang mencari dewi Shinta dapat digambarkan secara jelas tentang bagaimana orang India mencari Sysyira atau gunung salju yang penuh dengan rempah-rempah, terutama burung-burung yang indah yang dapat ditukar dengan porselin dan tembikar-tembikar.

2. Hubungan dengan Bangsa Cina

Bangsa Cina yang terkenal sebagai pedagang yang ulung, mereka melakukan hubungan perdagangan dengan bangsa-bangsa lain termasuk Papua. Hubungan kontak perdagangan dengan penduduk Papua melalui dua cara : *pertama*,

³¹Kern, Negarakertagama, door Prapanca, 1280-caka 1365. A.D. dalam *Verspreide Geschriften H.Kern. VII*, hlm. 240-320, dalam Koentjaraningrat, *Penduduk Irian Barat* (Jakarta: Universitas, 1963), hlm. 55-56.

perdagangan secara langsung antara penduduk Papua dengan pedagang Cina yang telah berlangsung lama melalui pertukaran benda-benda kebudayaan. Hal ini dapat dilihat dengan diketemukannya benda-benda porselin dan tembikar-tembikar yang masih digunakan oleh penduduk di pesisir utara Irian, terutama pada masyarakat Biak dan Serui. *Kedua*, perdagangan secara tidak langsung, yaitu melalui beberapa kerajaan, seperti kerajaan Tidore, Sriwijaya. Pada permulaan abad VIII, Sriwijaya yang pada masa itu menguasai seluruh Nusantara dan menggunakan kekuasaannya untuk mengambil sebagian rempah-rempah dari pulau besar maupun kecil di Nusantara ini. Menurut Koentjaraningrat, burung asal Papua yang dibawa oleh perutusan-perutusan Maha Raja Sri Indrawarman dari Sriwijaya untuk dipersembahkan kepada Kaisar Tiongkok pada masa itu Papua disebut Janggi.³² Pulau ini dikenal oleh Sriwijaya ketika Ia mencari rempah-rempah hingga ke Maluku. Dan daerah asal rempah-rempah itu oleh Sriwijaya diberi nama Janggi.³³

Sampai saat ini belum ditemukan bukti sejarah, baik etnografi maupun paleografi yang dapat membuktikan kerajaan Sriwijaya pernah menguasai Papua. Dengan demikian, jelaslah bahwa Sriwijaya tidak mempunyai hubungan, baik hubungan politis maupun perdagangan dengan penduduk Papua. Burung-burung yang berbulu indah yang diduga berasal dari Papua dan dipersembahkan oleh Maha Raja Sri Indrawarman kepada kaisar Tiongkok merupakan hasil perolehan kerajaan Sriwijaya melalui kontak perdagangan dengan penduduk di daerah Maluku. Penduduk Maluku juga memperoleh dari penduduk pribumi Papua, terutama penduduk Papua bagian barat sekitar Raja Ampat dan wilayah Kepala Burung yang menjalin hubungan di bidang perdagangan, karena secara geografis lebih yang dekat.

Hubungan tidak langsung hanya dilakukan secara politis yang oleh Sriwijaya dianggap seluruh wilayah Nusantara sebagai bagiannya. Walaupun demikian pada waktu itu orang Sriwijaya tidak terlalu dan tidak punya hubungan yang dekat dengan

³² Koentjaraningrat, *Penduduk Irian Barat* (Jakarta: Universitas, 1963), hlm. 55.

³³ Yayasan Bakti wawasan Nusantara, *Profil Propinsi Irian Jaya*, hlm. 8.

Papua, justru yang lebih dekat dan yang telah lama dikenal pedagang Cina melalui pertukaran barang porselin dan tembikar, dan hubungan yang lebih dalam adalah terjadi perkwaninan antara orang Papua dengan orang Cina. Bukti nyatanya adalah masyarakat Serui keturunan Cina, Biak dan sebagian dari bagian pantai utara Papua yang kini sudah mencapai lebih dari tujuh keturunan. Dan bahan kerajinan mereka seperti piring, mangkok, guci kuno hingga kini masih disimpan oleh penduduk dan di beberapa tempat menjadi sarana upacara adat seperti halnya dijumpai di masyarakat Yapen. Masyarakat menyambut tamu terhormat atau para pejabat dalam upacara adat dengan menggelar piring kuno asal Cina itu di atas tanah dan harus meniti langkah di atas piring-piring itu. Nama Tung-ki dari pelaut Cina ini merupakan bukti nyata pengaruh kebudayaan Cina.³⁴

Para pelaut Cina juga telah berlayar ke Papua selain dengan tujuan mencari burung-burung yang berbulu indah seperti Cendrawasih, Nuri, Kakaktua, juga berdagang hasil kerajinan mereka, berupa piring-piring, mangkuk dan guci porselin. Hubungan erat antara penduduk Papua dengan pedagang Cina, dapat diketahui setelah ditemukan di dalam catatan harian seorang pengarang Cina bernama Chau Yu Kua.³⁵ Di dalam catatan tersebut tertulis daerah asal burung berwarna indah yang mereka peroleh itu yakni sebuah pulau ayang bernama Tung-ki, sebutan pulau Papua bagi rakyat Cina saat itu. Nama Tung-ki adalah sebuah nama yang dapat

³⁴ Idris Yusuf, *Lahirnya Nama Irian Jaya.....*, hlm. 21-23.

³⁵ Rouffaer, G.P.R. & J.W.Y. Ijzerman, *De Erste Scippvaart der Nederlanders naar Oost Indie onder Conelis de Houtman, 1995-1597.*, (1925), hlm. 410; sebagaimana yang dikutip H.W. Bachtiar, "Sejarah Irian Jaya" dalam Koentjaraningrat (*et.al*), *Irian Jaya Membangun*,hlm.44.; Catatan Chau Yu Kua juga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Hirth, F., & W.W. Rockhil, *Chau Yu Kua: His Works on the Chinese and Arab Trade in the Twelfth and Thirteenth Centuries, Entitled Chu-fan-chi*, St. Petersburg: Imperial Academy of Sciences, 1911.

membuktikan bahwa telah lama terjalin hubungan dagang antara Cina dan penduduk Papua.

3. Hubungan dengan Kerajaan Majapahit

Semua kerajaan di Nusantara memiliki bukti yang jelas mengenai hubungan dengan Papua kecuali kerajaan Tidore yang secara geografis lebih dekat dengan bagian barat pulau Papua. Sebuah bukti yang lemah baru dapat diketahui dalam pertengahan abad XX, yaitu hubungan antara Papua dengan kerajaan Majapahit. Menurut Moh. Yamin, Papua dapat dianggap sebagai bagian dari kerajaan Majapahit di bawah Maha Patih Gajah Mada (1364) sebagai pemimpin bijak dan tangguh³⁶

Majapahit merupakan kerajaan terbesar kedua setelah runtuhnya Kerajaan Sriwijaya di Sumatera, Majapahit pada saat itu dipimpin oleh Maha Patih Gajah Mada memperkuat kekuatannya baik melalui daratan maupun laut, sehingga majapahit memiliki pengaruh yang luar biasa di Nusantara. Ketika itulah Majapahit dalam masa pemerintahan yang gemilang Hayam Wuruk mengumpulkan berbagai kepala suku dari daerah-daerah di Nusantara untuk menyatakan tunduk dan patuh serta setia kepada Maha Raja serta Maha Patih Gajah Mada. Kepala dari daerah-daerah tersebut tidak termasuk orang Papua, namun demikian yang menyatakan tunduk adalah kepala suku dari Maluku. Pada saat itu pula dapat dimungkinkan bahwa ia menyampaikan bahwa wilayah Papua bagian barat terutama *Wwanin* (Onin di Fakfak) dan *Sran* (Kowiai di Kaimana) merupakan bagian dari wilayah Majapahit. Hal ini berarti bahwa penduduk Papua sendiri tidak langsung ikut menyatakan diri sebagai bagian dari kerajaan Majapahit.

Pada masa kejayaan Majapahit, Raja Hayam Wuruk dan Maha Patih Gajah Mada berkuasa, tercatat kekuasaannya sampai juga ke Papua. Dalam buku

³⁶ Moh Yamin, *Kedaulatan Indonesia Atas Irian Barat yaitu Uraian tentang Tuntutan Rakyat terhadap Wilayah Indonesia Bagian Barat* (Bukittinggi Jakarta-Medan: Nusantara, 1956), hlm 47-55.

Negarakertagama karya Empu Prapanca (1365) terdapat bait syair (yaitu syair ke XIV) yang berbunyi :

*” Muwah tang i Gurun sanusa mangaram ri Lombok Mirah
lawan tikang i Saksakadi niaklun kahaiyan kabeh
muwah tanah I Bantayan pramuka Bantayan len Luwuk
teken Udamakatrayadhi nikanang sanusapupul
I kang sakasanusanusa Makasar Butun Banggawai
Kuni Ggaliyao mwang i (ng) Salaya Sumba Solot Muar
muwah tigang i Wandan Ambwan athawa Maloko Wwanin
ri Sran in Timur ning angkea nusatutur “. ³⁷*

Wwanin atau *Ewwanin*, menurut para ahli bahasa Jawa Kuno adalah nama lain dari Onin, sedang *Sran* adalah nama lain dari daerah Kowiai (Kaimana), keduanya di pulau Papua. Sedangkan “Timur” mungkin nama lain untuk bagian Timur Papua. Tidaklah dapat disangkal bahwa dalam abad XIV beberapa daerah di Papua merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Majapahit. Sejarah mencatat bahwa dengan Sumpah Palapanya, Maha Patih Gajah Mada bertekad mempersatukan seluruh wilayah Nusantara ini di bawah kekuasaan Majapahit. Dengan tertulisnya nama-nama daerah di dalam kitab *Negarakertagama* itu menandakan bahwa semua daerah itu sudah termasuk dalam pengaruh kekuasaan negara-nusa Majapahit.³⁸

Dapat pula dipastikan bukan hanya pengaruh kekuasaan saja yang berlangsung di daerah-daerah bersangkutan, tentu juga pengaruh lainnya, semacam pengaruh sosio-kultural dan lain-lainnya. Sesudah kekuasaan Majapahit beralih kepada Kesultanan Islam Demak sebagai pengganti syah kerajaan besar itu, tidak mustahil pengaruhnya juga masih berlanjut ke daerah-daerah bekas kekuasaan Majapahit. Seperti diketahui, baik di bawah pimpinan Sultan Demak Raden Patah

³⁷ Kern, *Negarakertagama*, door Prapanca, 1280-caka 1365. A.D. dalam *Verspreide Geschriften H.Kern. VII*, hlm. 240-320, dalam Koentjaraningrat (*et.al.*), *Irian Jaya Membangun*,hlm.45.

³⁸ Moh Yamin, *Kedaulatan Indonesia Atas Irian Barat*, hlm. 47-55.

maupun Pangeran Adipati Unus dan Sultan Trenggono, kerajaan ini masih menampakkan dirinya sebagai kekuatan maritim yang tangguh.

4. Hubungan dengan Kerajaan Bacan, Ternate dan Tidore.

Sebelum Malaka jatuh ke tangan bangsa Portugis (1511), kerajaan Islam mempunyai pengaruh yang kuat dalam pelayaran dan perdagangan di Nusantara. Maluku sebagai pusat rempah-rempah sangat terkenal itu, dikunjungi oleh pedagang-pedagang Nusantara yang beragama Islam. Akibatnya misi penyebaran agama Islam merupakan misi terselubung ternyata sampai sebelum tahun 1500 di Maluku terdapat empat buah kerajaan Islam. Keempat kerajaan itu adalah Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Di antara kerajaan-kerajaan itu yang pengaruhnya luas adalah kerajaan Ternate dan Tidore, dan diantara kedua yang mempunyai pengaruh besar adalah kesultanan Tidore.

Sebuah catatan sejarah Kesultanan Tidore "Museum Memorial Kesultanan Tidore Sinyine Mallige". Pada tahun 1453 Sultan Tidore X (Sultan Ibnu Mansur) bersama Sangaji Patani Sahmardan dan Kapitan Waigeo bernama Kapitan Gurabesi memimpin ekspedisi ke daratan tanah besar. Ekspedisi yang terdiri dari satu armada kora-kora berangkat ke tanah besar beserta pulau-pulau melewati patani Gebe dan Waigeo. Ekspedisi ini berhasil menaklukkan beberapa wilayah di Papua bagian barat dan menjadikan kesultanan Tidore yang terdiri dari : (1) Wilayah Raja Ampat atau Korano Ngaruha meliputi wilayah-wilayah: Kolano Waigeo, Kolano Salawati, Kolano Umsowol atau Lilinta, Kolano Waigama; (2) Wilayah Papoua Gamsio (Papoua Sembilan negeri) meliputi : Sangadji Umka, Gimalah Usba, Sangaji Barei, Sangaji Boser, Gimalaha Kafdarum, Sangaji Wakeri, Ginalaha Warijo, Sangaji Mar

Gimala Marasay; dan, (3) Wilayah Mafor Soa Raha (atau Mafor Empat Soa) meliputi :Sangaji Rumberpon, Sangaji Rumansar, Sangaji Angaradifa, dan Sangaji Waropen³⁹

Wilayah-wilayah diatas, merupakan sebagian kecil wilayah yang dapat ditempuh oleh penduduk Kerajaan Tidore berada di bagian barat Papua dan sebagian kecil utara Papua. Wilayah Tanah Besar (Pulau Papua) beserta pulau-pulaunya oleh Kesultanan Tidore disebut dengan nama *Papo Ua* yang berarti tidak bergabung atau tidak bersatu, tidak bergandengan (*not integrated*). Maksudnya bahwa wilayah luas dan Tanah Besar (Pulau Papua) ini tidak termasuk ke dalam Kesultanan Tidore atau induk kesultanan Tidore. Karena luas wilayah penaklukannya kecil, maka Sultan Tidore hanya membagi tiga wilayah, yaitu Wilayah *Kolano Fat* atau Raja Ampat dari empat kerajaan masing-masing dikepalai oleh seorang raja di wilayah *Papo Ua Gamsio* (*Papo Ua Sembilan Negeri*). Terdiri dari Sembilan daerah yang masing-masing dikepalai oleh seorang Gimalaha atau seorang Sangaji. Wilayah Mafor Soa Raha atau Mafor Empat Soa yang terdiri dari empat Soa yang masing-masing dikepalai oleh seorang Sangaji.

Hubungan yang amat spesifik daerah Papua dengan daerah lainnya di Indonesia adalah dengan Maluku, khususnya Ternate dan Tidore. Di samping faktor geografis yang dekat serta faktor ekonomis (perdagangan), juga karena fakta bahwa pada masa itu Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore merupakan kesultanan yang kuat dan disegani serta amat besar pengaruhnya di kawasan Indonesia Timur. Di bawah kepemimpinan Sultan Khairun dan Sultan Baabullah, pengaruh Kesultanan Tidore pada sekitar tahun 1580 telah sampai ke daerah yang batasnya Mindano sebelah utara, daerah Sumbawa sebelah selatan, daerah Sulawesi sebelah barat dan pulau Papua sebelah timur.

³⁹ Burger, D.H, *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia Jilid II*, terjemahan Prajuda (Djakarta: Paradnya Paramita & J.B. Wolters, 1965), hlm. 39.

Kesultanan ini tetap efektif kekuasaannya di Papua sampai menjelang berlangsungnya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hubungan spesifik ini terus berlanjut sampai masa TRIKORA, saat seluruh Bangsa Indonesia berjuang mengusir penjajah Belanda dari bumi Papua ini. Kota Soasiu di Tidore menjadi Ibukota Propinsi Perjuangan Papua dan Pejabat Gubernur Papua saat itu adalah Sultan Zainal Abidin Syah dari Kesultanan Tidore. Beberapa catatan yang mengindikasikan bahwa Kesultanan Tidore maupun Ternate dan Kesultanan Islam lainnya di Maluku sangat erat hubungannya dengan daerah Papua.

Dalam bukunya *“The Preaching of Islam”*, Thomas W. Arnold mencatat bahwa sejak tahun 1521, Sultan Bacan yang bernama Zainal Abidin telah menguasai daerah Waigeo, Misool, Waigama, Salawati (Raja Ampat-Sorong) serta semenanjung Onin (daerah Fakfak), di Barat laut Papua. Melalui Pengaruh raja Bacan ini, maka pemuka masyarakat pulau-pulau tadi memeluk agama Islam pada abad XVI.⁴⁰

Demikian pula berdasarkan cerita rakyat dan informasi dari Tidore didapatkan keterangan bahwa sejak abad XV daerah Biak telah menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Tidore. Sultan mengangkat pejabat-pejabat di daerah bersangkutan dan diberi gelar jabatan, antara lain: Kapitan, Sangaji, Korano, Dimara, Mayor dan sebagainya. Gelar jabatan tersebut sekarang menjadi nama keluarga (fam) di daerah tersebut. Salah seorang tokoh dari Biak bernama Gurabesi diangkat sebagai pejabat panglima di Pusat Kesultanan, bahkan menjadi menantu Sultan. Tokoh inilah yang kemudian melahirkan penguasa-penguasa Kerajaan di Kepulauan Raja Empat.

⁴⁰PJB. Robide van der Aa, *Reizen near Nederlandsch Nieuw-Guinea, met Geischied en Aardrijkskundige Toelichtingen*, The Hague, 1879, hlm. 350-3. sebagaimana dikutip dalam Thomas W. Arnold, *The Preaching of Islam : A History of The Propagation of the Muslim Faith*, New Delhi : Low Price Publications, 1995, hlm. 402- 4.

Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Papua dalam laporannya yang berjudul: “Departemen Agama dalam Kata dan Angka 1985”, mengutip pernyataan W.C. Klein dalam “Nieuw Guinea“ yang menyebutkan bahwa pada tahun 1596 pemimpin-pemimpin Papua mengunjungi Kerajaan Bacan, dan dari kunjungan tersebut terbentuklah Kerajaan-Kerajaan Islam. Kekuasaan Kesultanan Tidore atas Papua juga diakui syah oleh pihak Belanda. Dimana armada Kesultanan Tidore sering melakukan patroli ke daerah Papua. Berdasarkan informasi yang dapat dipercaya, sejumlah informasi dapat dicatat antara lain:

1. Mulai abad XV para pedagang Cina bekerja di Teluk Cenderawasih dan Teluk Wandamen. Pada waktu yang sama, Sultan Tidore mengirim orang-orangnya untuk menagih pajak.
2. Kekuasaan Kesultanan Tidore dan Kesultanan Ternate atas Papua diakui pula oleh Penguasa Inggris yang pada tahun 1814 s/d 1818 menjajah dan menguasai seluruh kepulauan Indonesia.
3. Pada tahun 1849 Pangeran Amir sebagai Wakil Sultan Tidore menyertai suatu kesatuan ekspedisi Belanda untuk menempatkan tanda batas milik Belanda di daerah Doreri, pulau Ron, dan pulau Ansus di Selatan Yapen.
4. Pada tahun 1880 Pangeran Ali sebagai Wakil Sultan Tidore pergi mengunjungi daerah pantai selatan Papua. Mula-mula ia mengunjungi Tanjung Sele, ujung terbarat Pulau Papua, kemudian ke Ati-ati, Kowiai, Kapiai dan juga daerah Merkusoord, bekas Benteng de Bus.
5. Tahun 1858 Pangeran Amir mengunjungi Humbolt-Bay (Teluk Yos Sudarso) untuk berdagang. Tetapi karena berselisih paham dengan penduduk setempat maka beliau kembali ke Tidore. Pengaruh Sultan Tidore telah tersebar luas di Manokwari, Teluk Cenderawasih dan daerah sepanjang pesisir Utara.
6. Di daerah Fakfak terdapat bentuk kekuasaan yang disebut “Raja-raja“ atau “Petuanan”, yang mendapat pengakuan dari Sultan Tidore. Sampai sekarang kekuasaan “para Raja” di Fakfak masih berjalan, dan merupakan kekuasaan adat

yang efektif, dipelihara dan dihormati secara turun temurun. Sebagai bukti bahwa Sultan Tidore mengangkat dan mengakui kekuasaan para penguasa Petuanan tersebut misalnya ditemukannya sebuah surat pengangkatan seorang Kepala wilayah dengan jabatan “Kapitan“ di daerah Ugar, distrik Sekar, bertanggal 5 Nopember 1929.

Sebelum Tidore menguasai wilayah-wilayah tersebut di atas, kerajaan Waigama dan Misool menjadi bagian kekuasaan kesultanan Bacan yang dipimpin oleh adik Sultan Bacan yang bernama Kaicil Jelman merupakan penguasa Islam pertama di Papua. Sedangkan wilayah lainnya diperebutkan oleh Kerajaan Ternate dan Tidore melalui suatu peperangan, akhirnya Ternate menguasai Halmahera bagian barat dan Salawati, sedangkan Tidore menguasai Seram bagian timur dan sebagian Papua bagian barat. Daerah-daerah seperti Waigama dan Misool yang dikuasai oleh kerajaan Bacan. Pada abad XVII Tidore berhasil mengalahkan Bacan dan kedua daerah tersebut dikuasai oleh Kerajaan Tidore. Dengan demikian, maka Tidore secara utuh menguasai sebagian kecil di bagian barat Papua. Sehingga tidak mengherankan ketika awal kedatangan bangsa penjajah, Kesultanan Tidore menjadi pengaruh besar dalam berbagai perundingan terutama mengenai Papua.

Semula kekuasaan Tidore hanya sampai di sekitar Kepulauan Raja Ampat tetapi berhasil meluas sampai ke arah timur dari Raja Ampat. Hal ini dimulai ketika Armada Hongi yang dikerahkan dari Tidore untuk memungut pajak dari penduduk pantai utara Papua. Dengan ini dapat diduga bahwa pada zaman sebelumnya mempunyai hubungan yang erat antara orang Maluku dengan orang Biak. Menurut F.C Kamma bahwa apabila seorang Biak datang membayar upeti, maka mereka menghadiahi sebuah gelar. Gelar yang dapat dihubungkan dengan gelar Kerajaan Tidore, seperti Raja atau Sangaji yang disebut (Kepala Distrik), Dimara (Gimalaha berarti Kepala kampung) dan Korano. Gelar ini ada hubungannya dengan pembagian daerah Biak menjadi distrik-distrik oleh Tidore. Di Tidore, sebuah ibukota terdiri dari 9 atau 4 kampung. Itulah sebabnya barangkali daerah Biak-Numfor juga dibagi

menjadi 9 Distrik 4 kampung. Hal ini sama dengan keempat Keret di Numfor yang utama.⁴¹

Dengan adanya hubungan tersebut, maka peradaban hidup dalam unsur budaya jasmani orang Biak. Setidak-tidaknya kehidupan masyarakat di Biak dipengaruhi oleh pola hidup orang Maluku, Halmahera, dan Raja Ampat misalnya Ubu, pandai Besi, Perahu Lesung Berpapan. Parahu Lesung ini berguna untuk pertahanan semangat-semang perisai tari, benda-benda keramat dan tembaga. Sedangkan daratan pulau Papua kurang dipengaruhi oleh Kerajaan Tidore. Hal ini mungkin disebabkan karena wilayahnya yang begitu luas atau alat-alat perlengkapan untuk penguasaannya belum kuat, sehingga ia menyebut pulau besar itu dengan memberi nama *Papo Ua* yang artinya tidak bersatu (*not integrated*) dengan kerajaannya. Namun dalam perkembangannya, kerajaan Tidore pernah memegang peranan yang penting dalam membuat perjanjian dengan bangsa Barat. Tidore mengklaim Papua sebagai bagian dari kerajaannya.

Karena begitu keras dan kuatnya kerajaan-kerajaan di pesisir pantai maupun suku-suku yang mendiami daratan pulau besar, maka praktis tak ada satupun kekuatan asing menduduki pulau Papua dan secara teknis administratif menguasainya. Kesultanan Tidore pun tidak pernah berkuasa secara defenitif. Ia hanya secara periodik melayani pesisir pantai tanah ini untuk mengayau dan mengumpulkan upeti. Tidore dalam banyak hal lebih banyak berhutang budi kepada penduduk Papua. Sebab ia biasanya meminta bantuan rakyat Papua untuk memerangi musuh-musuhnya (musuh-musuh Tidore, seperti Kesultanan Ternate, Jailolo dan Bacan, V.O.C maupun portugis) satu-satunya kekuasaan yang pernah secara defenitif memerintah dan membangun Papua menuju civilisasi modern adalah pemerintah

⁴¹ Kamma, F.C, *Koreri Mesianic Movement in the Biak Numfor Culture Area* (The Hague: martinus Nijhof, 1975), hlm. 8.

Belanda yang memulainya di Manokwari pada tanggal 9 November 1898, dan Fakfak pada tanggal 16 November 1898.

5. Hubungan dengan Spanyol dan Portugal

Pada awalnya kedatangan Spanyol dan Portugis ke pulau Papua untuk tujuan perdagangan. Tahun 1511 pelaut Portugis bernama Antonio d'Abreu mengunjungi pulau Papua dan ia memberi nama *Ilha de Papoia*. Tahun 1517 Fransisco Rodriguez mengunjungi pulau Papua. Pada tahun 1521-1522 dilakukan pelayaran Magelhaens mengelilingi dunia dengan kapal, "Victoria" yang dipimpin oleh Juan Sebastian del Cano. Pada tahun 1521 kapal tersebut pernah singgah di Tidore. Seorang penulis Italia bernama Antonio Pigafetta ikut dalam pelayaran itu. Dari catatan harian Antonio Pigafetta dalam laporan tertulisnya ia menyebut-nyebut nama Papua. Nama Papua diperolehnya ketika kapal Victoria singgah di Tidore dan menamainya "Pulau Emas".⁴²

Pada tahun 1522, para pedagang portugis mulai membuka perdagangan dan menetap di Ambon dan Ternate. Tahun 1526 gubernur Portugal pertama di Maluku bernama Jorge de Menesez mengunjungi pulau Waigeo (Raja Ampat). Pada tahun 1529, Alvaro de Saavedra diperintahkan oleh Herman Cortez (Spanyol) dari Mexico ke Maluku untuk menyelesaikan sengketa antara Portugal dan Tidore dan sekaligus mencari dan menaklukkan pulau yang disebut oleh Pigafetta *Isla de Oro* (pulau Papua). Secara kebetulan ketika dalam perjalanannya ke Meksiko pernah singgah di salah satu tempat pantai utara (Biak).⁴³

Tahun 1537 Herman Cortez dari Meksiko mengirim lagi Herman Griyalva untuk mencari dana menemukan pulau emas (*Islandia de Oro*). Sebab Alvrado de

⁴² Lihat H.W Bachtiar, "Sejarah Irian Jaya", ...hlm. 60.

⁴³ West Pac, *Kronologi Sejarah, Seri Pemahaman Papua Barat, vol. 1*, Jakarta: West Papua Community, 1999, hlm. 4.

Saavreda yang pertama telah gagal. Pada tanggal 20 Juni 1545, seorang Spanyol bernama Kapten Ynigo Ortiz de Retez dengan kapanya bernama San Juan berlayar dari Tidore, menuju Panama. Ia sempat mencapai sekitar Sarmi di muara sungai Amberno (Mamberamo). Ia memberikan nama pulau ini Nueva Guinea dan mengklaimnya sebagai milik raja Spanyol. Tahun 1606 Kapten Torres (Spanyol) dari arah timur pulau Papua menelusuri pantai selatan Papua Barat dan mengklaim sejumlah tempat sebagai milik Raja Spanyol. Perjalanan inilah yang pertama kali membuktikan bahwa pulau Papua yang sebelumnya dikira bersatu dengan Australia ternyata terpisah dari Australia.⁴⁴

6. Hubungan dengan Belanda

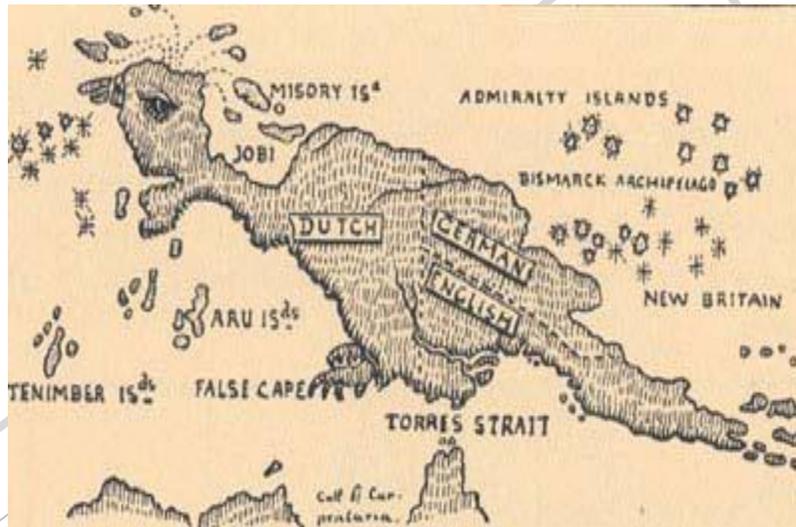
Tahun 1606 Willem Janz, seorang navigator, menelusuri pantai barat dan selatan Papua barat dalam rangka mencari emas. Ia adalah orang luar pertama yang menemukan sungai Digul di pantai selatan. Tanggal 24 Juli Le Maire dan Schoten mulai menjelajahi Teluk Geelvink (sekarang Teluk Cenderawasih) dan singgah di Pulau Biak, kepulauan Biak Numfor. Tahun 1623 bulan Februari, Janz Cartenz berlayar dari Maluku dan menelusuri pantai selatan Papua Barat. Ketika itu sampai pada titik 4 derajat LS, dengan teropong melihat salju di puncak gunung, setelah itu ia menamai gunung salju itu Cartenz yang sekarang dikenal dengan nama Puncak Jaya.⁴⁵

Tahun 1660, dilakukan perjanjian antara V.O.C dengan Ternate, Tidore dan Bacan tentang batas-batas wilayah kekuasaan atas Papua Barat dan pengamanan wilayah perairannya dari gangguan dan pengayuan orang Papua. Perjajnjian tersebut diperbaharui tahun 1667 dimana VOC mempertegas kedaulatan Tidore atas wilayah

⁴⁴ J.A.F. Sollewijn Gelpke, *On the Oroigin of the Name of Papua*, dalam *Bijdragen* (No. 149, pp. 318-332.)

⁴⁵ Lihat: West Pac, *Kronologi Sejarah, Seri Pemahaman Papua Barat Vol.I*, (Jakarta: West Papua Comumunity, 1999), hlm. 11-12.

kepulauan sekitar Papua Barat.⁴⁶ Tahun 1678 untuk pertama kali bendera Belanda ditancapkan di beberapa tempat di pesisir pantai bagian barat Papua. Tahun 1705 pelaut Belanda Geelvink dan Kraanvogel melayari dan memetakan seluruh Teluk Cenderawasih. Setelah itu teluk itu dinamakan Geelvink Bay.⁴⁷



Collingridge's impression of the "bird" of New Guinea⁴⁸

Tanggal 24 Agustus 1828 pertama kali pemerintah Belanda mendirikan benteng Fort du Bus di teluk Triton, Kaimana (Fakfak) sebagai symbol kekauasaannya atas Pulau papua atau Nueva Gunea. Peresmian itu bertepatan dengan hari ulang tahun Raja Belanda Willem I. Benteng itu didirikan oleh Komisariss A.J. Van Delden atas nama gubernur Maluku.

⁴⁶ Lihat: West Pac, *Kronologi Sejarah, Seri Pemahaman Papua Barat...*, hlm. 13-14.

⁴⁷ Don A.L. Flassy, *Vademecum Perjuangan & Rendez-Vous dengan Tiuntutan Papua Volken* (Sebuah deskripsi psikohosomatis), Port Numbay (Jayapura), 1989, hlm. 41.

⁴⁸ Lihat <http://www.papuaweb.org/gb/peta/sejarah/collingridge/index.html>

Tanggal 30 Juli 1848, gubernur Hindia Belanda J.J. Rochussen mengeluarkan suatu surat keputusan rahasia yang menetapkan batas-batas kekuasaan Tidore atas Papua Barat. Ia menetapkan batas timur 140.47 BT pantai utara di semenanjung Bonpland (teluk Humboldt) sampai ke barat dan titik 141 BT di pantai selatan sebagaimana diatur dalam proklamasi 24 Agustus 1828. Dengan keputusan rahasia itu, segala milik (kekuasaan) Tidore dihapuskan dan menjadi milik Belanda. Kebijakan ini diambil Belanda secara rahasia karena adanya sengketa antara Inggris dan Belanda atas Pulau Papua.

Pada tahun 1849-1850 pemerintah Belanda segera mematok seluruh wilayah Papua barat (kemudian disebut Nieuw Guinea) dari pantai utara sampai selatan sebagai wilayah kekuasaannya.

7. Hubungan dengan Jepang

Sebelum Perang Dunia terjadi, akibat beratnya pembangunan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Belanda atas daerah Irian yang terkenal besar dan luas, sehingga Belanda menghadapi kesulitan-kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan baik di bidang pembiayaan dan tenaga kerja, maka pemerintah Belanda mengizinkan kepada para pengusaha Jepang untuk mendirikan beberapa perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja besar. Pada tahun 1938 perusahaan-perusahaan Jepang di Papua memiliki sebanyak 1.100 tenaga kerja.

Pada tanggal 19 April 1942 munculah kapal perang Jepang mendarat di teluk Humboldt Jayapura. Mereka menyerang Belanda supaya seluruh Irian dikuasai Jepang. Penyerangan tersebut berlanjut ke wilayah Papua bagian Barat, seperti Biak, Serui, Manokwari, Sorong, Nabire, dengan mudah seluruh Papua dikuasai oleh tentara Jepang. Orang Belanda menyerah kalah kepada Jepang dan langsung diangkut ke kamp-kamp tahanan.

Setelah itu, Papua dikuasai oleh pemerintah Jepang minus Merauke yang masih di tangan Belanda. Pada awalnya penduduk Jepang mulai melaksanakan

kebijakan Romusha terutama dipadatkan pada pembuatan sarana prasarana infrastruktur demi menyiapkan pangkalan militer Jepang untuk menghadapi sekutu. Berbagai upaya dilakukan terutama pada umumnya dengan cara kekerasan fisik, untuk menutupi kekurangan tenaga kerja, tentara Jepang mendatangkan orang-orang yang berasal dari Jawa dan Sulawesi.

Papua dipimpin oleh seorang Minseibu Militer Jepang yang pusatnya di Ujung Pandang dan Maluku dari armada selatan kedua atau pangkalan angkatan laut sembilan. Meskipun demikian pemerintahan Jepang sama sekali tidak peduli dengan pembenahan sistem administrasi pemerintahannya, mereka lebih memfokuskan perhatian pada peningkatan pertahanan militer untuk memenangkan perang melawan Sekutu.⁴⁹

Sistem kerja paksa atau Romusha dari Jepang terhadap rakyat ternyata tidak dapat menguntungkan bagi rakyat. Banyak penduduk Irian yang meninggal akibat tindakan Jepang yang sangat tidak manusiawi. Sektor kehidupan mengalami kehancuran termasuk kesejahteraan rakyat tidak diperhatikan, sehingga tidak sedikit rakyat yang mengalami kelaparan. Banyak juga yang dipenjarakan termasuk para pendeta Zending dan Misi Katholik yang dipuja dan dihargai oleh penduduk setempat.

Untuk mengungkapkan rasa kekecewaan rakyat pribumi, maka pada saat itu, di berbagai daerah di Papua, rakyat melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang. Perlawanan yang terjadi di berbagai daerah Irian dipimpin oleh tokoh-tokoh perjuangan rakyat, seperti di Serui dipimpin oleh Silas Papare, sedangkan di Jayapura di pimpin oleh Simson dan di Biak di pimpin oleh Angganita Manufaul⁵⁰.

⁴⁹M.C Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,1995), hlm. 297 - 323.

⁵⁰Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintisan Barat, (Jakarta: Yayasan BKKBPB, 1986), hlm. 12.

Jepang resmi keluar dari Papua (Nieuw Guinea) pada tanggal 20 juni 1944, yang dikuasai oleh tentara sekutu di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArtur dan kemudian Pulau Papua diserahkan ke Belanda yang disebut NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*). Sebagai gubernurnya jenderal H.J. Van Mook, yang beribukota di Hollandia (Jayapura).⁵¹



⁵¹Lihat: West Pac, *Kronologi Sejarah, Seri Pemahaman Papua Barat Vol.I*, (Jakarta: West Papua Community, 1999), hlm. 35-36; Lihat pula: A. Mampioper, *Jayapura Ketika Perang Pasifik*, (Jayapura: Labor, 1972), hlm. 29.

BAB III

ISLAMISASI AWAL DI TANAH PAPUA

Sejarah masuknya agama Islam di pulau Papua dan proses penyebaran awal di tengah-tengah masyarakat Papua memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Artinya, hingga saat ini belum terdapat kesepakatan di kalangan umat Islam di pulau Papua menyangkut kapan waktu pertama kali Islam hadir di pulau Papua, darimana Islam datang, maupun bagaimana proses penyebarannya. Buku “Sejarah Umat Islam Indonesia” yang disusun oleh tim ahli yang diketuai oleh Taufik Abdullah, ternyata sama sekali tidak menyebutkan nama daerah Irian Jaya (Papua)¹. Hal ini menandakan bahwa kajian sejarah Islam di Papua masih diluar jangkauan penulisan dan penelitian para ahli sejarah. Untuk itu, Bab III dari disertasi ini akan membahas kedatangan Islam, pola penyebaran, bukti-bukti peninggalan, kerajaan-kerajaan Islam di pulau Papua, praktek keagamaan dan kehidupan sosial yang berkembang di kalangan penduduk asli Papua yang beragama Islam.

A. Kedatangan dan Penerimaan Islam

Sejauh menyangkut kedatangan Islam di Nusantara, terdapat diskusi dan perdebatan panjang di antara para ahli mengenai tiga masalah pokok: tempat asal kedatangan Islam, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Berbagai teori dan pembahasan yang berusaha menjawab ketiga masalah pokok ini jelas belum tuntas,

¹ Buku ini disusun dan diterbitkan untuk memenuhi salah satu Keputusan Rakernas MUI Tahun 1986, yang berjudul “Amanat Sejarah Umat Islam Indonesia”. Sebuah tim penyusun dibentuk dan diketuai oleh Taufik Abdullah. Proses buku ini selesai pada tahun 1991. Buku ini dimaksudkan untuk merekonstruksi sejarah umat Islam dalam rangka penyusunan kembali sejarah bangsa Indonesia. Lihat: Taufik Abdullah & Mohammad Hisyam, *Sejarah Umat Islam Indonesia*, Jakarta: MUI & Yayasan Pustaka Umat, 2003, cet. II, hlm. V.

tidak hanya karena kurangnya data yang dapat mendukung suatu teori tertentu, tetapi juga karena sifat sepihak dari berbagai teori yang ada²

Tanah Papua secara geografis terletak pada daerah pinggiran (*periferal*) Islam di Nusantara, sehingga Islam di Papua luput dari kajian para sejarawan lokal maupun asing. Kesan yang timbul penduduk Papua identik dengan pemeluk Kristen, sementara agama Islam bukan sesuatu yang asing bagi orang Papua karena mereka sudah berinteraksi dengan para pedagang Muslim dan Raja-raja Muslim di Maluku sejak abad XV atau abad sebelumnya. Sementara agama Kristen dan Katholik baru disyiarkan ke Tanah Papua pada pertengahan abad XIX.

Kedatangan Islam di Tanah Papua, juga masih terjadi silang pendapat di antara para pemerhati, peneliti maupun para keturunan raja-raja di Raja Ampat-Sorong, Fakfak, Kaimana, dan Teluk Bintuni-Manokwari. Diantara mereka saling

² Paling tidak ada 5 Teori mengenai Islamisasi di Nusantara: (1) Teori India: Islam berasal dari Gujarat dan Malabar. Berdasarkan argumen adanya kesamaan penganut mazhab Syafi'i dan adanya kemiripan batu nisan makam Mawlana Malik Ibrahim (w. 822 H./1419 M.) di Gresik, Jawa Timur dengan batu nisan di Cambay, Gujarat. Teori India ini dikemukakan oleh Pijnappel, C. Snouck Hurgronje, Moquette, R.A. Kern, R.O. Winstedt, G.H. Bousquet, B.H.M. Vlekke, J. Gonda, B.J.O. Schrieke, D.G.E. Hall, Morisson, Thomas W. Arnold, W.F. Stutterheim, J.C. van Leur, dan Clifford Geertz.; (2) Teori Benggali (Bangladesh): Islam berasal dari Bengal karena batu nisan di makam Siti Fatimah binti Maimun (475 H./1082 M.) terdapat di Leran, Gresik dan batu nisan di makam Sultan Malik al-Shalih (w.698 H./1297 M.) di Pasai yang sama dengan batu nisan di Bengal (kini Bangladesh). Teori Bengal ini dikemukakan oleh S.Fatimi, bersandar kepada pendapat Marcopolo dan Tome Pires. ; (3) Teori Arab: Islam datang langsung dari Arabia pada abad I H/7 M., tidak dari India pada abad XII atau XIII. Berdasarkan kesamaan mazhab Syafi'i dengan penduduk Mekkah dan seluruh literatur keagamaan Islam sebelum abad XVII tidak mencatat satu pengarang Muslim India, juga sumber-sumber local Melayu. Teori ini dipegang oleh Crawford, Niemann, de Holender, Keyzer, Veth, Naguib Al-Attas, Hamka Uka Tjandrasmita dan Azyumardi Azra.; (4) Teori Persia: Islam datang dari Persia (Iran) berdasarkan pengaruh sufisme Persia terhadap ajaran mistik Islam di Nusantara. Ajaran *manunggaling kawula gusti* Syaikh Siti Jenar merupakan pengaruh dari ajaran *Wahdatul Wujud* al-Hallaj dari Persia. Juga penggunaan bahasa Persia dalam sistem mengeja huruf Arab dan peringatan Asyura atau 10 Muharram yang diperingati kaum Syi'ah. Teori Persia ini dipegang oleh P.A. Hoesein Djajadiningrat, Suwedi Montana, dan A. Mansur Suryanegara.; (5) Teori Cina: Islam datang dari Cina berdasarkan argumen banyaknya pengaruh unsur kebudayaan Cina dalam beberapa unsur kebudayaan Islam di Indonesia dan tokoh-tokoh penyebar Islam keturunan Cina di Jawa seperti Sunan Ampel (Raden Rahmat/Bong Swi Hoo) dan Raja Demak (Raden Fatah/Jin Bun). Teori ini dikemukakan oleh H.J. de Graaf, Denys Lombard dan Slamet Mulyana. Lihat: Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*, (Bandung: Mizan, 2004), hlm.2-19; lihat pula: Uka Tjandrasmita, *Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-Kota Muslim di Indonesia dari Abad XIII sampai XVIII Masehi* (Kudus: Menara Kudus, 2000), hlm. 15-21. dan lihat pula: Nor Huda, *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm.31-39.

mengklaim bahwa Islam lebih awal datang ke daerahnya hanya berdasarkan tradisi lisan dan tanpa didukung dengan bukti-bukti tertulis maupun bukti-bukti arkeologis, karena di Tanah Papua ketika itu dihadapkan pada masa prasejarah. Menurut Azra, meskipun historiografi lokal ini sering bercampur dengan mitos dan legenda, tetapi ada baiknya didengarkan apa yang mereka ceritakan³

Penelusuran sejarah awal Islamisasi di Tanah Papua, setidaknya dapat digali dengan melihat beberapa versi mengenai kedatangan Islam di beberapa tempat di Tanah Papua. Versi-versi mengenai Islamisasi di Tanah Papua, setidaknya terdapat pandangan 7 (tujuh) versi, sebagaimana penulis mengklasifikasikannya sebagai berikut:

1. Versi Papua

Teori ini merupakan pandangan adat dan legenda yang melekat di sebagian rakyat asli Papua, khususnya yang berdiam di wilayah Fakfak, Kaimana, Manokwari dan Raja Ampat (Sorong). Pada umumnya, teori ini memandang Islam bukanlah berasal dari luar Papua dan bukan dibawa dan disebar oleh kerajaan Tidore atau pedagang Muslim dan da'i dari Arab, Sumatera, Jawa, maupun Sulawesi. Namun, Islam berasal dari Papua sendiri sejak pulau Papua diciptakan oleh Allah SWT. Mereka juga mengatakan bahwa agama Islam telah terdapat di Papua bersamaan dengan adanya pulau Papua sendiri. Tidak hanya Islam, Kristen juga telah terdapat di

³ Azyumadi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah.....* hlm. 9. Dalam beberapa kasus, sumber-sumber lokal menekankan pentingnya mimpi (Arab: *ru'yah*) dalam proses konversi kepada Islam. Untuk pembahasan tentang mimpi dalam masyarakat Muslim, sebagaimana yang dikuti Azra dalam G.E.von Grunebaum & Roger Caillos, *The Dream and Human Societies*, Los Angeles & Berkeley; University of California Pres, 1966. Terdapat pembahasan menarik tentang pentingnya dongeng dan mitos histories sebagai sumber informasi tentang sejarah wilayah tertentu. Lihat: Jan Vansina, *Oral Tradition: A Study nin Historical Methodology*, Chicago: Aldine, 1965, khususnya hlm. 154-7. Ia menegaskan, seluruh dongeng dan mitos merupakan tradisi resmi masyarakat-masyarakat tertentu untuk merekam sejarah mereka. Cerita-cerita ini disampaikan oleh para spesialis pada kesempatan resmi dalam mentransmisikannya di dalam kelompok sosial tertentu. Menurut dia, setiap dongeng dan mitos mempunyai nilai sendiri. Dongeng historis berguna bagi sumber informasi tentang sejarah militer, politik kelembagaan, dan hukum. Sedangkan dongeng didaktik memberikan informasi tentang nilai-nilai kultural, sementara mitos didaktik merupakan sumber yang amat berguna untuk sejarah agama.

Papua sebelum agama Kristen disebarkan ke Papua.⁴ Mereka meyakini kisah bahwa dahulu tempat turunnya Nabi Adam dan Ibu Hawa berada di suatu tempat di daratan Papua dengan berbusana seperti mereka masih berdiam di surga.⁵

Mereka juga beranggapan bahwa bekas-bekas jejak sejarah nabi Nuh yang terdampar di pedalaman dekat Nambi-Manokwari dan mereka percaya bahwa Gunung Wondivoi adalah tempat pemberhentian bahtera Nuh. Keyakinan lain nabi Ibrahim mempersembahkan anaknya Ismail/Ishak di pedalaman Dusner. Kepercayaan lain mengatakan bahwa Taman Eden yang asli terletak di Obo dan Bukit Zaitun berada di Puncak Rinsawan. Pandangan seperti ini dipengaruhi oleh pemikiran mistis dan agama suku yang telah merakyat dan melegenda di masyarakat asli, khususnya di wilayah Fakfak, Kaimana, Teluk Bintuni, maupun di Wondama.⁶ Pandangan ini tercermin dalam prosesi ibadah, dimana orang naik haji bukan di Mekkah, namun mereka berangkat ke Gunung Nabi yang terletak di belakang Teluk Arguni (Kaimana) dan Teluk Wondama (Manokwari).⁷

2. Versi Aceh

Menurut sejarah lisan dari daerah Kokas, Fakfak bahwa Syekh Abdurrauf yang merupakan putra ke 27 dari waliyullah syekh Abdul Qadir Jaelani dari kerajaan Samudera Pasai mengutus Tuan Syekh Iskandar Syah untuk melakukan perjalanan dakwah ke Nuu War (Papua) sekitar abad XIII tepatnya 17 Juli 1224, datang Syekh Iskandar Syah di Mesia atau Mes, kini distrik Kokas kabupaten Fakfak. Orang pertama yang diajarkan Iskandar Syah bernama Kriskris. Saat itu Syekh Iskandar syah mengatakan; “jika kamu mau maju, mau aman, mau berkembang, maka kamu harus mengenal *Alif Lam Ha* (maksudnya Allah) dan *Mim Ha Mim Dal* (maksudnya

⁴ Tim Perumus Seminar, *Sejarah Masuknya Islam dan Perkembangan di Irian Jaya*, Fakfak: 23 Juni 1997.

⁵ Kasibi Suwiryadi, *Sejarah Da'wah Islam Islam di Irian Jaya*, Makalah Disampaikan Dalam Sarasehan Sejarah Islam di Irian Jaya di Merauke Juni 2000.

⁶ Kelompok Peneliti Etnografi Irian Jaya, *Etnografi Irian Jaya Panduan Sosial Budaya*, Jilid I, Jayapura: t.p., 1993. hlm. 149.

⁷ Tim Perumus Seminar, *Sejarah Masuknya Islam.....Fakfak: 23 Juni 1997.*

Muhammad)”. Singkat cerita Kriskris mengucapkan dua kalimat syahadat. Tiga bulan kemudian, Kriskris diangkat menjadi imam pertama dan beliau sudah menjadi Raja pertama di Patipi, Fakfak.⁸

Syekh Iskandar Syah ketika itu datang membawa beberapa kitab yakni mushaf al-Qur’an tulisan tangan, kitab hadits, kitab ilmu tauhid dan kitab kumpulan doa. Sedangkan tiga kitab berikutnya dimasukkan ke dalam buluh bambu dan ditulis di atas daun koba-koba, pohon asli Papua yang kini mulai punah. Ada pula manuskrip yang ditulis di atas pelepah kayu, mirip manuskrip daun lontara (Fakfak: daun pokpok). Beberapa tahun kemudian bencana tsunami menenggelamkan Mes, sehingga menyebabkan sebahagian penduduk dan seluruh kerajaan Mes habis musnah, termasuk masjid dan isinya tenggelam ke dasar laut, kecuali mushaf al-Qur’an dan sejumlah kitab fiqih-tauhid yang diselamatkan Syekh Iskandar Syah dan disimpan di Aceh oleh keturunannya yang bernama Burhanuddin. Manuskrip tersebut baru dikembalikan tanggal 17 Juli 2004 di Jakarta kepada keturunan anak Raja Kriskris yang bernama Fadzlan Garamatan, sebelum musibah tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004.⁹

Menurut cerita rakyat, setelah bencana mushaf al-Qur’an diselamatkan Syekh Iskandar Syah ke Aceh, konon kitab ini sempat singgah di Maluku, tepatnya di kampung Sinisore. Menurut kepercayaan masyarakat kampung Sinisore, Islam masuk bukan dari Arab tapi dari Papua. Bahkan konon kitab ini juga sampai ke Kalimantan karena dianggap membawa berkah. Dari Aceh, Syekh Iskandar Syah kembali ke Mes tanpa membawa mushaf, kemudian dia wafat di Mes, makamnya berada di Pulau Kokorop, Batu Kudus. Konon ia sendiri yang menggali kuburnya, setelah itu wafat di tempat itu pula. Bahkan sebelum wafat beredar cerita di masyarakat setempat, ia mandi dan mengafani dirinya sendiri di dasar laut yang dalamnya mencapai 3 meter. Begitulah cara wafat pembawa al-Qur’an pertama di Papua, tepatnya di Fakfak

⁸ Wawancara dengan anak keturunan Raja Patipi-Fakfak, Fadzlan Garamatan, Jakarta: 10 Juli 2008; Lihat pula: *Majalah Sabili*, "Perjalanan Sebuah Mushaf 'Tua'", Jakarta: NO. 01 TH. XVI 24 JULI 2008/21 RAJAB 1429, hlm. 76-77.

⁹ *Majalah Sabili*, "Perjalanan Sebuah Mushaf.....", hlm. 77-78.

(distrik Kokas yang dulu bernama Mesia atau Mes.¹⁰ Sya'ban Garamatan mengatakan makam Syekh Iskandar Syah ada di dasar laut, sebagai simbolik, dibuatnya makam di darat. Inilah bukti otentik Islam masuk ke Fakfak. Selama ini banyak daerah lain mengaku-ngaku Islam masuk ke wilayahnya, tetapi tidak mempunyai bukti otentik.

Sumber lisan di atas, perlu dikritisi kembali mengenai angka tahun kedatangan Iskandar Syah dari Aceh ke Papua. Apakah 1224 Masehi (abad XVI) atau 1224 Hiriya? Sementara bukti peninggalan makam Raja Malik as-Shalih di Samudera Pasai (Aceh) berangka tahun 1297 M. Tentunya pada era tersebut dakwah Islam masih terkonsentrasi kepada masyarakat di Samudera Pasai, bagaimana mungkin mereka mau berdakwah ke Papua, sedangkan daerah-daerah yang dekat saja di Sumatera belum tersentuh dakwah Islam. Apabila karena motif dagang, tentu Iskandar Syah akan memilih daerah Maluku Utara sebagai tujuannya karena sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Sedangkan bukti-bukti manuskrip yang katanya berasal dari Aceh perlu diteliti angka tahun pembuatannya dengan pendekatan ilmu filologi.

Studi sejarah masuknya Islam di Fakfak yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak pada tahun 2006,¹¹ menyimpulkan bahwa Islam datang di Fakfak pada tanggal 8 Agustus 1360 M, yang ditandai oleh hadirnya mubaligh Abdul Ghafar asal Aceh di Fatagar Lama, kampung Rumbati¹² Fakfak. Penetapan tanggal awal masuknya Islam tersebut berdasarkan tradisi lisan yang disampaikan oleh Putra Bungsu Raja Rumbati XVI (Muhammad Sidik Bauw) dan Raja Rumbati XVII (H. Ismail Samali Bauw). Mubaligh Abdul Ghafar berdakwah selama 14 tahun (1360 – 1374 M) di Rumbati dan sekitarnya, kemudian ia wafat dan dimakamkan di belakang masjid kampung Rumbati pada tahun 1374 M.

¹⁰ *Majalah Sabili*, "Perjalanan Sebuah Mushaf.....", hlm. 77-78.

¹¹ Pemda Kab. Fakfak, *Sejarah Masuknya Islam di Fakfak* (Fakfak: Pemda Kabupaten Fakfak, 2006).

¹² Rumbati berasal dari bahasa Tidore, "Rum" adalah nama wilayah Istana Kesultanan Tidore pada era Sultan Ibnu Mansur (Sultan Papua I tahun 1443 M). kata "Bati" berarti patok atau batas.

Informasi lain mengatakan Raja Rumbati Ibrahim Bauw menyampaikan bahwa Abdul Ghafar dan teman-temannya mendarat di Fatagar Lama, yang sebelumnya mencari rempah-rempah di Ternate, Bacan (Maluku Utara), dan pulau Misool. Menurutny peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1502 M, yakni pada masa berkuasanya Raja Rumbati Mansmamor (Manimbo). Hingga saat ini makam Abdul Ghafar masih terdapat di samping masjid kampung Rumbati, Teluk Patipi Fakfak, seperti yang dikutip Ismail Bauw dalam tulisannya.¹³

Mubaligh Abdul Ghafar dan teman-temannya sering melakukan shalat dzuhur dan ashar di ruang terbuka, sehingga menarik perhatian masyarakat setempat. Penduduk heran melihat mulutnya komat kamit dan menghadap ke dinding dan mereka berkata: *iangge wagamanim waimbi ia oaka isafa som yama riri aroa rera toto wania fauar wai* (orang ini rupanya menyembah setan, sedang apa dia berdiri menghadap matahari turun dan berbicara sendiri).¹⁴ Kata-kata yang tercetak miring di atas berasal dari penduduk setempat yang menggunakan bahasa Onin (yang merupakan lingua franca pada masa itu) untuk menyatakan keheranan mereka atas apa yang dilakukan kedua mubaligh asal Aceh tersebut.

Setelah Abdul Ghafar dapat beradaptasi (termasuk mempelajari bahasa lokal), kemudian ia menjelaskan bahwa apa dilakukannya setiap hari adalah menyembah Allah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Penjelasan ini menyentuh dan menggugah hati penduduk setempat, dan mereka mulai membuka diri menerima Islam. Dari peristiwa ini tercatat sebagai awal masuknya Islam di Jazirah Onin, Kabupaten Fakfak.

Sumber-sumber lisan di atas, tentang Abdul Ghafar asal Aceh perlu ditinjau kembali keotentikannya. Kemungkinan Islam dibawa oleh Abdul Ghafar pada abad XVI, bersamaan dengan masa keemasan kesultanan Ternate dan Tidore sebagai bandar jalur sutera dan juga berhasil meluaskan kekuasaannya yang terbentang dari antara Sulawesi dan Papua.

¹³ Bauw, ” Pengaruh Hukum Islam,hlm. 33-34.

¹⁴ Pemda Kab. Fakfak, *Sejarah Masuknya Islam di Fakfak*,hlm. 24.

3. Versi Arab

Dalam catatan sejarah kerajaan Nusa Iha (sekarang Sirisori) di Ambon bahwa sekitar tahun 1212 M sampai dengan 1215 M terdapat 3 (tiga) orang mujahidin yang datang dari Irak, masing-masing adalah Syekh Abdul Aziz Assegaf Maulana Malik Ibrahim, Syekh Abdul Rahman Assegaf Maulana Saniki Yarimullah, (dua bersaudara) yang memasuki Asia Tenggara. Pada tahun 1215 mereka tiba di Nusa Iha dan mendirikan sebuah kerajaan Islam yang bernama Ama Iha I, berkedudukan di Louhatt Amalutu sekarang bernama Sirisori Islam di Ambon.¹⁵

Pada tahun 1230 M. Syekh Abdul Rahman Assegaf Maulana Saniki Yarimullah dengan Istrinya Nyai Mara Utah telah memasuki Jazirah Onin, Rumbati-Fakfak. Dan mendirikan kerajaan Islam yang bernama Woni Epapua, dari perkawinannya telah dianugerahi 10 orang anak. Maulana Saniki Yarimullah diberi gelar dengan nama Koning Papua (putra dari kayangan). Akibat perselisihan dalam keluarga, maka pada tahun 1363 lima orang dari mereka memutuskan untuk kembali ke Nusa Iha, sedangkan 5 lainnya menetap di Papua yang kemudian sebagai turunan dari Raja Ampat (kerajaan Misool), Raja Patiran, Poy Waru yang bermarga Patagras, serta Poy Sinna (Raja Kokas yang bermarga Patimura). Namun keturunan dari mereka belum dapat diketahui secara jelas.¹⁶

Menurut sejarah lisan Fakfak bahwa agama Islam mulai diperkenalkan di Tanah Papua, yaitu pertama kali di wilayah Jazirah Onin (Patimunin-Fakfak) oleh seorang sufi bernama Syarif Muaz al-Qathan dengan gelar Syekh Jubah Biru dari negeri Arab (Hadramaut Yaman) yang diperkirakan terjadi pada abad pertengahan abad XVI, sesuai dengan bukti adanya Masjid Tunasgain yang berumur sekitar 400 tahun atau dibangun sekitar tahun 1587.¹⁷

¹⁵ Pemda Kab. Fakfak, *Sejarah Masuknya Islam di Fakfak*,hlm. 38.

¹⁶ Pemda Kab. Fakfak, *Sejarah Masuknya Islam di Fakfak*,hlm. 39-40.

¹⁷ Ya'cub Ibnu Musa'ad, "Menelusuri Jejak Historis Masuknya Islam di Tanah Papua", *Makalah*: disampaikan dalam Seminar Sejarah Masuknya Islam di Fakfak dan MTQ II Papua Barat, tanggal 23 April 2008.

Informasi lain mengenai Syekh Syarif Muaz atau Syekh Jubah Biru menjelaskan bahwa pada tahun 1420-1541 M, ia juga berdakwah kepada Ade Aria Way sebagai penguasa pulau Adi (dulu disebut Eraam Moon atau Tanah Haram) di selatan semenanjung Onin, Fakfak. Kemudian pada tahun 1626 M berdiri Kerajaan Islam pertama raja pertama Wara (Waron).¹⁸ Ade Ari Way setelah memeluk Islam berganti nama menjadi Samay dan generasi ke V dari Samay mendirikan Kerajaan Kaimana dengan Rat Umis Aituarauw yang kemudian dikenal dengan Raja Komisi.¹⁹

Menurut Arnold, di daratan Papua sendiri hanya sedikit penduduk yang memeluk Islam. Agama ini pertama kali dibawa masuk ke daerah pesisir barat (mungkin semenanjung Onin) oleh para pedagang muslim yang berusaha berdakwah di kalangan penduduk, dan itu terjadi sejak tahun 1606 M. Namun ditemukan nama seorang mubaligh yaitu Imam Dikir (Dzikir) yang datang dari salah satu Pulau Adi sebelah selatan semenanjung Onin; setelah menunaikan dakwah itu ia kembali pulang ke kampungnya, menolak permintaan penduduk asli untuk tinggal menetap bersama mereka.²⁰

Dalam catatan hasil “Rumusan Seminar Sejarah Masuknya Islam dan Perkembangan di Papua”, yang dilaksanakan di Fakfak, tanggal 23 Juni 1997, dirumuskan bahwa: (1) Islam dibawa oleh Sultan Abdul Qadir pada sekitar tahun 1500-an (abad XVI), dan diterima oleh masyarakat di pesisir pantai selatan Papua (Fakfak, Sorong dan sekitarnya); (2) Agama Islam datang ke Papua dibawa oleh orang Arab (Mekkah).²¹

¹⁸ Pemda Kabupaten Fakfak, *Sejarah Masuknya Islam di Fakfak*,hlm. 40.

¹⁹ Wawancara dengan Hakim Ahmad Aituarauw (Putra Mahkota Raja Komisi), dalam Pemda Kabupaten Fakfak, *Sejarah Masuknya Islam di Fakfak*,hlm. 31.

²⁰ Thomas W. Arnold, *The Preaching of Islam*, hlm. 402- 404.

²¹ Tim Perumus Seminar, *Hasil Rumusan Seminar Sejarah Masuknya Islam dan Perkembangan di Irian jaya*, Fakfak: 23 Juni 1997.

4. Versi Jawa

Pada tahun 1518 M, Sultan Adipati Muhammad Yunus dengan gelar Pangeran Sebrang Lor anak dari Raden Patah dari kerajaan Islam Demak mengadakan kerjasama dengan kesultanan Ternate dan Tidore untuk mengirim dai dan mubaligh ke Papua dalam rangka menyiarkan Islam. Para dai dan mubaligh itu dikirim ke wilayah pesisir Barat dan Utara Papua.²²

Informasi lain dari pengurus Yayasan Sunan Drajad dan Sunan Giri bahwa Perdana Jamilu dari Hitu dan Sultan Zainal Abidin (1480-1500 M.)²³ dari Ternate, belajar langsung dari Sunan Giri yang dikenal dengan gelar Prabu Satmata. Setelah mempelajari dan memperdalam Islam selama kurang lebih satu tahun, maka Sultan kembali ke Ternate dengan membawa seorang mubaligh bernama: Tuhubahahul dari Giri untuk mengajarkan dan menyiarkan Islam di Maluku, sedangkan Perdana Jamilu dari Hitu dipercayakan menyiarkan Islam ke Papua. Perjalanan syiar Islam Perdana Jamilu dimulai dari Seram menuju Fakfak pada tahun 1488 M. Sejak syiar Islam tersebut, maka penduduk barat Papua mendapat sentuhan dan mengenal nilai-nilai Islam melalui para mubaligh utusan Sunan Giri.²⁴

Berdasarkan catatan keluarga Abdullah Arfan pada tanggal 15 Juni 1946, menceritakan bahwa “orang Papua pertama yang masuk Islam adalah Kalawen yang kemudian menikah dengan Siti Hawa Farouk yakni seorang mubalighat asal Cirebon. Kalawen berasal dari Waigeo yang setelah masuk Islam berganti nama menjadi

²² Pemda Kabupaten Fakfak, *Sejarah Masuknya Islam di Fakfak*,hlm. 40-41.

²³ Kolano Marhum (1463-1480 M.) bersama anaknya Zainal Abidin memperdalam agama Islam di Jawa dan setelah mereka kembali, Islam di Ternate lebih mantap. De Graaf berpendapat Raja Ternate pertama yang benar-benar muslim ialah Zainal Abidin (1486-1500 M.) karena terus mendapat tekanan dari pedagang muslim, kemudian Zainal Abidin yang bergelar Raja Bulawa atau Raja Cengek, belajar Islam di Madrasah Giri Gresik. Ketika kembali dari Jawa, ia mangajak Tuhubahahul ke daerahnya yang kemudian dikenal sebagai penyebar Islam di kepulauan Maluku. Lihat: H.J. De Graaf dan Th. G. Th. Pigeaud, *Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa*, Jakarta: Grafiti Pers, 1985, hlm. 176. Lihat juga: P. van Der Crap, *Geschiedenenis Van Ternate in Ternateanschen an Maleischen teks Beschreven door den Ternatean Naidah met Vertaling en antekeningen*, dalam *Tijdschrift van het Koninklijk Instituut*, Jilid II, 1985, hlm. 391. Lihat pula: Uka Tjandrasmita, *Sejarah Nasional Indonesia, Jilid III*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977, hlm. 94.

²⁴ Pemda Kabupaten Fakfak, *Sejarah Masuknya Islam di Fakfak*,hlm. 41-42.

Bayajid diperkirakan peristiwa itu terjadi pada tahun 1600. Jika dilihat dari silsilah keluarga tersebut, maka Kalawen merupakan nenek moyang dari Keluarga Arfan yang pertama masuk Islam.²⁵

5. Versi Banda

Menurut Halwany Microb bahwa Islamisasi di Papua, khususnya di Fakfak dikembangkan oleh pedagang-pedagang Bugis melalui Banda²⁶ yang diteruskan ke Fakfak melalui Seram Timur oleh seorang pedagang dari Arab bernama Haweten Attamimi yang telah lama menetap di Ambon. Mircrob juga mengatakan bahwa cara atau proses Islamisasi yang pernah dilakukan oleh dua orang mubaligh bernama Salahuddin dan Jainun dari Banda yang sezaman dengan Sultan Tidore sekitar abad XVI, terjadi di Pulau Misool yang belum terjangkau oleh Sultan Ternate dan Tidore.²⁷ Proses pengislaman yang dilakukan antara lain dengan jalankhitanan (sunatan), tetapi dibawa ancaman penduduk setempat jika orang yang disunat mati, kedua mubaligh itu akan dibunuh. Akhirnya keduanya berhasil dalam khitanan tersebut, maka penduduk setempat berduyun-duyun masuk agama Islam.²⁸

Informasi lain menurut Ismail A. Bauw bahwa agama Islam masuk ke Rumbati wilayah semenanjung Onin, Fakfak pada tahun 1502 M. dibawa oleh seorang mubaligh yang bernama Abdul Ghafar yang berasal dari Sumatera Utara (Aceh) sampai wafatnya. Pada abad berikutnya datang seorang mubalighat bernama

²⁵ Ismail A. Bauw, "Pengaruh Hukum Islam, hlm. 34.

²⁶ Masuknya Islam ke Banda menurut sejarah lisan setempat menyatakan bahwa agama ini diterima orang-orang Banda di suatu tempat di luar Banda, jadi bukan orang Islam datang ke Banda. Pada waktu itu Banda telah memiliki armada niaga untuk mengangkat pala dan fuli ke daerah pelabuhan lain. Banda menjadi eksportir terbesar di Nusantara. Kontak orang Banda mungkin terjadi di Ternate, Hitu atau pelabuhan-pelabuhan di Jawa. Lihat: Meilink Roelofsz Map, *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 an about 1630*, Haque, Martinus Neijhoff, 1962, hlm. 97.

²⁷ Pengislaman diteruskan oleh para mubaligh dari Maluku Utara, seperti halnya dengan Sultan Tidore, Kapten Soltief, Raja Tafalas, dan lain-lain. Lihat: Halwany Microb dkk., "Konsep Studi Kelayakan Masjid Agung Kokas Irian Jaya," Fakfak: Proyek P3SP Irian Jaya 10 September, 1984, hlm. 14.

²⁸ Halwany Microb dkk., "Konsep Studi Kelayakan Masjid....., hlm. 14.

Siti Mashita dari Bandaneira berkunjung ke desa Patipi, Fakfak, kemudian kawin dan wafat disana.²⁹

6. Versi Bacan

Kesultanan Bacan di masa Sultan Mohahammad al-Baqir lewat piagam *kasiratan* yang dicanangkan oleh peletak dasar *Mamlakatul Mulukiyah* atau *Moloku Kie Raha* (Empat Kerajaan Maluku: Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo) lewat walinya Jafar As-Shodiq (1250 M) melalui keturunannya ke seluruh penjuru negeri menyebarkan syiar Islam ke Sulawesi, Philipina, Kalimantan, Nusa Tenggara, Jawa dan Papua.³⁰

Asal-usul raja Maluku yang juga diceritakan Galvao, yakni bahwa empat bersaudara yang lahir dari tiga lelaki dan seorang perempuan: masing-masing menjadi cikal-bakal raja Bacan, Raja Papua, Raja Buton dan Raja Banggai, sedangkan sang puteri kawin dengan Raja Loloda, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada waktu naskah ini ditulis atau setidaknya pada masa Galvao berada di Ternate (1538-1539 M.), kesatuan empat serangkai yang dikenal dengan *Moloku Kie Raha* sekarang, belum dikenal³¹

Collins seorang pakar linguistik mengemukakan bahwa Kerajaan Bacan merupakan kerajaan tertua di Maluku. Hal ini dapat dilihat dari bahasa Bacan yang dialek Melayunya banyak persamaan dengan bahasa Melayu di bagian utara Kalimantan.³² Pada masa Sriwijaya, rempah-rempah dari Maluku telah dialirkan pula melalui kerajaan Sumatera itu. Lopian mengemukakan pendapat bahwa perdagangan

²⁹ Bauw, *Skripsi*: "Pengaruh Hukum Islam," hlm. 34.

³⁰ Herry Rd. Nachrawy, *Peranan Ternate Tidore Dalam Pembebasan Irian Barat*, Ternate: Yayasan Kie Raha, 2004, hlm. 16-17.

³¹ Lihat: Adrian B. Lopian, "Bacan and the Early History of North Maluku", dalam Leontine Visser (ed.), *Halmahera Beyond: Social Science Research in the Moluccas*, Leiden: KITLV Press, 1994, hlm. 11-12.

³² J.T. Collins, *Linguistic Research in Maluku: A Report of Recent Fieldwork*, *Oceanic Linguistic* 21, 1982, hlm. 79-80.

di masa itu dilakukan dengan kerajaan Bacan yang mendahului adanya kerajaan Ternate dan Tidore.³³

Terbentuknya *Kolano Fat* (Raja Ampat) di kepulauan Raja Ampat, Sorong oleh Kesultanan Bacan di Papua sebagai berikut : (1) Kaicil Patra war bergelar Komalo Gurabesi (Kapita Gurabesi) di pulau Waigeo; (2) Kaicil Patra war bergelar Kapas Lolo di pulau Salawati³⁴; (3) Kaicil Patra Mustari bergelar Komalo Nagi di Misool; (4) Kaicil Boki Lima Tera bergelar Komalo Boki Saila di pulau Seram³⁵.

Menurut Arnold, Raja Bacan pertama yang masuk Islam bernama Zainal Abidin, yang memerintah tahun 1521 M. telah menguasai suku-suku di Papua serta pulau-pulau di sebelah barat lautnya, seperti Waigeo, Misool, Waigama, dan Salawati. Kemudian Sultan Bacan meluaskan kekuasaannya sampai semenanjung Onin (Fakfak), di barat laut Papua pada tahun 1606 M., melalui pengaruhnya dan para pedagang Muslim maka para pemuka masyarakat pulau-pulau tadi memeluk Agama Islam. Meskipun masyarakat pedalaman masih tetap menganut animisme, tetapi rakyat pesisir adalah Islam.³⁶

Sementara itu, menurut Arnold bahwa agama Islam disambut dengan hangat oleh suku-suku bangsa yang lebih maju peradabannya di antara penduduk kepulauan Nusantara dan kurang mendalam di kalangan penduduk yang lebih bersahaja. Demikianlah misalnya suku-suku di daratan Papua serta pulau-pulau sebelah barat lautnya seperti Waigeo, Misool, Waigama, dan Salawati. Pada abad XVI pulau-pulau

³³ Lihat: Adrian B. Lopian, "Bacan and the Early History of North Maluku", dalam Leontine Visser (ed.), *Halmahera Beyond: Social Science Research in the Moluccas*, Leiden: KITLV Press, 1994, hlm. 11-12.

³⁴ Pulau Salawati, menurut tutur lisan masyarakat setempat, diberi nama oleh Sultan Bacan ketika pertama kali menginjakkan kakinya pulau tersebut kemudian membaca shalawat atas Nabi Muhammad. s.a.w., maka kemudian pulau itu diabadikan menjadi Salawati. Wawancara dengan Ridwan Maliki, Biak: 17 September 2008. Ridwan Maliki adalah keturunan Raja Ampat, dan kini menjabat sebagai sekretaris Majelis Muslim Papua.

³⁵ Nachrawy, *Peranan Ternate Tidore* , hlm. 17-18. *Kaicil* adalah gelar anak laki-laki Sultan Maluku; *Boki/Nyaicil* adalah gelar anak perempuan Sultan; *Hongi* artinya armada kerajaan, *Kora-kora* artinya jenis perahu untuk perang. Lihat: Syahril Muhammad, *Kesultanan Ternate Sejarah Sosial Ekonomi dan Politik*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004, hlm. 41.

³⁶ John Crawford, *A Descriptive Dictionary of Indian Islands and adjacent Countries*, London: 1856, hlm. 143.

tersebut dan juga Semenanjung Onin di barat laut daratan Papua tunduk kepada Sultan Bacan, salah seorang Raja Maluku. Melalui pengaruh Raja Bacan ini maka para pemuka masyarakat pulau-pulau tadi memeluk Islam dan meskipun masa rakyat pedalaman masih tetap menganut animisme, tetapi rakyat pesisir adalah Islam.³⁷ Klein mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin Papua mengunjungi kerajaan Bacan pada tahun 1596 M dan dari kunjungan tersebut terbentuklah kerajaan-kerajaan Islam.³⁸

Ada beberapa nama yang masih terpatri pada wilayah Raja Ampat dan Sorong yang merupakan nama pemberian dari Sultan Bacan yang pernah melakukan ekspedisi dengan perahu besar *bedide* untuk melihat anaknya Kaicil Gurabesi (bergelar Kapita Laut). Nama-nama tempat yang masih diabadikan sampai saat ini adalah: Pulau Saunek Mounde (buang sauh di depan), Teminabuan (tebing dan air terbuang), Kapita War (panglima yang kuat), War Samdin (air sembahyang), War Zum-zum (penguasa atas sumur), Melyat (melihat), Waigeo (air bah), War Sar (dayung), Weri Agan (rotan pasar), Kamudang (kamu lagi), Aitinyo (air kabur), Ayan Maru (air malu), Simatori (sembilan marga/pohon berbaris) dan Aifat (air empat).³⁹

Dari sumber-sumber tertulis maupun lisan di atas, serta bukti-bukti peninggalan nama-nama tempat dan keturunan raja Bacan yang menjadi raja-raja Islam di kepulauan Raja Ampat. Maka diduga kuat bahwa yang pertama menyebarkan Islam di Papua adalah Kesultanan Bacan sekitar pertengahan abad XV. Dan kemudian pada Abad XVI barulah terbentuk kerajaan-kerajaan kecil di kepulauan Raja Ampat.

³⁷ Thomas W. Arnold, *The Preaching of Islam*, hlm. 402- 4.

³⁸ W.C. Klein, *Nieuw Guinea, De Ontwikkeling Op Economisch, Sosial, En Cultureel Gebeid*, In Nederland Nieuw Guinea, Deel I, S'Gravenhage: Drukkerij-en Uitgeverijbedrijf, 1953.

³⁹ Nachrawy, *Peranan Ternate*,hlm. 18.

7. Versi Tidore dan Ternate

Sebuah catatan sejarah Kesultanan Tidore “Museum Memorial Kesultanan Tidore Sinyine Mallige”⁴⁰ menulis pada tahun 1443 M Sultan Ibnu Mansur (Sultan Tidore X) bersama Sangaji Patani Sahmardan dan Kapitan Waigeo bernama Kapitan Gurabesi memimpin ekspedisi kedaratan Tanah Besar (Papua). Ekspedisi yang terdiri dari satu armada kora-kora berangkat ke Tanah Besar melewati pulau-pulau seperti Patani, Gebe dan Waigeo.

Ekspedisi ini berhasil menaklukkan beberapa wilayah di Papua bagian barat dan menjadikan kesultanan Tidore yang terdiri dari : (1) Wilayah Raja Ampat atau Korano Ngaruha meliputi wilayah: Kolano Waigeo, Kolano Salawati, Kolano Umsowol atau Lilinta Kolano Waigama; (2) Wilayah Papua Gamsio (Papua Sembilan Negeri) meliputi :Sangadji Umka, Gimalaha Usba, Sangaji Barei, Sangaji Boser, Gimalaha Kafdarum, Sangaji Wakeri, Ginalaha Warijo, dan Sangaji Mar Gimala Marasay; (3) Wilayah Mafor Soa Raha (atau Mafor Empat Soa) meliputi : Sangaji Rumberpon, Sangaji Rumansar, Sangaji Angaradifa dan Sangaji Waropen.

Dalam dokumen sejarah tersebut disampaikan bahwa ekspedisi baginda Sultan berangkat dari Rum ibukota kesultanan Tidore waktu itu, menuju Patani untuk selanjutnya ke Papua. Di Patani telah siap untuk bergabung Sangaji Patani yang bernama Sahmardan dengan kekuatan 4 perahu kora-kora dan 100 orang anak buah. Setelah bergabung ekspedisi baginda Sultan melanjutkan perjalanan menuju Papua dengan menyinggahi Waigeo untuk menemui puteri Boki Tayyibah yang dijodohkan dengan Kapita Gurabesi⁴¹ berlayar menuju tanah Papua. Di setiap tempat yang disinggahi, Sultan berkenan mengajarkan agama Islam dan mengangkat pemuda dari penduduk setempat menjadi pimpinan atas kaumnya dan diberi gelarsangaji,

⁴⁰ D.H. Burger, *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, Jilid II, DJakarta, Pradnya Paramita dan J.B. Walters, 1960, hlm. 39.

⁴¹ Gurabesi berasal dari bahasa Tidore, *Gura* artinya kilatan bunga api dan *Besi* adalah besi, jadi dapat diartikan Gurabesi selalu berperang dengan parangnya, sehingga mengakibatkan parangnya yang beradu dengan parang lain seperti kilatan bunga api.

kapita Lau, gimalaha dan lain-lain. Sekaligus memberi nama pada setiap tempat-tempat yang belum memiliki nama.⁴²

Sultan Ibnu Mansur yang bergelar Sultan Papua I, pada 1443 M melakukan ekspedisi kora-kora dari negeri Gam Raange (Patani, Maba dan Weda) di pulau Halmahera menuju pulau Waigeo, Batanta, Salawati, Misool (disebut *Kolano Fat*) atau kepulauan Raja Ampat bersama armada perang yang dipimpin Kapita Syahmardan. Di wilayah pulau Misool, Sultan Ibnu Mansur mengangkat Kaicil Patra War putera Sultan Bacan dengan gelar Komalo Gurabesi (Kapita Gurabesi). Kapita Gurabesi kemudian dikawinkan dengan puteri Sultan Ibnu Mansur bernama Boki Tayyibah. Kemudian berdiri empat kerajaan di kepulauan Raja Ampat tersebut adalah Kerajaan Salawati, Kerajaan Misool/Kerajaan Sailolof, Kerajaan Batanta dan Kerajaan Waigeo.⁴³

Menurut Leeden bahwa agama Islam masuk di Kepulauan Raja Ampat ketika daerah tersebut mendapat pengaruh dari kesultanan Tidore tidak lama sesudah agama tersebut masuk di Maluku pada abad XIII. Walaupun agama Islam lebih lama masuk di daerah tersebut diatas namun tidak disebarkan secara luas kepada penduduk, melainkan hanya dipeluk oleh golongan-golongan tertentu saja dalam masyarakat, terutama di kalangan keluarga raja-raja dan pembantu-pembantunya.⁴⁴

Berdasarkan sejarah lisan dari Tidore, sebagaimana yang dikutip Koentjaraningrat bahwa sejak abad XV pulau Biak telah menjadi wilayah Kesultanan Tidore, salah seorang tokoh setempat bernama Gurabesi diangkat sebagai Pejabat di Kesultanan Tidore, bahkan dijadikan menantu Sultan. Gurabesi inilah yang kemudian melahirkan Raja-raja di kepulauan Raja Ampat. Demikian pula Sultan Tidore banyak

⁴² Pemda Kab. Fakfak, *Sejarah Masuknya Islam di Fakfak*,hlm. 46.

⁴³ Nachrawy, *Peranan Ternate Tidore*.....hlm. 33

⁴⁴ Mansoben, "Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya,hlm. 37

mengangkat tokoh-tokoh Biak menjadi pejabat daerah di Biak dan memberikan gelar jabatan⁴⁵ seperti *Kapitan*, *Sangaji*, *Korano*, *Dimara*, *Mayor* dan sebagainya⁴⁶

Sumber lain juga mengatakan Gurabesi adalah pahlawan asal Raja Ampat (Waigeo) yang membantu Sultan Tidore berperang melawan Sultan Ternate. Atas jasanya, Sultan Tidore memberikan adik perempuannya yang bernama Boki Tayyibah untuk dikawini dengan syarat tiap tahun harus kembali ke Tidore. Mulai saat itulah terjadi hubungan antara kerajaan-kerajaan di Raja Ampat dengan Kesultanan Tidore. Dalam hubungan ini, raja-raja di Raja Ampat membawa hadiah-hadiah kepada Sultan Tidore, sebaliknya Sultan Tidore memberikan kepada raja-raja itu gelar-gelar. Seperti gelar *Kapitan Laut* yang diberikan kepada raja, akhirnya gelar ini disamakan dengan gelar *Fun* atau raja oleh masyarakat setempat.⁴⁷

Informasi lain mengenai Gurabesi bahwa Sultan Jamaluddin dari Kesultanan Tidore pernah meminta bantuan Raja Papua bernama Kurabesi (Biak: kita mendukung mereka) untuk berperang melawan VOC pada tahun 1649 M. Dengan kekuatan armada 24 perahu perang, Kurabesi berhasil memukul mundur VOC. Atas jasa baik itu, Sultan Jamaluddin mengikat persahabatan dengan Kurabesi dan pasukannya (kebanyakan dari Pom, Ansus dan Biak), dengan perkawinan dan menyediakan tanah untuk mereka menetap di Maluku Utara. Hasil perkawinan itu kemudian menjadi penguasa-penguasa baru di sejumlah tempat di Maluku Utara dan

⁴⁵ Gelar-gelar jabatan yang diberikan Sultan Tidore kepada Raja atau pemimpin Papua ketika itu seperti Kapitan Laut (pemimpin armada kerajaan atau *hong*, diadopsi dari bahasa Portugis yang berarti), Sangaji (Kepala Distrik), Korano (tidore: Kolano atau Raja, dari kata Koko lanoa yang berarti tegak supaya kuat), Mayor (pangkat tertinggi dari pasukan Sultan, diadopsi bahasa Portugis yang berarti), Dimara (Kepala Kampung). Lihat Shaleh Putuhena, *Struktur Pemerintahan Kesultanan Ternate dan Agama Islam*, Jakarta: Lektas LIPI, 1981, hlm. 9.; Lihat pula: Abdul Hamid Hasan, *Aroma Sejarah dan Budaya Ternate*, Ternate: Antara Pustaka Utama, 2001, hlm. 26.; Lihat juga: Syahril Muhammad, *Kesultanan Ternate Sejarah Sosial Ekonomi dan Politik*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004, hlm. 53-58.

⁴⁶ Koentjaraningrat (*et. al*), *Penduduk Irian Barat*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1963, hlm.79-83.

⁴⁷ Mansoben, Johsz R., "Sistem Pemerintahan Tradisional di Salawati Selatan Raja Ampat", dalam *Majalah Ilmu-Ilmu Sastra Indonesia*, Jilid VIII No. 2 (Jakarta: Bhratara, November 1978/1979), hlm. 165-6.

Kepulauan Raja Ampat. Karena hubungan perkawinan itu berdampak pula terhadap pembelaan Raja-raja Papua terhadap sultan-sultan Maluku Utara di Tidore, Ternate dan Tanah Papua Barat.⁴⁸

Pasca pemerintahan Sultan Ibnu Mansur yang bergelar Sultan Papua I (1443 M.), kemudian Sultan Nuku disebut Sultan Papua II (1780 M.) memperluas wilayah ekspansinya dengan menguasai kepulauan Papua dari pesisir utara sampai selatan membentang dari Papua ke negara Papua New Guinea. Kaicil Nuku dikenal sebagai Sultan Papua, Seram, Tidore.⁴⁹ Penguasaan atas tanah Papua, kemudian dilanjutkan oleh Sultan Zainal Abidin Syah atau Sultan Papua III yang merupakan Sultan Tidore XXXV setelah berdirinya Negara Republik Indonesia dan dilantik pada tahun 1956 oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno sebagai Gubernur Irian Barat pertama beribukota sementara di Soasio Tidore, dengan tugas utama mengembalikan Irian Barat ke pangkuan NKRI. Dan pada tahun 1961, status Irian Barat (Papua) diperjelas dengan pelantikan Frans Kaisepo sebagai Gubernur Irian Barat ke II yang merupakan putera asli Papua. Ibukota sementara di Soasio kemudian dipindahkan ke Soekarnoputera. Nama ini kemudian diganti oleh Presiden Soeharto menjadi Jayapura.⁵⁰

Menurut Ismail A. Bauw bahwa pada tahun 1506 M. terjadi Perang Was antara Kerajaan Rumbati (Fakfak) dengan Kesultanan Tidore di pulau Was, Rumbati.⁵¹ Hal ini bisa dikaitkan dengan pendapat Katoppo bahwa Sultan Nuku dari Tidore (bergelar Sultan Papua II) yang berkedudukan di Waru Seram Utara, ia menginstruksikan perahu-perahu *hong* Ternate melayari semua pantai-pantai kepulauan Papua untuk merampas dan merampok serta membakar semua kampung

⁴⁸West PAC, *Kronologi Sejarah, Seri Pemahaman Papua Barat, Vol. I*, Jakarta: West Papua Community, 1999, hlm. 12-13.

⁴⁹Nachrawy, *Peranan Ternate Tidore*.....hlm. 33

⁵⁰Nachrawy, *Peranan Ternate Tidore*.....hlm. 33-34.

⁵¹Bauw, " Pengaruh Hukum Islam,hlm. 33-34.

dan perahu-perahu yang terdapat di perairan, sungai-sungai dan membunuh barangsiapa yang mengadakan perlawanan.⁵²

Dari kampung Ugar di kabupaten Fakfak terdapat dokumen Silsilah Raja-Raja Ugar, tertulis sebuah Surat Keputusan tertanggal 5 November 1929 M⁵³. yang diberikan Sultan Tidore kepada Maidama atau Moi Damar Ugar sebagai Kepala Kampung Ugar dengan gelar jabatan Kapitan. Moi Damar Ugar merupakan generasi V dari turunan Raja-Raja Ugar⁵⁴. Raja Ugar I bernama Rabana telah memeluk Islam hidup pada abad XVI. Kuburan Raja Ugar I, juga kuburan para imam dan khotib serta pengikutnya sudah bercirikan Islam kuburan Islam. Demikian pula terdapat Kitab Barzanji yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno tahun 1622 M.⁵⁵

Menurut Musa N.P. Herembu yang merupakan generasi X dari Raja Wetuarbawa Sultan Tidore yang bernama Muhammad Tahir Alting⁵⁶ melantik Lakatey sebagai Raja Wertuar VII.. Pelantikan ini dilaksanakan di Kampung Karek, Sekar Lama pada tahun 1886 M. yang dihadiri oleh Abdul Jalil (Raja Rumbati) dan Abdul Majid (Raja

⁵² E. Katoppo, *Nuku Perjuangan Kemerdekaan di Maluku Utara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1984, hlm. 39-40.

⁵³ Surat Keputusan itu menggunakan bahasa Belanda dan Melayu berstempel cap Kesultanan Tidore yang bertuliskan huruf Arab. Surat tersebut menunjukkan bahwa meskipun daerah Irian Jaya saat itu telah dikuasai Pemerintah Hindia Belanda (1828 M.) tetapi kekuasaan Sultan Tidore atas pulau Papua masih tetap sah dan efektif. Lihat: Kasibi Suwiryadi, *Sejarah Da'wah Islam Islam di Irian Jaya*, Makalah Disampaikan Dalam Sarasehan Sejarah Islam di Irian Jaya di Merauke Juni 2000.

⁵⁴ Dari silsilah Raja-raja Ugar diketahui bahwa Moi Damar Ugar adalah generasi V keturunan Raja Ugar, ayahnya bernama Hiriet Tetery dan hidup di abad XIX dikenal dengan nama Nadiwery atau Raja teluk/Raja Sholat Len atau Raja Shalat Teluk. Ayah dari Hiriet Tetery adalah Dulin Ugar yang lahir dan meninggal di Karang Buder (Tibatiba Nam) dan diperkirakan hidup pada abad XVIII. Dulin Ugar adalah anak dari Wahwa dan Wahwa adalah anak dari Rabana (Raja Ugar I) yang hidup di abad XVI. Lihat: Lukman Rahanwarat, *Islam di Kabupaten Fakfak: Suatu Tinjauan Historis*, Makalah disampaikan Dalam Sarasehan Sejarah Islam di Irian Jaya, Merauke: Juni 2000.

⁵⁵ Lukman Rahanwarat, "Islam di Kabupaten Fakfak,", Merauke, 2000. Lihat pula: Pemda Kab. Fakfak, *Sejarah Masuknya Islam di Fakfak*,hlm. 26-27.

⁵⁶ Dalam silsilah Sultan Tidore, tidak ditemukan nama Sultan Muhammad Tahir Alting yang tertulis adalah Sultan Mahatudin Taher (Sultan Tidore XXIX) yang hidup pada pertengahan abad XIX. Lihat: Herry Rd. Nachrawy, *Peranan Ternate Tidore*.....hlm. 33.

Misool). Dijelaskan juga bahwa Raja Wertuar VII membangun masjid pertama Kerajaan pada tahun 1870 M. berlokasi di kampung Patimburak.⁵⁷

Informasi dari Manokwari dalam salinan naskah manuskrip tertanggal 3 Mei 1952⁵⁸, bertulis tangan menceritakan bahwa utusan Sultan Tidore pada tanggal 18 Agustus 1812 M./17 Rajab 1217 H. yang bernama Dano Sech Muhammad Alting bersama adiknya bernama Dano Muhammad Hasan dan seorang penerjemah Tolowo Warwe bergelar Kasim Raja dari Sorong Dom beserta beberapa anak buah perahu Ternate mengunjungi pulau Mansinam-Manokwari. Kedatangan Sultan tidak disambut dengan ramah oleh penduduk setempat, tetapi setelah melalui dialog dengan kepala suku yang bernama Mayor Kerui Rumander, akhirnya ia memeluk Islam dan diikuti oleh beberapa anggota keluarganya.⁵⁹

Pada tahun 1849 Pangeran Amir sebagai Wakil Sultan Tidore menyertai suatu kesatuan ekspedisi Belanda untuk menempatkan tanda batas milik Belanda di daerah Doreri, pulau Ron, dan pulau Ansus di Selatan Yapen. Pada tahun 1880 Pangeran Ali sebagai Wakil Sultan Tidore pergi mengunjungi daerah pantai selatan Irian. Mula-mula ia mengunjungi Tanjung Sele, ujung terbarat Pulau Irian, kemudian ke Ati-ati, Kowiai, Kapiiai dan juga daerah Merkusoord bekas Benteng Du Bus di Fakfak

⁵⁷ Wawancara dengan Musa N.P. Herembu yang merupakan generasi X dari Raja Wertuar Musa N.P. Herembu yang merupakan generasi X dari Raja Wertuar, Fakfak: 15 November 2006.

⁵⁸ Manuskrip ini bertulis tangan, aslinya berbahasa Tidore, salinan ke-4 berbahasa Indonesia tertanggal 3 Mei 1952 milik keluarga Rumander. Disertai catatan antara lain sebagai berikut: “Dano Sech Muhammad Alting pulang ke Tidore, setelah anak lali-lakinya meninggal dan dikuburkan di pulau Mansinam, sedangkan istrinya meninggal dunia juga di Manokwari dan dimakamkan di Roudi bersama Hj. Boki Fatimah (istri Mayor Kuni Rumander). Kuni Rumander demi keselamatan dirinya, nama famnya (marga) diganti menjadi Rumbobiar. Salah seorang anak Kuni Rumander bernama Ismail lahir tahun 1882 dan meninggal tahun 1959. Anak Ismail Rumbobiar bernama Shaleh Rumbobiar lahir 1929 dan meninggal tahun 2000. Saat ini naskah asli manuskrip itu tidak diketahui keberadaannya, begitu pula halnya dengan makam anak Sultan yang ada di pulau Mansinam yang tidak tampak lagi bekasnya”. Lihat: Kasibi Suwiryadi, *Sejarah Masuknya Islam di Tanah Papua*, Makalah disampaikan dalam Seminar Dinamika Kerukunan Hidup Umat Beragama dari Berbagai Daerah, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Muhammadiyah Jayapura kerjasama dengan Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Departemen Agama, 2004.

⁵⁹ Brawery, S.M., dan Rumbobiar, M.S., *Buku Sejarah Sultan: Masuknya Islam di Mumukwar*, Manokwari, 1 Juli 1994.

untuk meletakkan tanda milik Belanda.⁶⁰ Tahun 1858 Pangeran Amir mengunjungi Humbolt-Bay (Teluk Yos Sudarso) di Jayapura untuk berdagang. Tetapi karena berselisih paham dengan penduduk setempat maka beliau kembali ke Tidore. Juga pada tanggal 11 Oktober 1871 di dekat semenanjung Bolpant sebelah timur teluk Hambolt (Teluk Yos Sudarso) mendarat di teluk Humbolt dengan beberapa pangeran dari Tidore untuk meletakkan tanda batas wilayah Belanda.⁶¹ Pengaruh kesultanan Tidore di Jayapura terlihat dengan adanya nama-nama tempat yang diabadikan seperti Hamadi, Tobati, Nafri dan Gurabesi.⁶²

Pada masa pemerintahan Sultan Babullah (1570-1584 M.) daerah Kesultanan Ternate telah meliputi sebagian wilayah perairan Indonesia bagian timur dengan memperluas daerahnya ke wilayah sebelah selatan sampai Bima, sebelah barat sampai Makassar, sebelah timur sampai Banda, dan sebelah utara sampai Kepulauan Raja Ampat.⁶³

Menurut sejarah lisan masyarakat Babo⁶⁴ (daerah Teluk Bintuni-Manokwari) bahwa Islam pertama dibawa oleh mubaligh dari Ternate yang bernama Sultan Iskandar Muda (anak dari Sultan Nahu), namun ada yang menyebutkan dari Aceh. Sultan Iskandar Muda datang di Babo, tepatnya di Pulau Nuswaman pada tahun 1618 M. dari arah Utara menuju ke Selatan dan Timur (Rute Ternate – Misool).⁶⁵ Sultan

⁶⁰ H.W. Bachtiar, "Sejarah Irian Jaya" dalam Koentjaraningrat dkk., *Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk*, Jakarta: Djambatan, 1994. hlm. 51-52.

⁶¹ H.W. Bachtiar, "Sejarah Irian Jaya",hlm. 52.

⁶² Hamadi berasal dari nama anak seorang Sultan Jailolo yang bernama Ahmadi yang melarikan diri ke Jayapura dan kawin dengan salah perempuan setempat. Karena lidah penduduk setempat sulit mengucapkan nama Ahmadi maka dipanggil Hamadi. Nama Hamadi ini juga diabadikan sebagai *fam* (marga), jika dilihat dari warna kulit marga Hamadi lebih terang dibanding dengan penduduk asli Jayapura. Kata Tobati juga berasal dari bahasa Tidore, kata *To* artinya "perintah sultan" dan kata *bati* artinya "batas", jadi Tobati berarti tempat atau pulau ini telah menjadi batas kekuasaan Sultan Tidore. Wawancara dengan Syaril mantan aktivis HMI di Ternate, Jakarta: 7 Juni 2004.

⁶³ Clercq, F.S.A., *Bijdragen tot de Kennis der Residentie Ternate*, Leiden: Brill, 1890, hlm. 153.

⁶⁴ Babo menurut masyarakat setempat berasal dari bahasa Arab yaitu *Babun* (pintu). Sehingga daerah Babo dianggap pintu masuknya Islam di Tanah Papua. Wawancara dengan Umar Bauw al-Bintuni, Jayapura: 21 Oktober 2004.

⁶⁵ Wawancara dengan Abd. Rasyid Fimbay, Teluk Bintuni: September 2006.

Iskandar Muda berinteraksi dengan penduduk lokal sekitar 8 tahun dalam misi perdagangan rempah-rempah di pulau tersebut. Praktek ajaran Islam di pulau Nuswaman hanya bersifat individual dan dalam kelompok terbatas (Sultan dan tiga orang pengikutnya). Sementara bagi penduduk lokal belum mengetahui prosesi apa yang dilakukan Sultan bersama teman-temannya. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Sultan (melaksanakan sholat) adalah tidak lain dari membuat *mawi* (mantra), sekitar delapan tahun di pulau Nuswaman (tidak menetap).

Tahun 1626 M. Sultan Iskandar Muda hijrah ke kampung Modan (pulau berlabuh dalam bahasa Irarutu) saat ini ibukota distrik Babo. Dalam jangka waktu 16 tahun (1626-1642 M) penduduk lokal mulai tertarik dengan ajaran Islam, di antaranya dari marga Fimbay. Pada 1643 M. sudah ada migrasi dari tempat lain di Babo dan mulai berinteraksi dengan penduduk lokal. Pada tahun 1645 dibangun tempat ibadah (langgar) di kampung Modan Lama (dekat pelabuhan lama Babo) dengan Imam pertama bernama Adam Kwamur. Pada tahun 1647 M Sultan Iskandar Muda hijrah dari Pulau Modan ke Misool (Raja Ampat) melewati Taroy, Mogotira dan Weriagar. Setelah tahun 1648 M ajaran Islam telah berkembang di sekitar pulau tersebut yang didiami penduduk lokal, di antaranya marga tersebut adalah Fimbay, Manoama dan Bauw.⁶⁶

Jika melihat sumber di atas tentang Sultan Iskandar Muda, belum ada ditemukan sumber tertulis baik barat maupun lokal yang otentik tentang kedatangannya ke Maluku maupun ke Papua. Sumber sejarah yang valid menerangkan bahwa Sultan Iskandar Muda telah membawa kejayaan Kerajaan Aceh, wafat pada 29 Rajab 1046 H. atau 27 Desember 1636 M. Ia meninggal pada usia yang tidak terlalu

⁶⁶Wawancara dengan generasi V dari Keluarga Monoama, Teluk Bintuni: September 2006. analisis dari cerita rakyat bahwa keturunan dari Imam Adam Kwamur di Babo sampai saat ini sudah enam generasi, salah satunya adalah Hajjah Bauw.

tua, sekitar 46 tahun. Pengganti Sultan Iskandar Muda ialah menantunya yang terkenal dengan nama Sultan Iskandar Tsani Alauddin Mughayatsyah.⁶⁷

Dalam memperluas dakwah Islam di wilayah Nusantara, Sultan Gapi Baguna dari Kesultanan Ternate dengan Sultan Ibnu Mansyur (1443 M.) dari Kesultanan Tidore (Sultan Papua I) telah menyepakati bahwa Ternate memiliki wilayah Barat sebagai ekspansinya meliputi kepulauan Timor dan Nusa Tenggara, sedangkan kesultanan Tidore mengambil posisi ekspansi ke wilayah Timur Nusantara meliputi kepulauan Pasifik Raya sampai di Honolulu⁶⁸ (Hawai, Amerika Serikat). Itulah otonomi ”nyili Papua dan otonomi ngulu-ngulu” yang berarti kekuasaan atas pulau Papua dan kekuasaan atas Negeri Jauh di Pasifik. Pada region Austronesia terdapat kepulauan *Nuku Oro* (perutnya Nuku), *Nuku Nifa* (kedatangannya Nuku), *Nuku Lae-lae* (lidahnya Nuku), *Nuku Nau* (pangeran Nuku), *Nuku Alofa* (keselamatan Nuku). Negeri-negeri Nuku kini banyak yang telah merdeka dan membentuk kerajaan Samoa yang menjadi wilayah perwalian Perancis dan ada pula yang masih membentuk prototorat di bawah naungan negara lain.⁶⁹

Berikut ini silsilah para Raja/Sultan di Kesultanan Tidore⁷⁰ :

1. Raja Muhammad Haekal
2. Raja Bosa Mawange
3. Raja Sahu
4. Raja Balibunga
5. Raja Duko Madoya
6. Raja Kie Matiti
7. Raja Seli
8. Raja Matagena
9. Raja Cili Ati (Sultan Jamaluddin)

⁶⁷ Lihat: Taufik Abdullah (ed.), *Sejarah Umat Islam Indonesia*, Jakarta: MUI dan Yayasan Pustaka Umat, 2003, hlm. 27.

⁶⁸ Nama *Honolulu* dalam bahasa Ternate mempunyai arti “mangkuk yang berbunyi” menunjukkan jati diri ke-Islaman yang berbunyi nyaring, terus terdengar dari tempat asalnya di Maluku dan bergemang panjang sampai di kepulauan Pasifik. Lihat: Herry Rd. Nachrawy, *Peranan Ternate Tidore*.....hlm. 18.

⁶⁹Nachrawy, *Peranan Ternate Tidore*.....hlm. 31.

⁷⁰ Nachrawy, *Peranan Ternate Tidore*.....hlm. 34.

10. Raja Sultan Ibnu Mansyur-Sultan Papua I (1443 M.)

11. Raja Amiruddin Syaidil Karamah
12. Sultan Amir Iskandar Sani
13. Sultan Amir Bifadli Arifin syah
14. Sultan Jalauddin Syah
15. Sultan Aliuddin Syah
16. Sultan Syaiuddin Syah
17. Sultan Gorontalo
18. Sultan Malikkudus Syah
19. Sultan Syaifudin Kaicil Golafino
20. Sultan Hamzah Fakhrudin Kaicil Seram
21. Sultan Abdul Fadil Kaicil Maloko
22. Sultan Hasanuddin Kaicil Garcia
23. Sultan Amirulfadli azis Kaicil Gebe
24. Sultan Muhammad Masud
25. Sultan Badaruddin Patra Alam
26. Sultan Khairun Alam Asgar
27. **Sultan Nuku** Mohammad bin Mabus Amiruddin Kaicil Paparangan– **Sultan Papua II** (1780 M.)
28. Sultan zainal Abidin Jou Maba
29. Sultan Mahatuddin Taher
30. Sultan Almansyur
31. Sultan Ahmad Syaifuddin
32. Sultan Ahmad Fatahuddin
33. Sultan Ahmad Qawiyuddin
34. Jougugu Nao Wange
35. Jougugu Nao Muhammad
36. Jougugu Soleman
37. Jougugu Fakhrudin
38. **Sultan Zainal Abidin Syah (Sultan Papua III)**, Gubernur Pertama Irian Barat 1956 yang dilantik Presiden Soekarno di Denpasar Bali.

Dari berbagai versi kedatangan Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa tempat asal kedatangan agama Islam dari Bacan, Maluku Utara yang dibawa oleh Sultan Bacan yang diperkirakan pertengahan abad XV. Didukung faktor ekonomis dan geografis letak kesultanan Bacan dibandingkan dengan ketiga kesultanan lainnya di Malauku (Ternate, Tidore dan Jailolo) lebih dekat dengan Pulau Papua, tepatnya di kepulauan Raja Ampat. Sedangkan Islam mulai melembaga kedalam struktur kekuasaan di Papua sekitar abad XVI, setelah pemimpin-pemimpin Papua

mengunjungi kerajaan Bacan pada tahun 1596 M. Dari kunjungan tersebut terbentuklah kerajaan-kerajaan Islam mini di kepulauan Raja Ampat, Sorong dan Semenanjung Onin, Fakfak. Selanjutnya pada abad XVII kesultanan Tidore secara resmi mengambil alih kekuasaan pulau Papua dari kesultanan Bacan.

Penguasaan Kesultanan Bacan atas Papua, juga dikatakan Arnold bahwa suku-suku di daratan Papua serta pulau-pulau sebelah barat lautnya seperti Waigeo, Misool, Waigama, dan Salawati. Pada abad XVI pulau-pulau tersebut dan juga Semenanjung Onin di barat laut daratan Papua telah tunduk kepada Sultan Bacan, salah seorang Raja Maluku. Melalui pengaruh Raja Bacan ini maka para pemuka masyarakat pulau-pulau tadi memeluk Islam dan meskipun masa rakyat pedalaman masih tetap menganut animisme, tetapi rakyat pesisir adalah Islam.

Pendapat Arnold di atas, didukung pula oleh sebuah catatan sejarah Kesultanan Tidore yang menyebutkan bahwa pada tahun 1443 M. Sultan Ibnu Mansur (Sultan Tidore X atau Sultan Papua I) memimpin ekspedisi kedaratan tanah besar (Papua). Setelah tiba di wilayah pulau Misool, Raja Ampat, maka Sultan Ibnu Mansur mengangkat Kaicil Patra War putera Sultan Bacan dengan gelar Komalo Gurabesi (Kapita Gurabesi). Kapita Gurabesi kemudian dikawinkan dengan puteri Sultan Ibnu Mansur bernama Boki Tayyibah. Kemudian berdiri empat kerajaan di kepulauan Raja Ampat tersebut adalah Kerajaan Salawati, Kerajaan Misool/Kerajaan Sailolof, Kerajaan Batanta dan Kerajaan Waigeo. Selanjutnya agama Islam dikembangkan oleh para pedagang muslim dari Arab, Aceh, Jawa, Bugis, Makassar, Buton, Banda, Seram, Goram dan lain-lain.

Dipeluknya Islam oleh masyarakat Papua terutama di daerah pesisir barat pada abad pertengahan XV, tidak lepas dari pengaruh kerajaan-kerajaan Islam di Maluku (Bacan, Ternate dan Tidore) yang semakin kuat dan sekaligus kawasan tersebut merupakan jalur perdagangan rempah-rempah (*silk road*) di dunia. Sebagaimana ditulis sumber-sumber Barat, Tome Pires yang pernah mengunjungi

Nusantara antara tahun 1512-1515 M.⁷¹ dan Antonio Pegafetta yang tiba di Tidore pada tahun 1521 M. mengatakan bahwa Islam telah berada di Maluku dan raja yang pertama masuk Islam 50 tahun yang lalu, berarti antara tahun 1460-1465 M.⁷² Berita tersebut sejalan pula dengan berita Antonio Galvao yang pernah menjadi kepala orang-orang Portugis di Ternate (1540-1545 M.) mengatakan bahwa Islam telah masuk di daerah Maluku dimulai 80 atau 90 tahun lalu.⁷³

Menurut Naidah yang merupakan penulis Istana, mengkisahkan proses terbentuknya Kesultanan Ternate yang dimulai dari penggabungan beberapa *momolij* (persekutuan suku) menjadi *kolano* (kerajaan) dan diakhiri dengan pembentukan kesultanan. Pengalihan *kolano* menjadi Kesultanan Ternate ditandai dengan pemberian gelar sultan kepada Zainal Abidin (1486-1500 M.) sekembali belajar agama Islam di Giri.⁷⁴ Zainal Abidin sebagai Sultan pertama dari Ternate ketika bersumpah dinyatakan fungsinya sebagai khalifah Allah di bumi untuk memelihara agama memakmurkan masyarakat.⁷⁵ Atas dasar itulah Sultan berusaha untuk menyebarkan Islam ke daerah-daerah kekuasaannya.

⁷¹ Armando Cortesao (ed.), *The Suma Oriental of Tome Pires: An Account of the East from The Red Sea To Japan, written in Malacca and India in 1512-1515, and the book of Francisco Rodrigues*, Vol I, London: Hakluyt Society, 1994, hlm. 213.

⁷² Italian Embassy, *Il Marcopolo*, No.13-14, Jilid V, Juli-Desember, 1963, hlm. 6.

⁷³ Hubert Th.Th.M Jacobus, *A Treatise on the Moluccas (1544) Probably the Preliminary version of Antonio Galvao's lost Historia*. Edited, Annotated, and Translated into English from the Portuguese Manuscript in the Archivo General de Indias, Seville Rome-Italy, 1970/1971. hlm.83-85.

⁷⁴ Naidah mengatakan bahwa sampai dengan masa Kaicil Sia (Tjitjo) syariat atau agama Islam belum kuat. Namun setelah Kolano Marhum (1463-1480 M.) bersama anaknya Zainal Abidin memperdalam agama Islam di Jawa dan setelah mereka kembali, Islam di Ternate lebih mantap. Lihat: P. van Der Crap, *Geschiedenenis Van ternate in Ternateanschen an Maleischen teks Beschreven door den Ternatean Naidah met Vertaling an antekeningen*, dalam *Tijdschrift van het Koninklijk Instituut*, Jilid II, 1985, hlm. 391. Lihat pula: Uka Tjandrasasmita, *Sejarah Nasional Indonesia, Jilid III*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977, hlm. 94.

⁷⁵ Hubert Th.Th.M Jacobus, *Sejarah Gereja di Indonesia*, Jakarta: Badan Penelitian Kristen, 1966, hlm. 111. Mengenai penggunaan gelar sultan, Clercq mengatakan bahwa meskipun dua orang raja dari kerajaan Tidore pada abad XIV yaitu Akhiruddin (1343 M.) dan Hasan Syah (1372 M.) tetapi mereka belum menggunakan gelar Sultan. Sultan pertama Tidore adalah Tjiliati atau Sultan

Sementara menurut sejarawan lisan (*oral history*) Maluku mengisyaratkan bahwa Islam telah datang ke Maluku pada pertengahan abad XIII.⁷⁶ Valentijn mengatakan sejak raja Ternate Comala atau Etsili Naay (memerintah 1304-1317 M.) yang ibunya orang Melayu, telah terdapat orang-orang Jawa dan Melayu di Ternate. Sedangkan pada masa pemerintahan Raja Sida Arif Malamo atau Etsili Aiya (1322-1331 M.) di Ternate telah dijumpai sekelompok orang-orang Arab dari Jawa.⁷⁷ Memperhatikan

Jamaluddin yang diangkat pada tahun 1495 M., sembilan tahun setelah Zainal Abidin. Besar kemungkinan, kerajaan Jailolo dan Bacan baru menggunakan gelar Sultan setelah Ternate. Lihat: F.S.A. Clercq, *Bijdragen tot de kennis der Residentie Ternate*, Leiden 1890, hlm. 149. Lihat pula: M. Shaleh Putuhena, "Proses Perluasan Agama Islam Di Maluku Utara" dalam M. Jusuf Abdulrahman, (*et.al.*), *Ternate Bandar Jalur Sutera*,hlm. 63.

⁷⁶ Islam datang pertama ke Maluku dibawa oleh empat orang ulama dari Irak untuk menyiarkan Islam di daerah cengkik itu, keempat orang yang dikatakan berpaham syi'ah itu adalah Syaikh Mansur, Syaikh Ya'kub, Syaikh Amin, dan Syaikh Umar. Selanjutnya Syaikh Mansur menyiarkan Islam di Ternate dan Halmahera Muka, daerah pulau Halmahera yang berhadapan dengan Ternate, Syaikh Ya'kub yang berdakwah di Tidore dan Makian. Sementara Syaikh Amin, dan Syaikh Umar, keduanya menyebarkan Islam di Islam di Halmahera Belakang, (bagian Timur), Maba dan Patani dan sekitarnya. Mereka berdua dikabarkan pulak ke Irak. Seperti biasanya, sumber tradisi lisan ini tidak menyebutkan waktu kedatangan keempat Syaikh tersebut. Naidah, sekretaris Kesultanan Ternate dalam bukunya *Hikayat Ternate*, tidak mencatat keempat Syaikh itu. Ia justru menceritakan tentang kedatangan seorang keturunan Nabi Muhammad yang bernama Ja'far Shadik yang disebut juga Ja'far Nuh. Menurutnya Ja'far Nuh telah sampai di Ternate *bilang tahun islam anam ratus ampat poeloh tiga anam hari boelan muharam harinya isnen* (senin, 6 Muharram 643 H.) bertepatan dengan 5 Juni 1245 M. Menurut Naidah, Ja'far Shadik yang telah kawin dengan Nur Sifa, putri setempat, adalah ayah tiri *kolano* atau raja dari empat kerajaan dalam konfederasi *Moloku Kie Raha* (Persekutuan Empat Gunung atau Kerajaan), masing-masing adalah Makian, Jailolo, Tidore dan Ternate. Lihat: P. van Der Crap, *Geschiedenenis Van ternate*...hlm. 491 & 383; Lihat pula: M. Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2007, hlm. 99-100.

⁷⁷ Francois Valentijn, *Oud en Nieuw Oost-Indien met aanteekeningen, volledige Inhoudsregisters, chronologische lijsten enz.*, vol. I, Uitgegeven door Dr. S. Keijzer, derde deel, Amsterdam: 'S-Gravenhage, 1858, hlm. 134-135. Buku ini ditulis oleh Valentijn berdasarkan penelusuran kembali sejarah kaum bangsawan dan legenda masyarakat Maluku sampai kira-kira tahun 1200 M. yang diterjemahkan dari kumpulan tulisan Bapak sejarah Maluku, yakni seorang ulama bernama Rijali dari Hitu. Buku ini terdiri 8 jilid berisikan data yang cukup lengkap perihal sejarah, masyarakat, geologi, laut, flora, dan fauna dan lainnya yang ada pada teritorial Belanda. Menurut Rijali, raja Ternate pertama bernama Guna berkuasa sekitar pertengahan abad XIII, bentuk kehidupan masyarakat masih sangat liar dan primitif, tetapi 250 tahun kemudian masyarakat mulai berbudaya dan beragama menurut ajaran Muhammad. Kemajuan dalam bidang kebudayaan di Ternate di bawah kekuasaan Kaicil Gapi Baguna (berkuasa dari 1432-1465). Ia mengundang para pedagang Cina, Arab, dan Jawa, yang sejak lama mengadakan relasi dagang untuk menetap dan menularkan ilmu pengetahuan mereka. Seorang pedagang Muslim asal Jawa bernama Maulana Husain, yang dengan al-Qur'an telah mengajari seni membaca dan menulis al-Qur'an. Maka tak lama kemudian raja dan orang-orang penting dan berpengaruh lainnya mulai masuk Islam sehingga memeluk agama dan orang terpelajar menjadi simbol bagi kaum yang berkuasa. Selanjutnya perkembangan Islam semakin kuat dan mendalam di bawah kekuasaan raja Zainal Abidin (1480-1500) yang bergelar Raja *Bulawa/Raja*

keterangan dari pelbagai sumber di atas, maka Putuhena menyimpulkan bahwa orang-orang asing yang beragama Islam telah berada di Maluku (Ternate) setidaknya tidaknya dalam abad XIII, sedangkan Islam telah melembaga pada pertengahan abad XV.

Memang tak dapat disangkal bahwa sejak abad VIII hubungan perdagangan Arab-India-Nusantara-Tiongkok sudah mulai ramai, tetapi Nusantara baru merupakan tempat persinggahan. Karena itu, Maluku yang letaknya jauh dari perdagangan maritim Samudera Hindia belum tersentuh oleh pedagang-pedagang Arab pada abad VIII.⁷⁸ Menurut sumber sejarah Cina (catatan dari Wang Ta-Yuan, 1349) yang dikutip oleh Anthony Reid, hubungan perdagangan langsung antara Cina dan Maluku hanya terwujud hingga pertengahan abad XIV. Ekspedisi Cheng Ho⁷⁹ selama di Nusantara hingga 1435 juga tidak mencapai Maluku.⁸⁰ Sejak para pedagang Cina tidak muncul lagi di Maluku pada pertengahan abad XIV, peranan mereka digantikan oleh orang-orang dari Jawa, Sumatera, Makasar dan Tagalok. Maka sejak itu majapahit menjadi bagian penting dari perdagangan rempah-rempah dari Maluku. Mpu Prapanca dalam *Negarakertagama* (1365) sempat mencatat adanya “Maloko” yang dapat diartikan sebagai empat pusat kekuasaan di Maluku Utara atau yang lazimnya dinamakan “Maloko Kie Raha”⁸¹.

Cengkeh, setelah belajar Islam di Giri, Jawa. Lihat pula: Des Alwi, *Sejarah Maluku*,hlm. 296-298.

⁷⁸ Lihat; M. Shaleh Putuhena, “Proses Perluasan Agama Islam Di Maluku Utara”, hlm. 61-62.

⁷⁹ Cheng Ho lahir pada tahun 1371 M. Pada Dinasti Ming, ketika jatuh Dinasti Yuan Lihat: Kong Yuanzhi, *Muslim Tionghoa Cheng Ho, Misteri Perjalanan Muhibah Nusantara*, Alih Bahasa: M. Hembing Wijayakusuma, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2007), Cet. Ke-3, hlm. xx-xxi. Cheng Ho melakukan ekspedisi ke Nusantara sebanyak 7 kali dari tahun 1405 M. sampai dengan 1433 M. Armada yang dipimpin Cheng Ho lebih dari 27.550 orang. Baca: Ma Huan, *Ying-Yai Sheng-Lan: The Overall Survey of the Ocean's Shores*, alih babasa: J.V.G. Mills, Cambridge: Cambridge University Press, 1970, hlm. 10-15.

⁸⁰ Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680*. Vol Two: Expansion and Crisis, Chiangmai: Silkworm Books, 1993, hlm. 4.

⁸¹ Richard.Z. Leirissa, *Halmahera Timur dan Raja Jailolo*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Berdasarkan informasi kedatangan Islam di Maluku di atas, maka sumber-sumber sejarah lisan Papua yang mengatakan bahwa Islam telah datang pada XIII, dianggap lemah. Karena ketika itu kehidupan masyarakat Maluku masih sangat primitif, bagaimana mungkin mereka dapat menyampaikan dakwah Islam ke Tanah Papua. Kemudian baru pada pertengahan abad XV, ajaran Islam mulai dipelajari dan berkembang luas di kalangan bangsawan dan masyarakat Maluku, juga Islam mulai melembaga ke dalam struktur kerajaan-kerajaan di Maluku ketika itu. Jadi dengan semakin kuatnya kesultanan-kesultanan di Maluku, maka mereka semakin terdorong untuk memperluas daerah kekuasaannya ke Papua, sekaligus memperkenalkan Islam.

B. Pola Penyebaran Islam

Antara kedatangan Islam, terbentuknya masyarakat Muslim, lebih-lebih munculnya kerajaan-kerajaan Muslim, mengambil proses waktu berabad-abad. Demikian pula proses tersebut melalui bermacam-macam saluran yang tentunya menguntungkan kedua belah pihak yaitu baik bagi orang-orang Muslim sendiri. Secara garis besar proses penyebaran Islam dapat melalui berbagai saluran seperti: perdagangan, perkawinan, birokrasi pemerintahan, pendidikan (pesantren), tasawuf, cabang-cabang kesenian dan lain-lain.⁸²

Pola penyebaran Islam di Tanah Papua, juga melalui beberapa saluran antara lain sebagai berikut:

1. Saluran Perdagangan

Proses Islamisasi awal di pulau Papua, menurut Leeden⁸³ dan Mansoben⁸⁴ diterima melalui hubungan perdagangan antara kerajaan-kerajaan di kepulauan

⁸² Uka Tjandrasmita, *Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-Kota Muslim di Indonesia Dari abad XIII samapai XVIII Masehi*, Kudus: Menara Kudus, 2000, hlm. 28.

⁸³ A.C. van der Leeden, "The Raja Ampat Island: A Brief General Description" dalam E.K.M. Mansinambow (ed.), *Halmahera dan Raja Ampat Konsep dan Strategi Penelitian*, Jakarta: Bharata-Karya Aksara, 1980, hlm. 19.

⁸⁴ Mansoben, *Sistem Politik Tradisional*,hlm. 262.

Maluku dengan kerajaan-kerajaan di kepulauan Raja Ampat pada abad XV. Karena itu maka pemeluknya hanya terbatas pada kelompok-kelompok yang terlibat dalam kegiatan perdagangan. Selanjutnya dengan masuknya Islam sejumlah penguasa kerajaan, terjadilah hubungan antara penguasa dari satu kerajaan dengan kerajaan lainnya. Karena itu maka kesamaan agama para penguasa di kepulauan Raja Ampat dan para penguasa di kepulauan Maluku Utara menyebabkan kemudian faktor agama menjadi legitimasi dan simbol kekuasaan. Implikasinya ialah agama Islam dijadikan sumber pengabsahan kekuasaan di kalangan para penguasa di kepulauan Raja Ampat.

Kamma menyatakan bahwa penyair Prapanca dalam buku *Negarakertagama* pada abad XIV melukiskan betapa luasnya Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Di dalamnya ada daerah Onin (Fakfak), yaitu sebuah daerah semenanjung yang terbagi atas sejumlah kerajaan mini, ketika itu sudah menghasilkan buah pala. Selain itu, juga budak yang dirampok dari Teluk Berau (Kepala Burung Barat Daya). Perdagangan budak dan buah pala itu rupanya sudah berada di tangan orang-orang Seram dan Goram, negeri asal datangnya raja-raja kecil yang kemudian bersama Ternate dan Tidore beralih masuk Islam. Pada tahun 1663 N. Vinck penemu Teluk Bintuni (Manokwari) sudah melihat adanya Islam disitu.⁸⁵

Raja Ampat dan Semenanjung Onin (Fakfak) sudah lama berfungsi sebagai daerah tujuan para pedagang dari berbagai wilayah lainnya di Nusantara, maupun pedagang mancanegara. Kedatangan para pedagang ini adalah dalam rangka mencari rempah-rempah, kulit masoy, memburu burung cenderwasih dan membeli budak

⁸⁵ F.C Kamma, *Dit Wonderlijke Werk*, terj. "Ajaib di Mata Kita: Masalah Komunikasi antara Timur dan Barat Selama Seabad Perikabaran Injil Di Irian Jaya, Jilid III, alih bahasa Koesalah Soebagyo Toer, Jakarta: Gunung Mulia, 1993, hlm. 428. Kamma mengutip dari A. Haga, *Nederlandsch Nieuw Guinea en Papoesche eilanden*, Vol. 2, Den Haag, 1884, hlm. 81. Berkaitan dengan pembelian budak dari Papua, ada sebuah cerita dari Kerajaan Majapahit di era Raja Angka Wijaya (1355-1360 M.). Ketika raja mengalami sakit keras, maka disarankan oleh *tabib* (orang yang ahli dalam pengobatan) untuk sembuh hanya ada satu jalan yakni harus hidup bersama dengan salah satu budak wnitanya yang berambut keriting, dari hasil hubungannya lahir putranya yang bernama Bundan Kajawan. Lihat: Thomas Stamford Raffles, *The History of Java*, alih bahasa Eko Prasetyaningrum (et.al), Yogyakarta: Narasi 2008, hlm. 466-7.

belian. Laporan Miguel Roxo Debrito, mencatat bahwa pada tahun 1581 M. para pedagang datang selain mencari rempah-rempah, mereka juga mencari barang-barang tambang seperti emas, perak dan batu mulia.⁸⁶

Kontak perdagangan antara penduduk Papua dengan dunia luar terjadi karena pulau Papua dikenal dengan sebutan *Golden Isle* (Pulau Emas), kawasan Kepulauan Raja Ampat dikenal kaya akan hasil laut (mutiara) dan hasil bumi lainnya. Kondisi demikian menurut Clereg menjadi alasan utama dan mampu memainkan peranan penting dalam perdagangan regional pada masa lampau dan sekarang. Akibat perdagangan tersebut, terutama pada masa lampau, ialah terlibatnya penduduk daerah kepulauan Raja Ampat dalam hubungan dengan orang-orang asing (pedagang-pedagang asing) baik berasal dari kepulauan Maluku maupun dengan pedagang-pedagang yang berasal dari Sulawesi dan Jawa.⁸⁷

Menurut Luis Vaes de Tores, bahwa kira-kira tahun 1606 M., tepatnya di daerah pesisir Onin (Fakfak) telah menetap orang-orang Pouton (mungkin Buton) disana. Mereka membuka usaha perdagangan di daerah itu sambil melakukan penyebaran agama Islam. Melalui pedagang-pedagang Islam inilah penyebaran agama Islam dimulai di beberapa daerah di Kabupaten Fakfak seperti : Kokas, Kaimana, Namatota, Kayu Merah, Aiduma serta serta Lakahia.⁸⁸

Namun menurut Des Alwi, pada awal abad XVII, pulau-pulau Maluku lainnya, Halmahera (Jailolo), Seram, dan Papua memainkan peranan yang amat kecil atau bahkan tidak berarti sama sekali di dalam perputaran sejarah regional kawasan

⁸⁶ Sollewijn Gelpke, "Report of Miguel Roxo Debrito of His Voyages in 1851-1852 to Raja Ampat, The Mac Cleur Gulf and Seram", in *Bijdragen tot de Taal Land en Volkenkunde*, Vol. 150, (Leiden: 1994). Hlm. 135. Para Pelaut ini melaaporkan bahwa penduduk Onin banyak menghasilkan kerajinan tangan dari emas dan menggunakannya sebagai anting dan di telinga dan kalung pada leher.

⁸⁷ Mansoben, Josh Robert, "Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya, Indonesia: Studi Perbandingan", *Disertasi*, Univerisitas of Leiden, hlm. 190.

⁸⁸ Elizabeth Bahba, "Profil Keagamaan di Kabupaten Fakfak dan Implikasinya Bagi Gereja Kristen Injili di Irian Jaya", *Skripsi*, Malang: Sekolah Tinggi Teologia "I-3" Batu Malang 1997, hlm. 15.

ini. Seram merupakan tempat suku asli Arifutu yang buas dan berani. Di jazirah Huamual (Seram Barat) orang-orang Ternate mendominasi kampung-kampung tersebut, pada awal abad XVII mereka memproduksi dan menjual hasil cengkeh secara gelap. Kecuali kota Ambon menjadi besar dan makmur sebagai pusat kegiatan Belanda yang menjadi imbalan kota Batavia saat itu. Karena Ambon menghasilkan cengkeh yang berlimpah-limpah dan Banda menghasilkan pala, tetapi Ternate dan Tidore menjadi parasit sehingga perlu mendapat tunjangan yang cukup besar, agar tidak jatuh ke tangan musuh.⁸⁹ Sementara Papua dihuni oleh suku-suku primitif hanya menghasilkan sedikit kayu cendana, kulit penyusut dan rempah-rempah yang diproses secara serampangan. Tetapi Papua tetap dikenal oleh orang luar kecuali oleh para pedagang Budak dari Tidore dan sesekali ada operasi militer Belanda untuk menindas kegiatan para bajak laut dan penganiayaan (potong kepala) disana.⁹⁰

Berdasarkan berbagai sumber-sumber di atas, mendukung pendapat Mansoben bahwa agama besar pertama yang masuk di Papua adalah Islam. Agama Islam yang masuk di Papua, yaitu di daerah kepulauan Raja Ampat dan daerah Fak-Fak berasal dari kepulauan Maluku dan disebarkan melalui hubungan perdagangan yang terjadi antara kedua daerah tersebut. Agama ini disebarkan para pedagang Islam yang berasal dari Kepulauan Maluku atau dibawa oleh orang-orang Papua sendiri yang melakukan pelayaran perdagangan ke daerah tersebut.⁹¹

2. Saluran Sosio Kultural

Sebelum adanya sistem kesultanan yang diperkenalkan oleh Kesultanan Islam di Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo, maka Jazirah Bomberay (Fakfak dan Kaimana) serta kepulauan Raja Ampat, telah lama menjalin hubungan tradisional dengan daerah-daerah lainnya di Maluku. Karena penduduk di Papua dan Maluku serta

⁸⁹ Des Alwi, *Sejarah Maluku: Banda Naira, Ternate, Tidore dan Ambon*, Jakarta: Dian Rakyat, 2005, hlm. 292-293.

⁹⁰ Des Alwi, *Sejarah Maluku: Banda Naira*, hlm. 293.

⁹¹ Mansoben, "Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya,hlm. 37

Maluku Utara adalah memiliki kedekatan etnik dan kultural sebagai akibat migrasi dan perpindahan penduduk yang berlangsung silih berganti dari dan ke Maluku dan Papua. Dalam relasi etnik kultural mereka yang berlangsung ini, kehidupan masyarakat sebelum masuknya Islam, hubungan kekeluargaan dan kekerabatan telah lama terjadi. Seringkali kedekatan etnik dan kultural ditemui dalam cerita mitos atau legenda-legenda dari berbagai suku (marga) yang ada di kedua daerah tersebut.⁹²

Bahasa-bahasa yang mereka pakai tergolong bahasa-bahasa dari rumpun Austronesia seperti bahasa-bahasa di Bacan dan Sula (bahasa Biak di Raja Ampat dan Patani serta Tobelo dan bahasa Onin di Fakfak dan Seram, maupun non Austronesia seperti di Ternate, Tidore, dan Jailolo, karena masuk golongan Bahasa Halmahera Utara bahasa Galela).⁹³ Jazirah Bomberay (di dalamnya terdapat Jazirah Onin), pantai selatan Kepala Burung adalah suatu wilayah yang terikat bersama dalam satu sejarah kebudayaan. Ini meliputi suatu wilayah dimana hidup beragam suku dengan bahasanya masing-masing, tetapi dapat pula disatukan dalam suatu bahasa yang menghubungkan keseluruhan wilayah ini. Secara karakteristik memiliki akar kebudayaan yang sama (*common cultural roots*), hal ini tidak saja meliputi penduduk di pesisir pantai Jazirah Bomberay (Fakfak dan Kaimana), Kepulauan Raja Ampat dan daratan Sorong, juga Babo, Teluk Bintuni (Manokwari) dan Seram bagian Timur (Geser dan Gorom). Halmahera bagian selatan, dan pulau Saparua di Maluku. Seluruh wilayah ini diikat bersama dalam satu kebudayaan, yaitu kebudayaan Onin atau pengaruh Onin dalam alur migrasi suku-suku sejak masa prasejarah Papua hingga abad-abad yang silam.

Bahasa Onin yang telah lama digunakan bersama sebagai *lingua franca*⁹⁴ atau digunakan bersama sebagai bahasa (alat) komunikasi perdagangan dan

⁹² F.K.M. Mansinambow, *Halmahera dan Raja Ampat, Konsep dan Strategi Penelitian*, Jakarta: Leksas-LIPI, 1980.264-270

⁹³ Mansinambow, *Halmahera dan Raja Ampat*,..... hlm.264-270

⁹⁴ J.C. Anceaux, "Language of the Bomberay Peninsula, Outline of a Linguistic Map" in *Nieuw Guinea Studien*, Den Haag: 1958, hlm. 109-120.

penyebaran Agama Islam. Bahasa Onin jauh sebelumnya telah digunakan sebagai bahasa pengantar perdagangan dan bersifat lintas budaya serta merupakan bahasa elit perdagangan (*elite trade language*). Ia tidak digunakan sebagai bahasa pergaulan masyarakat biasa, akan tetapi oleh para pedagang (dalam hal ini elit ekonomi dan politik) yakni orang-orang yang berpengaruh dalam memimpin masyarakat seperti para raja dan mereka yang biasa melayari pesisir pantai selatan Kepala Burung dan Jazirah Bomberay (Fakfak dan Kaimana) dalam rangka berdagang dan tujuan-tujuan lainnya.

Inilah suatu realitas etnis (etnografi) kesejarahan antropologi yang merupakan potensi bagi jalur perdagangan dan penyebaran agama Islam pada masa lalu. Juga, karena didorong oleh perhatian dan adanya berbagai nilai yang mendasar yang mempersatukan berbagai suku yang mendiami Jazirah Bomberay (Fakfak dan Kaimana) dan pantai selatan Kepala Burung, karena mereka berada dalam lingkup pengaruh kebudayaan Onin yang saling terikat dengan sesamanya melalui kebudayaan lokal dan mereka yang secara bersama menggunakan bahasa-bahasa yang secara umum masih termasuk dalam suatu rumpun (keluarga) besar bahasa-bahasa (*one great linguistic family*).⁹⁵

Menurut Kamma, seorang misionaris Kristen mengatakan bahwa pedagang-pedagang yang datang ke Papua hampir semuanya beragama Islam. Meskipun penyebaran agama ini hampir semua tempat terjadi melalui perdagangan, tetapi pengaruh pedagang-pedagang tersebut kepada orang Papua dapat diabaikan. Soalnya orang yang masuk Islam tidak boleh lagi menikmati daging babi. Ini merupakan faktor penting, karena babi itu merupakan satu-satunya hewan besar di Papua dan memainkan peranan penting dalam pertukaran barang dan bahan makanan untuk perkawinan. Biasanya yang berpindah kepada agama Islam hanyalah wanita-

⁹⁵ J.F. Onim, *Islam & Kristen Di Tanah Papua: Meniti Jalan Bersama Hubungan Islam-Kristen Dalam Sejarah Penyebaran dan Perjumpaannya di Wilayah Semenanjung Onin Fakfak*, Bandung: Jurnal Info Media, 2006, hlm. 48-49.

wanita muda yang telah kawin dengan pedagang-pedagang itu. Namun ada juga faktor-faktor yang menguntungkan agama Islam dibandingkan dengan zending Kristen. Kaum pedagang Muslim tidak berkeberatan terhadap pesta-pesta orang Papua, malahan sebaliknya pesta itu merupakan kesempatan meraih keuntungan. Sebaliknya zending Kristen melarang penyelenggaraan pesta-pesta tersebut. Juga diperbolehkan poligami di dalam ajaran Islam, merupakan hal yang menarik bagi orang Papua.⁹⁶

Dari informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa dari kedekatan dan kesamaan etnik dan kebudayaan antara Maluku dan Papua. Juga para pedagang-perdagangan Muslim dalam menyampaikan ajaran Islam lebih akomodatif dengan budaya penduduk setempat. Maka ketika itu agama Islam dapat diterima lebih mudah dan baik oleh mayoritas masyarakat pesisir di Kepulauan Raja Ampat-Sorong, Fakfak, Kaimana, Babo dan Teluk Bintuni di Manokwari

3. Saluran Politik

Menurut Arnold bahwa pada abad XVI Sultan Bacan⁹⁷ salah seorang Raja Maluku⁹⁸ telah menguasai suku-suku di Papua serta pulau-pulau di sebelah barat laut, seperti Waigeo, Misool, Waigama, dan Salawati. Kemudian Sultan Bacan meluaskan kekuasaannya sampai semenanjung Onin (Fakfak), di barat laut Papua pada tahun 1606 M., melalui pengaruhnya dan para pedagang Muslim maka para pemuka

⁹⁶ F.C. Kamma, *Ajaib di Mata Kita*, Jilid III,hlm. 350.

⁹⁷ Raja Bacan pertama yang masuk Islam bernama Zainal Abidin, yang memerintah tahun 1521 M. bersamaan dengan datangnya bangsa Portugis kesana.

⁹⁸ Asal-usul raja Maluku yang juga diceritakan naskah Galvao, yakni bahwa empat bersaudara yang lahir dari tiga lelaki dan seorang perempuan: masing-masing menjadi cikal-bakal raja Bacan, Raja Papua, Raja Buton dan Raja Banggai, sedangkan sang puteri kawin dengan Raja Loloda, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada waktu naskah ini ditulis atau setidaknya pada masa Galvao berada di Ternate (1538-1539 M.), kesatuan empat serangkai yang dikenal dengan Moloku Kie Raha sekarang, belum dikenal. Lihat: Adrian B. Lopian, "Ternate Sekitar Pertengahan Abad XVI", dalam M. Yusuf Abdulrahman, *et.al.*, *Ternate Bandar Jalur Sutera*, Ternate: LInTas, 2001, h. 42.

masyarakat pulau-pulau tadi memeluk agama Islam. Meskipun masyarakat pedalaman masih tetap menganut animisme, tetapi rakyat pesisir adalah Islam.⁹⁹

Sementara itu, menurut Arnold bahwa agama Islam disambut dengan hangat oleh suku-suku bangsa yang lebih maju peradabannya di antara penduduk kepulauan Nusantara dan kurang mendalam di kalangan penduduk yang lebih bersahaja. Misalnya suku-suku di daratan Papua serta pulau-pulau sebelah barat lautnya seperti Waigeo, Misool, Waigama, dan Salawati. Pada abad XVI pulau-pulau tersebut dan juga Semenanjung Onin di barat laut daratan Papua tunduk kepada Sultan Bacan, salah seorang Raja Maluku. Melalui pengaruh Raja Bacan ini maka para pemuka masyarakat pulau-pulau tadi memeluk Islam dan meskipun masa rakyat pedalaman masih tetap menganut animisme, tetapi rakyat pesisir adalah Islam.¹⁰⁰ Klein mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin Papua mengunjungi kerajaan Bacan pada tahun 1596 M dan dari kunjungan tersebut terbentuklah kerajaan-kerajaan Islam.¹⁰¹

Di masa kesultanan Tidore dan Ternate, setelah menaklukkan kekuasaan Kesultanan Bacan atas Papua, maka terjadi interaksi yang intensif dan mendalam, tidak hanya di bidang perdagangan, tetapi juga politik sehingga tanah Papua diklaim sebagai wilayah kekuasaan Kesultanan tersebut. Ada banyak catatan sejarah yang membuktikan hal ini dan hal itu juga diakui secara tidak langsung oleh masyarakat Papua abad XX kekuasaan Tidore tidak saja terbatas pada Kepulauan Raja Ampat, melainkan juga mencakup bagian utara Kepala Burung, pulau-pulau dan pantai di Teluk Cenderawasih, sampai pada pantai Sarmi di sebelah Timurnya.¹⁰² Intensifnya hubungan perdagangan dan politik dengan Tidore, dapat dilihat dari diserapnya kosa

⁹⁹ John Crawfurd, *A Descriptive Dictionary of Indian Islands and adjacent Countries*, London: 1856, hlm. 143.

¹⁰⁰ Arnold, *The Preaching of Islam*, hlm. 402- 4.

¹⁰¹ W.C. Klein, *Nieuw Guinea, De Ontwikkeling Op Economisch, Sosial, En Cultureel Gebeid*, In Nedherland Nieuw Guinea, Deel I, S'Gravenhage: Drukkerij-en Uitgeverijbedrijf, 1953.

¹⁰² W. Seiler, "The Spread of Malay to Kaiser Wilhelmsland", dalam Rainer Carle (et.al), "Gasva, Studies in Austronesia Language and Culture", Veroffentlichungen des Seminars fur Indonesische und Sudseesprachen der Universitat Hamburg, vol. XVII, Berlin Reimer Verlag, 1982, hlm. 67-85

kata atau kata bahasa Tidore *kolano* yang berarti raja dalam beberapa bahasa setempat, misalnya dalam bahasa Biak*koranu* (raja) dan dalam bahasa Sarmi*korano* (penghulu).

Berdasarkan cerita rakyat dan informasi dari Tidore, sebagaimana yang di kutip Koentjaraningrat bahwa sejak abad XV, pulau Biak telah menjadi wilayah Kesultanan Tidore, salah seorang tokoh setempat bernama Gurabesi diangkat sebagai Pejabat di Kesultanan Tidore, bahkan dijadikan menantu Sultan. Gurabesi inilah yang kemudian melahirkan Raja-raja di kepulauan Raja Ampat. Demikian pula Sultan Tidore banyak mengangkat tokoh-tokoh Biak menjadi pejabat daerah di Biak dan memberikan gelar jabatan seperti *Kapitan, Sangaji, Korano, Dimara, Mayor* dan sebagainya.¹⁰³

Kerajaan-kerajaan di Raja Ampat yang tetap mengirimkan upeti kepada Sultan Tidore seperti Raja Waigeo, Raja Samate, Raja Waigama dan Raja Sailolof. Mereka tetap mengirimkan hadiah-hadiah secara teratur kepada Sultan Tidore. Pemberian hadiah dikirim secara teratur misalnya pada kerajaan Sailolof yang diberi gelar Kapita Laut oleh Sultan Tidore sejajar dengan Fun setempat. Tetapi Kapita Laut Fun Sailolof pernah membangkang pada Sultan Tidore dimana Fun (Raja) generasi IV tidak lagi mengirim upeti maka Sultan Tidore marah dan berperang dengan mereka, korban pihak Sailolof banyak berjatuhan. Fun kemudian mengadakan hubungan baik lagi dengan Sultan Tidore dan hubungan ini berjalan mulus sampai saat pemerintahan Hindia Belanda.¹⁰⁴

¹⁰³ Koentjaraningrat (*et. al*), *Penduduk Irian Barat*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1963, hlm.79-83.

¹⁰⁴ Nachrawy, *Peranan Ternate Tidore*.....hlm. 27-28.

4. Saluran Perkawinan

Islamisasi di Tanah Papua juga melalui saluran perkawinan, sebagaimana Sultan Ibnu Mansur yang bergelar Sultan Papua I, pada 1443 M ketika melakukan ekspedisi kora-kora dari negeri Gam Raange (Patani, Maba dan Weda) di pulau Halmahera menuju pulau Waigeo, Batanta, Salawati, Misool (disebut *Kolano Fat*) atau kepulauan Raja Ampat bersama armada perang yang dipimpin Kapita Syahmardan. Di wilayah pulau Misool, Sultan Ibnu Mansur mengangkat Kaicil Patra War putera Sultan Bacan dengan gelar Komalo Gurabesi (Kapita Gurabesi). Kapita Gurabesi kemudian dikawinkan dengan puteri Sultan Ibnu Mansur bernama Boki Tayyibah. Kemudian berdiri empat kerajaan di kepulauan Raja Ampat tersebut adalah Kerajaan Salawati, Kerajaan Misool/Kerajaan Sailolof, Kerajaan Batanta dan Kerajaan Waigeo.¹⁰⁵

Begitu pula perkawinan mubalighat asal Cirebon yang bernama Siti Hawa Farouk dengan Kalawen seorang laki-laki asal Waigeo-Raja Ampat. Kalawen setelah masuk Islam berganti nama menjadi Bayajid, diperkirakan peristiwa itu terjadi pada tahun 1600. Jika dilihat dari silsilah keluarga, Kalawen inilah yang merupakan nenek moyang dari Keluarga Arfan yang pertama masuk Islam.¹⁰⁶ Siti Hawa Farouk dan beberapa mubaligh datang ke Raja Ampat, kemungkinan besar juga terjadi proses perkawinan dengan puteri-puteri dari kepulauan Raja Ampat.

Jauh sebelum datangnya Belanda ke Papua, menurut Zendeling Bout, para pedagang misalnya dari Seram, Goram, Bugis, Makassar, Arab dan Cina, pada umumnya menempuh cara perkawinan untuk mempermudah melakukan aktifitas perdagangan. Orang Seram dan Goram mempunyai pengaruh yang besar di daerah ini, karena kebanyakan dari mereka kawin dengan kaum wanitanya dan menjadi imam. Juga banyak wanita Seram yang dikawinkan dengan pemuda-pemuda Fakfak

¹⁰⁵ Nachrawy, *Peranan Ternate Tidore*hlm. 33

¹⁰⁶ Bauw, "Pengaruh Hukum Islam,hlm. 34.

yang memiliki banyak harta kekayaan karena hutan pala. Melalui perkawinan tersebut, maka mereka dijadikan pemimpin-pemimpin agama Islam di daerah itu.¹⁰⁷

5. Saluran Pendidikan

Penyebaran Islam Pulau Papua juga dilakukan melalui cara pendidikan sangat tradisional, dalam hal ini dilakukan melalui pusat-pusat pengajian yang berlokasi di mushola-mushola, masjid-masjid maupun di rumah-rumah para imam, guru ngaji dan pedagan-pedagang Muslim yang berasal dari Arab, Maluku, Bugis, Makasar dan Buton. Organisasi model sekolah Islam dan pesantren belum dikenal Papua pada waktu itu. Pola pendidikan tersebut baru dikenalkan di Papua, sejak masuknya Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1963 hingga saat ini.

Menurut Ricklefs, pola penyebaran atau cara-cara Islamisasi pada umumnya berlangsung dua proses yakni: *pertama*, penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam dan kemudian menganutnya. *Kedua*, orang asing Asia (Arab, India, Cina, dan lain-lain) yang telah memeluk agama Islam bertempat tinggal secara permanen di suatu wilayah Nusantara, melakukan perkawinan campuran, dan mengikuti gaya hidup lokal, sehingga mereka itu sudah menjadi Jawa atau Melayu maupun anggota suku lainnya.¹⁰⁸

Graaf berpendapat bahwa Islam di dakwahkan di Asia Tenggara melalui tiga metode; yakni *pertama*, para pedagang muslim dalam proses perdagangan yang damai; *kedua*, oleh para dai dan orang suci (wali) yang datang dari India atau Arab yang sengaja bertujuan mengislamkan orang-orang kafir dan meningkatkan

¹⁰⁷ Lihat : F. Slump, *De Zending Op West Nieuw Guinea*, Oegstgeest: Zending Bureau, 1930, hlm. 3-33. Keadaan atau perkawinan ini sebenarnya tidak mustahil sebab hubungan atau letak geografis Seram dan Fakfak yang sangat dekat diantara keduanya. Dan hubungan komunikasi serta kekerabatan Seram dan Fakfak sudah berlangsung lama malahan jauh sebelum datangnya agama Islam maupun Kristen. Lihat pula: J.F. Onim, *Islam & Kristen Di Tanah Papua*,hlm. 103-4.

¹⁰⁸ M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia*, London: The Macmillan Press Ltd., 1983, hlm. 3.

pengetahuan mereka yang telah beriman; dan *ketiga*, dengan kekerasan dan memaklumkan perang terhadap negara-negara penyembah berhala.¹⁰⁹

Dari teori-teori Islamisasi di atas, dapat disimpulkan bahwa pola atau cara-cara penyebaran Islam di Papua, yakni dengan cara damai tanpa adanya konflik. Para pedagang Muslim, mulai mengikat hubungan yang baik dengan penduduk setempat, dengan demikian, para pedagang telah memperoleh akses yang memungkinkan mereka dapat melakukan dakwah sebagai tuntutan ajaran Islam yang dianutnya. Para pedagang dengan kelebihan-kelebihannya di bidang materi mempunyai daya tarik tersendiri dan meningkatkan status mereka dalam masyarakat, sehingga terkadang mereka dijadikan sebagai pemimpin. Maka terbetuklah perkampungan-perkampungan Islam (keturunan Arab, Maluku, Bugis, Makasar dan Buton) di daerah pesisir Barat Papua yakni terutama di Kepulauan Raja Ampat, Fakfak dan Kaimana.

Peran politik juga sangat menentukan dengan dipeluknya Islam oleh kalangan bangsawan atau kerajaan di Papua di bawah kekuasaan kesultanan dari Tidore dan Ternate. Islamisasi di Papua dilakukan secara damai tanpa adanya paksaan, ini darti terlihat banyaknya gelar-gelar jabatan yang diberikan Sultan Tidore di Manokwari, Yapen, Biak Numfor dan lain lain tetapi mereka tetap memeluk agama lokal. Adapun kesultanan di Maluku pernah memerangi kerajaan-kerajaan di Papua, karena persoalan politik yakni tidak memberikan upeti atau pajak kepada Sultan.

C. Timbulnya Kerajaan-Kerajaan (Petuanan) Islam

Taufik Abdullah menyatakan bahwa terdapat tiga konsep tentang masuknya agama Islam ke suatu daerah, yaitu: (1) datang, yang dinyatakan dengan adanya bekas peninggalan Islam di kawasan yang bersangkutan; (2) berkembang, yang dinyatakan dengan adanya masjid, pusat-pusat pendidikan dan komunitas dan sarana

¹⁰⁹ H.J. de Graaf, "South Asian Islam to the Eighteenth Century" dalam Hofl (*et.al*), *Cambridge History of Islam*, Jilid 2, London: the Cambridge University Press, 1970, hlm. 123.

keagamaan lainnya; dan (3) kekuasaan politik, dengan munculnya kekuasaan kerajaan tersebut.¹¹⁰

Dari ketiga konsep di atas, di Tanah Papua pun berdiri kerajaan-kerajaan (petuanan) Islam mini yang diberikan otonomi oleh Kesultanan di Maluku. Kerajaan-kerajaan Islam mini ini terdapat di kepulauan Raja Ampat-Sorong dan Jazirah Bomberay (Fakfak dan Kaimana). Apabila sistem kerajaan-kerajaan tradisional di Papua itu dibagi atau dikelompokkan berdasarkan letak geografisnya, kerajaan-kerajaan itu terbagi ke dalam tiga wilayah geografi utama. *Pertama*, kerajaan-kerajaan yang terdapat di wilayah geografi Kepulauan Raja Ampat. *Kedua*, kerajaan-kerajaan yang terdapat di wilayah geografi Semenanjung Onin (Fakfak). *Ketiga*, kerajaan-kerajaan yang terdapat di wilayah geografi Kowiai (Pulau Adi, Pulau Namatota dan Kaimana).¹¹¹

Pada masing-masing wilayah geografi tersebut terdapat satu atau lebih pusat kekuasaan bagi daerah-daerah sekitarnya. Meskipun masyarakat wilayah geografi tersebut mempunyai istilah tersendiri untuk menamakan pemimpinnya (raja). Misalnya di Kepulauan Raja Ampat, gelar seorang pemimpin atau raja adalah *fun* atau *kolano*, sedangkan di Semenanjung Onin (Fakfak) dan Kowiai (Kaimana) pemimpin atau raja itu disebut *rat*, namun istilah raja adalah istilah umum yang resmi digunakan untuk menyebut seorang pemimpin dalam masyarakat di daerah berkebudayaan kerajaan ini.¹¹²

Kerajaan-kerajaan kecil yang berdiri sejak beberapa abad yang lalu di kepulauan Raja Ampat, Semenanjung Onin serta daerah Kowiai (Kaimana) sesungguhnya merupakan hasil proses alkulturasi dari kebudayaan Papua dengan kebudayaan Maluku yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya. Kerajaan-kerajaan (petuanan) Islam mini di Tanah Papua adalah sebagai berikut:

¹¹⁰ Taufik Abdullah, *Agama, Etos, dan Perkembangan Masyarakat*, Jakarta: LP3ES, 1979.

¹¹¹ Mansoben, "Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya,hlm. 188.

¹¹² Mansoben, "Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya,hlm. 188.

1. Kerajaan-Kerajaan Islam di Kepulauan Raja Ampat

Pada kerajaan-kerajaan Islam di Maluku dan daerah sekitarnya mengaku eksistensi keberadaan *Kolano* (Papua: *Korano*) sebagai pemimpin/raja mereka yang dihormati dan dipercaya. Pada gugusan Kepala Burung itulah nama *Kolano Fat* yang berarti Raja Ampat terpatri hingga kini sebagai jati diri dari pulau Papua. Secara makro pulau ini dipimpin oleh Empat Sultan dari Maluku yaitu : Sultan Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo. Namun secara mikro yang dimaksudkan adalah raja-raja di kepulauan Papua yaitu Raja Salawati, Raja Misool, Raja Batanta dan Raja Waigeo.¹¹³

Kesultanan Bacan di masa Sultan Mohahammad al-Baqir lewat piagam *kasiratan* yang dicanangkan oleh peletak dasar *Mamlakatul Mulukiyah* atau *Maloku Kie Raha* (Empat Kerajaan Maluku: Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo) lewat walinya Jafar As-Shodiq (1250 M) melalui keturunannya keseluruh penjuru negeri menyebarkan syiar Islam ke Sulawesi, Philipina, Kalimantan, Nusa Tenggara, Jawa dan Papua.¹¹⁴

Terbentuknya Raja Ampat (*Kolano Fat*) di Sorong oleh Kesultanan Bacan di Papua sebagai berikut : (1) Kaicil Patra war bergelar Komalo Gurabesi (Kapita Gurabesi) di pulau Waigeo; (2) Kaicil Patra war bergelar Kapas Lolo di pulau Salawati; (3) Kaicil Patra Mustari bergelar Komalo Nagi di Misool; (4) Kaicil Boki Lima Tera bergelar Komalo Boki Saila di pulau Seram.¹¹⁵

Sebuah catatan sejarah Kesultanan Tidore “Museum Memorial Kesultanan Tidore Sinyine Mallige”¹¹⁶ mencatat bahwa pada tahun 1443 M Sultan Ibnu Mansur (Sultan Tidore X) bersama Sangaji Patani Sahmardan dan Kapitan Waigeo bernama Kapitan Gurabesi memimpin ekspedisi kedaratan tanah besar Papua. Ekspedisi yang

¹¹³ Nachrawy, *Peranan Ternate Tidore*.....hlm. 21.

¹¹⁴ Nachrawy, *Peranan Ternate Tidore Dalam Pembebasan Irian Barat*, Ternate: Yayasan Kie Raha, 2004, hlm. 16-17.

¹¹⁵ Nachrawy, *Peranan Ternate Tidore*, hlm. 17-18.

¹¹⁶ D.H. Burger, *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, Jilid II, DJakarta, Pradnya Paramita dan J.B. Walters, 1960, hlm. 39.

terdiri dari satu armada kora-kora berangkat ke tanah besar beserta pulau-pulau melewati Patani, Gebe dan Waigeo.

Ekspedisi ini berhasil menaklukkan beberapa wilayah di Papua bagian barat dan menjadikan kesultanan Tidore yang terdiri dari : (1) Wilayah Raja Ampat atau Korano Ngaruha meliputi wilayah: Kolano Waigeo, Kolano Salawati, Kolano Umsowol atau Lilinta Kolano Waigama; (2) Wilayah Papua Gamsio (Papua Sembilan Negeri) meliputi :Sangadji Umka, Gimalaha Usba, Sangaji Barei, Sangaji Boser, Gimalaha Kafdarum, Sangaji Wakeri, Ginalaha Warijo, dan Sangaji Mar Gimala Marasay; (3) Wilayah Mafor Soa Raha (atau Mafor Empat Soa) meliputi : Sangaji Rumberpon, Sangaji Rumansar, Sangaji Angaradifa dan Sangaji Waropen.

Wilayah Kepulauan Raja Ampat terdiri dari kerajaan: (1) Kerajaan Waigeo dengan pusat pemerintahannya di Weweyai, Pulau Waigeo; (2) Kerajaan Salawati dengan pusatnya dengan pusatnya di Sailolof, pulau Salawatati Selatan; (3) Kerajaan Misool dengan pusatnya di Lilinta, Pulau Misool; (4) Kerajaan Batanta.¹¹⁷

Struktur pemerintahan di Kepulauan Raja Ampat berbentuk kerajaan dibantu oleh suatu Dewan Adat yang terdiri dari Kepala Adat dimana tiap marga (*gelet*) mempunyai wakilnya di dewan. Disamping Dewan Adat Kerajaan^{fun} atau raja juga mengangkat perwakilan untuk meneruskan perintahnya di daerah yang jauh di pusat pemerintahan. Ada beberapa gelar kepala adat Raja Ampat dengan jabatannya masing-masing yang merupakan pemberian gelar dari Sultan Tidore kepada^{fun} yang secara periodisasi tetap mengantar upeti ke kerajaan Tidore. Gelar jabatan tersebut adalah: (1) Marga Metawai: kepala adatnya bergelar *jojau*; (2) Marga : kepala adatnya bergelar *hukum*; (3) Marga Umalelen: kepala adatnya bergelar *domlaha/gimalaha*; (4) Marga Gemor: kepala adatnya bergelar *sawohit*; (5) Marga

¹¹⁷ Luksan Hutagaol dkk., *Peta Sejarah Di Tanah Papua*, Jayapura: Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Papua, 2007. hlm. 10.

Ulla: kepala adatnya bergelar *Sadaha*; dan (6) Marga Umpeles: kepala adatnya bergelar *mahimo*.¹¹⁸

Disamping gelar adat, wakil-wakil *fun* di pulau Salawati bergelar *kapita umal* atau *mirimo/mahimo* di Sapan bergelar *merimo* di kepulauan Mesa kapal bergelar *sangaji* sedangkan di Seget bergelar *dumlaha*. Pada umumnya wakil-wakil diluar kerajaan bertugas mengumpulkan upeti kepada *fun* yang nantinya diteruskan ke Sultan Tidore. Adapun tugas-tugas para Kepala Adat yang membantu *fun* sebagai berikut : (1) *Jojau* mempunyai tugas mendampingi *fun* dalam menjalankan roda pemerintahan, semua perintah *fun* kepada kepala adat harus lewat *jojau*; (2) *Hukum* mempunyai tugas melaksanakan hukuman kepada orang yang bersalah, dan dijatuhi hukuman badan pada pengadilan adat; (3) *Sawohi* mempunyai tugas menjaga keamanan dalam kerajaan; (4) *Domlaha* mempunyai tugas memimpin upacara adat; (5) *Mahimo* mempunyai tugas mengumpulkan upeti dari rakyat; (6) *Sadaha moro* mempunyai tugas berhubungan dengan alam gaib; dan (7) *Kapita* bertugas mengurus kepentingan rumah tangga *fun*.¹¹⁹ Ada beberapa Sangaji untuk mewakili Sultan dalam mengatur roda pemerintahan kerajaan di wilayah Raja Ampat (Papua), antara lain : Sangaji papua Gam Sio, Sangaji Soa Raha, Sangaji Numfor, Sangaji Mareku, Sangaji Warsamdin, Sangaji Urba, Sangaji Buso, Sangaji Warjae, Sangaji Warweri, dan Sangaji Warsomden.¹²⁰

Semua atribut kebesaran kerajaan terdiri dari lenso, selendang adat, seperangkat pakaian putih berbentuk jubah pemberian dari *fun*. Bila ada kepala adat yang meninggal dunia maka diangkat seorang kepala adat baru untuk menggantinya. Untuk maksud perlehatan ini, dikumpulkan semua laki-laki secara aklamasi menunjuk marga mereka untuk menjadi kepala adat baru yang disetujui *fun* dan melantiknya dalam upacara. Pencerminkan kekuasaan *fun* dipusat pemerintahan yang

¹¹⁸ Nachrawy, *Peranan Ternate Tidore*.....hlm. 23..

¹¹⁹ Nachrawy, *Peranan Ternate Tidore*.....hlm. 24.

¹²⁰ Nachrawy, *Peranan Ternate Tidore*.....hlm. 26.

dibantu para kepala adat dan rakyat bersumber pada kerajaan atau pada pemerintahan yang telah mapan. Kekuasaan *fun* juga tercermin atas lautan dan daratan dimana pada perburuan hasil pada tangkapan pertamanya baik ikan ataupun binatang buruan harus diserahkan kepada *fun* yang juga berhak memberikan hukuman pada mereka yang lalai atau tidak menaati perintah.¹²¹

2. Kerajaan (Petuanan) Islam di Wilayah Fakfak dan Kaimana

Petuanan atau kerajaan-kerajaan di wilayah Fakfak dan Kaimana terbagi dalam sembilan petuanan, yakni: (1) Petuanan Namatota; (2) Petuanan Komisi; (3) Petuanan Fatagar; (4) Petuanan Ati-Ati; (5) Petuanan Rumbati; (6) Petuanan Pattipi; (7) Petuanan Sekar; (8) Petuanan Wertuar; dan (9) Petuanan Arguni.¹²²

Di wilayah Semenanjung Onin terdiri dari: (1) Kerajaan Rumbati; (2) Kerajaan Fatagar; (3) Kerajaan Ati-Ati . Di samping beberapa kerajaan lain yang pada mulanya di bawah kekuasaan Kerajaan Rumbati, tetapi kemudian berhasil memperoleh pengakuan sebagai kerajaan sendiri terutama pada masa awal pax Neerlandica (1989) seperti Kerajaan Patipi terdapat di ujung barat Semenanjung Onin dan Kerajaan Arguni terdapat di pulau Arguni; Kerajaan Sekar dan Kerajaan Wertuar terdapat di Kokas Teluk Berau. Di wilayah Kowiai (Kaimana) terdiri dari: Kerajaan Namatota (Kowiai) dengan pusatnya di pulau Namatota dan Kerajaan Aiduma dengan pusatnya di pulau Aiduma. Di Semenanjung Onin dan Kowiai pemimpin atau raja disebut *rat*.¹²³

Petuanan/Kerajaan Wertuar, Raja I Wertuar adalah Viihao. Penduduk meyakini bahwa asal muasal raja Viihao ini dari cahaya. Sedang raja kedua bernama Ukir dan raja ketiga adalah Winey yang beristrikan Boki Kopyiai dari Namatota. Dari sumber yang ada, disebutkan bahwa kerajaanan Wertuar dan kerajaan Namatota sudah

¹²¹ Nachrawy, *Peranan Ternate Tidore*..... hlm. 24-25.

¹²² Onim, *Islam dan Kristen di Tanah Papua*,.....hlm. 44.

¹²³ Luksan Hutagaol dkk., *Peta Sejarah Di Tanah Papua*,..... hlm. 10.

terjalin sejak abad XIV, atau bahkan lebih jauh sebelumnya sekitar tahun 1506 – 1576, dimana Raja Wertuar II hidup. Kerjasama keduanya kemudian disepakati mempertemukan anak mereka dalam wadah perkawinan.¹²⁴

Pada tahun 1886 M Sultan Tidore yang bernama Muhammad Tahir Alting¹²⁵ melantik Lakatey sebagai Raja Wertuar VII. Pelantikan ini dilaksanakan di Kampung Karek, Sekar Lama yang dihadiri oleh Abdul Jalil (Raja Rumbati) dan Abdul Majid (Raja Misool). Dijelaskan juga bahwa Raja Wertuar VII membangun masjid pertama Kerajaan pada tahun 1870 M. berlokasi di kampung Patimburak.¹²⁶

Dari kampung Ugar, Fakfak terdapat dokumen silsilah Raja-Raja Ugar, tertulis sebuah Surat Keputusan tertanggal 5 November 1929 M¹²⁷. yang diberikan Sultan Tidore kepada Maidama atau Moi Damar Ugar sebagai Kepala Kampung Ugar dengan gelar jabatan Kapitan. Moi Damar Ugar merupakan generasi V dari turunan Raja-Raja Ugar¹²⁸. Raja Ugar I bernama Rabana telah memeluk Islam hidup pada abad XVI. Kuburan Raja Ugar I, juga kuburan para imam dan khotib serta

¹²⁴ Ali Athwa, *Islam atau Kristenkah Agama Orang Irian?* Jakarta: Pustaka Da'i, 2004 .hlm.46 – 47.

¹²⁵ Dalam silsilah Sultan Tidore, tidak ditemukan nama Sultan Muhammad Tahir Alting yang tertulis adalah Sultan Mahatudin Taher (Sultan Tidore XXIX) yang hidup pada pertengahan abad XIX. Lihat: Nachrawy, *Peranan Ternate Tidore.....*hlm. 33.

¹²⁶ Wawancara dengan Musa N.P. Herembu yang merupakan generasi X dari Raja Wertuar, Fakfak: 15 November 2006.

¹²⁷ Surat Keputusan itu menggunakan bahasa Belanda dan Melayu berstempel cap Kesultanan Tidore yang bertuliskan huruf Arab. Surat tersebut menunjukkan bahwa meskipun daerah Irian Jaya saat itu telah dikuasai Pemerintah Hindia Belanda (1828 M.) tetapi kekuasaan Sultan Tidore atas pulau Papua masih tetap sah dan efektif. Lihat: Kasibi Suwiryadi, *Sejarah Da'wah Islam Islam di Irian Jaya*, Makalah Disampaikan Dalam Sarasehan Sejarah Islam di Irian Jaya di Merauke Juni 2000.

¹²⁸ Dari silsilah Raja-Raja Ugar diketahui bahwa Moi Damar Ugar adalah generasi V keturunan Raja Ugar, ayahnya bernama Hiriet Tetery dan hidup di abad XIX dikenal dengan nama Nadiwery atau Raja teluk/Raja Sholat Len atau Raja Shalat Teluk. Ayah dari Hiriet Tetery adalah Dulin Ugar yang lahir dan meninggal di Karang Buder (Tibatiba Nam) dan diperkirakan hidup pada abad XVIII. Dulin Ugar adalah anak dari Wahwa dan Wahwa adalah anak dari Rabana (Raja Ugar I) yang hidup di abad XVI. Lihat: Lukman Rahanwarat, *Islam di Kabupaten Fakfak: Suatu Tinjauan Historis*, Makalah disampaikan Dalam Sarasehan Sejarah Islam di Irian Jaya, Merauke: Juni 2000.

pengikutnya sudah bercirikan Islam. Demikian pula terdapat Kitab Barzanji yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno tahun 1622 M.¹²⁹

Petuanan/Kerajaan Fatagar. Raja Fatagar I yaitu Tewel, diperkirakan hidup pada tahun 1724 – 1814. Raja Tewel bertakhta di daerah Tubirseram, yang hijrah dari Rumbati (daerah Was). Pada saat Raja Fatagar masih di Rumbati, Islam telah berkembang yang diketahui oleh puing-puing bekas peninggalan mesjid. Hal ini berarti Islam telah hadir di kerajaan Fatagar sebelum tahun 1724 M. Menurut Raja Rumbati XVI, Islam masuk di daerah Was pada tahun 1506 M melalui perang besar antara armada kerajaan Tidore yang dipimpin Arfan dengan kerajaan Rumbati.¹³⁰

Petuanan/Kerajaan Namatota. Raja Namatota I, yakni Ulan Tua, telah memeluk Islam. Menurut pewaris petuanan Namatota hingga saat ini Raja-raja yang memegang pemerintahan merupakan generasi V. Raja Namatota II bernama Lamora diperkirakan hidup pada tahun 1778 – 1884. Raja Lamora selanjutnya datang ke daerah Kokas dan di Kokas, Raja Namatota menyebarkan Islam dan kawin dengan wanita bernama Kofia Bata, selanjutnya menjadi cikal bakal Raja-raja Wertuar. Silsilah Jain dari Kerajaan Namatota mengemukakan bahwa seorang raja bernama Kipiah juga menyebarkan agama Islam sampai di Timika dan meninggal disana.¹³¹

Petuanan/Kerajaan Komisi. Kerajaan Islam pertama didirikan di pulau Adi pada tahun 1626 M dengan nama Eraam Moon, yang diambil dari bahasa Adijaya yang artinya "Tanah Haram". Raja I bernama Woran, namun jauh sebelumnya di abad ke XV (1460 – 1541) penguasa pertama pulau Adi, yaitu Ade Aria Way, telah menerima Islam yang dibawa oleh Syarif Muaz yang mendapat gelar Syekh Jubah Biru, yang menyebarkan Islam di wilayah pulau Adi. Setelah masuk Islam, Ade Aria Way berganti nama menjadi Samay. Kemudian Samay mencatat bahwa pada tahun

¹²⁹ Lukman Rahanwarat, "Islam di Kabupaten Fakfak,, Merauke, 2000. Lihat pula: Pemda Kabupaten Fakfak, *Sejarah Masuknya Islam di Fakfak*,hlm. 26-27.

¹³⁰ Bauw, " Pengaruh Hukum Islam,hlm. 33-34.

¹³¹ Pemda Fakfak, *Sejarah Masuknya Islam*, hlm. 30-31.

1760 M, Ndovin merupakan generasi V dari Samay mendirikan kerajaan Kaimana dan bertakhta di Kaimana dengan gelar Rat Umis Aituarauw yang kemudian terkenal dengan nama Raja Komisi.¹³²

Masing-masing wilayah pertuanan adat memiliki tradisi sebagai berikut: adat-istiadat, suku, marga/fam, dan bahasa, adat perkawinan, sistem kepakuan dan anak angkat, pengaturan harta warisan, hak ulayat atas tanah, seni budaya, pola rapat, dan penobatan raja serta tokoh adat. Pemilihan dan upacara pelantikan di sembilan pertuanan hampir sama, pada akhir upacara biasanya diserahkan pusaka. Pusaka itu biasanya berbentuk tongkat yang berfungsi sebagai lambang atau melambangkan adanya tanda kekuasaan atau kepemimpinan atas masyarakatnya.¹³³

Menurut Irza, paling tidak ada tiga tipe kerajaan pada era kolonial di Nusantara. *Pertama*, kerajaan-kerajaan pantai yang terdapat di sekitar selat Malaka, yang basis perekonomiannya sangat tergantung pada kemampuan mengembangkan dan mengontrol perdagangan laut, serta menghasilkan aneka kebutuhan untuk keperluannya sendiri. *Kedua*, kerajaan-kerajaan pedalaman sebagaimana terdapat di Jawa dan Bali, sangat mengandalkan irigasi surplus beras serta tenaga kerja yang melimpah; dan *ketiga*, kerajaan-kerajaan kecil yang terdapat di sekitar kepulauan Indonesia bagian Timur, khususnya Maloko Kie Raha yang basis perekonomiannya sangat tergantung pada satu jenis komoditi yakni rempah-rempah.¹³⁴

Dari ketiga tipe kerajaan di atas, maka kerajaan-kerajaan Islam yang berada di pulau Papua masuk ke dalam kerajaan tipe ketiga, yakni kerajaan-kerajaan Islam kecil, tetapi masih di bawah otonomi Kesultanan Islam di Maluku. Kerajaan-kerajaan

¹³² Rahanwarat, Islam dan Perkembangannya,hlm.1-2. Lihat pula: Pemda Fakfak, *Sejarah Masuknya Islam*, hlm. 31.

¹³³ Bambang Soerjono Wresniwiro, dkk., *Lembaga Kerapatan Adat Kabupaten Fakfak*, Fakfak: tp., 1994., hlm.2-3.

¹³⁴ Irza Arnyta Djafaar, *Jejak Portugis Di Maluku Utara*, Jogjakarta: Penerbit Ombak, 2006, hlm. 55.

Islam di Papua diperkirakan berdiri pada abad XVI, seabad setelah Islam melembaga ke dalam struktur kerajaan di Maluku.¹³⁵

D. Bukti-Bukti Peninggalan Islam

1. Daerah Fakfak dan Kaimana

Di Tanah Papua terdapat tiga buah masjid tua, masing-masing: (1) Masjid Tunasgain di kampung Tunasgain, distrik Fakfak Timur, kabupaten Fakfak; (2) Masjid Tubirseram di pulau Tubirseram, distrik Fakfak, kabupaten Fakfak; dan (3) Masjid Patimburak di kampung Patimburak, distrik Kokas, kabupaten Fakfak. Namun sekarang ini hanya tertinggal satu masjid tua yakni Masjid Agung Patimburak yang dibangun pada tahun 1870 M.

Pada tahun 1984, Tim Penelitian dari Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Irian Jaya yang dipimpin oleh Halwany Michrob melakukan penelitian tentang sejarah Masjid Agung di kampung Patimburak, distrik Kokas, Fakfak. Dari hasil penelitian dicatat bahwa masjid ini didirikan oleh Umar bersama Imam Haris dan Imam Abuhari Kilian pada tahun 1870 M. Masjid Agung di kampung Patimburak ini telah dijadikan situs bersejarah oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.¹³⁶

Dilihat dari jenis arsitektur bangunan masjid ini, berkubah dan pintu masuknya dibuat dengan ciri khas gereja, secara arsitektur Masjid ini mirip gedung Gereja Protestan Maluku yang tersebar dimana-mana, di wilayah Fakfak, Kokas. Konon masjid ini dikerjakan bersama masyarakat Islam dan Kristen pribumi Fakfak,

¹³⁵ Penulis Barat yang mencatat bahwa adanya masyarakat Islam di Papua sekitar abad XVII lebih ditentukan dengan Islamnya seorang Raja, dimana diartikan bahwa Islam telah melembaga dan masuk dalam struktur kekuasaan. Pandangan semacam ini terjadi untuk mengidentifikasikannya masuknya Islam seperti masuknya Islam ini terjadi di Sumatera pada abad XIII (Kerajaan Samudera Pasai, Sultan Malik al-Shaleh w. 1297 M); Maluku akhir abad XV (Kerajaan Ternate, Sultan Zainal Abidin 1480 M); Jawa akhir abad XV (Kerajaan Demak, Raden Patah) dan Sulawesi Selatan abad XVII (Kerajaan Gowa-Tallo, Sultan Alauddin 1605 M).

¹³⁶ Halwany Michrob dkk., "*Konsep Studii Kelayakan Masjid Agung Kokas Irian Jaya*", Fakfak: Proyek P3SP IRJA, 10 september 1984, hlm. 14.

ini berarti bahwa Masjid Patemburakh baru didirikan pada awal abad ke-20, setelah masuknya Kristen di Fakfak. Bisa juga Masjid ini dibangun pada tahun 1870 oleh para pedagang Islam bersama-sama dengan para pedagang Kristen, meskipun pada masa itu, daerah Fakfak belum terbuka bagi Pekabaran Injil.

Jika ditelusuri masjid Tunasgain dan masjid Tibirseram yang arsitektur bangunannya mirip dengan masjid Agung Demak. Khususnya masjid Tunasgain sampai dilakukan pembongkaran pada tahun 1987, terdapat peninggalan 8 buah tiang alif dengan ukuran panjang 1,70 meter dan diameter 0,20-0,30 meter (ukurannya hampir sama dengan tiang alif dari Masjid Agung Demak) yang masyarakat setempat disebut kepala masjid (dipasang di ujung kuba masjid) yang selalu dilakukan pergantian dengan yang baru bilamana telah rusak. Kedelapan buah tiang alif tersebut disimpan dan dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Diperkirakan usia Masjid Tunasgain sekitar 400 tahun dengan analisa sebagai berikut: (1) Kedelapan tiang alif tersebut dibuat dari kayu merbau, mempunyai berat jenis 0,80, kelas awet I dan kelas kuat I; (2) Kayu merbau sesuai penelitian, jika digunakan di luar ruangan terkena sinar matahari dan air hujan dapat bertahan rata-rata selama 50 tahun; (3) Delapan (8) buah tiang alif dikali 50 tahun (rata-rata) = 400 tahun; dan (4) pembongkaran dilakukan pada tahun 1987, ini berarti masjid Tunasgain diperkirakan dibangun 400 tahun yang lalu atau pada tahun pada tahun 1587 (dengan menggunakan perhitungan tahun 1987-400 tahun = 1587).¹³⁷

Menurut cerita lisan dari masyarakat Fakfak dan luar Papua bahwa Masjid Tunasgain dibangun oleh seorang sufi bernama Syarif Muaz al-Qathan dari negeri Arab (Hadramaut Yaman) dengan gelar Syekh Jubah Biru. Beliau juga telah mengunjungi Sailolof di Kepulauan Raja Ampat-Sorong untuk melakukan dakwah

¹³⁷ Ya'cub Ibnu Musa'ad, "Menelusuri Jejak Historis Masuknya Islam di Tanah Papua", *Makalah*: disampaikan dalam Seminar Sejarah Masuknya Islam di Fakfak dan MTQ II Papua Barat, tanggal 23 April 2008. Musa'ad, *Menelusuri Jejak Historis*,hlm. 25-26.

Islam, setelah lebih dulu membangun komunitas Islam di Semenanjung Onin (Patimunin-fakfak, Kokas, Kaimana dan Namatota).¹³⁸

Pada tahun 1996, Badan Purbakala Irian Jaya mengadakan penelitian Arkeologi Islam di kecamatan Kokas, kabupaten Fakfak.¹³⁹ Disimpulkan bahwa telah terjadi kontak dagang antara Ternate dan raja-raja tempatan di Fakfak sekitar abad XV – XVI. Beberapa kerajaan Islam tersebut adalah kerajaan Namatota, Ati-Ati, Fatagar, Rumbati, Patipi, Arguni dan Kokas, sehingga Islam dianut oleh lebih dari 50% penduduk daerah kabupaten Fakfak, bahkan untuk kecamatan Kokas penduduknya 90% beragama Islam. Ciri-cirinya dapat ditandai dengan adanya masjid dan madrasah.

Di desa Darembang Kampung Lama terdapat peninggalan arkeologis berupa tiang-tiang kayu yang dicat. Diduga merupakan bekas-bekas tiang sokoguru sebuah masjid. Terdapat 1 balok berukir, dilihat dari bentuknya mungkin merupakan bagian dari haluan perahu. Selain itu ada satu masjid kuno di daerah Patimburak yang perlu mendapat perhatian khusus karena tiang-tiang sokogurunya sudah dimakan rayap. Dari luar kelihatan bagus padahal bagian dalamnya sudah keropos. Ada sebuah masjid kuno, tetapi tidak disebutkan sejak abad berapa dibangun, dari segi arsitektur maupun bahan bangunannya menunjukkan tradisi Indonesia asli dan menggunakan bahan lokal.

Di kampung Serarni kelurahan Genefa, kecamatan Teluk Arguni, kabupaten Kaimana, terdapat masjid tua (semi permanen) dengan nama Masjid Serarni yang berusia kira-kira 80 tahun. Masjid ini bangunan aslinya terbuat dari atap daun sagu, dinding kuit kayu, lantai/dasar tanah dan pasir dan tiang kayu bulat. Setelah direnovasi atapnya tetap dari daun, lantai semen, dinding setengah beton, dan tiang kayu besi belahan balok.

¹³⁸ Musa'ad, *Menelusuri Jejak Historis*,hlm. 25-26.

¹³⁹ Lihat: Tim Peneliti, *Laporan Penelitian Arkeologi Islam di Kec.Kokas , Kab. Fak-Fak Irian Jaya*, (Jayapura: Proyek Penelitian Purbakala Irian Jaya, 1991-1997). hlm.13.

Sementara itu, Abdurahman Muri menginformasikan bahwa di desa Furir, kecamatan Kokas masih tersimpan sebuah naskah kuno berbentuk buku yang keadaannya sangat memprihatinkan, karena menurutnya sebagian dari naskah itu sudah hancur. Dalam naskah itu terdapat gambar sebuah perahu, bertuliskan huruf Arab dan latin yang sebagian isinya sudah rusak.¹⁴⁰

Di kota Fakfak, masih tersimpan 5 (lima) buah manuskrip yang katanya telah berumur 800 tahun berbentuk kitab dengan berbagai ukuran yang diamankan kepada Raja Patipi XVI (H. Ahmad Iba). Manuskrip tersebut berupa mushaf al-Qur'an yang berukuran 50 cm x 40 cm. Bertulis tangan di atas kulit kayu yang dirangkai menjadi seperti kitab zaman sekarang. Empat lainnya, salah satunya bersampul kulit rusa, merupakan kitab hadits, ilmu tauhid dan kumpulan doa. Ada tanda tangan dalam kitab itu berupa gambar tapak tangan dengan jari terbuka. tapak tangan yang sama juga dijumpai di Teluk Etna (Kaimana) dan Merauke. Sedangkan tiga manuskrip berikutnya dimasukkan ke dalam buluh bambu dan ditulis di atas daun koba-koba, pohon asli Papua yang kini mulai punah. Ada pula manuskrip yang ditulis di atas pelepah kayu, mirip manuskrip daun lontara (Fakfak: daun pokpok).¹⁴¹

Berdasarkan tradisi lisan masyarakat setempat, inilah 5 (lima) manuskrip pertama yang masuk ke Papua yang dibawa oleh Syekh Iskandarsyah dari kerajaan Samudera Pasai untuk melakukan perjalanan dakwah ke pulau Nuu War (Fakfak: Papua) tepatnya di daerah di Mesia atau Mes, kini distrik Kokas kabupaten Fakfak

¹⁴⁰ Disamping itu, situs Furir Lama ditemukan juga sejumlah pecahan keramik asing. Hasil pengamatan sementara menunjukkan bahwa pecahan-pecahan keramik tersebut berasal dari Cina dan Eropa. Keramik Cina berasal dari Dinasti Ming abad XIV-XVI dan Dinasti Ching abad XVII-XVIII. Juga ditemukan keramik Eropa berasal dari Belanda abad XIX. Pada pecahan dasar piring mangkok terlihat jelas stempel (cap) pabrik pembuatannya di Maastricht berangka tahun 1836. Lihat: Tim Peneliti, *Laporan Penelitian Arkeologi Islam*,..... . hlm.10-11.

¹⁴¹ Kelima manuskrip-manuskrip tersebut penulis saksikan sendiri, sangat disakralkan diangkat diatas tandu bambu dan dibungkus kain putih dan baru dibuka ke publik oleh Raja Patipi XVI (H. Ahmad Iba) ketika diselenggarakan Seminar Sejarah Masuknya Agama Islam di Kabupaten Fakfak dan MTQ II Papua Barat pada tanggal 23 April 2008 di kabupaten Fakfak. Lihat pula: *Majalah Sabili*, "Perjalanan Sebuah Mushaf Tua", Jakarta: NO. 01 TH. XVI 24 JULI 2008/21 RAJAB 1429, hlm. 76-77.

pada tanggal 17 Juli 1214 M. Beberapa tahun kemudian bencana tsunami menenggelamkan Mes, sehingga menyebabkan sebagian penduduk dan seluruh kerajaan Mes habis musnah, termasuk masjid dan isinya tenggelam ke dasar laut, kecuali kecuali kelima manuskrip tersebut yang diselamatkan Syekh Iskandar Syah dan disimpan di Aceh oleh keturunannya yang bernama Burhanuddin. Manuskrip tersebut baru dikembalikan tanggal 17 Juli 2004 di Jakarta kepada keturunan anak Raja Kriskris yang bernama Fadzlan Garamatan, sebelum musibah tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004.¹⁴² Dari Aceh, Syekh Iskandar Syah kembali ke Mes tanpa membawa mushaf, kemudian dia wafat di Mes, makamnya berada di Pulau Kokorop, Batu Kudus, kecamatan Koka, kabupaten Fakfak.¹⁴³

Dari kampung Ugar Fakfak terdapat Dokumen Silsilah Raja-Raja Ugar, tertulis sebuah Surat Keputusan tertanggal 5 November 1929 M.¹⁴⁴ Surat Keputusan itu menggunakan bahasa Belanda dan Melayu berstempel Kesultanan Tidore yang bertuliskan huruf Arab yang diberikan Sultan Tidore kepada Maidama atau Moi Damar Ugar sebagai Kepala Kampung Ugar dengan gelar jabatan Kapitan. Moi Damar Ugar merupakan generasi V dari turunan Raja-Raja Ugar¹⁴⁵. Raja Ugar I

¹⁴² Wawancara dengan anak keturunan Raja Patipi-Fakfak, yakni Fadzlan Garamatan, Jakarta: 10 Juli 2008; Lihat pula: *Majalah Sabili*, "Perjalanan Sebuah Mushaf Tua",hlm. 76-77. Orang pertama yang diajarkan Iskandar Syah bernama Kriskris. Saat itu Seykh Iskandar Syah mengatakan; "jika kamu mau maju, mau aman, mau berkembang, maka kamu harus mengenal *Alif Lam Ha* (maksudnya Allah) dan *Mim Ha Mim Dal* (maksudnya Muhammad)". Singkat cerita Kriskris mengucapkan dua kalimat syahadat. Tiga bulan kemudian, Kriskris diangkat menjadi imam pertama dan beliau sudah menjadi Raja I di Patipi, Fakfak.

¹⁴³ Menurut Sya'ban Garamatan (keturunan Raja Patipi) konon iSyekh Iskandarsyah sendiri yang menggali kuburnya, setelah itu wafat di tempat itu pula. Bahkan sebelum wafat beredar cerita di masyarakat setempat, ia mandi dan mengafani dirinya sendiri di dasar laut yang dalamnya mencapai 3 meter. Begitulah cara wafat pembawa al-Qur'an pertama di Papua, tepatnya di Fakfak (distrik Kokas yang dulu bernama Mesia atau Mes. mengatakan makam Syekh Iskandar Syah ada di dasar laut, sebagai simbolik, dibuatnya makam di darat. Lihat: *Majalah Sabili*, "Perjalanan Sebuah Mushaf Tua",, hlm. 77-78.

¹⁴⁴ Surat Keputusan tersebut menunjukkan bahwa meskipun daerah Irian Jaya saat itu telah dikuasai Pemerintah Hindia Belanda (1828 M.), tetapi kekuasaan Sultan Tidore atas pulau Papua masih tetap sah dan efektif. Lihat: Kasibi Suwiryadi, *Sejarah Da'wah Islam Islam di Irian Jaya*, Makalah Disampaikan Dalam Sarasehan Sejarah Islam di Irian Jaya di Merauke Juni 2000.

¹⁴⁵ Dari silsilah Raja-Raja Ugar diketahui bahwa Moi Damar Ugar adalah generasi V keturunan Raja Ugar, ayahnya bernama Hiriet Tetery dan hidup di abad XIX dikenal dengan nama Nadiwery atau Raja teluk/Raja Sholat Len atau Raja Shalat Teluk. Ayah dari Hiriet Tetery adalah

bernama Rabana telah memeluk Islam hidup pada abad XVI. Kuburan Raja Ugar I, juga kuburan para imam dan khotib serta pengikutnya sudah bercirikan Islam kuburan Islam. Juga terdapat terdapat kitab barzanji yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno bertanggal 5 Ramadlan tahun 1622 Miladiyah., teks khutbah berhuruf Arab berbahasa Melayu bertarih tanggal 28 Rajab tahun 1319 M., dan Kitab Maulid Geser yang dibeli oleh Raja Rumbati Muhammad Sidik Bauw abad XV.¹⁴⁶

2. Daerah Raja Ampat

Pada tahun 1995, Pusat Arkeologi Nasional RI di bawah pimpinan Hasan Muarif Ambary melakukan survey kepurbakalaan Islam di desa Saonek, Lopintol dan desa Beo di kecamatan Waigeo, kepulauan Raja Ampat, kabupaten Sorong. Kepulauan Raja Ampat dijadikan tempat penelitian sebab diasumsikan secara geografis letaknya lebih dekat dengan Kesultanan Maluku (Ternante, Tidore, Bacan dan Jailolo). Secara mikro, 3 (tiga) desa yang dipilih merupakan bagian semi makro dari kepulauan Raja Ampat dan bagian makro situs-situs pengaruh Islam di pulau Papua, di luar kepulauan Raja Ampat, seperti Sorong dan Fakfak.¹⁴⁷

Dari hasil penelitian ditemukan dua jenis data, yaitu pertama, data sejarah berupa *dead monument* makam-makam Islam lama, ada 2 makam yang terbuat dari tembok setinggi 50 cm berbentuk persegi makam yang besar berukuran panjang 610 cm., lebar 340 cm, makam-makam yang lain berupa tumpukan batu yang disusun persegi panjang, tetapi tidak ditemukan data sejarah yang jelas, karena nisan yang terbuat dari kayu yang telah rusak. Dari informasi penduduk setempat semua guru-

Dulin Ugar yang lahir dan meninggal di Karang Buder (Tibatiba Nam) dan diperkirakan hidup pada abad XVIII. Dulin Ugar adalah anak dari Wahwa dan Wahwa adalah anak dari Rabana (Raja Ugar I) yang hidup di abad XVI. Lihat: Lukman Rahanwarat, *Islam di Kabupaten Fakfak: Suatu Tinjauan Historis*, Makalah disampaikan Dalam Sarasehan Sejarah Islam di Irian Jaya, Merauke: Juni 2000.

¹⁴⁶Lukman Rahanwarat, "Islam di Kabupaten Fakfak,", Merauke, 2000. Lihat pula: Pemda Kab. Fakfak, *Sejarah Masuknya Islam di Fakfak*,hlm. 26-27.

¹⁴⁷Lihat: Tim Penelitian, *Survey Kepurbakalaan Islam Di Kabupaten Sorong Irian Jaya*, (Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 1995).

guru agama berasal dari Tidore dan Ternate. Mereka yang dimakamkan di desa Saonek adalah Arif Saefudin, Hambali, Abdurrahim Rafana yang meninggal tahun 1942 dan makam keluarga Lagat yang diperkirakan meninggal abad XIX atau XX.¹⁴⁸

Kedua, data sejarah berupa *Living Monument* yakni masjid dan peninggalan lainnya. Masjid-masjid yang ditemukan jika dilihat dari bangunannya relatif baru, tapi masih ada yang insitu, ada juga yang berpindah tempat, pada umumnya telah mengalami pemugaran berulang kali. Sebelum dipugar masjid ini menunjukkan arsitektur tradisional (denah bujur sangkar dan atap berbentuk limas, bahan bangunan dari kayu). Di masjid terdapat mimbar kayu dan tongkat (cis) yang dipergunakan khotib selama berkhotbah. Di ketiga masjid yang diteliti terdapat teks-teks purba yang telah lama menjadi teks baku. Hal ini dapat diperhatikan dari penulisan teks khotbah tersebut yang umumnya berasal dari akhir abad XIX atau awal abad XX., teks-teks tersebut berasal dari Kota Baru, Kabla Kauja (Perak, Malaysia) cetakan tahun 1326 H/1908 M dan Mekkah.¹⁴⁹

Penduduk di desa Lapintol dan Beo hampir semua beragama Islam dan merupakan masyarakat penduduk Papua asli. Pada umumnya nama depan mereka melambangkan nama Islam yang sangat dikenal untuk setiap muslim, misalnya untuk laki-laki: Hamid, Idris, Ahmad Din, Abdul Somad, Abdul Rasyid, Muhammad Nur, dan lain-lain. Sedangkan nama untuk perempuan, antara lain: Ramal, Saodah dan sebagainya. Sementara di desa Saonek yang letaknya di depan pulau Waigeo, penduduknya lebih heterogen bermukim penduduk dari berbagai sub etnis asal Papua dan etnis asal Bugis, Buton, Ternate, Tidore, Jawa dan lain-lain.¹⁵⁰

Dari dua hasil survey diatas, disimpulkan mungkin masuknya Islam di daerah tersebut mulai abad XV atau XVI, atau mungkin abad sesudahnya, karena itu perlu penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, perlu diadakan satu penelitian pada situs-situs

¹⁴⁸ Tim Penelitian, *Survey Kepurbakalaan Islam*..... hlm. 24-25.

¹⁴⁹ Tim Penelitian, *Survey Kepurbakalaan Islam*..... hlm. 26-27.

¹⁵⁰ Tim Penelitian, *Survey Kepurbakalaan Islam*..... hlm. 30-31.

Islam di luar Kepulauan Raja Ampat, seperti Sorong dan Fakfak. Juga situs-situs di Papua secara integral tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan situs-situs Islam di daerah sekelilingnya, seperti Tidore, Ternate, Hitu, Seram, bahkan Sulu, dan Mindanao.¹⁵¹

3. Kepulauan Mansinam Manokwari

Di Manokwari terdapat salinan naskah manuskrip, tulisan tangan, tertanggal 3 Mei 1952, yang aslinya berbahasa Tidore, salinan ke-4 berbahasa Indonesia, dimana salinan ini adalah milik keluarga Rumander.¹⁵² Dalam naskah ini menceritakan bahwa utusan Sultan Tidore pada tanggal 18 Agustus 1812 M./17 Rajab 1217 H. yang bernama Dano Sech Muhammad Alting bersama adiknya bernama Dano Muhammad Hasan dan seorang penerjemah Tolowo Warwe bergelar Kasim Raja dari Sorong Dom beserta beberapa anak buah perahu Ternate mengunjungi pulau Mansinam-Manokwari. Kedatangan Sultan tidak disambut dengan ramah oleh penduduk setempat, tetapi setelah melalui dialog dengan kepala suku yang bernama Mayor Kerui Rumander, akhirnya ia memeluk Islam dan diikuti oleh beberapa anggota keluarganya. Dano Sech Muhammad Alting pulang ke Tidore, setelah anak lali-lakinya meninggal dan dikuburkan di pulau Mansinam, sedangkan istrinya meninggal dunia juga di Manokwari dan dimakamkan di Roudi bersama Hj. Boki Fatimah (istri Mayor Kuni Rumander). Kuni Rumander demi keselamatan dirinya, nama famnya (marga) diganti menjadi Rumbobiar.¹⁵³

¹⁵¹ Lihat: Tim Penelitian, *Survey Kepurbakalaan Islam.....* hlm. 32.

¹⁵² Salah seorang anak Kuni Rumander bernama Ismail lahir tahun 1882 dan meninggal tahun 1959. Anak Ismail Rumbobiar bernama Shaleh Rumbobiar lahir 1929 dan meninggal tahun 2000. Saat ini naskah asli manuskrip itu tidak diketahui keberadaannya, begitu pula halnya dengan makam anak Sultan yang ada di pulau Mansinam yang tidak tampak lagi bekasnya". Lihat: Kasibi Suwiryadi, *Sejarah Masuknya Islam di Tanah Papua*, Makalah disampaikan dalam Seminar Dinamika Kerukunan Hidup Umat Beragama dari Berbagai Daerah, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Muhammadiyah Jayapura kerjasama dengan Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Departemen Agama, 2004.

¹⁵³ Brawery, S.M., dan Rumbobiar, M.S., *Buku Sejarah Sultan: Masuknya Islam di Munukwar, Manokwari*, 1 Juli 1994.

E. Pengaruh Agama Islam Dalam Kehidupan

Potret suasana keagamaan di daerah Papua Barat tersebut menarik, karena di satu sisi agama Islam telah merupakan "agama resmi" bagi kerajaan-kerajaan di kepulauan Raja Ampat, Semenanjung Onin dan di daerah Kowiai (Kaimana). Hal ini ditandai dengan raja dan keluarganya telah memeluk agama Islam, serta adanya institusi resmi yang berkaitan pengaturan kehidupan masyarakat. Pengaruh raja umumnya sangat besar dalam membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Akan tetapi di sisi lain tampak pengamalan ajaran Islam sebagian penduduk Papua barat masih kurang mendalam sehingga terjadi keadaan yang kontradiktif.

Diterimanya Islam sebagai agama dan jalan hidup masyarakat Papua, maka pranata-pranata kehidupan sosial budaya memperoleh warna baru. Keadaan ini terjadi karena penerimaan mereka kepada Islam sebagai agama, tidak terlalu banyak mengubah nilai-nilai, kaidah-kaidah kemasyarakatan dan kebudayaan yang telah ada sebelumnya. Apa yang dibawa oleh Islam pada mulanya datangnya, hanyalah urusan-urusan *'ubudiyah* (ibadat) dan tidak mengubah lembaga-lembaga dalam kehidupan masyarakat yang ada. Islam mengisi sesuatu dari aspek kultural mereka, karena sasaran utama dari pada penyebaran awal Islam hanya tertuju kepada soal iman dan kebenaran tauhid.

Di pulau Misool misalnya, hingga akhir masa pemerintahan kolonial Belanda di Papua, masih banyak dijumpai bahwa para *Jojau* atau Kepala Pemerintahan lokal setempat selain didampingi oleh pembantu-pembantunya di bidang pemerintahan, juga mengangkat Hakim Syara' yang disertai tugas mengurus dan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, kematian, shalat berjamaah dan berbagai upacara keagamaan yang diadakan oleh penduduk.¹⁵⁴ Gelar atau jabatan yang disebut *Jojou* ini, begitu pula gelar *Ukum* atau Hakim diadopsi dari gelar yang terdapat di Tidore

¹⁵⁴ La Ode Jiru Baadiah, *Risalah Masuknya Agama Islam di Pulau di Pulau Misool*, Sorong: LPTQ Kabupaten Sorong, 1996, hlm. 9.

dan Ternate. Di Tidore dan Ternate jabatan ini punya kedudukan lebih tinggi dari seorang Hukum dan berperan sebagai Menteri atau Wazir, yang merupakan bentuk khas dari bentuk pemerintahan Islam Kun, yang diadopsi oleh kesultanan-kesultanan di kepulauan Maluku khususnya.¹⁵⁵

Di pulau Misool, *Joiau* sebagai kepala pemerintahan dan Imam selaku ketua Hakim Syara' merupakan dwitunggal dalam mengurus dan mengatur jalannya pemerintahan dan berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Karena itu hukum adat dan hukum agama berjalan bersama-sama dan saling mengisi. *Joiau* sebagai kepala pemerintahan juga termasuk penguasa agama yang tata kerjanya ikut menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat selalu bersama-sama ketua Hakim Syara'. Juga di dalam menentukan awal ibadah puasa Ramadhan selalu diadakan perembukan antara Imam selaku Ketua Hakim Syara' dengan *Joiau* selaku Kepala Pemerintahan dan hasil keputusan itu kemudian disebar luaskan kepada seluruh lapisan masyarakat.¹⁵⁶

Sejak terbentuknya masyarakat Muslim baik di Semenanjung Onin, Kowiai (Kaimana), maupun kepulauan Raja Ampat, pada umumnya telah dilaksanakan masalah perkawinan sesuai ajaran Islam. Di pulau Misool masalah pernikahan dilaksanakan berdasarkan pada hukum perkawinan dan tata cara sesuai dengan ajaran Islam. Dalam acara lamaran disertai dengan acara pembayaran maskawin dilakukan menurut adat dan tradisi setempat, namun dalam ikrar (*jab qabul*) pernikahan selalu dilakukan berdasarkan tata cara hukum Islam. Pengaruh Islam juga terlihat nyata dalam perilaku masyarakat Waigeo dalam masalah perkawinan. Mereka yang berkelas bangsawan dan beragama Islam, melakukan sistem perkawinan bersifat endogem dengan adat perkawinan sepupu silang (*cross cousin marriage*). Mereka melakukan sistem perkawinan ini setelah masyarakat memeluk Islam, bukan

¹⁵⁵ Mansoben, *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya*, Jakarta: LIPI-RUL Series, 1995, hlm. 251.

¹⁵⁶ La Ode Jiru Baadiah, *Risalah Masuknya Agama Islam*.....hlm. 10.

merupakan unsur budaya asli mereka. Di bidang sosial pengaruh Islam tampak dalam berbagai kegiatan seremonial bersifat ritual, seperti upacara yang berkaitan dengan perkawinan, kelahiran, sunatan, pembangunan rumah baru, memasuki rumah baru, kesemuanya ini diwujudkan dengan pembacaan kitab barzanji.¹⁵⁷

Walaupun penduduk asli Papua telah memeluk agama Islam maupun Kristen, tetapi disamping itu mereka masih mempertahankan agama lokal. Penduduk Muslim Papua di pedesaan, seperti di Salawati Selatan masih mempercayai *imon* (jin) yang setiap tahun diadakan upacara pesta *mon*.¹⁵⁸ Di pantai Utara sampai titik timur Papua penduduk mempunyai kepercayaan pada *mansren*, seorang penyelamat dunia. Mereka juga percaya pada seorang makhluk yang maha kuasa yakni Uri, yang mengambil peranan besar dalam mythos Papua.¹⁵⁹ Kondisi semacam ini merupakan tantangan sekaligus kerja keras dan perhatian serius bagi dakwah Islam di Papua.

Di kepulauan Raja Ampat masih seringkali dijumpai penduduk melakukan upacara-upacara yang berkonatasi animisme. Mereka masih percaya akan adanya makhluk-makhluk halus, roh-roh jahat, dan mempraktekkan ilmu dukun serta sihir. Sehingga masih dapat dikatakan bahwa ajaran dua agama besar (Islam dan Kristen) hanya dijadikan pembungkus pola kepercayaan. Praktek-praktek perdukunan dan ilmu sihir masih dilakukan dalam hal kematian, masih dapat dijumpai praktek penanganan jenazah yang sederhana. Ada jenazah yang dibakar atau diletakkan begitu saja di bawah pohon atas sebuah *para-para* (semacam rak yang terbuat dari kayu) hingga membusuk. Hal ini masih dilakukan oleh sebagian kecil suku bangsa, walaupun anggota suku bangsa itu sudah menyatakan diri sebagai penganut agama.¹⁶⁰

Diterimanya Islam sebagai agama dan jalan hidup masyarakat Papua, maka pranata-pranata kehidupan sosial budaya memperoleh warna baru. Keadaan ini terjadi

¹⁵⁷ Kasibi Suwiryadi, Sejarah Masuknya Islam, hlm. 21.

¹⁵⁸ Mansoben, *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya*, hlm. 255.

¹⁵⁹ Khoe Soe Khiam (*et. al.*), *Mengenal Sebagian Dari*, hlm. 170.

¹⁶⁰ Lihat: Tim Penelitian, *Survey Kepurbakalaan Islam*..... hlm. 8.

karena penerimaan mereka kepada Islam sebagai agama, tidak terlalu banyak mengubah nilai-nilai, kaidah-kaidah kemasyarakatan dan kebudayaan yang telah ada sebelumnya. Apa yang dibawa oleh Islam pada mulanya datangnya, hanyalah urusan-urusan *'ubudiyah* (ibadat) dan tidak mengubah lembaga-lembaga dalam kehidupan masyarakat yang ada. Islam mengisi sesuatu dari aspek kultural mereka, karena sasaran utama dari pada penyebaran awal Islam hanya tertuju kepada soal iman dan kebenaran tauhid.

Djajadiningrat mengelompokkan orang Islam dalam mengamalkan ajaran Islam menjadi tiga kelompok yaitu: Pertama, mereka yang bersungguh-sungguh mempelajari agama Islam, sehingga ia bukan saja paham dalam ilmu tentang rukun yang lima dan tentang kepercayaan orang Islam, tetapi ia paham pula dalam perkara masalah hukum Islam yang sedalam-dalamnya. Sampai pada tingkatan itu ialah kyai-kyai dan guru-guru yang memegang atau yang menuntun sesama muslim lainnya supaya taat beribadah dan sujud kepada Tuhan. Kedua, mereka yang mempelajari agamanya semata-mata karena hendak menjadi orang Islam yang sejati. Mereka yang masuk bilangan itu tidak mendalam pengetahuannya tentang ilmu agama sebagai golongan pertama tadi. Biasanya mereka itu hanya mempelajari pokok-pokok kewajiban beragama saja dan taat menjalankan ibadat. Ketiga, mereka yang tidak mempelajari ilmu pengetahuan dari kitab-kitab, melainkan pengetahuan yang diperolehnya dari kebiasaan dan contoh dari keluarga serta para guru tentang cara berbuat ibadat.¹⁶¹

Jika digunakan penggolongan Djajadiningrat ini, maka penduduk muslim Papua bagian barat khususnya pada masa kedatangan dan penyebaran Islam, dapat digolongkan dalam kategori ketiga dan sedikit sekali yang masuk dalam kategori satu dan dua.

¹⁶¹ P.A. Achmad Djajadiningrat, *Herineringen van Pangeran Aria Ahmad Djajadiningrat*, Amsterdam-Batavia, 1936, hlm. 198-199.

BAB IV

UMAT ISLAM PAPUA DI BAWAH KOLONIAL BELANDA

Pada bab ini akan dibahas perkembangan umat Islam Papua di masa pemerintahan kolonial Belanda. Pertama-tama akan dibahas kedatangan awal Belanda dan kekuasaannya di pulau Papua, diikuti oleh penyebaran agama Kristen Protestan dan Kristen Katholik, serta munculnya gerakan sosial politik. Selanjutnya, bab ini akan membahas perkembangan Islam pada masa pertuanan (raja-raja) Islam di Papua, khususnya di daerah Kepala Burung pulau Papua, munculnya lembaga-lembaga pendidikan Islam, dan daerah Digoel sebagai tempat pembuangan para pejuang Indonesia yang juga turut berpengaruh bagi perkembangan dakwah di pulau Papua. Hal ini memberikan gambaran awal gerakan dakwah Islam yang bersifat modern sebagaimana munculnya organisasi keagamaan seperti Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah di Tanah Papua pada era kolonial Belanda.

A. Kekuasaan Belanda di Papua (*Fort Du Bus: the first European Settlement in New Guinea, 1828*)¹

Dalam melihat status politik pulau Papua, hingga tahun 1828 Belanda memiliki pandangan yang tidak jelas terhadap status politik Papua. Belanda mendengar rumor bahwa Inggris akan membangun sebuah benteng atau permukiman di wilayah selatan Papua, sehingga hal ini mendorong Gubernur Belanda untuk wilayah Maluku, Pieter Merkus pada tahun 1826 untuk mengklaim tanah Papua sebagai daerah kekuasaan Belanda melalui pembangunan sebuah benteng atau permukiman Belanda (settlement). Pieter Merkus menunjuk dan menugaskan A.J van

¹ *The Intrusion of the European, Fort Du Bus: First European Settlement in New Guinea, 1828*, hlm, 205.

Delhen, Komisioner Pemerintah untuk berlayar dengan sebuah kekuatan militer Belanda dalam skala yang kecil menuju daerah Triton (teluk yang terletak di bagian selatan pulau Papua), tepatnya di daerah Fakfak. Delhen ditugaskan untuk mencari lokasi yang tepat untuk mendirikan sebuah *settlement* pertama Belanda. Pasukan Belanda ini meninggalkan Ambon pada tanggal 21 April 1828 yang terdiri dari 1 orang tentara berpangkat letnan, 11 warga Eropa, 20 tentara asal Indonesia beserta keluarga, dan 10 buruh asal Jawa. Ketika tim ekspedisi hampir mencapai bagian barat daerah Onin, dimana disebut teluk Lobo, ditemui sebuah daerah yang layak. Teluk Lobo ini kemudian dirubah namanya menjadi "Teluk Triton" dan daerah di sekitar Teluk tersebut dinamai "Merkussoord", sebagai penghargaan kepada Gubernur Belanda untuk Maluku (Pieter Merkus).²

Konstruksi dari benteng atau *settlement* tersebut dilakukan selama 7 (tujuh) minggu. Akhirnya pada tanggal 24 Agustus 1828, benteng "Fort Du Bus" selesai secara formal. Untuk memilih lokasi sebagai *settlement*, Van Delden mengikuti 2 (dua) perintah Gubernur Merkus yakni lokasi yang dipilih diluar wilayah kepentingan perdagangan para Ceramese, dan lokasi yang dipilih harus sehat. Letnan J. Modera yang ikutserta dalam ekspedisi tersebut bahwa penduduk asli di sekitar Fort Du Bus adalah beragama Islam dan pedagang-pedagang *Ceramese* (orang Seram, Maluku) sering mengunjungi daerah secara reguler.³

Selanjutnya, H.W. Bachtiar menguraikan bahwa pada tanggal 24 Agustus 1828, yaitu pada hari ulang tahun Raja Willem I dari Belanda, diadakan upacara peresmian berdirinya benteng Belanda yang pertama di daratan Papua.⁴ Van Delden membacakan suatu proklamasi menyatakan bahwa "Atas nama dan untuk Sri Baginda Nederland bagian daerah Neiuw Guinea serta daerah-daerah di pedalaman yang muia pada garis 141 BT di pantai selatan dan dari daerah tempat tersebut di arah barat, barat-laut, dan utara sampai ke Semenanjung Goede Hoop di pantai utara, selain

² Lihat *The Instrusion of the European...*, hlm, 205.

³ Lihat, *The Instrusion of the European...*, hlm, 206.

⁴ Lihat H.W. Bachtiar, Sejarah Irian Jaya, di dalam Koentjaraningrat dkk, *Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk* (Jakarta: Penerbit Djembatan, 1993), hlm. 47.

daerah Mansarai, Karondefer, Ambarpura, dan Amberpon yang dimiliki oleh Sultan Tidore, dinyatakan sebagai milik”. Upacara yang dilakukan pada tanggal 24 Agustus 1828 ini merupakan tanda di Eropa bahwa Belanda memiliki kekuasaan atas tanah Niuew Guinea, sehingga sejak saat itu negara-negara lain tidak dapat mengklaim Niuew Guinea.

Dengan masuknya Belanda ke pulau Papua, maka perdebatan berikutnya adalah persoalan penentuan batas kekuasaan antara Kesultanan Tidore dan kolonial Belanda. Pada tahun 1846 A.L. Weddik ditugaskan oleh Gubernur Jenderal Belanda di Batavia untuk menetapkan batas-batas wilayah Maluku, termasuk Papua. Setelah melalui penelitian, akhirnya Gubernur Jenderal di Kepulauan Indonesia, J.J. Rochussen mengeluarkan surat rahasia yang merumuskan batas-batas daerah Tidore di Papua, yaitu “mulai sudut Saprop Maneh (Semenjung Bonpland) pada garis 140 47 BT di pantai utara sampai sudut Kain-Kain Bebab (Semenanjung Goede Hoop), Teluk Wandamen di Teluk Geelvink, dan seterusnya kearah barat, barat-daya, tenggara, sampai perbatasan pada garis batas 141 di pantai selatan” sebagai dinyatakan dalam Proklamasi tanggal 24 Agustus 1828, menjadi bagian dari wilayah Nederland. Demikian pula dinyatakan bahwa daerah yang bersangkutan meliputi pula ”daerah Wonin di bawah dan Namatota yang berdasarkan proklamasi tertanggal 24 Agustus 1828 telah dinyatakan sebagai milik”⁵.

Keputusan tahun 1848 ini menimbulkan persoalan pembagian daerah kekuasaan Belanda dan Tidore di Papua. Keputusan tahun 1848 ini tidak memberi ketentuan mengenai kedudukan daerah pedalaman Papua. Mengingat keputusan tahun 1848 ini hanya mencakup daerah-daerah pantai, sedangkan batas timur dan pantai selatan tidak dihubungkan dengan batas timur dan pantai utara. Akhirnya, garis yang berlaku sekarang ditetapkan pada tanggal 16 Mei 1895 di sGravenhage, pada waktu pemerintah Belanda dan pemerintah Inggris menetapkan perbatasan antara wilayah kekuasaan mereka masing-masing di Pulau Papua.

⁵ Lihat H.W. Bachtar, Sejarah Irian Jaya, dalam Koentjaraningrat dkk, *Irian Jaya*, hlm. 51.

Dalam rangka memperoleh legalisasi bahwa Papua adalah bagian dari pemerintah Belanda, maka pada tahun 1898 parlemen Belanda mensahkan pengeluaran anggaran belanja sebanyak f. 115,000 untuk mendirikan pemerintah di daerah bagian Belanda, sehingga dapat dikatakan Papua merupakan bagian dari tanah jajahan kerajaan Belanda di Indonesia. Pemerintah Belanda membagi daerah Papua ke dalam dua bagian yang masing-masing dikuasai oleh kontrolir Belanda. Bagian utara disebut Afdeeling Noord Nieuw Guinea, dan bagian barat dan selatan disebut Afdeeling West en Zuid Nieuw Guinea. Kedua daerah ini merupakan sub-bagian dari Keresidenan Maluku.⁶ Lokasi yang dipilih untuk Afdeeling Noord berada di Manokwari, yang menguasai bagian utara Papua mulai membentang dari Yamursba (Tanjung Goede Hoop) di bagian barat hingga Teluk Humboldt (Jayapura). Sedangkan Afdeeling West-en Zuid ditempatkan di Fakfak yang memiliki kontrol dari Yamursba, menyusur arah barat, selatan, dan timur, hingga perbatasan Papua New Guinea. Pada awal pemerintahan Belanda, daerah Fakfak merupakan sentra perdagangan diantara orang-orang Indonesia, orang Tionghoa, dan orang Arab Muslim.

Namun dalam perkembangannya, pemerintah Belanda menyadari sulitnya rentang kendali pemerintahan ketika Afdeeling West berada di Fakfak, dimana kesulitan untuk mengontrol kekuasaan hingga daerah pantai selatan pulau Papua.⁷ Dari sisi sosio-kultural, masyarakat asli yang menetap di daerah Fakfak dipengaruhi oleh agama Islam dan struktur kepemimpinannya berciri raja-raja (pertuanan) yang berdekatan dengan kekuasaan kesultanan Tidore. Hal ini berbeda dengan ciri budaya yang terdapat di Zuid Nieuw Guinea dimana masyarakat asli adalah Marind Anim. Mempertimbangkan kondisi tersebut, pada tahun 1901 pemerintah Belanda memekarkan Afdeeling West-en Zuid Nieuw Guinea, dimana dibentuk Afdeeling Zuid Nieuw Guinea, yang dipimpin oleh seorang asisten residen. Akhirnya, pada

⁶ Lihat H.W. Bachtiar, "Sejarah Irian Jaya", , hlm. 53.

⁷ Lihat H.W. Bachtiar, "Sejarah Irian Jaya", hlm. 52-5.

tanggal 14 Februari 1902 bendera Belanda dikibarkan di muara Sungai Maroo, Merauke. Walaupun Belanda telah menanamkan kekuasaannya di daerah Merauke, namun Belanda masih tetap menghormati kekuasaan Kesultanan Tidore dimana Belanda memberi ganti rugi kepada Sultan Tidore sebesar f 6,000 per tahun.

B. Gerakan Missionaris dan Zending di Tanah Papua

Adanya pengaruh kekuasaan Belanda atas pulau Papua sejak tahun 1850-an, telah membuka masuknya penyebaran agama Kristen, disamping agama Islam yang telah ada sejak abad XV di Tanah Papua. Carl Willem Ottow, seorang pendeta pertama yang tiba di pulau Mansinam, Papua pada tahun 1855 menjelaskan bahwa sejarah pekabaran Injil di Papua tidak terlepas dari perjuangan Pendeta Gossner dan Heldring. Kedua pendeta Protestan ini mengirimkan penginjil-penginjil Protestan ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Gossner dan Heldring menilai bahwa daerah Papua membutuhkan perkabaran Injil. Akhirnya, Pendeta Gossner mengutus dua penginjil yakni Carl Willem Ottow dan Johan Gottlob Geissler yang tiba di pulau Mansinam pada tanggal 5 Februari 1855. Kedua penginjil ini bertolak ke Papua melalui Ternate.⁸

Hal inilah yang menjadikan bahwa setiap tanggal 5 Februari yang oleh gereja Kristen Injili di tanah Papua sebagai hari ulang tahun pekabaran Injil, yang merupakan sebuah upaya untuk mengenang kembali zendelping Werklieden, yakni Carl Wilem Ottow dan Johan Gotlob Geisler. Kedua utusan ini pada akhirnya dikenal sebagai Rasul Papua. Upaya pertama orang Belanda untuk menyebarkan agama Kristen sudah dimulai pada tahun 1855, dan kemudian berpangkal di Manokwari dalam tahun 1872. Namun baru pada awal abad ke- 20 ada kegiatan yang berkesinambungan. Penyebaran agama Kristen terutama dilakukan di pantai utara Papua oleh Utrechtsche Zendingsvereniging, dan kemudian oleh Zending der

⁸ Lihat, Z. Rumere & Pdt.J.F.Onim, *Dengarlah Ottow Berbicara* (Jayapura: Penerbit Deiyai, 2005), hlm. 1 - 10.

Nederlands Hervormde Kerk, yaitu mula-mula di pulau Yapen (tahun 1908) dan pulau-pulau diteluk Cenderawasi lainnya, di daerah Kepala Burung bagian Barat (tahun 1911). Di kepulauan Raja Ampat (tahun 1913), di pulau Wakde yang berhadapan dengan Sarmi (tahun 1922), dan dari sana keseluruh daerah pantai utara dan Genyem (tahun 1924).

Pendeta Onim menguraikan bahwa pada tahun 1912 Pemerintah Belanda membagi wilayah pelayanan yang dilakukan oleh Zending Protestan dan Misi Katholik di tanah Papua, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelayanan. Kemudian, di tahun 1928 pembagian wilayah dipertegas lagi. Zending Protestan membawahi wilayah Holandia (Jayapura) di utara, hingga Bintuni (Manokwari) di pantai selatan Kepala Burung. Sedangkan Misi Katholik melakukan pelayanan di wilayah Babo, Fakfak, Kaimana, Mimika, Asmat, hingga Merauke. Namun perjanjian tersebut tidak berlaku secara efektif karena Misi dapat bekerja di wilayah utara, dan sebaliknya Zending Protestan bekerja pula di wilayah selatan pulau Papua.⁹

Pada awalnya, misi Protestan yang melaksanakan tugas pelayanan agama adalah *Utrechtse Zending Vereniging (UZV)*, kemudian beralih ke *Indische Kerk (GPI)* di Hindia Belanda, dan berganti nama menjadi *MPK/GPM*. Gereja Protestan Maluku kemudian berdiri sendiri sebagai gereja mandiri pada tanggal 6 September 1935. Dalam periode kerja yang dimulai pada tahun 1928-1929 hingga tahun 1952, telah tercatat kurang lebih 10.000 orang anggota jemaat yang telah dibaptis. UZV bekerja dengan teori 3 C yakni *Commerce, Civilization, and Christianity*, Pendeta Heldring mencanangkan program Pekabaran Injil, Dagang, dan Peradaban. Dalam konteks itu, pendeta Zending Gossner dan O.G Heldring mengutus Ottow dan Geissler ke daratan Papua tepatnya di pulau Mansinam, pada tanggal 5 Februari 1855.¹⁰ Sementara itu, di tahun 1950 daerah belakang antara kabupaten Jayapura dan Jayawijaya (daerah hulu sungai Mamberamo) dilayani oleh misi *Unevangelist Field*

⁹ J.F. Onim, *Islam dan Kristen di Tanah Papua* (Bandung: Jurnal Info Media, 2006), hlm. 127 – 29.

¹⁰ J.F. Onim, *Islam dan Kristen di Tanah Papua...*, hlm. 131.

Mission (UFM). Demikian pula, misi Doopsgezinde Raad (DZR) mengusahakan suatu bidang pelayanan baru di daerah selatan Kepala Burung yakni di daerah Inanwatan, Teminabuan, Ayamaru, Aitinyo, dan Aifat pada 1 Oktober 1950. Jumlah pendeta pribumi mulai meningkat setelah Perang Dunia II, dan dalam tahun 1956 gereja Kristen Irian menjadi suatu organisasi yang mandiri.

Berbeda dengan daerah Papua bagian utara yang didominasi oleh agama Kristen, bagian selatan penyebaran agama Nasrani didominasi oleh para pendeta Katholik. Upaya pertama orang Belanda untuk menyebarkan agama Katholik diawali pada tahun 1894, namun hasilnya hampir tidak ada. Juga ketika tahun 1905 organisasi penyebaran agama Katholik yang bernama Missionarissen van het Heilige Hart membuka pusat penyebaran agama di Merauke. Upaya penyebaran tetap tidak banyak berhasil. Baru ketika tahun 1930 muncul saingan dari gereja Kristen Maluku yang membuka pusat penyebaran agama Kristen di Merauke, para pendeta meningkatkan kegiatannya dengan menyebarkan agama mereka di daerah suku bangsa Muyu di hulu sungai Digul, di pulau Frederik Hendrick (pulau Yos Sudarso), dan di Irian Jaya bagian selatan (Afdeeling Zuid Nieuw-Guinea).¹

Pelaksanaan pembangunan sekolah-sekolah Katholik dimulai di sekitar daerah Merauke dan daerah suku bangsa Muyu sejak tahun 1923, dan kurang lebih satu dasawarsa kemudian dalam tahun 1934, sekolah-sekolah Katholik telah tersebar di Papua bagian Selatan, di Agats, dan di Mimika. Dalam tahun 1936 kegiatan penyebaran agama Katholik juga mulai dilakukan di daerah-daerah bagian utara. Di tahun 1936 organisasi penyebaran agama Katholik Belanda dari Ordo Fraskan mendirikan pusat penyiaran di Manokwari, dan mereka memulai kegiatan mereka di daerah kepala Burung yang belum terpengaruh agama Kristen, dan selanjutnya di daerah Hollandia (Jayapura) sampai ke daerah suku Arso yang hidup diperbatasan daerah Papua dan Papua New Guinea. Jumlah pemeluk Kristen Protestan di Papua

¹¹ Lihat: H.W. Bachtiar, "Sejarah Irian Jaya", ... , hlm. 56 – 57.

pada tanggal 5 Pebruari tahun 1935, tercatat lebih dari 50.000 orang, sedangkan pemeluk Katolik berjumlah 7.100 orang pada tahun 1933.¹²

Sebelum Perang Dunia II pecah di lautan pasifik, para pendeta agama Katolik juga telah menyebarkan agama ke daerah-daerah danau Paniai di pegunungan Jayawijaya. Setelah perang berakhir berbagai organisasi penyiaran agama Kristen dari Australia dan Amerika mulai aktif pula menyebarkan agama itu di Papua, disamping organisasi Belanda dan organisasi Maluku. Diantara organisasi Christian and Missionary Aliace (CAMA) dari Amerika, yang sangat aktif di lembah Balim, tempat organisasi agama Katolik Belanda Fransiskan dan Augustin juga membuat pusat penyebarannya pada akhir dasawarsa 1950.¹³

Sejak dasawarsa berikutnya, suatu organisasi Amerika lain yaitu *Summer Institute of Linguistic* (SIL), yang menyebarkan agama dengan keahlian khusus yaitu ilmu linguistik. Para penyiar agama yang tergabung di dalamnya ditugaskan meneliti dan mempelajari bahasa-bahasa daerah di Nieuw Guinea (Pulau Papua) dengan tujuan yang lebih jauh yakni selain mengumpulkan data linguistik saja, tujuan yang jauh itu adalah menerjemahkan kitab Injil ke dalam bahasa daerah, dan akhirnya menyebarkan agama Kristen.¹⁴

C. Kepentingan Bisnis dan Politik Belanda di Papua

Seiring dengan kekuasaan Belanda di pulau Papua dan kegiatan Zending Protestan dan Misi Katolik, pulau Papua memiliki potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomis dan strategis dalam pandangan pemerintah Belanda. Langkah eksplorasi pertama dilakukan pada tahun 1931 yang ditujukan untuk memperoleh minyak tanah, sehingga dipandang tepat untuk mendirikan perusahaan eksploitasi bahan-bahan minyak tanah di pulau Papua. Sejumlah perusahaan besar Belanda,

¹² Lihat: John R.G. Djopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, Jakarta: PT Grasindo, 1993, hlm. 47-49.

¹³ Lihat: H.W. Bachtar, "Sejarah Irian Jaya", ..., hlm. 57 – 58.

¹⁴ Lihat: H.W. Bachtar, "Sejarah Irian Jaya", ..., hlm. 58.

Inggris, dan Amerika dalam tahun 1935 mendirikan perusahaan NV Nederlandsch Nieuw Guineas Petroleum Maatschappij (NNGPM). Dari pemerintahan jajahan Belanda, NNGPM memperoleh hak atas daerah konsesi seluas 10.000.000 hektare, termasuk seluruh daerah Kepala Burung, sehingga meliputi kurang lebih 1/3 daerah Papua. Untuk keperluan eksplorasi minyak, NNGPM mendirikan bandar udara di Tanah Merah dan Ayamaru, dan data-data hasil pemotretan NNGPM digunakan juga oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mengetahui daerah jajahannya. Hasil foto-foto tersebut ternyata dapat mengetahui potensi sumber minyak dan potensi tambang-tambang lainnya yang tersebar di pulau Papua. Pada tahun 1935 penggalan percobaan dilakukan di daerah pedalaman daerah Kepala Burung. Di tahun 1938, jumlah orang Indonesia yang bekerja di NNGPM mencapai 1.460 orang, termasuk 760 orang pribumi. Namun, mempertimbangkan keterbatasan tenaga kerja, maka NNGPM mendatangkan orang-orang Makasar, Bugis, Buton dan Jawa. Kedatangan arus migrasi sebagai tenaga kerja di NNGPM membawa dampak pula bagi perkembangan agama Islam di daerah Kepala Burung.¹⁵

Pada masa sebelum Perang Dunia II, wilayah Papua terbagi 3 Afdeeling yang merupakan bagian dari Keresidenan Maluku. Onderafdeeling Boven Digoel dengan Tanah Merah sebagai tempat kedudukan seorang controller. Onderafdeeling Boven Digoel dan onderafdeeling Zuid Nieuw Guinea merupakan bagian dari Afdeeling Tual. Onderafdeeling Zuid Nieuw Guinea terbagi kedalam bestuursressort yaitu Merauke, Okaba, Kimaam, dan Moeting. Sedangkan daerah-daerah di bagian utara Papua, yaitu Onderafdeeling Manokwari, Sorong, Serui, Sarmi dan Hollandia berada dalam bagian Afdeeling Manokwari yang berlokasi di Manokwari, dibawah pimpinan asisstant resident. Seluruh wilayah afdeeling itu dianggap sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Sultan Tidore, sehingga tiap onderafdeeling terbagi dalam "tot het zelfbesturent landschap Tidore behorende districten". Afdeeling lainnya adalah Afdeeling Nieuw Guinea Barat, yang berbasis di Fak-Fak yang dipimpin oleh

¹⁵ Lihat: H.W. Bachtiar, "Sejarah Irian Jaya", ..., hlm. 61 – 64.

assistant resident. Afdeeling ini meliputi onderafdeeling Fak-Fak, onderafdeeling Inanwatan, dan onderafdeeling Mimika. Wilayah barat ini pula merupakan pengaruh dari kekuasaan Kesultanan Tidore.

Setelah Perang Dunia II dan Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, Pemerintah Belanda memperkuat kedudukannya di Papua dengan mengangkat S.L.J van Waarderburg menjadi Gubernur Nederlandsch Nieuw Guinea, yang dibantu oleh 3 (tiga) asisten residen yang berbasis di Jayapura, Manokwari, dan Merauke. Dua tahun kemudian, tepatnya tanggal 10 Mei 1952 Gubernur Nederlandsch Nieuw Guinea membuat perubahan terhadap pembagian wilayah pemerintah daerah, yakni sebagai berikut: *Pertama*, Afdeeling Noord Nieuw Guinea beribukota di Hollandia (Jayapura), yang terbagi ke dalam 6 (enam) onderafdeeling, yakni Hollandia, Nimboran, Sarmi, Waropen, Yapen, dan Biak. *Kedua*, Afdeeling Zuid Nieuw Guinea beribukota di Merauke terbagi ke dalam 3 onderafdeeling, yakni Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. *Ketiga*, Afdeeling Centraal Nieuw Guinea yang terbagi ke dalam onderafdeeling Danau-danau Wissel, dengan Enarotali sebagai ibukota. *Keempat*, Afdeeling West Nieuw Guinea yang beribukota di Sorong, yang terbagi ke dalam 9 onderafdeeling, yakni Sorong, Makbon, Raja Ampat, Manokwari, Ransiki, Wandamen, Ayamaru, Bintuni, dan Fakfak.¹⁶

D. Munculnya Gerakan Sosial Politik

Kehadiran bangsa Indonesia (nama yang digunakan bagi penduduk pribumi). Di Irian ini sebelumnya hanya bersifat pelayaran dan perdagangan yang dilakukan melalui kerajaan-kerajaan Nusantara. Hingga saat ini belum ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pernah terjalin hubungan antara rakyat Indonesia dengan rakyat Irian. Kerajaan Bacan, Jailolo, Ternate dan Tidore atau induk kesultanan Tidore hanya membagi tiga wilayah Papo Ua Gamsio (Papo Ua Sembilan Negeri), yaitu wilayah Kolano, Fat, atau Raja Ampat dan empat kerajaan masing-masing dikepalai

¹⁶ Lihat: John R.G. Djopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*,hlm. 26-29.

oleh seorang raja yang disebut Gimalaha atau seorang Sangaji. Wilayah Mafor Soa Raha atau Mafor empat soa yang terdiri dari empat soa, masing-masing dikepalai oleh seorang Sangaji dan merupakan kerajaan-keajaan Islam dibagian timur nusantara, mempunyai hubungan erat dengan beberapa daerah dibagian barat dan pantai utara Irian, dalam hal ini mencerminkan kehadiran bangsa Indonesia di Irian, tetapi lebih pada ikatan emosional yang didorong oleh persamaan etno-biologis sebagai keturunan ras Melanesia (tidak termasuk orang pedalaman Irian yang disebut penduduk Papua).

Kedatangan bangsa Indonesia, baru pertama kali dirasakan dimulai ketika pemerintah Belanda memberikan bantuan kepada misi penyiaran agama Kristen protestan tahun 1892. Dengan bantuan dari pemerintah Belanda ini dapat memperlancar program penyiaran agama yang didalamnya termasuk pendidikan pemberdayaan masyarakat. Dengan bantuan ini, mereka mendatangkan tenaga edukatif dari orang Indonesia, yakni guru-guru dari Minahasa dan Maluku. Guru-guru itu terutama ditugaskan dibagian utara Irian yang menjadi prioritas penyiaran agama Protestan, yang perkembangannya terlihat cepat. Sedangkan orang Indonesia lainnya yang beragama Katholik, didatangkan oleh Pater J. verstenten pada tahun 1914. Mereka didatangkan dari Maluku tenggara dan selatan bersuku bangsa Kei yang bermukim di kepulauan Kei.¹⁷

Kontak masyarakat Papua dengan masyarakat Belanda untuk pertama kalinya berlangsung pada tahun 1616, hingga negeri itu mengakhiri kekuasaannya di Papua pada tahun 1962. Dalam periode-periode kehadiran Belanda (termasuk Papua), maka pada masa sela kekuasaan Inggris di Hindia Belanda. Kapal-kapal perang Belanda sesekali mengunjungi atau melayari pesisir pantai daerah itu, Belanda khawatir akan adanya dominasi Inggris menggantikan posisi Belanda di perairan Papua. Pada masa ini, Inggris telah membangun beberapa buah benteng di Papua. Benteng-benteng itu

¹⁷ Pendeta J.F, Onim, *Islam dan Kristen di Tanah Papua*, (Jakarta: Jurnal Info Media, 2006).

ialah benteng Fort Coronation di Manokwari dan English Point.¹⁸ Di pulau Isiple Semenanjung Sele, Inggris menumpuk armadanya di Teluk Bintuni (Mac Cleur/Teluk Berau). Setelah proses perjumpaan yang panjang di tahun 1616, maka kekuasaan Belanda bersifat permanen (definitif). Pada tahun 1898, Manokwari dan Fakfak dijadikan pos pemerintahan, setelah Zending bekerja di Manokwari sekitar 45 tahun (5 Pebruari 1855, hingga 9 November 1898). Kekuasaan Belanda terjadi setelah kekuasaan Tidore atas Papua berakhir. Periode berikutnya adalah ketika terjadinya pendudukan dan kekuasaan singkat Jepang di Papua, hingga dikalahkan pada tahun 1944. Jepang dikalahkan oleh pasukan sekutu pimpinan Amerika Serikat dengan dukungan rakyat Papua yang turut berjuang dengan berbagai cara untuk melawan pasukan pendudukan Jepang seperti yang juga terjadi di daerah-daerah lain.

Perlawanan rakyat Irian terhadap kaum pendatang sebenarnya didorong oleh suatu perasaan etno-nasionalisme yang lebih mengandalkan pada perasaan akan kesamaan fisik (etno-biologis), yang memandang orang dari luar rakyat Papua sebagai lawannya. Perlawanan rakyat Papua terhadap kaum pendatang pertama dimulai ketika kegagalan awal Belanda di Teluk Triton. Pada tahun 1835 benteng Fort de Bus dihancurkan maka terjadi pemindahan kedudukan Belanda dari teluk Triton akibat perlawanan rakyat terhadap Belanda disamping kondisi alam yang tidak memungkinkan. Perlakuan Belanda terhadap rakyat di wilayah kerajaan Nomatota sebenarnya tidak dapat membahagiakan rakyat pribumi.

Perlawanan ini tidak hanya kepada Belanda, tetapi juga terhadap Inggris. Beberapa tahun kemudian oleh karena Inggris tidak memperhatikan hak-hak rakyat terutama monopoli perdagangan oleh kaum kolonial, maka pangeran Tidore yang bernama Nuku pada tahun 1780 memimpin perlawanan rakyat, yang mendapat julukan sebagai Sultan Papua dan Seram, sebab bersama rakyat mengadu domba kaum kolonial Inggris dan Belanda. Akhirnya Inggris pun tidak mampu menahan kebencian rakyat sehingga sebuah benteng yang didirikan oleh kerajaan Inggris yang

¹⁸ E.Katoppo, *Perjuangan Irian ke Dalam Wilayah Indonesia* (Bandung: Kilat dan Maju, 1955), hlm. 26.

bernama benteng Coronation dihancurkan oleh Inggris sendiri karena mendapat tantangan berat dari Pangeran Tidore dan rakyat asli di wilayah benteng tersebut.

Aksi perlawanan yang dilaksanakan spontan dalam skala besar diantara aksi-aksi perlawanan adalah gerakan Reni di Kepulauan Raja Ampat di bawah pimpinan Wasyari Faidan pada tahun 1931 yang merupakan gerakan kebencian terhadap orang kulit putih yang ingin menghancurkan zaman kebahagiaan yang mereka nantikan. Gerakan ini dapat dicurigai oleh pemerintah kolonial Belanda karena diikuti juga oleh rakyat yang hidup di luar kepulauan Raja Ampat. Akhirnya Wasyari sebagai pemimpinnya ditangkap oleh Belanda dan kemudian dipenjarakan. Gerakan serupa terjadi di pulau Waigeo yang ini sering disebut sebagai gerakan Konor di pulau Waigeo pada tahun 1932. Gerakan yang terjadi di desa Kabilol ini dipimpin oleh seorang putera asli bernama Tanda. Tanda ditangkap oleh Belanda dan dimasukkan ke penjara karena dianggap menyebarkan kebencian terhadap pemerintah Belanda. Perlawanan serupa lainnya adalah gerakan Warbesren di Batanta pada tahun 1933, gerakan Nyawomos di Pam pada tahun 1936-1941. Gerakan yang dipimpin oleh Nyawomos ini mulai menyebarkan kebencian terhadap bangsa kulit putih termasuk orang Jepang, sehingga konekwensinya ia ditangkap tentara Jepang dan mati di penjara. Juga salah seorang Raja Wertual (Kokas) bernama M. Rumandeng al-Amin Umar Sekar 1934, dengan gigih pernah menentang pemerintah Belanda dengan tidak mau menyeter uang tambang minyak kepada mereka. Akibatnya dia dipenjara di Hollandia (Jayapura) sebelum kemudian dibebaskan.¹⁹

Gerakan Koreri pimpinan Angganita Manufaur di Insubaki pada tahun 1938. Angganita sebenarnya memiliki kekuatan ilmu ghaib sehingga Stefanus Simopiaref yang beberapa keluar masuk penjara akibat tantangannya terhadap Belanda. Karena kebencian terhadap tentara Belanda dan pendatang pada umumnya, maka Stefanus menggunakan Angganita Manufaur dari gerakan Koreri di Biak yang menarik masyarakat Biak demi perjuangan kemerdekaan Papua. Gerakan Sen Kayu Hijau

¹⁹ Ali Athwa, *Islam atau Kristenkah...*, hlm. 50.

pada tahun 1935, gerakan Manggarega di Teluk Arguni pada tahun 1935, Gerakan Damo di Gresi pada Tahun 1935, gerakan Simson di Jayapura antara tahun 1940-1943 serta gerakan Wegebage di Paniai. Perlawanan semangat nasionalisme Papua tidak hanya terhadap Belanda yang telah lama mengeksploitasi semua kekayaan dari Bumi Papua, tetapi juga dilakukan terhadap bangsa kulit putih lainnya. Ketika bangsa Jepang pada awal kedatangannya tanggal 19 April 1942 melakukan pendekatan yang tidak manusiawi terhadap rakyat, sehingga rakyat di bawah beberapa pimpinan tokoh adat Papua mengangkat senjata melawan Jepang sehingga pertempuran meledak dimana-mana yang didorong oleh kesamaan budaya dan suku untuk mempertahankan identitas mereka. Beberapa pimpinan dari perlawanan itu ialah Silas Papare, Samuel Kawab, Marthen Indey, Raja Fatagar, Raja Kokas, Lodewick Mandacan . Dalam perlawanan di tahun 1944 lebih dari 2000 orang dibunuh oleh rakyat, terutama tentara Jepang yang berada di Manokwari, Sausapor, Jayapura, Biak dan Serui.

Koentjaraningrat mencatat Koreri, sebuah gerakan kebathinan dibagian utara Papua sebagai gerakan untuk mempertahankan kemerdekaan Irian Barat yang dipimpin oleh Stefanus Simopiaref, seorang buangan Belanda di daerah Ternate sebelum perang dunia II, kemudian di sebuah penjara di Jawa. Setelah ia dibebaskan dari penjara, perasaan etno-nasionalisme Papuanya semakin besar sehingga untuk mempengaruhi masyarakat, ia menggunakan Angganita Manuafur dari tokoh aliran kebathinan Koreri untuk melaksanakan perlawanan kemerdekaan Irian Barat.²⁰

Sejak tahun 1944 pandangan rakyat Papua terhadap bangsa non pribumi tidak hanya dipengaruhi oleh suatu pandangan aliran-aliran kebathinan (sifat-sifat kargo) seperti perlawanan-perlawanan terhadap bangsa lain sebelumnya, tetapi kesadaran nasionalisme yang mengarah pada perlawanan politik yang modern, yakni perjuangan ke arah kemerdekaan Papua. Hal ini disebabkan oleh suatu penanaman kesadaran ideologi nasionalisme Papua.

²⁰ Koentjaraningrat, *et.al*, *Penduduk Irian Barat* (Jakarta: Penerbit Universitas, 1963), hlm. 369.

E. Munculnya Lembaga Pendidikan dan Organisasi Keagamaan Islam di Papua

1. Pengajian dan Madrasah: Pendidikan Islam Berpola Informal

Dakwah di Jayapura. Perkembangan Islam di Papua pada mulanya tidaklah disertai dengan usaha pendidikan yang teratur tetapi juga tidak berarti pendidikan Islam tidak ada. Hal ini disebabkan oleh penyebaran Islam selama ini dilakukan oleh pedagang dan para pemburu burung kuning yang kebetulan beragama Islam. Sebagai seorang muslim penyiaran agama Islam ini dilakukan sebagai perwujudan tanggung jawab terhadap panggilan Allah SWT yang tertuang dalam kitab suci. Dalam penyebaran ini pendidikan hanya dilakukan dengan sistem yang sangat sederhana yaitu pengajian di tempat guru dengan mengutamakan huruf-huruf Arab untuk dapat membaca kitab suci Al-Quran yang ayat-ayatnya digunakan dalam pelaksanaan ibadah sehari-hari.²¹ Pada tahun 1910 Haji Abdul Majid, seorang pedagang Tidore mulai melakukan kegiatan pendidikan Islam di Jayapura. Haji Majid melaksanakan pengajian Al-Quran di Jayapura dan mendirikan sebuah masjid pertama di Jayapura pada tahun 1910 dan menjadi imam mesjid tersebut.

Dakwah Islam di Merauke seiring dengan pembukaan perkebunan kapas, pemerintah Belanda mendatangkan orang-orang Jawa ke Merauke pada tahun 1908. Anak-anak mereka mempelajari agamanya melalui guru ngaji. Kemudian pada tahun 1930 Tengku Bujang tiba di Merauke dan memulai syiar agama Islam melalui pembangunan masjid, yang saat itu ini dikenal dengan nama Masjid Sepadin. Di masjid inilah, Tengku Bujang memasyarakatkan khotbah Jum'at dengan bahasa

²¹ Yayasan Pendidikan Islam (Yapis), *Sejarah Pendidikan Islam Yapis Irian Jaya* (Jayapura : Yapis Irian Jaya, 1999), hlm. 47.

Indonesia, mendirikan madrasah dan membentuk organisasi keagamaan Muhammadiyah. Tengku Bujang kemudian ditangkap Belanda dan kemudian dibuang ke Digoel.

Dakwah di Fakfak dan Kaimana. Pada tahun 1930-an Ustads Usman dan Al Hamid merintis pembukaan madrasah. Namun usaha dakwah ini tidak berlangsung lama. Dalam perkembangannya, komunitas Islam di Fakfak membentuk Kesatuan Islam Nieuw Guinea (KING) yang dipimpin oleh Raja Rumbati Haji Ibrahim Bauw. Raja Rumbati ini mendirikan sekolah Islam. Kemudian pada tahun 1933 Raja Rumbati bersama pembimbingnya Daeng Umar mendirikan Muhammadiyah di Fakfak. Namun tidak lama kemudian Haji Ibrahim Bauw ditangkap dan dipenjarakan, sedangkan Daeng Umar dipindahkan ke tempat lain. Pada tahun 1934 Raden Muhammad Zain menggantikan Tengku Bujang memimpin organisasi Muhammadiyah di Merauke, dan Raden Zain juga membina pendirian masjid di daerah Mopah Baru, membuat madrasah, dan membentuk organisasi kepanduan untuk remaja "Panduan Hizbul Wathan (HW)". Raden Zain kemudian digantikan oleh mubaligh lainnya Asrus Muhammad pada tahun 1937 – 1940.²²

Pemerintah Belanda memperlakukan sifat yang diskriminatif terhadap umat Islam. Umat Islam memperoleh kesulitan untuk memperoleh buku-buku pelajaran agama Islam, sehingga pengadaan buku-buku tersebut berasal dari Singapura atau Jawa atau daerah lainnya di Nusantara. Bahkan pada awal tahun 1950, pekerja-pekerja Muslim yang berada di Jayapura dikembalikan secara besar-besaran ke daerah asalnya, sehingga tidak terdapat umat Islam di Holandia (Jayapura). Masjid yang ada di Jayapura kosong, sehingga diubah menjadi bar dan restoran. Namun setelah Papua berintegrasi ke dalam negara Indonesia, pada tahun 1963 masjid tersebut difungsikan kembali sebagai tempat ibadah.

Pada masa perjuangan integrasi pada tahun 1950-an dan 1960-an, para sukarelawan yang datang ke Papua memiliki semangat dakwah, sehingga kegiatan

²² Yayasan Pendidikan Islam (Yapis), *Sejarah Pendidikan Islam Yapis Irian Jaya...*, hlm. 49.

keagamaan Islam aktif di berbagai kota di pulau Papua. Madrasah Diniyah dibentuk di Kaimana, Fakfak, Sorong, dan Jayapura.²³ Masuknya Papua ke wilayah Indonesia menjadikan iklim yang kondusif bagi syiar Islam di tanah Papua. Hal ini berbeda ketika masa kolonial Belanda.

2. Pendidikan Islam Berpola Formal yang Didirikan Belanda

Mempertimbangkan sebelum kedatangan Belanda di Papua, dimana mayoritas penduduk asli di daerah Kepala Burung adalah beragama Islam, maka pemerintah Belanda mengupayakan program pendidikan formal bagi anak-anak muslim. Pada masa kolonial Belanda di Papua, terdapat hanya satu lembaga pendidikan untuk masyarakat Islam yakni *Openbare Vervolg School* (O.V.V.S). Selain kepada penduduk yang Islam, namun sekolah ini membuka kesempatan kepada siswa-siswa beragama Kristen Protestan. Hal ini terjadi karena pada zaman Belanda tidak banyak diberikan kesempatan kepada masyarakat Islam untuk menyekolahkan anak-anaknya atau membuka sekolah-sekolah Islam. Karena itu banyak anak-anak Islam disekolahkan orang tuanya di sekolah-sekolah Kristen, khususnya masyarakat di pinggiran kota dan kampung-kampung di sekitar kota Fakfak. Keadaan ini menyebabkan sehingga, anak-anak Islam yang buta huruf. Anak-anak Islam di dalam kampungnya, mereka hanya mempelajari Islam secara khusus.²⁴

Lembaga pendidikan sebagaimana disebutkan di atas ini baru didirikan oleh pemerintah Belanda pada masa menjelang pengalihan kekuasaan Belanda di Papua kepada pemerintah Republik Indonesia. Hal ini dilakukan supaya untuk menyamakan tingkat pendidikan anak-anak muslim Papua dengan kaum Muslim di daerah lainnya di Indonesia. Karena mereka (sebagian umat Islam Fakfak) pro (memihak) Republik Indonesia. Dengan dibukanya sekolah ini, maka umat Islam banyak memasukkan anak-anaknya di lembaga O.V.V.S ini.

²³ Yayasan Pendidikan Islam (Yapis), *Sejarah Pendidikan Islam Yapis Irian Jaya...*, hlm. 51.

²⁴ J.F. Onim, *Islam dan Kristen di Tanah Papua,.....*hlm. 106.

Sampai dengan masuknya pemerintah Republik Indonesia di Papua, yakni sejak 1963, mulai dibuka tiga macam sekolah dasar, yakni Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Dasar Kristen, dan Sekolah Dasar Katholik. Selain itu juga dibuka Sekolah Pendidikan Agama Islam Negeri (P. G .A. N. A. M). Pelajaran agama diberikan sesuai ciri masing-masing sekolah tersebut.

Pada sejumlah kampung Islam, Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) diberi wewenang oleh pemerintah Belanda untuk mendirikan sekolah dasar Kristen. Misalnya kasus kampung Karas di Distrik Fakfak dan kampung, kayu Merah di Distrik Teluk Etna. Pada kampung-kampung yang disebutkan ini pelajaran agama Kristen hanya diberikan kepada murid yang beragama Kristen, sedangkan murid-murid beragama Islam, pelajaran agama Islam diberikan pada murid di luar jam sekolah resmi. Jadi lebih merupakan kegiatan ekstra kurikuler, tetapi proses belajar ini bukan dilaksanakan oleh YPK, akan tetapi oleh petugas agama di masjid. Hal ini berlangsung hingga berakhirnya kekuasaan Belanda di Papua. Pada masa sesudah itu, barulah sekolah-sekolah dasar YPK yang berada di kampung-kampung Islam, mulai dinegerikan oleh pemerintah. Terkecuali SD YPK Karas, di Distrik Karas sekarang, dan sekolah dasar Kayu Merah di Distrik Teluk Etna. Karena perubahan situasi politik daerah di Fakfak, maka YPK rela melepaskan sekolah-sekolah yang diasuhnya di kampung-kampung Islam selama ini menjadi sekolah dasar negeri²⁵

Meski sebagian besar sekolah-sekolah Kristen di kampung-kampung Islam telah dijadikan sekolah negeri, banyak orang Islam lebih senang menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah Kristen (YPK). Hal ini terjadi di kampung Karas. Misalnya, nampaknya banyak anak-anak Islam lebih suka masuk sekolah dasar YPK. Karena itu, sekolah dasar negeri dan YPK terpaksa berbagi murid secara seimbang, sehingga memungkinkan kedua sekolah ini dapat terus bertahan hidup dalam mengelola pendidikan dasar pada masing-masing sekolah.

²⁵ J.F. Onim, *Islam dan Kristen di Tanah Papua*,.....hlm. 106-7

Dengan demikian dapat diketahui, bahwa pada dasarnya Belanda tidak begitu banyak mengizinkan sekolah-sekolah Islam dibuka di keresidenan Fakfak (West Nieuw Guinea). Kesempatan hanya diberikan untuk Yayasan Pendidikan Kristen Protestan maupun Katholik. Hal ini dimungkinkan kekhawatiran pada pemerintah Belanda, mengingat bila orang Islam diberikan kesempatan untuk membuka sekolah-sekolah, maka sekolah atau lembaga pendidikan yang diasuh mereka akan menghasilkan orang-orang Muslim yang akan tampil menentang kekuasaan Belanda seperti yang terjadi di daerah-daerah lainnya di Indonesia. Hal ini terjadi karena perkembangan pendidikan dan pengaruh reformisme atau pembaharuan Islam. Mereka mulai bangkit melawan kekuatan hegemoni kekuasaan politik Belanda secara khusus, ataupun dunia barat pada umumnya.

3. Lahirnya Muhammadiyah di Papua

Masuknya pemerintahan Belanda ke wilayah Papua, beserta dengan tentara Belanda (KNIL) dan pegawai yang berasal keturunan Jawa (Muslim) ke daerah Merauke pada awal tahun 1906²⁶ telah menumbuhkan semangat dakwah Islam di kalangan mereka. Dalam beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1910 terdapat tokoh pergerakan nasional Muslim yang dibuang ke Merauke (tempat tahanan mereka berada di kompleks perumahan DPR Jalan Sabang, Merauke) dan pada periode tahun 1914-1919 di daerah Okaba, Merauke telah dibuka perkebunan oleh pemerintah Belanda dimana tenaga kerjanya didatangkan dari pulau Jawa yang mayoritas beragama Islam. Kondisi seperti itu telah membuka kesempatan kepada para migran asal Jawa ini untuk berinteraksi dan melakukan kegiatan keagamaan diinternal mereka dan dakwah ke luar ke penduduk pribumi Papua.

²⁶ Kasibi Suwiryadi, *Sejarah Singkat Muhammadiyah di Papua* (Jayapura: Naskah makalah yang disiapkan untuk disajikan pada kegiatan DAD IMM Jayapura, 2004), hlm. 2.

Kemudian pada tahun 1926, Pemerintah Belanda mengirim Tengku Bujang Selamat ke Merauke dengan status sebagai Digulis.²⁷ Di Merauke, Tengku Bujang melakukan dakwah dan tabligh yang membawa ajaran Muhammadiyah. Kegiatan dakwah yang dilakukan antara lain Tengku memelopori pelaksanaan Shalat Idul Fitri di lapangan terbuka, dan waktu pelaksanaannya berdasarkan hasil hisab saat itu, yang berbeda dengan tradisi yang berlaku. Namun, organisasi Muhammadiyah belum secara resmi berdiri di Merauke. Selanjutnya, menurut berbagai sumber, bahwa kepanduan Hisbul Wathon telah terbentuk di daerah tersebut. Di tahun 1929 para pendukung Tengku Bujang Selamat mendirikan madrasah yang berlokasi di Jalan Willis (saat ini berada di ujung Bandar udara Mopah Lama) dan merupakan Madrasah Pertama di Merauke. Demikian pula, pendukung Tengku Selamat membangun Masjid Nurul Huda. Pada periode tahun 1933 hingga 1936 PP Muhammadiyah di Yogyakarta mengirimkan 3 (tiga) orang Uztads, yakni Uztads Jais bertugas dari tahun 1933 -1935, Uztads Asrar dari tahun 1935 – 1936, dan terakhir Uztads M. Chabib yang akhirnya menetap di Merauke. Perjuangan awal Muhammadiyah ini telah menghasilkan tokoh-tokoh Islam di kota Merauke antara lain Rejo, Rimbo Bujang dan Ponadi yang berperan serta aktif dalam kepemimpinan Muhammadiyah.

Bersamaan dengan dibuangnya tokoh-tokoh Islam asal Indonesia ke Boven Digoel pada periode 1928 hingga 1942, antara lain yakni Bung Hatta, Sutan Syahrir, Muchtar Luthfi, Iljas Jakub, Muhammad Kasan, dan A.A. Rasyid, para pejuang ini melakukan interaksi dengan diantara penduduk Indonesia yang dibuang di Digoel, serta melakukan kegiatan-kegiatan dakwah. Selanjutnya, dalam perjuangan melawan pemerintah Belanda, sejumlah tokoh-tokoh Muslim seperti Alwi Rahman dan Raja Alam Ugar Sekar dari Kokas, berjuang bersama-sama dengan tokoh-tokoh non-Muslim seperti Silas Papare, Marthen Indey, Lukas Rumkorem. Pada tahun 1960 berdiri Gerakan Rakyat Irian Barat (GRIB) yang berlokasi di Fakfak dipimpin oleh

²⁷ Kasibi Suwiryadi, *Sejarah Singkat Muhammadiyah di Papua...*, hlm. 2.

Garim Riasa, dan berdiri pula Kesatuan Islam New Guinea dipimpin oleh H. Ibrahim Bauw, seorang Raja Rumbati, yang juga tokoh Muhammadiyah Papua. Pada periode tahun 1960-1964 migrasi muslim yang berlatarbelakang Muhammadiyah mulai masuk ke Jayapura, yakni setelah Papua secara resmi kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka berprofesi sebagai pegawai pemerintah, petugas, pedagang, transmigran, atau pencari kerja.

Pada akhirnya, perjuangan yang dilakukan sejak akhir tahun 1920-an hingga tahun 1960-an guna meletakkan landasan bagi berdirinya Muhammadiyah telah mencapai klimaksnya ketika pada 1966, dimana organisasi Muhammadiyah resmi berdiri pada tahun 1966 di Abepura. Dengan status cabang, Muhammadiyah diketuai oleh H. Ismail Bauw (almarhum). Setelah itu perkembangan Muhammadiyah di daerah ini terus berlanjut, baik pengembangan horizontal maupun vertikal.²⁸

F. Digul (Merauke): Tempat Pengasingan Pejuang Muslim Indonesia

Ikatan batin antara Papua dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah terbangun secara mendalam sejak era tahun 1920-an. Seiring dengan kesadaran politik di kalangan masyarakat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Negara Indonesia, muncul berbagai kesatuan politik dan pergerakan politik yang bergerak dengan berbagai pola dalam mengkritik kebijakan negara penjajah Belanda di Hindia Belanda.

Pada tahun 1926 terjadi pemberontakan terhadap kekuasaan penjajah Belanda yang bertempat di Jawa dan Sumatera Barat. Pemberontakan besar ini dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Merespon pemberontakan tersebut, maka Gubernur Jenderal de Graeff memerintahkan pengasingan secara besar-besaran dari orang-orang yang dipandang berbahaya bagi kekuasaan Belanda. Pemerintah Belanda mengasingkan sekitar 823 orang ke Tanah Merah, yang terletak di hulu sungai Digul

²⁸ Kasibi Suryadi, *Sejarah Singkat Muhammadiyah di Papua*, hlm. 3.

Papua.²⁹ Para pejuang yang dibuang ke Tanah Merah diijinkan untuk membawa istri dan anak sebanyak 473 anggota keluarga.

Namun demikian, Tanah Merah di Digoel memiliki nilai yang istimewa bagi perjuangan dan pergerakan kebangsaan Indonesia mengingaat Tanah Merah dipandang sebagai lambang perlawanan rakyat terhadap kekuasaan penjajah. Dengan mempertimbangkan ideologi dan pola pergerakan dari para pejuang Indonesia, pemerintah Belanda membagi lokasi pengasingan di Digoel, dimana satu lokasi untuk para pejuang yang berlatarbelakang komunis, sedangkan terdapat tempat lain di Tanah Merah yang diperuntukkan bagi para pejuang non-komunis.³⁰ Pada bulan November 1934 Pemerintah Belanda mengasingkan Sutan Sjarir, aktivis pergerakan Indonesia yang aktif sejak menimba ilmu di Universitas Leiden, Belanda. Tiga bulan kemudian, Mohammad Hatta diasingkan pula ke Tanah Merah. Di Tanah Merah, Bung Hatta menulis naskah Alam Pikiran Yunani, suatu sumbangan pada pustaka pengetahuan orang-orang Indonesia. Dua tahun kemudian, yakni pada tahun 1936 Hatta dan Sjahrir dipindahkan ke Bandanaira. Tanah Merah, Digul akhirnya memperoleh tempat istimewa dalam gerakan kebangsaan Indonesia, karena daerah Digul oleh pemerintah jajahan Belanda di bawah gubernur A.C.D de Graef sebagai tempat pengasingan orang-orang yang dipandang membahayakan kedudukan penjajah Belanda.

²⁹ Tanah Merah adalah terjemahan dari bahasa Jair “Sokanggo” atau Sohokanggo”. Suku Jair adalah penduduk asli penghuni daerah itu. Kata So atau Soho dalam bahasa suku Jair berarti bukit. Sedang Kanggo dalam bahasa Jair adalah Merah. Jadi diberi nama perbukitan yang bertanah merah. Kota Merauke terletak diujung paling timur tanah air kita. Kota Merauke adalah kota terbesar yang terdekat dekatnya dengan pembuangan politik, Tanah Merah atau Boven Digul. Eksploitasi pertama di daerah hulu sungai Digul yang oleh belanda disebut dan kemudian terkenal dengan nama Boven Digoel (artinya Digul Hulu) dilakukan dalam tahun 1905.

³⁰ Diringkas dari H.W. Bachtiar, Sejarah Irian Jaya, di dalam Koentjaraningrat dkk, *Irian Jaya* ..., hlm. 60 -61. Kebanyakan orang mengira, bahwa Tanah Merah yang dijadikan deportase kolonial itu tempat pembuangan dan pengasingan politik itu berasal dari orang-orang merah atau orang-orang komunis yang dibuang ketempat itu. Hal ini dikarenakan pemberontakan 1926/1927 sering juga disebut sebagai pemberontakan orang-orang komunis, dan mereka banyak yang dibuang ke Boven Digoel atau Tanah Merah. Akhirnya asumsi yang berkembang bahwa Tanah Merah adalah tempat pembuangan dan pengasingan politik Belanda yang mempunyai hubungan dengan komunis.

Para pejuang dan keluarganya memperoleh tantangan yang sangat berarti. Banyak sekali para pejuang kita dari berbagai daerah dibuang ke Digoel, dimana 8 persen dari 1.400 para buangan meninggal dunia. Sejak tahun 1952 Tanah Merah dipimpin oleh seorang H.B.B. (Hoofd van Plaatselijk Bestuur = Kepala pemerintah setempat) Nieland. Setahun kemudian digantikan oleh HPB C.H. Stefels. Dengan kejamnya penguasa Belanda biasanya sengaja secara berencana merusak mental dan fisik para pejuang, sehingga banyak yang meninggal dan yang berhasil kembali biasanya mengalami cacat.

Pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia memiliki dampak bagi perkembangan Islam di tanah Papua. Salah satunya adalah Tengku Bujang Selamat. Ia dibuang oleh Belanda ke Merauke sebagai status sebagai Digulis pada tahun 1926.³¹ Namun dengan semangat syiar Islam, Tengku Bujang melakukan dakwah dan mengajarkan ilmu-ilmu agama yang selaras dengan ajaran ke-Muhammadiyah-an. Tengku mempelopori pelaksanaan Shalat Idul Fitri di lapangan terbuka, dan waktu pelaksanaannya berdasarkan hasil hisab saat itu, yang berbeda dengan tradisi yang berlaku. Selanjutnya, kepanduan Hisbul Wathon dibentuk pula di Merauke. Di tahun 1929 para pendukung Tengku Bujang Selamat mendirikan madrasah di sekitar daerah Mopah dan merupakan Madrasah Pertama di Merauke. Demikian pula, pendukung Tengku Selamat membangun Masjid Nurul Huda. Sejak saat itu, pada periode

Pada periode tahun 1933 - 1936 PP Muhammadiyah di Yogyakarta mengirimkan 3 (tiga) orang Uztads, yakni Uztads Jais bertugas dari tahun 1933 - 1935, Ustads Asrar dari tahun 1935 - 1936, dan terakhir Uztads M. Chabib yang akhirnya menetap di Merauke. Perjuangan awal Muhammadiyah ini telah menghasilkan tokoh-tokoh Islam di kota Merauke antara lain Bapak Rejo, Bapak Rimbo Bujang dan Bapak Ponadi yang berperan serta aktif dalam kepemimpinan Muhammadiyah.

³¹ Kasibi Suwiryadi, *Sejarah Singkat Muhammadiyah di Papua...*, hlm. 2.

Bersamaan dengan dibuangnya tokoh-tokoh Islam asal Indonesia ke Boven Digoel pada periode 1928 hingga 1942, antara lain yakni Bung Hatta, Sutan Syahrir, Muchtar Luthfi, Iljas Jakub, Muhammad Kasan, dan A.A. Rasyid, para pejuang ini melakukan interaksi dengan diantara penduduk Indonesia yang dibuang di Digoel, serta melakukan kegiatan-kegiatan dakwah. Selanjutnya, dalam perjuangan melawan pemerintah Belanda, sejumlah tokoh-tokoh Muslim seperti Alwi Rahman dan Raja Alam Ugar Sekar dari Kokas, berjuang bersama-sama dengan tokoh-tokoh non-Muslim seperti Silas Papare, Marthen Indey, Lukas Rumkorem. Pada tahun 1960 berdiri Gerakan Rakyat Irian Barat (GRIB) yang berlokasi di Fak-fak dipimpin oleh Garim Riasa, dan berdiri pula Kesatuan Islam New Guinea dipimpin oleh H. Ibrahim Bauw, seorang Raja Rumbati, yang juga tokoh Muhammadiyah Papua. Para periode tahun 1960-1964 migrasi muslim yang berlatarbelakang Muhammadiyah mulai masuk ke Jayapura, yakni setelah Papua secara resmi kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka berprofesi sebagai pegawai pemerintah, petugas, pedagang, transmigran, atau pencari kerja.

BAB V

PERKEMBANGAN UMAT ISLAM DI PAPUA

SETELAH BERINTEGRASI KE REPUBLIK INDONESIA

Pada Bab V akan dibahas dinamika yang terjadi dalam perkembangan umat Islam di pulau Papua setelah berintegrasi ke Republik Indonesia. Dalam memulai Bab ini akan digambarkan konteks sosial politik masuknya wilayah Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah itu, akan dipaparkan kondisi pemerintahan dan pembangunan pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini, bab ini akan menggambarkan dinamika otoritas raja-raja Islam Papua, perkembangan dakwah umat Islam, sebagaimana yang tercermin dari peranan masyarakat pendatang dan lembaga-lembaga pendidikan Islam di wilayah Papua.

A. Konteks Sosial Politik: Masuknya Papua Kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Perjuangan untuk mengintegrasikan wilayah Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan perjalanan sejarah yang relatif panjang sejak tahun 1940-an hingga tahun 1960-an. Dengan berbagai strategi diplomasi, baik ekonomi, politik, maupun keamanan, akhirnya wilayah Papua berhasil diintegrasikan ke dalam NKRI pada tanggal 1 Mei 1963.

Perdebatan apakah wilayah Papua masuk ke negara Indonesia diawali dalam rapat BPUPKI pada tanggal 10 – 11 Juli 1945, dimana rapat membahas batas-batas dari negara Indonesia.¹ Sebagian anggota BPUPKI memandang bahwa Tanah Papua (Timur dan Barat) adalah masuk kedalam wilayah Indonesia. Alasan politis yang muncul adalah hubungan historis dengan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit melalui kesultanan Tidore (Maluku). Sedangkan Mohammad Hatta memiliki pandangan yang berbeda. Ia beralasan bahwa etnis dan kebudayaan (suku Papua, rumpun Melanesia)

¹ Lihat, Agus A. Alua, *Papua Barat Dari Pangkuan ke Pangkuan, Suatu Ikhtisar Kronologis* (Jayapura: Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Biro Penelitian STFT Fajar Timur, 2006), hlm. 18.

sangat berbeda dengan suku bangsa Melayu di pulau-pulau lain yang akan menjadi bagian dari negara yang akan dimerdekakan. Mengingat perdebatan tersebut tidak mencapai kesepakatan, akhirnya BPUPKI menetapkan pola voting diantara 66 anggota BPUPKI. Pada rapat tanggal 11 Juni 1945 Hatta memberikan pandangan yang simpatik kepada bangsa Papua sebagai bangsa Papua yang berbeda dengan bangsa Indonesia. Artinya, bangsa Papua memiliki hak untuk menjadi bangsa yang merdeka, namun memerlukan waktu beberapa tahun untuk mempersiapkan diri menjadi bangsa yang merdeka. Karena itu, diperlukan kesiapan sumber daya manusia yang cakap dalam mempersiapkan kemerdekaan bangsa Papua. Selanjutnya, Hatta menjelaskan bahwa :

“Bagian Papua, saya serahkan kepada orang lain. Akan tetapi kalau pemerintah Nippon memberikan Papua yang dulu di bawah pemerintah Belanda kepada Indonesia, saya tidak keberatan, hanya saya tidak menuntutnya dan kalau sekiranya bagian Papua itu ditukar dengan Borneo Utara, saya tidak keberatan, malah bersyukur, karena, seperti saya katakan dahulu, saya tidak minta lebih dari pada tanah air Indonesia yang dulu dijajah oleh Belanda, tetapi kalau ditukar memang merupakan suatu kebutulan”. Menurut Hatta, Tanah Papua bukan hak kita otomatis, tetapi harus diserahkan oleh penguasa saat itu, yakni Nippon. Hatta menegaskan lagi : “bagi saya sendiri tidak ada keberatan, kalau Tanah Papua diberikan kepada kita.”²

Dari perdebatan yang terjadi dalam BPUPKI, terdapat 3 (tiga) alternatif, yang harus divoting oleh 66 anggota BPUPKI, yakni : (1) Hindia Belanda dahulu; (2) Hindia Belanda dahulu, Malaka, Borneo Utara, Papua, Timor-Portugis dan Kepulauan sekitarnya; dan (3) Hindia Belanda dahulu ditambah Malaka dipotong Papua. Dari voting yang diselenggarakan, maka BPUPKI menetapkan bahwa batas-batas wilayah negara Indonesia adalah Hindia Belanda dahulu.

² Lihat, Agus A. Alua, *Papua Barat Dari Pangkuan ke Pangkuan...* hlm. 18.

Pada periode 1945 hingga 1960-an, status politik Papua menjadi agenda penting yang dibahas dalam berbagai konferensi internasional. Hal ini dapat dilihat sebagai konfrontasi melalui jalur diplomasi untuk menentukan status politik Papua.³ Belanda mencari jalan lain untuk mempertahankan kekuasaan serta pengaruhnya di Indonesia. Belanda berfikir tentang bagaimana caranya memerangi bangsa yang baru menyatakan kemerdekaan. Salah satu jalan yang ditempuh adalah cara lama yang sudah dikenal dalam merampokporandakan keutuhan bangsa Indonesia selama penjajahannya di Hindia Belanda. Itulah cara *divide et impera* membagi atau memecah belah dan menguasai, suatu cara yang sudah sejak lama dipraktekkan oleh para pejabat kolonial Belanda di Nusantara. Misalnya saja, Van Mook mengusulkan gagasan pembentukan negara federal dengan menggunakan alasan bahwa Indonesia terdiri dari puluhan kerajaan dan kesultanan yang selama ini berdiri sendiri. Gagasan federasi senantiasa dijadikan agenda oleh Belanda dalam beberapa konferensi internasional.

Pertama, Konferensi pertama adalah Konferensi Malino yang dilaksanakan pada 15 Juli 1946, dan salah satu tokoh Papua, yakni Frans Kaisepo hadir dalam konferensi bersejarah tersebut. Konferensi memutuskan untuk membentuk sebuah negara federasi, sebagaimana keinginan Van Mook. Sedangkan, Irian (Papua) dipandang sebagai daerah yang dapat berdiri sendiri. Van Mook yang terlibat penuh dalam konferensi mengusulkan pembentukan negara bagian yang terdiri dari Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Timur Besar. Pada kesempatan tersebut, tepatnya tanggal 18 Juli 1945 Frans Kaisepo berpidato untuk menyampaikan usulan perubahan nama *Nederland Nieuw Guinea* atau Papua menjadi Irian Barat.

³ Proses konferensi dari waktu ke waktu sejak konferensi Malino hingga konferensi Meja Bundar, diolah dari Decki Natalis Pigai, *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 162 – 174.

Mengingat nama Papua memiliki kesan yang merendahkan martabat penduduk asli Papua.⁴

Kedua, Konferensi Pangkalpinang. Sebagai kelanjutan dari konferensi Malino, maka dilaksanakan konferensi Pangkalpinang pada tanggal 1 – 12 Oktober 1946. Konferensi ini menyetujui pembentukan negara federal. Pada konferensi tersebut, kaum peranakan menginginkan agar penduduk Netherland Nieuw Guinea untuk menjadi daerah yang terpisah dari wilayah maupun ketatanegaraan negara federal yang akan dibentuk. Pada konferensi tersebut, tidak satupun tokoh Papua yang hadir dalam konferensi tersebut. Yang dihadirkan dalam konferensi ini adalah golongan cina, Arab dan Indo Belanda. Dalam konferensi tercetus usul dari seorang Indo Belanda agar wilayah Irian Jaya (Nieuw Guinea) reserve untuk orang-orang Indo dan Belanda yang berada langsung dibawah pengaruh Kerajaan Belanda artinya wilayah ini tidak ikut dalam pembentukan negara serikat yang nantinya bergabung dalam Republik Indonesia Serikat (RIS). Usul ini memang sesuai dengan hasrat Belanda yang menginginkan Indonesia terdiri dari sejumlah negara kecil, sehingga memperkecil kedudukan pemerintah Republik Indonesia⁵.

Ketiga, Konferensi Denpasar. Konferensi ini diselenggarakan di Denpasar pada tanggal 2- 24 Desember 1946 yang bertujuan untuk pembentukan negara federal. Dalam konferensi ini mulai dibicarakan pembentukan negara bagian pertama yakni Negara Indonesia Timur (NIT) yang wilayah meliputi pulau-pulau Sunda Kecil, Sulawesi, dan Maluku, kecuali Keresidenan Nieuw Guinea. Konferensi ini berakhir pada tanggal 24 Desember 1946, dimana Konferensi memilih T.G.R Soekowati dari Bali sebagai Presiden Negara Indonesia Timur.⁶

⁴ Lihat Decki Natalis Pigay, *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 162 – 164.

⁵ Lihat Decki Natalis Pigai, *Evolusi Nasionalisme...*, hlm. 164 – 166.

⁶ Lihat Decki Natalis Pigai, *Evolusi Nasionalisme...*, hlm. 166 – 168.

Keempat, Konferensi Meja Bundar (KMB). Konferensi ini dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus – 2 November 1949. Konferensi ini sangat menentukan bagi kedudukan Nieuw Guinea (Papua), KMB menghasilkan beberapa naskah perjanjian antara Indonesia dan Belanda, terutama mengenai status Papua, khususnya yang terkait dengan kewarganegaraan. Namun status Papua tidak dibicarakan secara terperinci. Dalam konferensi ini, pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, namun belum mengakui Papua.⁷ Secara lengkap, KMB menghasilkan keputusan antara lain : (1) Republik Indonesia dan kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dibawah Ratu Yuliana; (2) Hutang bekas Hindia Belanda ditanggung Indonesia; (3) Tentara Belanda, KL dan KNIL dibubarkan; (4) Tentara Nasional Indonesia menjadi inti tentara RIS; (5) Penyerahan kedaulatan dilakukan sebelum akhir 1949; (6) Kedudukan Irian Jaya (Nieuw Guinea) akan ditetapkan pada tahun berikutnya. Dengan hasil KMB seperti ini maka kedudukan Irian Jaya secara de facto dikuasai Belanda sampai akan diselesaikan dalam perundingan berikutnya setahun kemudian.

Pada periode 1950 - 1951, sebagai tindak lanjut KMB, maka diadakan beberapa kali Konferensi Uni Indonesia-Belanda. Serangkaian konferensi tersebut bertujuan untuk membahas tentang ketatanegaraan Indonesia, guna mewujudkan tujuan Belanda agar konsep negara serikat diberlakukan di Indonesia dan membawa permasalahan Papua ke Mahkamah Internasional. Namun gagasan Belanda untuk 'internasionalisasi' masalah Papua ke Mahkamah Internasional ditolak oleh Indonesia.

Perjuangan Indonesia dan Belanda atas status politik wilayah Nieuw Guinea (Papua) berlanjut di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam Sidang

⁷ Lihat Decki Natalis Pigai, *Evolusi Nasionalisme...*, hlm. 174 – 179.

Umum PBB ke-9 yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 1954 membuka peluang bagi Indonesia untuk mengajukan sebuah memorandum "soal Nieuw Guinea" kepada PBB supaya masalah Irian (Papua) juga dijadikan bagian dari rancangan agenda pembahasan Sidang Umum PBB. Setelah melalui perdebatan yang panjang di PBB, masalah status Irian dibicarakan dalam Sidang pada tanggal 10 Desember 1954. Sidang Umum ini membahas masalah Irian yang diajukan oleh Panitia Politik PBB. Namun, masalah Irian belum terpecahkan dalam Sidang tersebut.

Di era perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet, masalah Irian menjadi salah satu agenda yang digunakan oleh Pemerintahan Soekarno. Dalam konteks perang dingin, Soekarno mendekati negara-negara komunis untuk menekan negara-negara Barat. Diharapkan Amerika dapat mempengaruhi Belanda terhadap masalah Irian. Dengan jalur diplomasi, Soekarno mendekati Uni Soviet dan Cina, dimana Soekarno memperkenalkan 'poros Jakarta-Peking'. Demikian pula, Soekarno mendekati Uni Soviet. Soekarno mengundang Presiden Rusia Voroshilov pada bulan Mei 1957. Berbagai kebijakan diplomasi yang ditempuh oleh Soekarno membuat negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat khawatir dan kecewa. Namun strategi Soekarno ini berhasil untuk mempengaruhi Amerika untuk menekan Belanda. Pada Februari 1962 Presiden Kennedy melobi Indonesia dan Belanda yang bertujuan untuk memfasilitasi perdamaian antara kedua negara.

Ditengah-tengah perjuangan diplomasi yang dijalankan Indonesia, pihak Belanda mengeksploitasi semangat 'nasionalisme Papua' untuk membentuk Negara Papua yang bersiri sendiri dan terlepas dari Indonesia. Untuk persiapan tersebut, melalui pemilihan tanggal 18 – 25 Februari 1961 dan kemudian pada 5 April 1961 Belanda membentuk Dewan Nieuw Guinea (Nieuw Guinea Raad) dimana sebuah badan perwakilan rakyat yang memiliki fungsi-fungsi legislatif. Dewan ini terdiri dari 28 anggota. Demikian pula, pihak Belanda mendorong kebebasan rakyat Papua untuk mendirikan partai-partai politik lokal, antara lain partai Nasionalis, Nasionalis Partai Papua, Partai Papua Merdeka, Front Nasional Papua, Partai Kristen Islam

Radja Ampat. Partai-partai tersebut mengikuti pemilihan Dewan Nieuw Guinea yang berkedudukan di Holandia (Jayapura) dan dilantik pada tanggal 5 April 1961. Salah satu tokoh Islam dari daerah Raja Ampat adalah Abdullah Arfan. Melalui Dewan Nieuw Guinea, kelengkapan-kelengkapan negara Papua Barat disiapkan, antara lain: (1) menentukan nama negara menjadi West Papua atau Papua Barat; (2) nama bangsa adalah bangsa Papua; (3) nama bendera adalah Bintang Kejora; (4) lagu kebangsaan Papua, yakni Hai Tanahku Papua. Akhirnya, pada tanggal 1 Desember 1961, negara Papua Barat dideklarasikan di Jayapura.⁸

Dengan kondisi sosial politik seperti itu, Pemerintah Soekarno melakukan langkah politik yang lebih keras melalui politik keamanan. Bertempat di Yogyakarta, pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mendeklarasikan Tri Komando Rakyat (TriKora), dimana Komando ini diserukan 18 hari setelah bendera Papua dikibarkan di pulau Papua. Setelah TRIKORA dikumandangkan, maka pada tanggal 11 Januari 1962 dibentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, yang dipimpin oleh Soeharto.⁹

Tekanan politik keamanan ini memiliki pengaruh yang kuat untuk mendorong Amerika Serikat dalam mempengaruhi sikap politik Belanda. Perjuangan ini mencapai hasilnya pada tanggal 15 Januari 1962, dimana pihak Belanda akan menyerahkan wilayah Irian kepada UNTEA sebagai suatu pemerintahan sementara PBB. Penyerahan kekuasaan dari tangan Belanda kepada UNTEA berlangsung pada tanggal 1 Oktober 1962. Mulai tanggal itu juga bendera PBB dikibarkan bersama bendera Belanda. UNTEA dikepalai oleh seorang administrator PBB yang diangkat langsung oleh Sekretaris Jenderal PBB agar melaksanakan seluruh tugas dan kewajibannya sesuai dengan petunjuk Sekjen PBB. Berdasarkan pasal IV dalam perjanjian New York, kepala administrator tersebut terlebih dahulu harus mendapat

⁸ Lihat Decki Natalis Pigai, *Evolusi Nasionalisme...*, hlm. 218 – 220.

⁹ Lihat Decki Natalis Pigai, *Evolusi Nasionalisme...*, hlm. 220.

persetujuan dari kedua belah pihak baik Indonesia maupun Belanda. Pada pertama kalinya kepala UNTEA diberikan kepada Jose Rolz Bonnet kemudian digantikan oleh DR Jalal Abdoh.¹⁰

Tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh UNTEA dapat diperinci sebagai berikut: Pertama, menerima penyerahan pemerintah atas kekuasaan Irian Barat dari pihak Belanda. Kedua, menyelenggarakan pemerintahan yang stabil atas wilayah Irian Barat dengan satu masa tertentu. Ketiga, menyerahkan pemerintahan atas Irian Barat kepada pihak Republik Indonesia.¹¹

UNTEA juga mempunyai beberapa wewenang seperti yang tertuang dalam perjanjian New York pasal XI, IX, XXV, misalnya mengubah peraturan-peraturan yang dianggap perlu asal tidak bertentangan dengan aturan yang ada dalam perjanjian tersebut di atas, berwenang mempekerjakan para karyawan-karyawan sipil orang Indonesia dan Belanda kecuali pada jabatan-jabatan terpenting yang harus ditempati oleh para karyawan dari Negara lain, tetapi pihak Belanda hanya mempekerjakan 11 orang sebagai tenaga ahli di bidang ekonomi, keuangan, kesehatan dan pemerintah dalam negeri. Sedangkan orang Indonesia ditempatkan di berbagai jabatan pada lapisan kedua sebagai asisten Direktur, asisten residen di hampir sebagian besar instansi seperti pengadilan, telepon, telegram, radio, kepegawaian, keuangan dan perbekalan. Tindakan ini dalam rangka mempermudah penyesuaian penyerahan kekuasaan dari PBB kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963.¹²

¹⁰ Lihat: Agus Alua, *Papua Barat dari Pangkuan ke Pangkuan* (Jayapura : Sekretariat PDP dan Biro Penelitian STFT Fajar Timur, 2006).

¹¹ Lihat: Decki Natalis Pigai, *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 245-248.

¹² Agus Alua, *Papua Barat dari Pangkuan ke Pangkuan* (Jayapura : Sekretariat PDP dan Biro Penelitian STFT Fajar Timur, 2006); John RG Djopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka* (Jakarta: Grasindo, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993).

Hal yang menarik dalam penyerahan pegawai-pegawai dari Indonesia untuk diperbantukan pada pegawai-pegawai UNTEA adalah tidak terlepas dari dorongan pihak-pihak ketiga yang memainkan peranan didalamnya, agar dapat mewujudkan secara defacto pengambilalihan kekuasaan oleh Republik Indonesia yang agak berbeda dengan batas waktu yang di tentukan dalam peraturan-peraturan perjanjian antara Indonesia dan Belanda di New York. Di lain pihak adalah untuk membersihkan seluruh alat perlengkapan Negara Papua Barat yang telah disiapkan oleh rakyat Irian atas bantuan negara Belanda.

Dalam penyelenggaraan tugasnya di Irian segala pembiayaan harus ditanggung secara merata oleh pemerintah Indonesia dan Belanda. Maka oleh UNTEA di Irian sesuai dengan *Memorandum of Understanding* antara pihak Indonesia dan Belanda pada tanggal 15 Agustus 1962 dibentuk sebuah panitia yang terdiri atas wakil-wakil dari pihak sekretaris jendral PBB, Indonesia dan Belanda. Panitia ini bertugas untuk mengumpulkan keterangan dan menyarankan anggaran yang sepatutnya bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan UNTEA di Irian. Dalam rangka kelancaran kegiatan UNTEA, maka PBB menugaskan kesatuan keamanan yang terdiri dari pasukan keamanan PBB yang berasal dari Pakistan. pasukan Republik Indonesia yang semuanya berasal dari bekas-bekas Gerilyawan (infiltran) dan penduduk Irian yang menjadi anggota keamanan pada masa Belanda. Seluruh pasukan dibawak komando Mayor Jendral Sahid Uddin Khan.

Pada akhir masa pemerintahannya Dr. Jalal Abdoh melaporkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan selama hampir 7 bulan berkuasa di Irian. Sekalipun mengalami berbagai tantangan dan rintangan yang dihadapinya, baik itu kesulitan berkomunikasi dengan rakyat, kesulitan karena medan yang begitu berat maupun arus demonstrasi dari rakyat yang menuntut agar bendera Negara Papua Barat, lambing Negara, dan lagu kebangsaan yang telah dikibarkan pada tanggal 1 Desember 1961 tetap dikibarkan. Dilaporkan pula hasil pembangunan dermaga Biak, rumah sakit-rumah sakit, penyelesaian bangunan pusat penyelidikan pertanian di Manokwari,

tempat penyimpanan dan persediaan air di Merauke dan Serui, perluasan gedung perwakilan rakyat, gedung pengadilan serta perluasan jalan dan lapangan terbang. Sesudah laporan itu pada tanggal 1 Mei 1963 dilaksanakan penyerahan kekuasaan dari pemerintah UNTEA kepada Negara Republik Indonesia. Penyerahan kekuasaan ini berdasarkan perjanjian New York, dimana PBB harus mengikuti perkembangan jalannya pemerintahan sampai tahun 1969.

B. Politik Pembangunan di Era Pemerintahan Orde Baru

(1) Ideologi Pembangunan Orde Baru

Pembangunan di Irian Jaya pada awal masa pemerintahan Orde Baru di akhir tahun 1960-an dan 1970-an tidak terlepas dengan konstelasi sosial politik dan kondisi ekonomi yang berkembang saat itu. Diwarisi dengan krisis ekonomi dan politik pada tahun 1965, pemerintahan Soeharto memberikan prioritas utama pada pembenahan sektor ekonomi. Sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XXIII tentang “Pembaruan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan”¹³ Kebijakan ekonomi tersebut meliputi tahap penyelamatan, tahap stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi dan tahap pembangunan ekonomi. Kebijakan ini sebenarnya memberikan pilihan kepada para pengambil keputusan di era awal Orde Baru untuk menarik dukungan dari kreditor luar negeri, khususnya di kalangan negara-negara Barat dan Jepang. Untuk menarik investasi asing, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA) yang memuat langkah-langkah kebijakan ekonomi yang bersifat insentif. Dengan landasan UU PMA ini, PT. Freeport Indonesia, perusahaan pertambangan Amerika adalah investasi asing pertama yang beroperasi di Indonesia pada tahun 1967, khususnya berlokasi di wilayah Papua.

¹³ Mohtar Mas' oed, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966 – 1971* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 69.

Struktur politik yang berkembang di Papua pada awal tahun 1970-an tidak terlepas dari ideologi pembangunan yang dibangun oleh Pemerintahan Orde Baru. Ideologi ini meletakkan pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sehingga pembangunan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Ideologi yang dipromosikan adalah ideologi yang membawa nilai-nilai modernitas sekuler, pragmatis, dan rasionalisme.¹⁴ Demikian pula, rejim Orde Baru mempromosikan ideologi Dwi-Fungsi ABRI. Ideologi yang membenarkan secara legal-formal keterlibatan militer dalam urusan-urusan non-militer. Para elite-elite militer juga dididik untuk menganut ideologi yang bernilai-nilai modernitas sekuler, dan didukung oleh intelektual sipil liberal yang umumnya dididik di perguruan tinggi Amerika. Pada intinya, tujuan pembangunan di era Orde Baru adalah pertumbuhan ekonomi dan ketertiban atau stabilitas politik dalam suatu politik teknokratik yang tertib.

Untuk melaksanakan tujuan pembangunan tersebut, Mohtar Mas'ood mencatat bahwa, *pertama*, pemerintah harus melaksanakan kebijakan ekonomi yang memberi ruang bagi pertumbuhan ekonomi yang efektif dan cepat yang didukung oleh sumber-sumber ekonomi asing. Kedua, pemerintah harus memelihara suatu sistem ekonomi dan masyarakat yang terkendali secara ketat dan tertib. Stabilitas dan keamanan nasional merupakan hal yang paling berharga dalam pandangan elite Orde Baru. Untuk itu, pemerintahan Orde Baru membangun struktur-struktur politik yang dapat dikelola oleh pemerintah secara efektif. Pertama, birokrasi sipil yang terkendali. Kedua, Angkatan Bersenjata yang terpadu. Ketiga, Lembaga perwakilan yang lebih tanggap. Keempat, politik kepartaian yang disederhanakan. Kelima, Kantor Kepresidenan sebagai inti.¹⁵

¹⁴ Mohtar Mas'ood, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru...* hlm. 132-136.

¹⁵ Penjelasan secara rinci menyangkut struktur-struktur politik yang dibangun oleh rejim Orde Baru dilihat pada Mohtar Mas'ood, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru...*, hlm. 150-184.

(2) Pendekatan Pembangunan dan Pemerintahan di Provinsi Irian Jaya

Penyelenggaraan pemerintahan di Irian (Papua) sejak 1 Mei 1963 sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.¹⁶ Setelah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), pemerintahan dan pembangunan di Papua dilaksanakan secara penuh dilaksanakan sesuai dengan UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Demikian pula, Pemerintah Indonesia membuat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten di Provinsi Irian Barat. Sejak tahun 1964, terdapat 5 Keresidenan yaitu: (1) Keresidenan Kotabaru, Pegunungan Tengah, Biak, Manokwari, Fakfak, dan Merauke. Namun terdapat beberapa wilayah persiapan di Pegunungan Tengah.¹⁷

Untuk mempermudah koordinasi pembangunan di Irian (Papua), maka Pemerintah membentuk 3 (tiga) Pembantu Gubernur dengan pusat kedudukan dan wilayah kerja sebagai berikut : Wilayah I, yang menjadi Wilayah Timur berkedudukan di Jayapura, dengan wilayah kerjanya meliputi kabupaten Jayapura, Kotamadya Jayapura, Jayawijaya dan Merauke. Wilayah II, yang menjadi wilayah Tengah berkedudukan di Biak Numfor, dengan wilayah kerja meliputi kabupaten Biak Numfor, Yapen Waropen, Nabire, Paniai, dan Mimika. Wilayah III, meliputi wilayah Barat yang berkedudukan di Manokwari, dengan wilayah kerja mencakup kabupaten Manokwari, Fakfak, dan Sorong.¹⁸

Sejalan dengan konsolidasi awal pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia, termasuk di Irian Barat (Papua), maka pembangunan di Papua didukung oleh organisasi khusus yaitu Sekretariat Koordinator Irian Barat (SEKIB). Konsep

¹⁶Pemerintah Daerah Irian Jaya, *35 Tahun Irian Jaya Membangun* (Jayapura: Pemda Provinsi Irian Jaya, 1997).

¹⁷ Pemerintah Daerah Irian Jaya, *35 Tahun Irian Jaya...*, hlm. 42.

¹⁸ Pemerintah Daerah Irian Jaya, *35 Tahun Irian Jaya...*, hlm. 45-47.

kebijaksanaan an program-program pembangunan di Papua kemudian diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), sejak Repelita I Tahun 1969 hingga Repelita ke-7 Tahun 1997.

Dalam pelaksanaan pembangunan pada masa Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I sampai Pelita IV, bersifat sektoral dan berorientasi pada pertumbuhan masing-masing, sehingga pembangunan yang masuk ke kecamatan-kecamatan (kampung) tidak saling berkaitan satu sama lain dan kurang menyentuh. Oleh karena itu, pada periode Pelita V, Pemerintah Daerah mengambil suatu kebijakan yang menitikberatkan pembangunan pedalaman dan daerah terpencil yang ditempuh dengan program yang khusus. Adapun strategi pembangunan diarahkan pada: (a) Penerobosan isolasi. Kebijakan ini dimaksudkan agar secara bertahap semua masyarakat Irian mempunyai akses untuk berkomunikasi satu dengan yang lain dan dapat berkomunikasi terhadap perkembangan pembangunan; (b) Peningkatan sumber daya manusia. Kebijakan ini ditujukan agar manusia Irian menjadi insan pembangunan yang mampu mengolah dan memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia; (c) Konsolidasi organisasi dan manajemen pemerintah. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan aparat pemerintah untuk melayani masyarakat sampai ke tingkat desa.¹⁹

Untuk melaksanakan strategi pembangunan di Papua, pemerintah daerah Irian Jaya saat itu menerapkan 2 (dua) pendekatan pembangunan adalah sebagai berikut:

Pertama, pendekatan makro-sektoral. Pendekatan ini merupakan konsep pendekatan pembangunan melalui sektor-sektor prioritas dimana sektor-sektor prioritas sangat erat kaitannya dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan sumber daya manusia (tenaga kerja). Sektor-sektor prioritas tersebut

¹⁹ Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, *Evaluasi Pelita V Propinsi daerah Tingkat I Irian Jaya Tahun 1989/1990 – 1993/1994* (Jayapura, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, 1994), hlm. 7 – 8.

adalah sektor pertanian, pemerintahan, kesejahteraan sosial, industri tenaga kerja, transmigrasi. Dan didukung oleh sektor pendidikan, kesehatan, dan perumahan. *Kedua*, pendekatan mikro-spasial. Pendekatan pembangunan dimana kegiatan pembangunan dilaksanakan secara terpadu di lokasi tertentu, dana, daya dan material dari berbagai sektor dipadukan dan diarahkan melalui program yang menyeluruh ditujukan pada sasaran wilayah dan masyarakat tertentu.²⁰ Untuk mengkaitkan pendekatan mikro-spasial dan makro-sektoral, maka pemerintah daerah Irian Jaya melaksanakan beberapa pola atau bentuk keterkaitan yakni: (a) keterkaitan antara perusahaan besar, menengah, dan usaha-usaha berskala kecil oleh masyarakat; (b) pola PIR, dengan sistem inti dan plasma; (c) pola *equity participation*; (d) pola bapak angkat dan anak angkat; (d) pola hubungan ketenagakerjaan.²¹

C. Umat Islam dalam Birokrasi dan Pembangunan di Papua pada masa Orde Baru

Sejalan dengan strategi, kebijakan, dan pendekatan pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan makro-sektoral dan menguatkan kualitas sumber daya manusia di kawasan perdesaan dengan pendekatan mikro-spasial, pemerintah daerah Papua dan pemerintah pusat membuka kawasan-kawasan potensial di berbagai pelosok Papua. Konsekuensinya, wilayah Papua terbuka oleh masuknya penduduk dari luar Papua. Urbanisasi menjadi fenomena sosial yang merupakan persoalan sosial baru di Papua. Dalam konteks urbanisasi, mayoritas arus migrasi ini adalah masyarakat muslim yang berasal dari pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan.

²⁰ Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, *Evaluasi Pelita V...*, hlm. 9-10.

²¹ Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, *Evaluasi Pelita V...*, hlm. 11-12.

1. Umat Islam dalam Birokrasi Sipil di Papua di Era Orde Baru

Demikian pula, dalam lapangan birokrasi lokal, baik di tingkat provinsi dan kabupaten, umat Islam khususnya figur-figur militer atau birokrasi sipil yang beragama Islam telah menempati posisi-posisi penting dalam struktur birokrasi di tingkat provinsi. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut.²²

1. Zainal Abidin Syah (Muslim), tahun 1956 – 1961, berkedudukan di Soa-Siu
2. Eliazer Jan Bonai, tahun 1963 – 1964, berkedudukan di Soekarnopura
3. Frans Kaisepo, tahun 1964 – 1973, berkedudukan di Soekarnopura
4. Acub Zainal (Muslim), tahun 1973 – 1975, berkedudukan di Jayapura
5. Soetran (Muslim), tahun 1975-1981, berkedudukan di Jayapura
6. Drs. Busiri Suryowinoto (Muslim), tahun 1981-1982, berkedudukan di Jayapura
7. Izaak Hindom, tahun 1982 – 1988, berkedudukan di Jayapura
8. Barnabas Suebu, SH, tahun 1988 – 1993, berkedudukan di Jayapura
9. Drs. Jacob Pattipi, tahun 1993 – 1998, berkedudukan di Jayapura

Artinya, pada masa pemerintahan Orde Baru, terdapat gubernur-gubernur yang bergama Islam dan dipandang berhasil dalam mendorong pembangunan di Papua saat itu. Gubernur tersebut adalah Zainal Abidin Syah, Acub Zainal, Soetran, dan Drs. Busiri Suryowinoto.

Sedangkan wakil gubernur Irian Jaya (Papua), sejak tahun 1961 hingga tahun 1996, adalah sebagai berikut.²³

²² Pemerintah Daerah Irian Jaya, *35 Tahun Irian Jaya Membangun* (Jayapura: Pemda Irian Jaya, 1997), hlm. 52.

²³ Pemerintah Daerah Irian Jaya, *35 Tahun Irian Jaya...*, hlm. 53.

1. R. Pamoedji, tahun 1961 – 1964
2. R.A. Soebekti, tahun 1964 – 1967
3. M. Sarwono, tahun 1967 – 1973
4. Jan Mamoribo, Tahun 1973 – 1976
5. Eliyas Paprindey, tahun 1976 – 1980
6. Izaak Hindom, tahun 1980 – 1982
7. Sugiyono, thun 1982 – 1987
8. Poedjono Pronyoto, tahun 1987 – 1988
9. Soedradjat Nataatmadja, tahun 1988 – 1993
10. Basyir Bachtiar, tahun 1993
11. Herman Monim, tahun 1996
12. Abraham Ataruri, tahun 1996

Pada tahun 1996, Pemerintah Pusat melakukan inisiatif untuk membentuk 3 (tiga) wakil gubernur, yakni Basyir Bachtiar, Herman Monim, dan Abraham Ataruri. Hal ini sebagai persiapan awal untuk mendorong pemekaran provinsi Papua menjadi beberapa provinsi sebagai konsep yang telah diajukan oleh Gubernur Busiri Suryowinoto, pada tahun 1981 – 1982. Dari komposisi tersebut, keterwakilan umat Islam dalam struktur pemerintahan provinsi tercermin dari posisi wakil gubernur, yakni antara lain Sugiyono, Poedjono Pronyoto, Soedradjat Nataatmadja, dan Basyir Bachtiar.

Pada masa pemerintahan di dekade 1970-an hingga 1980-an, Gubernur-gubernur seperti Acub Zainal, Soetran, dan Busiri mendorong konsep pembangunan yang berbasis pertanian dan perdesaan. Di era Acub Zainal, ia mencetuskan "Operasi Koteka" di wilayah Pegunungan Tengah. Gubernur Soetran mendorong pengembangan pertanian di kawasan perdesaan, terutama dengan gerakan tanam cengkeh. Demikian pula, Gubernur Busiri mendorong kebijakan transmigrasi untuk membuka daerah-daerah baru yang potensial guna pengembangan pertanian. Hal ini pula sejalan dengan kebijakan nasional yang mendorong kebijakan transmigrasi di wilayah Timur Indonesia, khususnya di pulau Papua.

2. Muslim Perantau dalam Struktur Penduduk Papua di Era Orde Baru

Setelah Papua masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963 seiring dengan itu makin banyak pula penduduk dari luar Papua yang membanjiri kota dan kabupaten di seluruh Papua. Baik yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, militer, polisi, pedagang dan para pencari kerja lainnya. Mayoritas perantau adalah dari suku Bugis-Makasar, Jawa-Madura dan suku-suku perantau lainnya. Dimana mereka telah terbentuk secara spontan komunitas-komunitas pedagang Bugis-Makasar misalnya di Jayapura yang bertempat di pasar Ampera, pasar Hamadi, pasar Entrop, pasar Abepura, pasar Yotefa dan pasar Sentani. Dimana setiap tempat yang ada komunitas Bugis-Makasar selalu didirikan Masjid sebagai tempat ibadah.

Perkembangan penduduk di Papua selama era Orde Baru meningkat dari waktu ke waktu. Pada awal pemerintahan Orde Baru di Papua, jumlah penduduk Papua pada tahun 1971 adalah sebanyak 923.440 jiwa dengan konsentrasi di kabupaten Jayawijaya dan diikuti oleh kabupaten Merauke, Nabire, Sorong, dan Jayapura. Sepuluh tahun (10) kemudian pada tahun 1980, populasi Papua meningkat sebanyak 250.435 jiwa dari populasi Papua di tahun 1971, sehingga total penduduk Papua pada tahun 1980 menjadi 1.173.875 jiwa. Sedangkan di tahun 1990 jumlah penduduk Papua meningkat terus menjadi 1.648.708 jiwa.²⁴ Dibandingkan dengan periode 1970 – 1980 dimana pertambahan penduduk hanya sekitar 250.435 jiwa, maka pada dekade 1980 – 1990 pertambahan penduduk mencapai 474.833 jiwa. Pada umumnya arus migrasi ini menempati kota-kota di pesisir atau pantai, yakni di kabupaten Jayapura, Merauke, Nabire, Sorong, dan Manokwari. Pertambahan penduduk yang pesat ini terjadi pula pada periode 1990 – 1998 yang mencapai

²⁴ Badan Pusat Statistik Propinsi Irian Jaya, *Irian Jaya Dalam Angka Tahun 1998* (Jayapura, BPS Propinsi Irian Jaya, 1998), hlm. 87.

462.792 jiwa, dimana pada tahun 1990 berjumlah 1.648.708 meningkat menjadi 2.111.500 jiwa di tahun 1998.

Mencermati dinamika dari struktur penduduk Papua dari tahun 1971 hingga 1998 tersebut, terlihat bahwa peningkatan penduduk Papua terjadi pada periode 1980 hingga 1990 dan berlanjut di era 1990-an. Pertambahan penduduk pada dekade 1980-1990 dan 1990 – 1998 yang mencapai rata-rata 450.000 jiwa nampaknya disebabkan beberapa faktor antara lain pelaksanaan pembangunan yang semakin dinamis, pembukaan kawasan-kawasan potensial di Papua, masuknya investasi dalam dan luar negeri, maupun sarana transportasi yang semakin tersedia untuk melayani daerah-daerah di luar Papua ke pulau Papua. Arus migrasi tersebut terkonsentrasi di kabupaten Sorong, Jayapura, Timika, maupun Merauke. Pada tabel dibawah ini digambarkan struktur pemeluk agama dari penduduk Papua pada tahun 1998, yakni²⁵:

Tabel 4. Banyaknya Pemeluk Agama Menurut Golongan Agama di Papua

No.	Tahun	Kristen Protestan	Katholik	Islam	Hindu	Budha	Jumlah
1.	1998	1.171.297	478.609	452.214	5.600	3.780	2.111.500
2.	1997	1.164.370	458.058	428.771	4.532	2.669	2.058.400
3.	1996	1.154.272	469.681	414.550	4.054	2.808	2.045.365
4.	1995	1.130.021	430.011	405.725	3.644	2.702	1.972.103
5.	1994	1.043.197	401.445	393.155	3.672	3.052	1.844.521

Sumber : BPS Provinsi Irian Jaya, Irian Jaya Dalam Angka Tahun 1998.

Seiiring dengan peningkatan penduduk Papua, terjadi peningkatan pula populasi umat Islam dari tahun 1971 hingga tahun 1998. Dari jumlah umat Islam sebesar 452.214 jiwa pada tahun 1998 atau sekitar 21 % (21 persen) dari total

²⁵ Badan Pusat Statistik Propinsi Irian Jaya, *Irian Jaya...*, hlm. 193.

penduduk Papua sebanyak 2.111.500 jiwa. Umat Islam tersebar di seluruh kabupaten di Papua, namun terkonsentrasi di beberapa kabupaten pesisir sehingga agama Islam merupakan agama terbanyak kedua ke-2) di beberapa kabupaten seperti di kabupaten Merauke, Jayapura, Nabire, Fakfak, Mimika, Sorong, Manokwari, Biak Numfor, dan Kotamadya Jayapura. Penyebaran umat Islam menurut kabupaten/kota di Irian Jaya pada tahun 1998 adalah:²⁶

Tabel 5. Penyebaran Umat Islam Menurut Kabupaten Di Propinsi Papua Tahun 1998

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Umat Islam
1.	Merauke	75.937
2.	Jayawijaya	5.574
3.	Jayapura	48.439
4.	Paniai	662
5.	Puncak Jaya	658
6.	Nabire	33.481
7.	Fak-fak	27.931
8.	Mimika	14.615
9.	Sorong	104.059
10.	Manokwari	38.108
11.	Yapen Waropen	6.522
12.	Biak Numfor	10.359
13.	Kotamadya Jayapura	85.869
	T o t a l	452.214

Sumber: BPS Provinsi Irian Jaya, Irian Jaya Dalam Angka Tahun 1998.

Dalam perkembangannya, dari hasil sensus tahun 2000 diperkirakan jumlah penduduk di Papua sebesar sebesar 2,1 juta jiwa dimana terdapat kurang lebih 800.000 jiwa digolongkan sebagai kaum pendatang dari luar Papua, seperti

²⁶ Badan Pusat Statistik Propinsi Irian Jaya, *Irian Jaya....*, hlm. 193.

transmigran, pekerja, pedagang, dan lain-lain.²⁷ Saat ini diperkirakan populasi masyarakat pendatang meningkat mencapai sekitar 1 juta jiwa dari 2,6 juta jiwa penduduk Papua.²⁸

Dari tahun ke tahun laju pertumbuhan penduduk di pulau Papua grafiknya semakin meningkat, terlebih sejak awal tahun 1980, dimana kawasan ini semakin terbuka dengan beroperasinya 4 tempat pemberangkatan kapal untuk tujuan Papua yaitu: Jakarta, Semarang, Surabaya dan Makassar dan Maluku. Sedangkan kota-kota pelabuhan yang disinggahi oleh kapal-kapal penumpang antara lain; Sorong, Manokwari, Nabire, Serui, Biak, Jayapura, Fak-fak dan Merauke. Demikian pula, memasuki tahun 2000-an perusahaan-perusahaan penerbangan, khususnya dari swasta mulai masuk ke pulau Papua.

Jalur laut juga merupakan sarana mengalirnya penduduk non-Papua ke pulau Papua. Jika diperkirakan sekitar 25 % dari penumpang (katakan sajalah jumlah penumpang 1000 jiwa) dan tiap penumpang yang kembali ke Papua membawa seorang warga baru, maka diperkirakan pendatang baru ke Papua tidak kurang dari 260 orang per kapal datang. Sementara itu frekuensi kapal datang ke Papua setiap bulan kurang lebih 7 kali. Dengan demikian pertumbuhan warga baru sekitar 1.750 orang perbulan. Atau dalam satu tahunnya jumlah warga baru sebanyak 21.000 jiwa.

Komposisi antara penduduk asli dan penduduk pendatang juga mengalami perubahan. Pada tahun 2000 penduduk asli Papua dari 312 suku sebanyak 1.460.846 atau sekitar 65,41 % dari total penduduk Papua sebanyak 2.233.530 jiwa. Untuk

²⁷ Lihat : Badan Pusat Statistik, *Statistics Indonesia : Indonesia's 2000 Population Census*, Bangkok : 29 November 2000.

²⁸ Lihat : Bappenas, (Draf Akhir), *Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara, Buku Rinci di Provinsi Papua*, Jakarta: Bappenas 2006. *Seri Papua Aktual No. 5*, Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura, Jayapura, Juni, 2006.

melihat jumlah penduduk asli semakin bertumbuh atau semakin dapat dilihat dari beberapa contoh dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Komposisi Penduduk Asli dan Non-Papua tahun 2002

No	Kabupaten	Total Penduduk	Jumlah Penduduk Asli	Jumlah penduduk Non Papua
1.	Timika	89.862	35.813	54.048
2.	Kota Sorong	157.117	44.611	112.505
3.	Kota Jayapura	134.138	57.825	76.313

Sumber : Kompas: 15 Juni 2002

Jika dilihat dari sensus pertama di Papua diadakan pada tahun 1959 atas biaya dari organisasi masyarakat ekonomi Eropa dan hasilnya di publikasikan pada tahun 1964-1967 dapat diketahui bahwa penduduk asli Papua yang berada langsung dibawah pemerintah Belanda adalah sebanyak 459.609 jiwa.²⁹

Sejak daerah Papua menjadi bagian dari NKRI telah diadakan sensus penduduk sebanyak empat kali, pada tahun 1971, tahun 1980, tahun 1990 dan tahun 2000. Dari hasil sensus tahun 1971 jumlah penduduk asli dan pendatang sebanyak 923.900 jiwa. dan sensus penduduk pada tahun 1980 jumlah penduduk Papua sebanyak 1.173.875 jiwa.

Jadi pada dasawarsa antara 1971 sampai 1980 pertumbuhan penduduk Irian Jaya bertambah rata-rata 2,67% per tahun. Pertambahan tersebut disatu pihak disebabkan oleh pertumbuhan alamiah dan pada pihak lain disebabkan oleh gerak

²⁹ Lihat : Groenewegen & Van de kaa (1964): hlm 1, dalam Mansoben , *Disertasi*, hlm. 28.

perpindahan penduduk dari daerah-daerah lainnya di Indonesia ke provinsi Irian Jaya, baik dalam bentuk transmigrasi nasional, transmigrasi spontan maupun karena penugasan dari pemerintah pusat.

3. Umat Islam dan Program Transmigrasi di Papua

Peningkatan penduduk di Papua dipengaruhi juga oleh arus masuknya penduduk non-Papua melalui program transmigrasi yang dikendalikan secara nasional. Dalam perspektif nasional, sebagaimana yang ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) VI bahwa program transmigrasi adalah bagian yang utuh dari program pembangunan daerah dan sebagai program penunjang dari program pembangunan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Pembangunan permukiman transmigrasi diarahkan agar dapat menjadi kawasan produksi potensial dan dapat mendukung perkembangan ekonomi masyarakat. Untuk mencapai tersebut, kebijaksanaan transmigrasi dikembangkan ke kawasan timur Indonesia, terutama yang lambat perkembangannya, mendukung pengembangan wilayah, membantu mengentaskan penduduk dari kemiskinan, mengembangkan agribisnis, dan usaha lainnya di daerah transmigrasi, serta mengembangkan kualitas sumber daya manusia.³⁰

Di Papua, pelaksanaan program transmigrasi di mulai sejak pra-Pembangunan Lima Tahun (Pelita), dimana dimulai pada tahun 1964 untuk pertama kalinya yang ditempatkan transmigran sebanyak 36 KK dari 94 jiwa yang tersebar pada 2 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) di Kabupaten; yaitu UPT Dosay di Jayapura 9 KK/22 jiwa, dan UPT Kumbe di Merauke 27 KK/72 jiwa. Kemudian ditempatkan pula transmigran, dimana hingga tahun 2000 telah ditempatkan sebanyak 78.650 KK

³⁰ Lihat Republik Indonesia, *Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Di Depan Sidang DPR, 16 Agustus 1997, Pelaksanaan Tahun Ketiga Repelita VI* (Jakarta, Republik Indonesia, 1997), hlm. VIII/61-62.

terdiri dari 306.447 jiwa transmigran yang berasal dari pulau Jawa, Bali, NTT, NTB serta APPDT.

Dengan ditematkannya transmigran telah menambah jumlah penduduk sebagai sumber daya manusia sebanyak 306.447 jiwa yang tersebar di 217 UPT yang telah menjadi Desa/Kampung definitif yang tertata dan teratur. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Provinsi Papua tahun 2004 sebanyak 2.338.704 jiwa³¹ (BPS Provinsi Papua : 2004) maka program transmigrasi memberikan kontribusi penduduk sebesar 13,10 % dari jumlah penduduk keseluruhan, di mana penempatannya tersebar pada 217 UPT di 8 (delapan) Kabupaten.³²

Jumlah transmigran yang telah ditempatkan sejak pra-Pelita sampai dengan tahun 2000 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Data Penempatan Transmigran di Provinsi Papua (Irian Jaya) Dari Pra Pelita sampai dengan tahun 2000

No	Pelita	Tahun	Jumlah		Jumlah UPT	Ket.
			KK	Jiwa		
1.	Pra Pelita	1964-1968	267	1.000	6	
2.	Pelita I	1972-1975	260	1.184	-	Lanjutan
3.	Pelita II	1974-1979	500	2.065	3	
4.	Pelita III	1979-1984	18.570	76.917	43	
5.	Pelita IV	1984-1989	10.568	46.700	28	
6.	Pelita V	1989-1994	17.780	69.307	54	

³¹ Lihat Badan Pusat Statistik Provinsi, *Papua Dalam Angka Tahun 2004* (Jayapura, BPS Provinsi Papua, 2004).

³² Dinas Kependudukan dan Permukiman Provinsi Papua, *Profil Pembangunan Transmigrasi dan Penataan Permukiman Penduduk Lokal di Provinsi Papua* (Jayapura : Dinas Kependudukan dan Permukiman Provinsi Papua, 2007), hlm. 5.

7.	Pelita VI	1994-1999	30.055	106.390	83	
8.	Setelah Pelita	1999-2000	650	2.884	-	Lanjutan
	TOTAL		78.650	306.447	217	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Permukiman Provinsi Papua, tahun 2007

Sedangkan penyebaran penempatan transmigrasi menurut kabupaten sebelum terjadi pemekaran kabupaten/kota di Papua adalah seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Data Penempatan Transmigrasi per Kabupaten Se-Provinsi Papua (Irian Jaya)

No.	Kabupaten	Jumlah		
		KK	Jiwa	UPT
1.	Jayapura	16.182	63.513	41
2.	Manokwari	12.304	50.606	33
3.	Sorong	10.506	40.680	30
4.	Merauke	25.197	98.943	66
5.	Fakfak	6.275	22.695	18
6.	Yapen Waropen	1.640	5.934	7
7.	Nabire (Paniai)	6.471	23.773	21
8.	Biak Numfor	75	303	1
	TOTAL	78.650	306.447	217

Sumber: Dinas Kependudukan dan Permukiman Provinsi Papua, tahun 2007

Komposisi penempatan transmigrasi menurut perbandingan Daerah Asal dengan Daerah Penempatan /APPDT secara umum adalah 75,33 % dari Daerah Asal (meliputi : DKI, JABAR, JATENG, DIY, JATIM, BALI, NTT dan NTB), sedangkan

dari Daerah Penempatan / APPDT sebanyak 24,67 %. Jumlah transmigran per Daerah Asal dan Daerah Penempatan dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 9. Data Jumlah Transmigran per Daerah Asal dan Daerah Penempatan

No.	Daerah Asal/APPDT	Jumlah	
		KK	Jiwa
1.	DKI	237	718
2.	Jawa Barat	12.164	42.493
3.	Jawa Tengah	18.851	70.791
4.	DIY	2.362	6.994
5.	Jawa Timur	20.021	74.402
6.	Bali	365	1.116
7.	NTB	2.152	6.793
8.	NTT	3.092	11.401
9.	APPDT	19.406	91.739
TOTAL		78.650	306.447

Sumber: Dinas Kependudukan dan Permukiman Provinsi Papua, tahun 2007

Seiring dengan bergulirnya era reformasi dan era otonomi khusus bagi provinsi Papua, terjadi perdebatan tentang perlu tidaknya program transmigrasi di Papua. Karena memang selama ini ada anggapan dari beberapa orang asli Papua bahwa program transmigrasi merupakan operasi Islamisasi dan merampas hak tanah-tanah adat orang asli Papua dan orang Papua semakin terpinggirkan.³³ Dengan kebijakan desentralisasi, khususnya dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 21

³³ Lihat: Kata Pengantar Socrates Sofyan Yoman, dalam bukunya Sendius Wonda, SH., M.Si., *Tenggelammnya Rumpun Malenesia: Pertarungan Politik NKRI di Papua Barat* (Yogyakarta: Galangpress, 2007).

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, program transmigrasi di Papua untuk sementara dihentikan hingga menunggu Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Kependudukan dan dan Ketransmigrasian yang diamanatkan dalam UU tersebut.³⁴

Sejalan dengan kebijakan Otonomi Khusus, Gubernur Provinsi Papua melalui Dinas Kependudukan dan Permukiman Provinsi Papua melakukan pembenahan program transmigrasi. Gubernur kemudian membentuk Tim Penyusunan Raperdasi (Rancangan Peraturan Daerah Provinsi)³⁵ tentang kependudukan (transmigrasi). Namun hingga tahun 2008 ini Raperdasi belum disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).³⁶

Pelaksanaan program transmigrasi di Papua hingga saat ini masih diperdebatkan di kalangan eksekutif dan legislatif. Secara umum, program ini memiliki dampak yang positif bagi pembangunan daerah, namun program transmigrasi juga memiliki implikasi negatif di kalangan masyarakat lokal di Papua. Kehadiran Unit-Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) di Papua telah memberikan dampak positif dalam beberapa hal, antara lain: *Pertama*, telah terbentuknya unit-unit pemerintahan daerah baru, baik di tingkat kabupaten, kecamatan (distrik), kelurahan, dan desa. Sentra-sentra transmigrasi yang ada di Papua telah tumbuh menjadi sentra-sentra pemerintahan baru yang mendukung pemekaran kabupaten baru, seperti kawasan UPT Aimas sebagai ibukota kabupaten Sorong, kawasan UPT Warmare sebagai distrik baru yang berkembang pesat di kabupaten Manokwari, maupun kawasan UPT Arso sebagai ibukota kabupaten Keerom. *Kedua*, sentra-sentra

³⁴ Lihat : Undang Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, pada Bab 18 tentang Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

³⁵ Lihat : Draf Raperdasi Kependudukan (transmigrasi) yang diajukan Gubernur Provinsi Papua Pada tanggal 23 Maret 2005, terdapat pasal-pasal ketransmigrasian disebutkan dalam Bab. 5 pasal 23 s.d pasal 25.

³⁶ Lihat : DR. La Pona, MSi, dalam makalah: *Program Pembangunan Transmigrasi Era Otonomi Khusus Di Papua*, Jayapura, 20 Juni 2008.

kawasan transmigran telah berperan untuk mendorong pengembangan wilayah-wilayah potensial di sektor produksi pertanian dan perkebunan. Hal ini terlihat pada kawasan perkebunan kelapa sawit Warmare di Manokwari dan kawasan Arso di Kabupaten Keerom, maupun kawasan pertanian di Merauke dan Sorong. Dari kawasan transmigrasi, kebutuhan pangan seperti sayur-mayur, buah-buahan, maupun beras lokal diproduksi dan dipasarkan di kota-kota di Papua.

Namun, program transmigrasi dikritisi oleh sebagian pihak bahwa transmigrasi adalah sebagai upaya "Islamisasi" dan transmigrasi telah memarginalisasi hak-hak ulayat dari masyarakat adat. Karena itu, dalam pelaksanaannya, pendekatan dalam pemilihan lokasi permukiman transmigrasi selalu disesuaikan dengan rencana tata ruang daerah, memperhatikan aksesibilitas dan potensi lokasi, dan memenuhi persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Demikian, pemahaman terhadap karakteristik sosial dari masyarakat lokal merupakan persyaratan utama dalam penempatan transmigran. Langkah-langkah yang bersifat persuasif dengan dukungan studi kelayakan yang memadai dapat menghindarkan terjadinya konflik horizontal antara masyarakat asli dan para transmigran.

D. Gerakan Sosial Keagamaan

1. Muhammadiyah

Menurut Kasibi Surwiyadi menjelaskan bahwa Pemerintah Belanda mengirim Tengku Bujang Selamat ke Merauke dengan status sebagai Digulis pada tahun 1926. Di Merauke, Tengku Bujang melakukan dakwah dan tabligh yang membawa ajaran Muhammadiyah. Kegiatan dakwah yang dilakukan antara lain Tengku memelopori pelaksanaan Shalat Idul Fitri di lapangan terbuka, dan waktu pelaksanaannya berdasarkan hasil hisab saat itu, yang berbeda dengan tradisi yang berlaku. Namun, organisasi Muhammadiyah belum secara resmi didirikan di

Merauke. Selanjutnya, menurut berbagai sumber, bahwa kepanduan Hisbul Wathon telah terbentuk di daerah tersebut. Di tahun 1929 para pendukung Tengku Bujang Selamat mendirikan madrasah yang berlokasi di Jalan Willis (saat ini berada di ujung Bandar udara Mopah Lama) dan merupakan Madrasah Pertama di Merauke. Demikian pula, pendukung Tengku Selamat membangun Masjid Nurul Huda. Pada periode tahun 1933 hingga 1936 PP Muhammadiyah di Yogyakarta mengirim 3 (tiga) orang Uztads, yakni Uztads Jais bertugas dari tahun 1933 -1935, Ustads Asrar dari tahun 1935 – 1936, dan terakhir Uztads M. Chabib yang akhirnya menetap di Merauke. Perjuangan awal Muhammadiyah ini telah menghasilkan tokoh-tokoh Islam di kota Merauke antara lain Bapak Rejo, Bapak Rimbo Bujang dan Bapak Ponadi yang berperan serta aktif dalam kepengurusan Muhammadiyah³⁷.

Bersamaan dengan dibuangnya tokoh-tokoh Islam asal Indonesia ke Boven Digoel pada periode 1928 hingga 1942, antara lain yakni Bung Hatta, Sutan Syahrir, Muchtar Luthfi, Iljas Jakob, Muhammad Kasan, dan A.A. Rasyid, para pejuang ini melakukan interaksi dengan diantara penduduk Indonesia yang dibuang di Digoel, serta melakukan kegiatan-kegiatan dakwah. Selanjutnya, dalam perjuangan melawan pemerintah Belanda, sejumlah tokoh-tokoh Muslim seperti Alwi Rahman dan Raja Alam Ugar Sekar dari Kokas, berjuang bersama-sama dengan tokoh-tokoh non-Muslim seperti Silas Papare, Marthen Indey, Lukas Rumkorem. Pada tahun 1960 berdiri Gerakan Rakyat Irian Barat (GRIB) yang berlokasi di Fak-fak dipimpin oleh Garim Riasa, dan berdiri pula Kesatuan Islam New Guinea dipimpin oleh H. Ibrahim Bauw, seorang Raja Rumbati, yang juga tokoh Muhammadiyah Papua. Para periode tahun 1960-1964 migrasi muslim yang berlatarbelakang Muhammadiyah mulai masuk ke Jayapura, yakni setelah Papua secara resmi kembali ke Negara Kesatuan

³⁷ Kasibi Suwiryadi, *Sejarah Singkat Muhammadiyah di Papua*, hlm. 2.

Republik Indonesia. Mereka berprofesi sebagai pegawai pemerintah, petugas, pedagang, transmigran, atau pencari kerja.³⁸

Pada akhirnya, perjuangan yang dilakukan sejak akhir tahun 1920-an hingga tahun 1960-an guna meletakkan landasan bagi berdirinya Muhammadiyah telah mencapai klimaksnya ketika pada 1966, dimana organisasi Muhammadiyah resmi berdiri pada tahun 1966 di Abepura. Dengan status cabang, Muhammadiyah diketuai oleh H. Ismail Bauw (almarhum). Setelah itu perkembangan Muhammadiyah di daerah ini terus berlanjut, baik pengembangan horizontal maupun vertikal.³⁹

2. Nahdhatul Ulama

Seiring dengan arus migrasi penduduk dari luar Papua, hadirnya pula gerakan sosial keagamaan lainnya selain Muhammadiyah yakni Nahdhatul Ulama (NU). Di daerah Fak-Fak, NU berkembang pada tahun 1965-1967, dengan mengembangkan sayapnya melalui Gerakan pemuda Anshor yang masuk pertama-tama di Fakfak dengan ketua pertama Abdullah Killian dan Syarifuddin Rumoning sebagai sekretaris.⁴⁰ Demikian pula, masuknya kaum muslim dari Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, dengan membangun masjid Jami di kota Jayapura. Kawasan masjid Jami merupakan sentra dari pergerakan pemuda Anshor se-Papua. Pengurus daerah provinsi NU berpusat di kota Jayapura dan memiliki cabang-cabang di berbagai kota di provinsi Papua.

³⁸ Kasibi Suryadi, *Sejarah Singkat Muhammadiyah di Papua*, hlm. 3.

³⁹ Kasibi Suryadi, *Sejarah Singkat Muhammadiyah di Papua*, hlm. 4.

⁴⁰ Syarifudin Rumoning, Wawancara lisan, 14 Agustus 2002, dalam J.F. Onim, *Islam dan Kristen di Tanah Papua*,.....hlm. 110.

E. Lembaga-lembaga Pendidikan Islam.

1. Yayasan Pendidikan Islam

Yayasan Pendidikan Islam (Yapis) didirikan pada tanggal 15 Desember 1968 M, atau bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1388 H.⁴¹ Latar belakang didirikannya yayasan ini diantaranya adalah kesadaran dari tokoh-tokoh Islam setempat, bahwa keberadaan umat Islam yang sudah lama dianut selama ratusan tahun di Papua, ternyata tertinggal jauh dibelakang pendidikan Kristen. Jalan bagi berdirinya Yayasan Pendidikan Islam terbuka lebar setelah Bupati Merauke, Drs. Anwar Ilmar dipindahkan menjadi Bupati Jayapura. Anwar melanjutkan cita-citanya di Jayapura dengan dibantu oleh Salikin Soemowardaya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Oleh karena itu, sekolah-sekolah yang bernaung dibawah sekolah Muhammadiyah, Al-Ma'arif (NU) dan sekolah-sekolah Islam lainnya semua bernaung di bawah bendera YAPIS.

Sesuai dengan peraturan dasar dari YAPIS, diatur beberapa hal antara lain : Yayasan Pendidikan Islam ini berdasarkan UUD 1945 dan berazasakn Islam. Dalam melaksanakan kegiatannya Yayasan Pendidikan Islam ini berusaha mewujudkan kehidupan sosial di bidang pendidikan dengan dijiwai oleh isi dan jiwa UUD 1945, disamping menghayati dan mengamalkan semua ajaran agama Islam. Demikian pula, Yayasan ini bersifat sosial, non-politik. Sifat sosial adalah bersama-sama dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan pemerintah untuk melaksanakan usaha mencapai cit-cita dan aspirasi bangsa, secara gorong royong dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan, guna membina system pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan atau mampu menghasilkan tenaga kerja dan siap dipakai dan diperlukan pembangunan.

Sedangkan yang dimaksud dengan non politis ialah bebas dan aktif turut serta dalam pembangunan dan memanfaatkan semua unsure teknologi untuk keperluan

⁴¹ Drs. Soekino dkk, *Sejarah Pedidikan Islam Yapis Irian Jaya* (Jayapura: Yapis, 1999), hlm.

dibidang pendidikan dengan memperhatikan dan menuruti syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah guna kemashalatan bangsa dan Negara. Yang dimaksud dengan sifat tidak berafiliasi ialah selain dari pada ikut serta dalam pembangunan dan menyelenggarakan pendidikan baik formil maupun non formil. Yayasan ini tidak menganut suatu politik apapun.

Perkembangan Yapis hingga saat ini mempunyai mempunyai 19 cabang di seluruh kota dan kabupaten di Pulau Papua. Yapis mempunyai 179 unit sekolah dan 80 sekolah mitra Yapis di Tanah Papua yang dikelola mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai SLTA dan memiliki 4 Perguruan Tinggi. Pada tanggal 19 April 2008 Yapis juga membuka Program Pascasarjana (S-2) yang merupakan Program Pascasarjana Mandiri pertama untuk Wilayah Kopertis XII meliputi provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.

2. Yayasan Pondok Karya Pembangunan (YPKP) Bumi Cendrawasih

Yayasan Pondok Karya Pembangunan (YPKP) berdiri pada tanggal 20 Desember 1975, dimana dipelopori oleh Sudjadi Notomiseno, seorang petugas sukarelawan guru Trikora, yang datang di Papua pada tahun 1963. YPKP menitikberatkan pendidikan jalur sekolah dan kegiatan sosial yang menempati lahan seluas 2,5 Ha di Kelurahan Sentani Kota, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura.⁴² Pendirian ini dikuatkan dengan akte pendirian yang ditandatangani Thontje Meset pada tanggal 14 Januari 1976.

Keprihatinan terhadap keterbatasan sarana ibadah masjid dan kegiatan dakwah Islam di daerah Sentani, Jayapura telah mendorong Sudjadi Notomiseno untuk membangun masjid dan lembaga pendidikan Islam. Renungan ini mendapatkan dukungan dari Dokter Bachtiar Ismail, seorang Muslim Minang, dengan mendirikan Badan Musyawarah Umat Islam (BMUI) Sentani. Badan ini kemudian membentuk

⁴² Yayasan Pondok Karya Pembangunan, *25 Tahun Kiprah Yayasan Pondok Karya Pembangunan Bumi Cendrawasih Irian Jaya* (Jayapura: YPKP, 2000), hlm. 1-2.

Panitia Pembangunan Masjid Sentani, yang didukung oleh Letda Pol. A. Mansnembra. Selanjutnya, pada tanggal 20 Desember 1975 Rapat BMUI bersepakat untuk mendirikan Yayasan Pendidikan Islam yang disebut Yayasan Pondok Karya Pembangunan (YPKP). Pada tahun 1976 YPKP membuka Sekolah Dasar (SD) YPKP dan dibentuk pula Taman Pengajian, yang akhirnya berubah menjadi Lembaga Pondok Pesantren Modern YPKP.

Sesuai dengan Anggaran Dasar YPKP, sistem pertanggungjawaban bersifat terpusat dan masa waktu pengabdian pengurus yayasan selama 5 tahun. Pada tahun 1976 YPKP membangun Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YPKP. Sepuluh tahun kemudian, YPKP mengorganisasikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (STLP) YPKP. Di tahun 1999 dibangun lagi SD YPKP II dan dibangun pula SMU Al-Fatah pada tahun 1996. Hingga tahun 2000 guru yang mengabdikan diri di YPKP sebanyak 92 guru, dimana guru SD dan guru SMK yang terbanyak. Sedangkan jumlah murid pada tahun 2000 sebanyak 1.112 murid, dimana jumlah murid SMK dan SD adalah bagian terbesar dari murid di lingkungan YPKP.

3. Hidayatullah

Pesantren Hidayatullah hadir di Jayapura pada tahun 1990. Dalam 10 pertama, pesantren Hidayatullah menguatkan landasan organisasi dan membangun jaringan ke seluruh Papua. Saat itu, pendirian Hidayatullah dijayaki oleh oleh Ustadz H. Abdurrahman Muhammad (kini Pimpinan Umum Hidayatullah) dengan pendekatan ke semua tokoh masyarakat dan agama memperkenalkan Pesantren Hidayatullah. Setahun kemudian tongkat estafet dilanjutkan oleh Ust. H. Suwardani Sukarno (1991-1997) dan Ust. H. Abdurrahman Muhammad ditarik ke Balikpapan. Ust. Suwardani Sukarno yang ditemani Ust. Sudiono AR, Ust. Ali Imran, Ust. Jamaluddin Jafar dan beberapa santri dari gunung Tembak memulai usaha dakwahnya dengan mencari lokasi pembangunan kampus Pesantren. Dalam perkembangan awal berdiri sentra dakwah di beberapa tempat yakni di Desa Kertosari-Sentani (Kabupaten Jayapura), di

Kelurahan Kelapa Dua-Entrop Jayapura Selatan sekitar 500 m² (Kotamadya Jayapura), dan Desa Holtekamp Distrik Muaralami sekitar 2 Ha (Kotamadya Jayapura). Disinilah kemudian menarik nafas legah karena mendapat tanah hibah dari keluarga H. Muslimin seorang pengusaha Bugis. Di tempat (0,5 ha) inilah pembangunan sarana dimulai. Hingga tahun 2006 ini beberapa bangunan telah berdiri seperti masjid dua lantai, kantor, dan bangunan TK lantai dua.

Dalam perkembangannya, pada masa kepemimpinan Ust. Suwardani Sukarno, kampus Holtekamp di Kotamadya Jayapura dibangun secara bertahap. Pada masa kepemimpinan Ust. Hasan Suradji inilah Kampus Holtekamp dibenahi menjadi kampus impian dan idaman. Selanjutnya, luas kawasan ini berkembang dari 2 Ha menjadi 6 Ha atas hibah dari BDI Pertamina wilayah VIII Jayapura plus satu bangunan masjid permanen. Di atas tanah 6 ha ini dibangunlah beberapa gedung, al: 7 unit perumahan guru, satu unit asrama putri dan putra dan gedung pendidikan dan Guest House.

Tahun 1999 kepemimpinan Hidayatullah Wilayah Papua di pimpin oleh Ust. Sudirman Ambal. Pada masa ini pendidikan lanjutan pertama mulai dibuka dan hingga akhir tahun pelajaran 2005/2006 telah menamatkan empat kali, lulusannya disebar ke seluruh wilayah Papua, khusus putri dilanjutkan ke Madrasah Aliyah Putri di Sorong.

Di tahun 2008 ini, jaringan Hidayatullah telah menyebar ke seluruh Papua (provinsi Papua dan provinsi Papua Barat). Untuk wilayah Papua, dibentuk Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Papua, yang saat ini diketuai oleh Hiful Fadhel dan membawa pesantren Hidayatullah di Jayapura, Timika, Biak Numfor, Waropen, Nabire, Merauke, Keerom, Jayawijaya, Sentani, Merauke. Di pesantren di desa Holtekamp di Kotamadya Jayapura dibangun Madrasah Tsanawiyah (Mts), Madrasah Aliyah (MA), dan Taman Kanak-Kanak Integral. Di tempat lainnya, dibangun pula Sekolah Dasar Hidayatullah.

Jaringan Hidayatullah dibangun juga di provinsi Papua Barat dengan terbentuknya Dewan Pimpinan Wilayah Hidayatullah Papua Barat. Pada tahun 2008 ini, Ketua DPW Hidayatullah Provinsi Papua Barat adalah H. Affan Gaffar yang mengkoordinasikan pengembangan pesantren Hidayatullah di Manokwari, Sorong, Fakfak, Kaimana, dan Bintuni.

F. Perkembangan Islam di Wamena, Papua

Perkembangan dakwah di Papua juga tersebar di daerah Pegunungan Tengah Papua, terutama di daerah Jayawijaya. Mengingat selama ini umat Islam terkonsentrasi di daerah pesisir dan kepulauan di Sorong, Fak-Fak, maupun Kaimana, serta kota-kota di tepi pantai. Karena itu, seiring dengan perkembangan pembangunan dan pelayanan birokrasi di kampung-kampung, agama Islam mulai dikenal oleh orang-orang asli Papua di daerah Jayawijaya.

1. Merasugun Asso: Mu'allaf Wamena Pertama

Merasugun Asso, seorang pemuda Walesi, adalah orang Wamena pertama yang masuk Islam pada tanggal 2 Juni 1975 di kota Wamena, dimana diislamkan oleh H. Abu Yamin asal Madura, seorang anggota DPRD II Wamena. Asso hijrah ke Islam karena ia seringkali melihat H. Abu Yamin mengambil air wudhu dan melaksanakan shalat ketika akan menjual kayu bakar. Setelah masuk Islam, keislamannya diikuti oleh ketiga saudaranya Firdaus Asso, Ali Asso dan Arpemeke Yeleget.⁴³

Keislaman Merasugun Asso dan saudara-saudaranya memberikan dampak yang cukup signifikan di kampung Walesi, Jayawijaya. Salah satu Kepala Suku setempat Aipon Asso tertarik untuk mengikuti jejak Merasugun Asso. Menurutnya ia tertarik karena Islam itu baik, mereka suka menolong dan ramah-ramah. Belum lagi Aipon Asso menyatakan secara resmi keislamannya, nampaknya terdapat pihak-pihak

⁴³ Ali Athwa, *Islam atau Kristenkah Agama Orang Irian?* (Jakarta: Pustaka Dai, 2004), hlm. 125-127.

tertentu yang mengaitkannya dengan ke dalam lingkaran politik. Puncaknya adalah ketika terjadi pemberontakan OPM (organisasi Papua Merdeka) pada tahun 1977. Merebak isu bahwa pasukan OPM akan menghabisi penduduk desa Walesi yang akan masuk Islam. Di mata para pemberontak, kedatangan Islam akan hanya mendatangkan kerusakan. Walaupun Aipon Asso belum muslim, martabatnya sebagai kepala suku terbangkit untuk membela kehormatan sukunya yang berniat masuk Islam.

Aipon Asso dan pasukannya berinisiatif menyerbu kelompok OPM yang terletak di sekitar 20 km dari kampung Walesi. Setelah melalui pertempuran hebat selama beberapa minggu, Aipon dan seluruh pasukannya kembali ke kampung halamannya dengan kemenangan gemilang. Setelah memenangi peperangan, maka timbul kesadaran dari kepala suku dan panglima perang Aipon Asso dan wakilnya Taholuk Asso yang akhirnya memeluk Islam pada tanggal 26 Mei 1978. Kemudian warga desa Walesi sekitar 600 orang secara berbondong-bondong menyatakan syahadat mengikuti kepala sukunya. Juga diikuti oleh beberapa suku di desa lain, setelah mendengar penduduk Walesi berhasil memenangkan pertempuran.

2. Pendirian Islamic Center

Islamic Center berdiri di desa Walesi Wamena pada tahun 1980, para pendiri Islamic Center ketika itu ialah Drs. H. Sodik Ismail (Kadolog Irian Jaya, tahun 1979-1982), dr. H. Mulya Tarmidzi (dokter dinas Angkatan Laut) dan Drs. H. Syamilan (Asisten II Gubernur Prop. Irian Jaya). Berdirinya Islamic Center di Walesi ini, bekerjasama dengan lembaga antara lain: Rabityah 'Alam Islamiyah di Saudi Arabiyah, Dewan Dakwah Islam Indonesia di bawah pimpinan Mohammad Natsir, dan Yayasan Lamtora Agung di Jakarta. Dasar pemikiran berdirinya Islamic Center, karena kaum Muslimin di Papua terketuk untuk membantu antusiasme para Mu'allaf Wamena guna mempercepat adaptasi terhadap Islam, terutama masalah aqidah dan akhlak. Program yang dilakukan Islamic Center adalah pertama, Pengiriman da'i muda untuk membimbing para Mu'allaf; kedua, Memperlancar bantuan kepada para

Mu'allaf dan ketiga, Mengirim anak-anak Mu'allaf Walesi ke Jayapura untuk dijadikan anak asuh.⁴⁴

G. Hubungan Umat Islam dengan Agama-agama Lain

Interaksi antara pemeluk agama, khususnya antara Islam dan Kristen di Tanah Papua telah berlangsung sejak lama, khususnya di daerah-daerah pesisir, pantai, dan kepulauan. Pada sub bab ini diuraikan sejarah pertemuan gereja dan Islam di Kabupaten Fakfak, sebagaimana Fak-fak adalah konsentrasi umat Islam di Tanah Papua, khususnya mayoritas penduduk asli yang memeluk agama Islam.

Jika dibandingkan dengan agama Kristen yang dianut oleh sebagian besar penduduk Papua, maka Islam di Papua dianut oleh sebagian kecil penduduk pribumi. Penyebarannya hanya meliputi sebagian kecil penduduk pada (3) tiga kabupaten, yakni kabupaten Sorong, kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Fakfak, yang telah lama memiliki hubungan tradisional dengan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Pengaruh agama Islam ditiga buah kabupaten ini memang sudah lama ada dan melembaga dalam tata cara dan pola hidup masyarakat pribumi Papua. karena keadaannya berbeda dan tidak seperti daerah-daerah lain di Papua yang baru dimasuki agama Islam setelah kekuasaan Belanda.

Berikut ini peta penduduk antara Islam dan Kristen di daerah-daerah yang dilihat komposisinya berimbang, yakni:⁴⁵

Tabel 10. Distribusi Pemeluk Agama Menurut Kabupaten/Kota di Papua di era Orde Baru Tahun 1998

No.	Kabupaten/Kota	Kristen Protestan	Katholik	Islam
1.	Merauke	59.484	165.310	75.957
2.	Jayawijaya	348.745	111.366	5.574

⁴⁴ Wawancara dengan Drs. H. Soddik Ismail, Jakarta: 8 Desember 2008.

⁴⁵ Badan Pusat Statistik Propinsi Irian Jaya, *Irian Jaya Dalam Angka Tahun 1998* (Jayapura, BPS Propinsi Irian Jaya, 1998), hlm. 193.

3.	Jayapura	77.520	18.092	48.439
4.	Nabire	46.816	27.832	33.481
5.	Fak-Fak	22.435	11.230	27.931
6.	Mimika	13.766	26.930	14.615
7.	Sorong	131.053	20.497	104.059
8.	Manokwari	115.170	15.782	38.108
9.	Kotamadya Jayapura	83.268	28.596	85.869
10.	Yapen Waropen	65.179	905	6.522
12.	Puncak Jaya	54.174	9.055	658
13.	Biak Numfor	88.406	4.021	10.359
	Total	1.171.297	478.609	452.214

Sumber BPS Propinsi Irian Jaya, 1998

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari sisi komposisi pemeluk agama, terutama 3 agama besar di Papua, baik Protestan, Katholik, dan Islam, terdistribusi relatif seimbang di Merauke, Jayapura, Nabire, Mimika, Fak-Fak, Sorong, Manokwari, Kotamadya Jayapura, dan Biak Numfor. Dengan struktur penduduk seperti itu, interaksi sosial antara pemeluk agama merupakan faktor utama yang merekatkan hubungan sosial antar warga di kota-kota di Papua. Hal ini semakin penting mengingat bahwa orang-orang Muslim adalah mayoritas pendatang yang berasal dari luar Papua, baik dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, maupun Sulawesi. Namun diperkirakan pendatang dari Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara merupakan komponen terbesar dari masyarakat pendatang muslim.

Di Papua, Agama Islam merupakan agama tertua yang pertama masuk, terutama di daerah-daerah Kepala Burung pulau Papua, baik di Sorong, Fak-Fak, dan Kaimana. Hal Karena itu, tidaklah mengherankan jika kepala daerah dari Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Fak-Fak berasal dari penduduk asli Muslim Papua. Sedangkan wakilnya adalah masyarakat asli yang beragama Kristen. Telah menjadi kebiasaan atau hukum tidak tertulis di Kabupaten Fak-Fak misalnya, bahwa jabatan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah dibagi secara merata ke 3 agama, yakni

Islam, Protestan, dan Katholik. Jika Bupati beragama Islam, maka Wakilnya adalah Protestan, dan Sekretaris Daerahnya beragama Katholik.

Pendeta Onim yang meneliti Islam dan Kristen di Kabupaten Fak-Fak menguraikan bahwa sejarah pertemuan Islam dan Kristen di Papua memperlihatkan suatu model kehidupan keagamaan yang khusus dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia.⁴⁶ Kehidupan keagamaan berkembang dipengaruhi tatanan nilai budaya dan sosial keagamaan yang berporoskan relasi kekeluargaan secara humanistik melalui proses perkawinan yang spesifik. Onim menjelaskan bahwa jika seorang wanita yang beragama Islam jika menikah, dia akan menikah dengan saudara dari keluarga ibunya, maka ia akan dengan sendirinya masuk atau menganut agama suami, yakni agama ibunya. Jika ibu agama kristen dan kawin ke Islam, maka anaknya akan kembali kawin ke Kristen, dan sebaliknya juga dengan ibu yang beragama Islam. Jadi soal pindah agama saat itu bukan menjadi suatu permasalahan, karena telah diatur secara baik dalam hukum adat dan struktur sosial budaya dan merupakan nilai-nilai budaya positif yang telah melembaga bertahun-tahun lamanya.

Interaksi sosial yang baik tercermin ketika perayaan Hari Raya Idul Fitri maupun Hari Natal. Kunjung-mengunjungi menjadi tradisi yang berlaku bertahun-tahun hingga saat ini. Umat Islam mengunjungi mereka yang merayakan hari Natal, dan sebaliknya mereka yang beragama Kristen mengunjungi mereka yang merayakan Idul Fitri. Karena itu, merupakan pemandangan yang indah ketika silaturahmi seperti itu terpelihara sehingga hal tersebut menguatkan integrasi sosial ditengah-tengah masyarakat beragama.

Demikian pula, kehadiran Islam pada masa kekuasaan Belanda di Papua dapat diterima karena turut mengambil bagian dalam memperjuangkan hak-hak dasar orang Papua, terutama pada masa pedebatan status politik Irian Barat di era 1950-an dan

⁴⁶ J.F Onim, *Sejarah Pertemuan Gereja dan Islam di Kabupaten Fakfak Irian Jaya* (Jayapura, Fajar Timur, 1997).

awal tahun 1960-an. Bahkan Pemerintah Belanda mendirikan Partai Kristen Islam Raja Ampat yang dikomandani oleh tokoh setempat, baik yang beragama Kristen dan Islam. Artinya, partai politik yang bersinggungan dengan basis Islam didorong oleh Belanda untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua terlepas dari Indonesia.

Namun, disisi lain, munculnya pula pejuang-pejuang Muslim Papua dari daerah Fak-Fak maupun Sorong yang menginginkan integrasi Irian Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misalnya Raja Rumbati, H. Ibrahim Bauw, yang bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Soekarno untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Dengan kondisi seperti itu, Fak-Fak menjadi basis perjuangan Indonesia pada awal tahun 1960-an, dimana dibuktikan dengan banyaknya pejuang-pejuang Indonesia yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di daerah Fakfak.

Dalam konteks pertemuan antara gereja dan Islam, dapat dikatakan bahwa hubungan antar kedua agama tersebut dipengaruhi oleh latar belakang sentimen historis, kepentingan politik, dan ekonomi. Jika timbul kesan-kesan/anggapan-anggapan yang demikian, maka akan timbul suatu konflik, maka kepentingan agama akan berbenturan dengan kepentingan politik sehingga hubungan tidak harmonis lagi.⁴⁷ Jika disimak dengan baik, maka hubungan Islam dan Kristen dapat digambarkan dalam dua tataran relasional. Yaitu tataran ketersinggungan dan tataran kebersamaan yang harmonis. Umat Islam dan Kristen di Tanah Papua sesungguhnya telah lama hidup dalam suatu hubungan toleransi beragama yang sangat harmonis. Kehidupan keagamaan telah menyatu akrab dengan semua sendi-sendi kehidupan masyarakat dan turut pula membentuk nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat, sehingga mempersatukan mereka dalam kehidupan dan aktifitas bersama.

⁴⁷ Kamaruddin Hidayat, *Perjumpaan Gereja dengan IPTEK dan SOSPOL*”, dalam *Perjumpaan Gereja di Indonesia dengan Dunianya yang sedang Berubah*, 1995, hlm. 90.

BAB VI

PERKEMBANGAN UMAT ISLAM DI DI TANAH PAPUA PASCA SOEHARTO, 1998 - 2007

Kejatuhan presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 membawa dinamika baru dalam konstelasi sosial politik di Tanah Air, tak terkecuali di pulau Papua. Pertanyaannya adalah bagaimana dampaknya bagi umat Islam di Papua? Bagaimana respon dan peran serta umat Islam di era otonomi daerah, khusus di era otonomi khusus? Adakah era keterbukaan politik nasional dan kebijakan otonomi khusus Papua membawa implikasi positif bagi perkembangan umat Islam di Papua? Ataukah sebaliknya, kondisi yang kurang kondusif bagi umat Islam di Papua. Untuk itu, bab ini akan membedah kondisi sosial politik di Papua di era transisi, terutama pada tahun 1998 hingga 2001, dan perkembangan Papua pasca penetapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua. Selanjutnya, bab ini akan membahas respon Pemerintah terhadap gejolak politik yang berkembang di Papua. Dalam konteks otonomi khusus, bab ini juga akan memetakan struktur demografis penduduk di Papua dan bentuk-bentuk partisipasi umat Islam dalam pembangunan Papua, baik dalam konteks politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

A. Posisi Umat Islam Dalam Gejolak Sosial Politik di Papua, 1998 – 2001

Gejolak sosial politik yang terjadi di Jakarta dan kota-kota lainnya pada pertengahan tahun 1998 memiliki implikasi, baik langsung dan tidak langsung bagi kondisi kepolitikan di berbagai pelosok di pulau Papua. Berbagai tuntutan mahasiswa yang terjadi pada bulan Mei 1998, dan diikuti oleh kerusuhan sosial pada tanggal 12 – 15 Mei 1999 telah berkontribusi pada kejatuhan Soeharto. Hal ini diperparah lagi oleh mundurnya 14 menteri dari Kabinet Pembangunan VI, serta ketidaksetujuan tokoh-tokoh Islam dalam membentuk suatu komite transisi,

sebagaimana solusi politik yang ditawarkan oleh presiden Soeharto. Tidak ada pilihan lain kecuali Soeharto mundur dari kekuasaan. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto membacakan pengunduran dirinya dan menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden Prof. Dr. B.J Habibie untuk melanjutkan kepemimpinan nasional.

Dalam konteks politik di Papua, mahasiswa memiliki peran yang signifikan dalam menuntut perubahan politik di Papua dengan mendesak berbagai agenda perubahan. Pada tanggal 3 Juli 1998, ribuan mahasiswa Universitas Cendrawasih menuntut Jakarta untuk merubah kebijakan nasional bagi Papua. Isu yang diangkat adalah demiliterisasi Papua Barat, referendum baru, dan peninjauan ulang Perjanjian New York.¹ Namun demonstrasi mahasiswa tersebut berakhir rusuh dengan jatuhnya 1 korban jiwa di pihak mahasiswa. Selain isu-isu yang diangkat diatas, terdapat isu-isu lainnya yang diangkat mahasiswa antara lain penuntutan kasus-kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia, penghentian operasional militer, penghentian kerusakan lingkungan hidup, perubahan kontrak karya antara Pemerintah dan PT. Freeport Indonesia, maupun tuntutan perimbangan keuangan yang lebih adil bagi daerah. Termasuk beberapa isu yang sebenarnya terkait dengan posisi dan kepentingan umat Islam, yakni : (1) kebijakan transmigrasi yang dinilai telah merebut tanah-tanah adat dan kehadiran transmigran telah berkontribusi bagi perubahan komposisi penduduk, antara pribumi dan pendatang yang umumnya beragama Islam; (2) pembatasan masuknya migrasi spontan yang datang di berbagai pelabuhan di Papua. Arus migrasi yang besarnya dikhawatirkan menyebabkan persoalan baru, seperti persaingan kerja dan ketimpangan sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat.

Demonstrasi mahasiswa pada tanggal 3 Juli 1998 dan jatuhnya korban jiwa memberikan pengaruh bagi munculnya gelombang demonstrasi yang lebih marak di kota-kota di pulau Papua, bahkan di pusat-pusat pergerakan mahasiswa Papua di kota Yogyakarta, Makassar, Manado, maupun Jakarta. Fenomena yang terlihat dari

¹ Willy Mandowen, *Papua Barat dan Hak Menentukan Nasib Sendiri: Sebuah Tantangan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia*, dalam Theodor Rathgeber (edt), *Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Buaya di Papua Barat, Studi Realitas Sosial dalam Perspektif Politis* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006).

sejumlah aksi tersebut adalah pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai simbol kedaulatan dari pergerakan Papua Merdeka.

Merespon berbagai aksi, baik yang bersifat damai maupun aksi yang berakhir dengan kekerasan, maka Presiden B.J Habibie berupaya menempuh jalan persuasif dan dialog. Pada tanggal 22 Juli 1998 Presiden Habibie mengumumkan pembentukan Tim Pencari Fakta Nasional yang diketuai oleh Abdul Gafur, yang juga sedang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Walaupun Abdul Gafur bukan berasal dari pihak eksekutif, namun Habibie tetap menetapkan Gafur sebagai ketua Tim. Diperkirakan terdapat 2 (dua) alasan pokok, yakni, *pertama*, Abdul Gafur dipandang sebagai tokoh asal Maluku Utara yang memiliki hubungan historis antara kesultanan Tidore dan kesultanan Ternate dengan masyarakat Irian atau Papua. *Kedua*, Abdul Gafur adalah tokoh dari partai Golongan Karya (Golkar) yang menguasai peta politik Papua pada Pemilihan Umum Tahun 1997². Setelah melakukan investigasi dan dialog terbatas dengan tokoh-tokoh Papua selama 1 (satu) bulan, Tim ini berkesimpulan bahwa tuntutan kemerdekaan yang disuarakan oleh rakyat Papua disebabkan oleh berbagai hal, antara lain adanya pelanggaran hak asasi, perusakan lingkungan hidup, maupun ketidakadilan dalam pembagian sumberdaya alam. Selain itu, Tim ini mengusulkan Pemerintah di Jakarta untuk memekarkan provinsi Papua menjadi beberapa provinsi.

Pemerintahan Habibie secara intens menjalin hubungan formal dan informal dengan komunitas-komunitas Papua dan berinisiatif untuk menyelenggarakan dialog nasional tentang masa depan Papua. Pada tanggal 24 Juli 1998 bertempat di kota Jayapura, sejumlah komunitas aktivis Papua dari berbagai kelompok dan tokoh-tokoh agama membentuk Forum Rekonsiliasi Masyarakat Irian Jaya atau disebut Forery. Sejalan dengan berbagai tuntutan sebagian masyarakat Papua yang menuntut merdeka, Forery mengambil sikap yang sama. Forery menegaskan bahwa tuntutan

² Lihat Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Irian Jaya, *Irian Jaya Dalam Angka Tahun 1998*, Jayapura, 1998; Yorrys TH Raweyai, *Mengapa Papua Ingin Merdeka* (Jakarta: Desanti Grafika, 2002), hlm. 69

bagi sebuah pemerintahan sendiri ini harus dipelajari dengan seksama dan dibahas dalam dialog terbuka, bukan sekedar memberi tawaran otonomi luas³

Sebuah dialog nasional untuk Papua yang digagas oleh Presiden Habibie akhirnya dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 1999. Dialog ini dilaksanakan bertempat di Istana Merdeka, Jakarta dan dihadiri oleh 100 tokoh masyarakat dan lintas agama dari Papua. Karena itu, tim ini dijuluki sebagai 'Tim 100'. Salah satu aktivis Muslim yang hadir adalah Muhammad Said Sabuku. Seorang pegiat lembaga swadaya masyarakat yang berasal dari kabupaten Fak-fak. Selain itu, terdapat tokoh muda muslim Papua, Thaha Al-Hamid, yang menjadi tokoh muslim di dalam tubuh Presidium Dewan Papua (PDP). Namun, Thaha tidak tergabung dalam 'Tim 100'. Dalam hal ini, nilai-nilai dasar perjuangan PDP adalah menegakkan hak-hak dasar rakyat Papua yang selama ini termarginal dan pilihan merdeka dipandang sebagai solusi politik bagi masa depan Papua. Thaha Al-Hamid dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal PDP yang berperan penting dalam mengorganisasi pergerakan PDP. Peran Thaha Al-Hamid mengundang kontroversi. Namun, sebagian aktivis muslim memandang bahwa Thaha Al-Hamid telah berhasil memainkan peran 'penyeimbang' antara muslim dan kristen dalam pergerakan politik Papua pasca kejatuhan Soeharto. Thaha tampil di tengah-tengah aktivis Papua merdeka yang didominasi oleh aktivis Kristen dan berupaya menetralsir isu-isu negatif yang menimpa posisi dan kepentingan umat Islam di tanah Papua.

Dalam dialog yang dilaksanakan pada 26 February 1999, nampaknya skenario yang telah dibangun oleh pihak Sekretariat Negara dan pihak Forery mengalami perubahan. Dialog berubah menjadi tuntutan agar Jakarta mengakui kemerdekaan Papua yang telah dideklarasikan pada tahun 1961. Penegasan kemerdekaan tersebut disampaikan oleh Thom Beanal, tokoh adat asal kabupaten Mimika, yang bersuku Amungme. Pernyataan ini menghentak Presiden Habibie dan 14 menteri yang hadir dalam dialog tersebut. Tanpa dialog yang berkepanjangan, Yorris Raweyai

³ Yorris TH Raweyai, *Mengapa Papua Ingin Merdeka*, (Jakarta: Desanti Grafika, 2002), hlm. 69. – 71.

menulis bahwa Habibie membatalkan pidatonya dan menyampaikan pesan secara langsung, sebagaimana berikut :

” Sebelumnya saya telah dinasehati agar tidak bertemu dengan tim ini, tapi saya menolak karena saya menganggap ini adalah bagian dari tugas saya. Saya mengakui kebenaran yang disampaikan pembicara-pembicara sebelumnya dan menggambarkan hal itu sebagai refleksi jujur atas pengalaman menyakitkan yang mereka terima. Saya juga menghargai cara tim yang menyampaikan hal itu dengan 'penuh harga diri'. Aspirasi yang anda sampaikan ini sangat penting, tapi membentuk sebuah negara bukanlah tugas yang mudah, marilah kita mempertimbangkan aspirasi itu kembali. Sekarang pulanglah, dan sampaikan salam saya kepada warga Papua”.⁴

Dalam suasana demikian, tampil 2 (dua) tokoh muda muslim Papua, yakni Ali Mochtar Ngabalin dan Andi Hakim, dan 1 (satu) tokoh pejuang Indonesia asal Papua, yakni Jacobus Dimara. Mereka tidak tergabung dalam 'Tim 100', namun diundang secara khusus oleh pihak Sekretaris Negara. Ali Mochtar Ngabalin adalah putra asal Kabupaten Fak-fak di Provinsi Papua Barat. Ngabalin menimba kuliah bidang keagamaan di Mesir dan pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pelajar Indonesia Mesir, Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam (GPI), dan aktif secara intens dalam pergerakan organisasi-organisasi Islam di Jakarta. Sejak tahun 2006 Ali Mochtar Ngabalin terpilih secara mayoritas sebagai Ketua Umum DPP Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masjid se-Indonesia (BKPRMI). Di aras partai politik, Ngabalin sebagai salah satu ketua Partai Bulan Bintang (PBB) dan saat ini sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia periode 2004 – 2009. Ngabalin ditugaskan oleh PBB di Komisi I bidang hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, dan komunikasi. Ngabalin dikenal sebagai salah satu vokalis di DPR dan tampil dengan gaya yang unik dengan sorban berwarna putih.

⁴ Yorries Raweyai, *Mengapa Papua Ingin Merdeka*, (Jakarta: Desanti Grafika, 2002), hlm. 76 – 77.

Selain merespon kondisi sosial politik di Papua, sejak Februari hingga September 1999 Presiden B.J Habibie berupaya menjawab tuntutan sebagian rakyat Papua, khususnya 'Tim 100', dengan mengeluarkan konsep kebijakan pemekaran provinsi Papua. Pada pertengahan September 1999 Presiden dan DPR menetapkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, dan Provinsi Irian Jaya Timur. Namun, kebijakan pemekaran ini mendapat perlawanan yang keras dari sebagian publik Papua, terutama dari kalangan mahasiswa. Pada tanggal 16 – 17 Oktober 1999 ribuan mahasiswa menduduki Kantor Gubernur Provinsi Papua. Dengan naiknya Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada akhir Oktober 1999, akhirnya Gus Dur menunda pelaksanaan UU No. 45/1999 tersebut.

Presiden Abdurrahman Wahid mensikapi persoalan Papua dengan pendekatan yang berbeda dengan gaya politik mantan Presiden B.J Habibie. Gus Dur berupaya menampilkan pendekatan yang lebih humanis, akomodatif, dan kultural. Gus Dur menjalin hubungan yang baik dengan tokoh-tokoh progresif Papua, khususnya dari pihak Presidium Dewan Papua (PDP) pimpinan Theys Elluay dan Thaha Al-Hamid. Gus Dur membuat kejutan politik nasional dengan mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora, mengusulkan perubahan nama Irian menjadi Papua, maupun memberikan bantuan dana sebesar Rp. 1 Miliar kepada PDP guna menyelenggarakan Kongres Rakyat Papua (KRP) II, pada tanggal 31 Mei – 6 Juni 2000 bertempat di kota Jayapura.

Dengan pola komunikasi yang lebih terbuka dengan tokoh-tokoh Papua, Gus Dur seringkali dijuluki sebagai 'Bapaknya Orang Papua', sebagaimana julukan yang diberikan kepada Soekarno di era perjuangan integrasi Irian Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika tokoh-tokoh PDP seperti Theys Elluay dan Thaha Al-Hamid dipenjara di kota Jayapura, tampil H. Sofyan Wanggai yang memimpin Komunitas Muslim Asal Papua bertemu dengan Presiden Gus Dur pada tanggal 21 Desember 2000 yang bertempat di Istana Merdeka. H. Sofyan Wanggai mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia bahwa penanganan penyelesaian

persoalan Irian Jaya diarahkan pada 2 (dua) pemdekatan, yakni penyelesaian mendasar (substansif) yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Irian Jaya. Selanjutnya diikuti oleh pemecahan yang bersifat simbolistik yang dapat membangkitkan kebanggaan dan identitas masyarakat Irian Jaya⁵.

Namun masa kekuasaan Gus Dur tidak berjalan normal hingga tahun 2001. Mengingat pada pertengahan Juli 2001 Gus Dur dilengserkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan posisinya digantikan oleh Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Sebagai representasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati menampilkan gaya politik yang relatif tertutup dan konservatif. Di masa kepemimpinannya, Presiden Megawati melanjutkan upaya Gus Dur untuk merumuskan dan membahas undang-undang otonomi khusus bagi Papua. Tetapi, kebijakan Presiden Megawati melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Percepatan Pelaksanaan UU No. 45/1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Irian Jaya Tengah, dan Irian Jaya Timur menimbulkan kontroversial dalam politik lokal di Papua. Melalui kebijakan Inpres No. 1/2003 ini, akhirnya tokoh-tokoh asal Irian Barat berhasil mendeklarasikan pendirian provinsi Irian Jaya Barat pada awal February 2003 yang beribukota di Manokwari. Sebaliknya deklarasi pendirian provinsi Irian Jaya Tengah yang bertempat di kota Timika pada Agustus 2003 berakhir dengan konflik berdarah dan menimbulkan korban jiwa. Provinsi Irian Jaya Tengah akhirnya batal dideklarasikan.

Selain kebijakan Inpres No. 1/2003, Presiden Megawati juga menerapkan strategi pemekaran kabupaten-kabupaten dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan 14 Kabupaten Baru di Provinsi Papua, yang meliputi kabupaten Keerom, Sarmi, Tolikara, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Asmat, Mappi, Sorong Selatan, Kota Sorong, Teluk Wondama, Raja Ampat, Kaimana, dan Teluk Bintuni. Kebijakan pemekaran kabupaten dan kota di

⁵ Press Release, Komunitas Muslim Asal Irian Jaya, *Pokok-Pokok Pemikiran Alternatif dalam Penyelesaian Permasalahan di Daerah Irian Jaya*, Istana Negara, Jakarta, 20 Desember 2000. Press release ini secara lengkap dimuat pada harian Cendrawasih Pos, 22 Desember 2000.

pulau Papua ini membawa implikasi bagi posisi dan kepentingan umat Islam dalam konteks pemerintahan dan politik lokal. Hal ini akan dibahas pada bagian lain dalam Bab VI ini menyangkut bentuk-bentuk peran serta umat Islam dalam pembangunan Papua.

B. Otonomi Khusus: Jalan Tengah Bagi Papua

Pada sub-bab diatas telah dijelaskan *setting* politik yang terjadi pada tahun 1998 hingga 2003 dimana menggambarkan dinamika hubungan antara negara dan masyarakat Papua, kebijakan pemerintah terhadap penyelesaian masalah Papua, maupun posisi umat Islam ditengah-tengah gejolak sosial politik Papua di era transisi tersebut. Sedangkan dalam sub-bab berikut ini akan dibahas kebijakan otonomi khusus yang dipandang sebagai jalan tengah bagi penyelesaian masalah Papua. Dalam kesempatan ini akan digambarkan proses singkat penyusunan undang-undang otonomi khusus, kerangka substansi dari otonomi khusus dan sejauhmana pengaruh bagi posisi dan kepentingan umat Islam di Papua.

Berawal dari Sidang Umum MPR RI Oktober 1999, seluruh anak bangsa anggota MPR menetapkan Ketetapan MPR tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang salah satu poin penting dalam bab pembangunan daerah adalah pemberlakuan daerah otonomi khusus kepada provinsi Daerah Istimewa Aceh dan provinsi Irian Jaya yang diatur dalam undang-undang. Namun dalam kondisi sosial politik yang resisten terhadap gagasan otonomi pada periode 1998 – 2000, amanat untuk menyusun draft undang-undang otonomi khusus Papua mengalami kemacetan. Sebaliknya gagasan merdeka telah menjadimainstream dalam demonstrasi dan aksi-aksi protest di berbagai kota di pulau Papua. Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat (Foker LSM) memecahkan kebekuan politik tersebut. Foker LSM adalah lembaga pertama di tingkat masyarakat sipil di Papua yang melakukan inisiasi dalam penyusunan draft awal undang-undang otonomi khusus. Foker LSM menamakannya sebagai draft undang-undang tentang Otoritas Khusus bagi Tanah Papua. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Papua yang dipimpin oleh Gubernur Jaap Sollosa dan Wakil

Gubernur Karma meminta Universitas Cendrawasih (UNCEN) untuk menyusun draft awal undang-undang tersebut.⁶ Dengan beranggotakan intelektual-intelektual Papua dari UNCEN di Jayapura, termasuk Fakultas Pertanian UNCEN di Manokwari, tim UNCEN menggabungkan berbagai pokok-pokok pikiran otonomi khusus dari berbagai pihak ke dalam suatu draft undang-undang yang disertai oleh kajian akademik. Dalam periode Januari hingga April 2001, tim UNCEN berhasil menyusun sebuah draft undang-undang yang dinamai "Undang-Undang tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Yang Berpemerintahan Sendiri". Dalam proses tersebut, terdapat 2 (dua) intelektual muslim yang terlibat secara intens dalam proses penyusunan draft, yakni Muhammad Musa'ad dari Fakultas Sosial dan Politik, dan Bambang Sugiono dari Fakultas Hukum. Peran dari kedua intelektual muslim ini akan dibahas dalam sub-bab selanjutnya. Di tingkat nasional, pembahasan draft undang-undang otonomi khusus berlangsung sejak akhir Juli hingga 22 Oktober 2001. Draft ini kemudian menjadi hak inisiatif DPR. Draft yang berasal dari Papua menjadi pedoman utama bagi draft inisiatif DPR. Untuk membahas draft tersebut, DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang diketuai oleh Sabam Sirait (F-PDIP) dan salah satu wakilnya adalah Ferry Mursyidan Baldan (F-Partai Golkar). Ferry Baldan adalah seorang tokoh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan memiliki pengalaman sebagai Ketua Pansus Penyusunan RUU Otonomi Khusus bagi Nanggroe Aceh Darussalam, atau yang dikenal sebagai UU No. 18 Tahun 2001. Setelah dibahas selama 4 (empat) bulan, akhirnya DPR dan Pemerintah dibawah kepemimpinan Megawati-Hamzah Haz menetapkan RUU tersebut pada tanggal 22 Oktober 2001 menjadi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Melalui UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, akan ada pemberian kewenangan yang lebih luas bagi provinsi Papua dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan

⁶ Proses penyusunan draft undang-undang tentang otonomi khusus bagi Papua dapat dilihat secara detail pada, Agus Sumule (edt), *Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003).

Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di provinsi Papua. Terdapat 4 (empat) hal mendasar yang menjadi isi Undang-Undang ini adalah: *Pertama*, pengaturan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan; *Kedua*, pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar; *Ketiga*, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berciri partisipasi, transparan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung ke masyarakat; *Keempat*, pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu”⁷.

Penerbitan UU No. 21 Tahun 2001 telah menciptakan iklim sosial politik yang mengedepankan peran orang-orang asli Papua dalam berbagai tingkatan dan bidang, baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan, maupun politik. Hal ini juga memberikan pengaruh, baik secara langsung dan tidak langsung kepada posisi dan kepentingan umat Islam di tanah Papua. *Term-term* sosial yang senantiasa diucapkan oleh publik Papua adalah 'Papuanisasi' di segala bidang. Dalam konteks pengisian jabatan-jabatan di struktur pemerintahan, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, isu Papuanisasi menjadi faktor pendorong dalam penempatan jabatan. Akibatnya, dalam beberapa kasus nampaknya bahwa masa kerja dan jenjang kepangkatan *di pass* oleh faktor 'Papuanisasi'. Dalam konteks seperti itu, pegawai-pegawai negeri yang berasal dari suku-suku non-Papua, terutama dari Jawa seringkali tersingkir.

⁷ Lihat bagian Penjelasan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Tabel 11. Kerangka Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Bab I	Ketentuan Umum
Bab II	Lambang-Lambang
Bab III	Pembagian Daerah
Bab IV	Kewenangan Daerah
Bab V	Bentuk dan Susunan Pemerintahan
Bab VI	Perangkat dan Kepegawaian
Bab VII	Partai Politik
Bab VIII	Peraturan Daerah Khusus, Peraturan Daerah Provinsi, dan Keputusan Gubernur
Bab IX	Keuangan
Bab X	Perekonomian
Bab XI	Perlindungan dan Hak-hak Masyarakat Adat
Bab XII	Hak Asasi Manusia
Bab XIII	Kepolisian Daerah Provinsi Papua
Bab XIV	Kekuasaan Peradilan
Bab XV	Keagamaan
Bab XVI	Pendidikan dan kebudayaan
Bab XVII	Kesehatan
Bab XVIII	Kependudukan dan Ketenaga Kerjaan
Bab XIX	Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup
Bab XX	Sosial
Bab XXI	Pengawasan
Bab XXII	Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan
Bab XXIII	Ketentuan Peralihan
Bab XXIV	Ketentuan Penutup

Pertanyaan adalah bagaimana respon umat Islam terhadap kebijakan otonomi khusus ini? Dan sebaliknya, bagaimana implikasi atau pengaruh dari kebijakan otonomi khusus ini bagi posisi dan kepentingan umat Islam?

Dalam proses pembahasan RUU Otonomi Khusus, komunitas umat Islam telah menyampaikan beberapa poin penting, terutama menyangkut gagasan pemberlakuan ajaran Kristen (Injil) dalam UU Otonomi Khusus Papua. Dalam konteks munculnya gagasan ajaran Kristen atau Injili untuk diberlakukan dalam kerangka otonomi khusus Papua, H. Sofyan Wanggai, Koordinator Komunitas

Muslim Asal Irian Jaya menegaskan bahwa pemberlakuan syariat Kristen di Irian Jaya dinilai tak sesuai dengan masyarakat setempat yang multietnis. Oleh karena itu, gagasan tersebut perlu dipertimbangkan lagi dengan mengacu pada UUD 1945 dan Pancasila, sehingga lebih bisa mengakomodir kepentingan semua umat. Sofyan Wanggai menjelaskan bahwa "teman-teman yang menginginkan syariat Kristen perlu mempelajari kembali UUD 1945 dan Pancasila, sehingga kalau ada hal-hal yang belum terakomodir bisa dikembangkan untuk menambah kepentingan non-muslim⁸. Pandangan Sofyan Wanggai ini mencerminkan pentingnya prinsip-prinsip pluralisme menjadi landasan utama dalam membangun kehidupan sosial di Papua.

Pandangan senada juga disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wilayah Papua (saat itu Irian Jaya), Drs Zubair D Hussein menegaskan, bahwa umat Islam keberatan kalau Irian Jaya menerapkan ajaran Kristen ketika propinsi itu mendapat otonomi dari Pemerintah Pusat. Zubaer menegaskan bahwa umat Islam memiliki kekhawatiran jika Irian Jaya diberlakukan otonomi, maka ajaran Kristen akan diterapkan dalam berbagai kehidupan di Irian Jaya. Hal ini mengingatkan pemeluk beragama di Irian Jaya sangat beragam, sehingga memerlukan persetujuan dari berbagai kelompok agama, termasuk umat Islam. Padahal, kebebasan melaksanakan ajaran Islam bagi umatnya adalah bagian dari hak asasi yang harus mendapat perlindungan. Lebih lanjut, Zubaer menegaskan bahwa populasi umat Islam di Irian Jaya makin meningkat dari waktu ke waktu, dan demikian pula, agama Islam telah hadir Irian lebih dulu sebelum agama Kristen. Sehingga, umat Islam sebenarnya adalah tuan rumah; yang mempunyai hak dalam menentukan masa depan Irian Jaya. Umat Islam di Irian Jaya relatif rukun dengan siapa saja, terlebih di daerah kantong-kantong muslim seperti Fakfak, Kaimana, Manokwari Selatan dan Raja Empat.

⁸ Lihat InfoPapua.Com, 20 Desember 2000.

Karena itu, menurut Ketua MUI Irian Jaya itu, pemerintah harus memperhatikan aspirasi umat Islam, karena umat Islam di Irian Jaya selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Umat Islam Irian Jaya tidak pernah mendapat posisi yang baik dalam pemerintahan. Sebab itulah, umat Islam di Irian Jaya menyesalkan sikap pemerintah yang tidak jelas dalam soal Papua⁹.

Namun, dalam perkembangannya, gagasan ajaran Injil tidak diakomodasi dalam RUU Otonomi Khusus bagi Papua, dan hanya memasukan gagasan hak-hak asasi manusia yang bersifat universal.

Untuk itu, pada sub-bab selanjutnya akan membahas hal-hal yang terkait dengan posisi dan kepentingan umat Islam dalam kerangka otonomi khusus. Namun sebelumnya, diperlukan pemetaan demografis umat Islam di dalam konteks kependudukan pulau Papua, baik di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat.

C. Peta Umat Islam Dalam Konteks Demografis Papua, 1990 - 2007

Pada sub-bab ini akan digambarkan perkembangan penduduk di pulau Papua dalam 20 (duapuluh) tahun terakhir, dan digambarkan pula struktur demografis, antara umat Islam dan pemeluk-pemeluk agama lainnya. Mengingat pada tahun 2008 ini terdapat 2 (dua) provinsi, yakni provinsi Papua dan provinsi Papua Barat, maka sub-bab ini akan menggambarkan struktur demografis di kedua provinsi tersebut secara terpisah.

(1) Peta Umat Islam di Provinsi Papua

Seiring dengan penambahan penduduk di pulau Papua dalam 20 (dua puluh tahun terakhir), jumlah umat Islam di pulau Papua mengalami peningkatan yang cukup berarti pula. Pada tahun 1990 pulau Papua hanya memiliki 1 (satu) provinsi, yakni provinsi Irian Jaya (provinsi Papua). Pada tahun itu, terdapat 9 kabupaten dan 1 kotamadya, yakni kabupaten Merauke, Jayawijaya, Jayapura, Paniai,

⁹ Lihat, <http://www.indonesia.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?start=0&t=5348>, 12 September 2006.

Fakfak, Sorong, Manokwari, Yapen Waropen, Biak Numfor, dan Kodya Jayapura. Pada tahun 1990 penduduk Papua berjumlah 1.648.708 jiwa, dengan konsentrasi penduduk di kabupaten Jayawijaya di wilayah pegunungan Tengah, dan diikuti oleh kabupaten Jayapura dan kabupaten Merauke. Sedangkan kabupaten yang paling sedikit jumlahnya adalah kabupaten Yapen Waropen yang berada di wilayah Teluk Cendrawasih, bagian utara dari pulau Papua.¹⁰ Di kabupaten Jayapura dan kabupaten Merauke berada di tepian pantai yang menyebabkan arus imigrasi penduduk dari luar pulau Papua berada di kedua kabupaten tersebut. Migrasi spontan dari Makasar, Buton, maupun Jawa terkonsentrasi di kedua kabupaten, termasuk di kabupaten Sorong. Demikian pula, dengan program transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah sejak akhir tahun 1960-an dan secara intensif digalakkan pada tahun 1980-an telah meningkatkan populasi masyarakat asal Jawa yang identik beragama Islam, dan menempati kota-kota di Jayapura, Merauke, Sorong, dan Manokwari.

Setahun setelah Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR RI, perkembangan populasi di Papua mengalami lonjakan dari 1.648.704 jiwa di tahun 1990 meningkat menjadi 2.288.410 jiwa pada tahun 2002.¹¹

Tabel 12. Penganut Agama di Provinsi Papua Tahun 2002

Kabupaten	Protestan	Katolik	Islam	Hindu	Buddha	Total
Merauke	74.552	161.988	88.810	1.469	350	327.169
Jayawijaya	289.995	128.719	5.119	108	80	424.021
Jayapura	93.456	21.430	59.318	742	400	175.346

¹⁰ Lihat Badan Pusat Statistik Provinsi Irian Jaya, *Irian Jaya Dalam Angka Tahun 1998*, (Jayapura: BPS Provinsi Irian Jaya, 1999).

¹¹ Lihat Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, *Papua Dalam Angka 2002*, Jayapura, 2003, sebagaimana dikutip oleh Siegfried Zollner, *Budaya Papua dalam Transisi : Ancaman Akibat Modernisasi – Jawanisasi dan Diskriminasi*, di dalam Dr. Theoder Rathgeber (edt), *Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Papua Barat*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006).

Paniai	26.521	21.501	360	13	10	48.405
Puncak Jaya	61.543	19.361	680	72	25	81.681
Nabire	75.736	29.450	25.371	486	233	131.276
Fakfak	18.315	16.689	47.332	167	65	82.568
Mimika	19.523	41.543	38.010	168	15	99.259
Sorong	34.205	20.884	39.940	585	405	95.719
Manokwari	147.158	16.248	37.723	1.037	472	202.638
Yapen Waropen	73.355	1.125	8.156	90	35	82.761
Biak Numfor	96.852	4.493	11.183	193	635	113.635
Kota Jayapura	89.241	30.165	83.916	1.878	1.018	206.218
Kota Sorong	135.218	29.434	52.411	241	680	217.984
Total	1.235.670	543.030	498.329	7.249	4.423	2.288.410

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Papua Dalam Angka 2002

Menyimak distribusi umat Islam di provinsi Papua, nampaknya prosentase umat Islam berjumlah 498.328 jiwa atau sekitar 25 persen dari total jumlah penduduk Papua pada tahun 2002. Jumlah umat Islam ini meningkat dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 1994 umat Islam berjumlah sekitar 393.155 jiwa, meningkat menjadi 405.725 jiwa pada tahun 1995, 414.550 jiwa pada tahun 1996, 428.771 jiwa pada tahun 1997 dan meningkat menjadi 452.214 jiwa di tahun 1998. Dari tabel diatas tercermin bahwa populasi umat Islam terkonsentrasi di kabupaten-kabupaten yang terletak di wilayah pesisir, baik di bagian barat, utara, dan selatan dari pulau Papua. Secara umum, populasi umat Islam menempati nomor 2 (dua) setelah Kristen Protestan. Terkecuali di kabupaten Fakfak, jumlah umat Islam terbanyak dibandingkan Protestan dan Katholik. Demikian pula, populasi umat Islam terbanyak kedua (2) setelah Katholik di kabupaten Merauke dan Mimika.

Perkembangan populasi umat Islam dalam beberapa tahun terakhir ini seringkali dikritisi oleh pengamat luar negeri. Hal ini diungkapkan oleh Siegfried Zollner¹², seorang pengamat sosial kebangsaan Jerman, bahwa persentase umat Islam pada tahun 2002 tersebut dipandang terlalu direndahkan. Zollner menilai 'terkadang jumlah pemeluk agama muslim yang diberitakan terlalu rendah, terutama di daerah-daerah dimana Islam merupakan agama yang minoritas'.¹³ Selanjutnya, Zollner juga menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, gelombang populasi yang masuk Papua dari daerah lain telah menunjukkan perbandingan yang dramatis. Perbandingan antara penduduk asli Papua dengan total populasi hingga saat ini diperkirakan mencapai 55 (limapuluh lima) persen. Pandangan seperti ini mencerminkan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan dari pengamat asing dalam melihat pergeseran dalam komposisi penganut agama di pulau Papua.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan provinsi Irian Jaya Barat, Irian Jaya Tengah, dan Irian Jaya Timur, maka Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2003 tentang percepatan pelaksanaan UU No. 45 Tahun 1999. Walaupun kebijakan pemekaran ini menimbulkan kontroversi di tengah-tengah publik Papua, namun provinsi Irian Jaya Barat (provinsi Papua Barat) tetap dideklarasikan pada awal February 2003. Dengan demikian, sejak tahun 2003, di pulau Papua terdapat 2 (dua) provinsi, yakni provinsi Papua dan provinsi Papua Barat. Namun di level

¹² Siegfried Zollner adalah pensiunan pendeta, dimana sampai dengan tahun 2004, Zollner adalah Koordinator jaringan West Papua Netzwerk di Jerman. Jaringan adalah forum yang terdiri dari gereja-gereja Jerman, LSM, kelompok-kelompok solidaritas dan lingkungan, termasuk individu-individu yang tertarik dengan Papua Barat. Jaringan ini dibentuk pada tahun 1996 setelah laporan-laporan atas pelanggaran HAM dan kerusuhan Abepura dan Timika. Sejak tahun 1960 – 1973, Zollner melayani sebagai utusan Injil (missionaries) di Yali, Papua.

¹³ Lihat Siegfried Zollner, *Budaya Papua dalam Transisi : Ancaman Akibat Modernisasi – Jawanisasi dan Diskriminasi*, di dalam Dr. Theoder Rathgeber (edt), *Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Papua Barat*, (Jakarta, Sinar Harapan, 2006), hlm. 135.

kabupaten, Presiden Megawati juga menetapkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang pembentukan 14 (empatbelas) kabupaten baru di provinsi Papua.¹⁴

Dengan dimekarkannya Provinsi Papua, maka peta komposisi penganut agama mengalami perubahan. Sebelum dimekarkan, populasi penduduk provinsi Papua berjumlah 2.288.410 jiwa di tahun 2002. Namun, pada tahun 2005 penduduk di provinsi Papua berjumlah 1.875.388 jiwa, dimana penganut agama Kristen Protestan sebanyak 1.154.420 jiwa, Kristen Katolik sebanyak 409.722 jiwa, Islam sebanyak 341.057 jiwa, Hindu 4.267 jiwa, dan Budha 1.625 jiwa. Hal ini berarti bahwa sekitar 61,56 persen penduduk Papua beragama Kristen Protestan, selanjutnya diikuti oleh Katolik sebanyak 21,85 persen dan umat Islam sebanyak 18,19 persen dari penduduk Papua.

Tabel 13. Banyaknya Pemeluk Agama Menurut Golongan Agama dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2005

No.	Kabupaten/kota	Protestan	Khatolik	Islam	Hindu	Buddha
1.	Merauke	39.907	28.414	98.554	837	165
2.	Jayawijaya	51.615	12.529	3.191	28	8
3.	Jayapura	192.371	10.321	33.822	80	32
4.	Paniai	112.616	38.346	339	13	-
5.	Puncak Jaya	109.689	13.454	7.387	-	-
6.	Nabire	78.356	22.726	35.000	290	-
7.	Mimika	31.497	60.403	39.241	476	98
8.	Yapen Waropen	64.471	1.012	4.834	15	-
9.	Biak Numfor	98.229	5.536	13.179	157	257
10.	Boven Digoel	10.892	28.354	1.542	-	-
11.	Mappi	11.779	59.357	1.557	-	-
12.	Asmat	16.558	51.905	1.015	-	-
13.	Yahukimo	77.273	476	-	-	-
14.	Peg. Bintang	27.577	25.579	-	-	-
15.	Tolikara	59.875	-	12	1	-
16.	Sarmi	35.918	1.478	3.736	2	5
17.	Keerom	10.996	18.139	12.994	488	-

¹⁴ Melalui UU No. 26 Tahun 2002 telah dibentuk 14 kabupaten baru di provinsi Papua, yakni Keerom, Sarmi, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Boven Digoel, Asmat, Mappi, Kaimana, Teluk Bintuni, Puncak Jaya, Teluk Wondama, Sorong Selatan, dan Raja Ampat

18.	Waropen	22.994	530	620	-	-
19.	Supiori	12.411	25	80	2	-
20	Kota Jayapura	89.326	31.138	83.934	1.878	1.060
Total		1.154.420	409.722	341.057	4.267	1.625

Sumber: BPS Provinsi Papua, Papua Dalam Angka Tahun 2006.

(2) Peta Umat Islam di Provinsi Papua Barat

Sementara itu, pada tahun 2006 penduduk di provinsi Papua Barat mencapai sekitar 702.202 jiwa. Jumlah ini meningkat dari 642.472 jiwa pada tahun 2004. Dari jumlah penduduk sebesar 702.202 jiwa di Papua Barat, total penduduk pemeluk agama adalah berturut-turut adalah Kristen Protestan sebesar 55,70 persen, Islam sebesar 41,27 persen dan Kristen Katolik sebesar 7,70 persen. Sedangkan jika dilihat pada tingkat kabupaten tercermin bahwa mayoritas umat Islam berada di kabupaten Fak-fak sebesar 61,63 persen, dan jumlah umat Islam yang terkecil di kabupaten Teluk Wondama sekitar 8,22 persen. Namun, dikota-kota lainnya, jumlah umat Islam relatif seimbang dengan pemeluk agama Kristen Protestan, yakni berkisar 36 persen hingga 52 persen. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 14. Persentase Pemeluk Agama Islam di Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2005 – 2006

Kabupaten/Kota	Prosentase Umat Islam (%)
Fak-fak	61,63
Kaimana	39,17
Teluk Wondama	8,22
Teluk Bintuni	44,19
Manokwari	36,08
Sorong Selatan	22,04
Sorong	52,11
Raja Ampat	34,84
Kota Sorong	44,90

Sumber : BPS Provinsi Papua Barat, Papua Barat Dalam Angka Tahun 2007

Dengan demikian, rata-rata prosentase jumlah pemeluk agama Islam di provinsi Papua Barat sebesar 41,27 persen. Angka-angka ini sebenarnya menjelaskan

adanya perbedaan tipologi umat Islam, antara di kawasan perkotaan dan perdesaan. Tipologi I tercermin di Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari. Di kota-kota tersebut karakteristik umat Islam umumnya berasal dari masyarakat pendatang, baik dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Jawa, maupun dari Maluku Utara. Sedangkan Tipologi II tercermin dari umat Islam yang menempati kabupaten Fakfak, Kaimana, Teluk Bintuni, Sorong Selatan, maupun Raja Ampat. Di ke-5 kabupaten tersebut, mayoritas umat Islam umumnya berasal dari penduduk pribumi Papua yang menempati wilayah perdesaan, pedalaman, kepulauan, maupun sebagian perkotaan.

D. Karakteristik dan Bentuk-bentuk Pergerakan Umat Islam di Tanah Papua

Pasca -Soeharto

Perubahan konstelasi sosial politik di Tanah Air telah berimplikasi pula bagi perubahan sosial politik di pulau Papua. Lahirnya kebijakan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada tahun 2001 telah membawa pengaruh bagi segala aspek kehidupan di provinsi Papua. Secara makro, terdapat 3 (tiga) fenomena yang muncul seiring dengan perubahan politik di Papua, yakni sebagai berikut:

Pertama, adanya ruang publik yang terbuka secara kuat yang memberikan hak-hak politik kepada rakyat Papua untuk menuntut perbaikan kehidupan, termasuk menuntut kemerdekaan Papua. Iklim keterbukaan telah mendorong aktivis-aktivis Papua untuk membentuk Dewan Adat Papua, Presidium Dewan Papua, maupun komunitas lainnya yang bersifat progresif dalam memperjuangkan hak-hak dasar rakyat Papua.

Kedua, seiring dengan era desentralisasi, otonomi daerah, dan otonomi khusus, terdapat implikasi yang bersifat politik etnis, dimana hadirnya semangat 'Papuanisasi' atau tuntutan yang lebih besar kepada penduduk asli Papua untuk mengambil peran di berbagai bidang dan tingkatan. Disatu sisi, Papuanisasi dapat merupakan kebijakan khusus yang berfungsi mendorong percepatan pembangunan sumber daya manusia Papua. Namun disisi lain, hal ini menyebabkan dampak negatif

bagi interaksi sosial antara etnik di Papua maupun antara suku-suku penduduk asli di Papua sendiri.

Ketiga, tuntutan liberalisasi politik yang terjadi pada tahun 1998 telah memberi ruang kepada peran partai politik yang lebih kuat maupun hadirnya pola pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Kondisi ini berimplikasi bagi semakin luasnya akses umat Islam dalam konstelasi sosial politik di pulau Papua.

Untuk itu, dalam sub-bab ini digambarkan karakteristik dari perkembangan umat Islam dan bentuk-bentuk peranserta dan kepentingan umat Islam dalam bidang sosial, budaya, dan politik di pulau Papua.

(1) Figur Thaha Al-Hamid dan Pergerakan Presidium Dewan Papua (PDP)

Dinamika sosial politik yang terjadi di pulau Papua sejak tahun 1998 tidak akan terlepas dari peran Thaha Al-Hamid. Thaha adalah putra keturunan Fak-fak-Arab, seorang aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Papua. Ia aktif dalam berbagai kegiatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang pemberdayaan masyarakat maupun advokasi hak-hak dasar rakyat Papua sebelum reformasi nasional terjadi di tahun 1998. Dengan demikian, Thaha memiliki pengalaman yang memadai dalam konsolidasi pergerakan di tingkat akar rumput, maupun jaringan dengan berbagai pihak, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Seiring dengan perubahan sosial politik yang drastis di tingkat nasional, kondisi sosial politik di tanah Papua juga mengalami perubahan yang mendasar. Artinya, terdapat ruang keterbukaan bagi sebagian besar rakyat Papua untuk mengkritik Pemerintah secara terbuka guna menegakkan hak-hak dasar rakyat Papua yang selama ini termarjinal. Dalam konteks perjuangan tersebut, Presidium Dewan Papua (PDP) dibentuk pada tanggal 12 Desember 1999.¹⁵ Salah satu tokoh muda dari umat Islam yang aktif di PDP adalah Thaha Al-Hamid. Ia berperan sebagai

¹⁵ Lihat Origenes Ijje, SE, *Kongres Rakyat Papua II*, (Jakarta: PT. Bumi Antama Sejahtera, 2003, hlm. 136.

Sekretaris Jenderal PDP. PDP bergerak di kota-kota dan desa-desa dengan mengkonsolidasi perwakilan PDP di masing-masing ibukota kabupaten se-pulau Papua. Pergerakan PDP mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 2000, dimana PDP menyelenggarakan Kongres Rakyat Papua (KRP) II, sejak tanggal 31 Mei hingga 4 Juni 2000 Kongrs ini diikuti oleh sekitar 25.000 orang masyarakat Papua dari seluruh daerah di Papua dan berlangsung di Gedung Olah Raga Cendrawasih, Jayapura. Selain itu, diundang pula peninjau dari luar negeri dan undangan lainnya. Turut diundang pula carateker Gubernur Papua Maarsekal Pertama Musiran Darmosuwito dan Pangdam XVII/Trikora Mayjen TNI Albert Inkiriwang, Kapolda Papua Brigjen (Pol) S.Y. Wenas, serta Rektor Universitas Cendrawasih Ir. Frans Wosprakrik.¹⁶

Kongres Rakyat Papua (KRP) II menghasilkan resolusi politik yang menegaskan pentingnya Pemerintah di Jakarta untuk mengakui kemerdekaan Papua yang telah dideklarasikan pada tahun 1961. Disamping itu, KRP II menegaskan pentingnya penegakkan hak-hak dasar rakyat Papua dan pelurusan sejarah Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Figur H. Sofyan Wanggai dan Komunitas Muslim Asal Irian Jaya

Dalam kegalauan sosial politik di Papua, antara pilihan otonomi, merdeka dan federasi, maupun ditangkapnya tokoh-tokoh Papua, seperti Theys Elluay, Thaha Al-Hamid, dan Mambor pada tahun 2000, muncul pula tokoh muslim asal Yapen Waropen, Papua, H. Sofyan Wanggai, yang mengkoordinir Komunitas Muslim Asal Irian Jaya. Komunitas ini merupakan wadah pergerakan bagi mualaf-mualaf asal Papua, terutama yang berasal dari wilayah Teluk Cendrawasih dan wilayah Pegunungan Tengah, Papua. Ditengah-tengah kebuntuan politik antara Jakarta dan Papua, Sofyan Wanggai menawarkan pemikiran dan pandangan alternatif bagi penyelesaian masalah Papua.

¹⁶ Frits Bernard Ramenday (edt.) Profil Otonomi Khusus Papua, (Jakarta, AJI-Papua, 2005), hlm. 179 – 180.

Pada tanggal 20 Desember 2000, H. Sofyan Wanggai bertemu dengan Presiden Abdurahman Wahid menyampaikan alasan-alasan mengapa isu ‘merdeka’ pada saat itu menjadi ‘kesadaran kolektif baru’ di perlbagai kalangan masyarakat Papua? Komunitas Muslim Asal Irian Jaya memandang bahwa kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat Irian Jaya sudah terakumulasi begitu lama, sehingga proses penyelesaian Irian Jaya, haruslah dilaksanakan hati-hati, bertahap, transparan, humanis, dan persuasif.¹⁷

Sofyan Wanggai mengusukan agar penanganan persoalan Irian Jaya harus menggunakan mekanisme dialogis yang sejati antara Pemerintah, TNI/Polri, MPR/DPR, dengan tokoh-tokoh PDP, maupun dengan semua komponen masyarakat Irian Jaya yang majemuk di Irian Jaya secara adil dan bermartabat. Juga, fenomena aspirasi merdeka ini saat ini janganlah hanya dilihat dari kaca mata pelanggaran hukum saja, namun perlu ditekankan penyelesaian politis melalui dialog sejati dengan semua komponen masyarakat, sehingga menghasilkan konsensus-konsensus sejati. Karena itu, penanganan penyelesaian persoalan Irian Jaya harus diarahkan terhadap penyelesaian mendasar (*substansif*) yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Irian Jaya. Selanjutnya diikuti oleh pemecahan yang bersifat simbolistik yang dapat membangkitkan kebanggaan dan identitas masyarakat Irian Jaya.¹⁸

Terkait dengan usulan yang bersifat mendasar (*substansif*), Komunitas Muslim Asal Irian Jaya mengusulkan agar Pemerintah merombak secara komprehensif atas pilihan pendekatan, strategi, dan kebijakan (*policy choice*) yang dilaksanakan di Papua. Mengingat selama ini, pembangunan di Papua sangat terkesan ego-sektoral dan sentralistis. Salah satu langkah yang diusulkan adalah melakukan re-negosiasi kontrak-kontrak karya, maupun kontrak-kontrak investor lainnya (pertambangan, kehutanan, perikanan, perkebunan) yang selama ini merugikan hak-

¹⁷ Lihat, Kompas, 21 Desember 2000; Suara Pembaruan, 21 Desember 2000. Pada saat audiensi dengan Presiden Abdurahman Wahid, H. Sofyan Wanggai didampingi oleh Muzakir Asso, Velix Wanggai, Said Asso, dan Tony Wanggai.

¹⁸ Press Release, Komunitas Muslim Asal Irian Jaya, *Pokok-Pokok Pemikiran Alternatif dalam Penyelesaian Permasalahan di Daerah Irian Jaya*, Istana Negara, Jakarta, 20 Desember 2000. Press release ini secara lengkap dimuat pada harian Cendrawasih Pos, 22 Desember 2000.

hak masyarakat adat di Papua.¹⁹ Komunitas Muslim Asal Irian Jaya juga memiliki pandang tersendiri dalam melihat gagasan otonomi dan desentralisasi yang mulai dirumuskan bagi kebijakan otonomi khusus. Dalam hal ini, Komunitas melihat bahwa terdapat 5 (lima) hakekat penting dalam konsep desentralisasi di Papua,²⁰ yakni *pertama*, pemberian ruang publik bagi semua masyarakat asli yang majemuk untuk mengelola rumah tangga daerah secara mandiri. *Kedua*, penghormatan bagi budaya lokal dan hak-hak masyarakat adat. *Ketiga*, menata dan membentuk sistem dan struktur politik lokal dengan semangat desentralistik. *Keempat*, pendistribusian keadilan dan kesejahteraan. *Kelima*, peningkatan semangat ke-Irian-an dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, sebagai jawaban dari persoalan 'cultural gap' yang terjadi selama ini.

Sementara itu menyangkut langkah-langkah Pemerintah yang bersifat simbolistik, Komunitas Muslim Asal Irian Jaya mengusulkan agar : Pertama, Pemerintah membebaskan tokoh-tokoh Presidium Dewan Papua (PDP) maupun elite-elite Papua lainnya; Kedua, Pemerintah perlu membentuk Dewan Penasehat Daerah (DPD), yang merupakan lembaga penasehat di daerah (seperti DPA), yang mengakomodasi tokoh-tokoh pejuang, tokoh adat, tokoh agama, dan komponen masyarakat Irian lainnya, DPD sebagai mitra dan partner Pemerintah Daerah dan DPRD, baik Provinsi maupun Kabupaten; Ketiga, Pemerintah perlu mencetak uang baru dengan simbol tokoh pejuang Irian, misalnya pahlawan Bapak Dimara; Keempat, Pemerintah perlu mengekspos kebudayaan dan mengangkat kebudayaan dan identitas manusia Papua dalam panggung kebudayaan nasional/keindonesiaan; dan Kelima, dalam panggung internasional, Pemerintah perlu menjajaki kemungkinan pembentukan Forum Kepulauan Pasifik, dimana Irian Jaya dijadikan pintu depan bagi kerjasama kebudayaan, sosial ekonomi, maupun pembangunan. Persamaan ras

¹⁹ Lihat Kompas, 21 Desember 2000; Cendrawasih Pos, 22 Desember 2000.

²⁰ Lihat Cendrawasih Pos, 22 Desember 2000.

maupun kecenderungan ekonomi ke cekungan Pasifik adalah alasan yang kuat untuk membentuk forum tersebut.²¹

Terkait dengan pembebasan tokoh-tokoh PDP, H. Sofyan Wanggai menjelaskan bahwa Presiden Abdurrahman Wahid mengemukakan dalam beberapa hari ini, Presiden akan mengkonsultasikan masalah Theys kepada pihak kejaksaan Kapolri, dan pihak lainnya. Pembebasan para tokoh ini merupakan pendekatan politis. Pendekatan politis, menurut H. Sofyan Wanggai, sangat tepat untuk dilakukan meskipun dari kacamata hukum tidak akan menyelesaikan masalah.²²

Dalam konteks munculnya gagasan ajaran Kristen atau Injili untuk diberlakukan dalam kerangka otonomi khusus Papua, H. Sofyan Wanggai menegaskan bahwa pemberlakuan syariat Kristen di Irian Jaya dinilai tak sesuai dengan masyarakat setempat yang multietnis. Oleh karena itu, gagasan tersebut perlu dipertimbangkan lagi dengan mengacu pada UUD 1945 dan Pancasila, sehingga lebih bisa mengakomodir kepentingan semua umat. Sofyan Wanggai menjelaskan bahwa "teman-teman yang menginginkan syariat Kristen perlu mempelajari kembali UUD 1945 dan Pancasila, sehingga kalau ada hal-hal yang belum terakomodir bisa dikembangkan untuk menambah kepentingan non-muslim".²³ Pandangan Sofyan Wanggai ini mencerminkan pentingnya prinsip-prinsip pluralisme menjadi landasan utama dalam membangun kehidupan sosial di Papua.

Gagasan pluralisme ini terus dikembangkan oleh Sofyan Wanggai. Untuk mempromosikan gagasan tersebut, maupun untuk pengembangan kualitas sumber daya masyarakat muslim Papua, Sofyan Wanggai mendirikan Yayasan Bilal (Bilal Foundation). Yayasan ini merupakan cerminan dari semangat sahabat Rasulullah, yang berasal dari Ethiopia, dan membawa semangat perubahan dan pembebasan dari kekafiran, keterbelakangan, kebodohan, maupun kemiskinan.

²¹ Lihat Cendrawasih Pos, 22 Desember 2000.

²² Lihat Suara Pembaruan, 21 Desember 2000; Detik.com, 20 Desember 2000.

²³ Lihat InfoPapua.Com, 20 Desember 2000.

(3) Figur Muhammad Musa'ad dan Formulasi Draft UU Otonomi Khusus

Peran dari tokoh muda muslim Papua juga tercermin dalam proses penyusunan draft undang-undang otonomi khusus bagi Papua. Muhammad Abud Musa'ad adalah tokoh muda umat Islam yang berkarier sebagai dosen politik di Fakultas Sosial dan Politik Universitas Cendrawasih (Uncen) di Jayapura. Musa'ad lahir di Fak-fak, pada tanggal 22 Juli 1965 dan menyelesaikan sarjana strata-1 dan strata-2 bidang pemerintahan di Universitas Hasanuddin. Musa'ad juga memelopori pendirian lembaga pengkajian di Uncen melalui pembentukan Democratic Centre Uncen, dimana Musa'ad sebagai Ketua dari lembaga tersebut. Ia kemudian mengungkapkan buah pikirannya melalui penerbitan 2 (dua) buku, yakni "Penguatan Otonomi Daerah di Balik Bayang-bayang Ancaman Disintegrasi" (Bandung, 2002) dan "Menguak Tabir Otonomi Khusus Papua" (Bandung, 2004).²⁴

Dalam konteks penyusunan draft awal Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua, Musa'ad adalah salah satu tokoh kunci dari Uncen yang terlibat secara penuh dan intens dalam tim kecil yang dibentuk oleh Gubernur Provinsi Irian Jaya, J.P Sollosa. Gubernur Sollosa meminta Rektor Uncen Frans Wosprakrik untuk membentuk Tim Pengkajian. Tim ini bertugas untuk mempersiapkan draft RUU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Musa'ad menyampaikan bahwa Tim ini mulai bertugas pada minggu I Januari 2001, dengan mengumpulkan bahan baik berupa draft RUU otonomi khusus, pokok-pokok pikiran muatan RUU otonomi khusus, maupun dokumen lain yang dianggap relevan. Tim Pengkajian bekerja dari Januari hingga Maret 2001 dengan melakukan penjangkaran aspirasi pada 14 unsur komponen masyarakat pada seluruh kabupaten/kota di provinsi Papua. Pada Minggu I Maret 2001 Tim Pengkajian berhasil menyusun 2 (dua) dokumen, yakni (1) academic paper, yang melatar belakangi penyusunan draft RUU Otonomi Khusus ; dan (2) draft RUU Otonomi Khusus. Pada Minggu III Maret 2001, Musa'ad bersama Rektor Uncen Frans Wosprakrik bertemu dengan para anggota DPR asal Papua dan Aceh, serta

²⁴ Lihat Mohammad Abud Musa'ad, *Menguak Tabir Otonomi Khusus Papua*, (Bandung: Penerbit ITB, 2004).

beberapa pakar di Jakarta, antara lain Sekjen Komnas HAM (Asmara Nababan).²⁵ Lebih lanjut, Musa'ad menjelaskan bahwa draft yang telah disusun oleh Tim Pengkajian ini dibahas dalam suatu Forum Kajian Pembahasan RUU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang dilaksanakan di kota Jayapura pada tanggal 28 – 29 Maret 2001.

Tim melanjutkan untuk menyempurnakan draft RUU dan akhirnya menyerahkan draft tersebut kepada Presiden Abdurrahman Wahid dan Ketua DPR Akbar Tanjung pada 16 April 2001.²⁶ Mohammad Musa'ad terlibat terus dalam pembahasan draft RUU di lingkungan DPR RI di Jakarta. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua membentuk Tim Asistensi yang bertujuan untuk mengawal proses pembahasan RUU di Panitia Khusus (Pansus) Otonomi Khusus Papua. Di dalam Tim Asistensi ini, Musa'ad diposisikan sebagai anggota inti dalam Tim Pengkajian Materi. Musa'ad menguraikan tugas berat yang diemban oleh Tim Asistensi. Musa'ad dan anggota tim lainnya bertemu dengan anggota DPR asal Papua, berdialog dengan fraksi-fraksi di Panitia Khusus DPR, melakukan audiensi dengan para menteri dari Kabinet Abdurrahman Wahid, maupun bertukar pikiran dengan para akademisi seperti Prof. Selo Soemardjan, Prof. Jimly Assidique, maupun Dr. Sri Moeljadi. Akhirnya, draft RUU ini ditetapkan oleh DPR pada tanggal 20 Oktober 2001 menjadi Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Undang-undang ini kemudian disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 21 November 2001 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 dan Tambahan Lembaga Negara Tahun 2001 Nomor 4151.²⁷

Mohammad Musa'ad juga terlibat aktif dalam beberapa organisasi kemasyarakatan Islam. Di lingkungan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Musa'ad adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Papua. Ia juga

²⁵ Lihat Mohammad Abud Musa'ad, *Menguak Tabir Otonomi Khusus Papua*, (Bandung: Penerbit ITB, 2004), hal. 21 – 22.

²⁶ Lihat Agus Sumule (edt), *Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003).

²⁷ Lihat Mohammad Abud Musa'ad, *Menguak Tabir Otonomi Khusus Papua*, (Bandung: Penerbit ITB, 2004), hlm. 30 -33.

aktif di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wilayah Papua. Musa'ad juga sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua periode 2003 – 2008. Namun di tengah perjalanannya sebagai anggota KPU, Musa'ad dipinang oleh calon Gubernur dari Partai Damai Sejahtera (PDS) Lukas Enembe sebagai calon wakil Gubernur. Kedua pasangan ini didukung oleh PDS dan PKS. Namun dalam proses pencalonannya, Majelis Rakyat Papua (MRP) membatalkan keikutsertaan Musa'ad karena MRP menilai Musa'ad tidak memenuhi salah satu persyaratan, yakni penduduk asli Papua. Walaupun Musa'ad telah memperoleh pengakuan sebagai anak adat dari salah satu raja petuanan di kabupaten Fak-fak, namun hal ini tidak merubah keputusan dari pihak MRP.²⁸

Dari berbagai diskusi-diskusi informal yang berkembang saat itu, berkembang kekhawatiran bahwa Musa'ad adalah representasi kekuatan Islam yang bersaing untuk memperoleh kekuasaan di provinsi Papua. Hal ini mengingat pasangan Lukas Enembe – Mohammad Musa'ad adalah calon terkuat dimana Lukas Enembe sebagai representasi masyarakat Pegunungan Tengah Papua dan Musa'ad adalah representasi komunitas Islam di Papua. Akhirnya, posisi Musa'ad digantikan oleh Ahmad Aroby Aituaraw, tokoh muslim asal Fakfak. Dari hasil perhitungan suara, Enembe-Robby menempati nomor 2, dimana bersaing ketat dengan pasangan Barnabas Suebu-Alex Hasegem. Bahkan dalam perhitungan awalnya, pasangan Enember-Robby memenangi hasil pemilihan. Namun di detik-detik terakhir perhitungan, khususnya setelah menghitung suara dari kabupaten Yahukimo, akhirnya ditetapkan Barnabas-Alex dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang memenangi pertempuran Gubernur-Wakil Gubernur periode 2006 – 2011.

²⁸ Lihat, Sinar Harapan, 19 November 2005. Sementara itu Sabtu, 19 November 2005, sekitar 500 massa dari Pegunungan Tengah Papua yang bermukim di Sentani, Abepura dan Jayapura berbondong-bondong mendatangi Hotel Numbai yang terletak di Dok V Jayapura, yang untuk sementara dijadikan Kantor Sekretariat MRP. Mereka memprotes pencoretan nama bakal calon Wagub Muhammad Musa'ad yang berpasangan dengan bakal calon Gubernur Lukas Enembe oleh MRP. Di antara massa ada yang berteriak hendak menduduki dan membakar kantor sekretariat MRP, apabila Musa'ad tidak dikembalikan ke posisinya sebagai bakal calon Wagub. Menurut koordinator penggerak massa yang juga tim sukses pasangan Lukas Enembe-Muhammad Musa'ad, mereka tidak akan meninggalkan kantor tersebut sebelum tuntutan mereka dipenuhi

(4) Kehadiran Partai - Partai Politik Berbasis Islam dalam Pemilu 2004 di Papua

Perubahan sosial politik di Indonesia telah memberi ruang yang luas bagi kehadiran partai-partai politik dari berbagai aliran, ideologi, maupun tokoh. Jika Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1997 hanya terdapat 3 (tiga) partai, namun dalam Pemilu 1999 terdapat puluhan partai bersaing memperebutkan kursi di legislatif, baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Hal ini terjadi dalam konteks sosial politik di tanah Papua. Berdiri perwakilan-perwakilan partai politik nasional di ibukota Jayapura dan kabupaten-kabupaten se-Provinsi Papua. Demikian pula, hal ini terjadi dalam Pemilu 2004. Dari Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 telah menunjukkan bahwa kekuatan politik lama seperti Golongan Karya yang selama ini menguasai politik Papua mengalami kemunduran dan kehilangan banyak kursi legislatif. Kekuatan sosial politik di Papua mulai bergeser sehingga kekuasaan politik tidak terkonsentrasi di tangan Golongan Karya, namun tersebar ke partai-partai politik lainnya, termasuk ke kekuatan politik berbasis ideologi Islam atau partai yang mengandalkan suara umat Islam.

Pada Pemilu 2004 yang dilaksanakan di provinsi Papua, terdapat 24 (duapuluh empat) partai yang berhak ikut serta dalam pesta demokrasi ini. Dari 993.023 pemilih, partai Golongan Karya tampil sebagai pemenang dengan merebut 252.407 suara, diikuti oleh PDI-P dengan 95.028 suara, dan Partai Damai Sejahtera (PDS) dengan 75.487 suara.²⁹ Berikut ini ditampilkan peta kekuatan politik dari hasil Pemilu 2004.

²⁹ Lihat Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, *Papua Dalam Angka Tahun 2006*, (Jayapura: BPS Provinsi Papua, 2007).

Tabel 15. Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu untuk DPRD Provinsi Papua Tahun 2004

No	Partai Politik	Jumlah Suara	Jumlah kursi DPRD	Persentase
1.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	23.255	1	2,34
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	25.036	1	2,52
3.	Partai Bulan Bintang (PBB)	10.358	0	1,04
4.	Partai Merdeka	22.768	1	2,29
5.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	15.739	1	1,58
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	33.521	2	3,38
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	33.855	1	3,41
8.	Partai Nasional Banteng Kebangsaan	52.510	3	5,29
9.	Partai Demokrat	50.715	4	5,11
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	18.784	1	1,89
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	24.424	2	2,46
12.	Partai Persatuan Nadhatul Ummah Indonesia	2.717	0	0,27
13.	Partai Amanat Nasional (PAN)	31.164	1	3,14
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	27.887	1	2,81
15.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	23.099	1	2,33
16.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	26.361	2	2,65
17.	Partai Bintang Reformasi (PBR)	13.926	1	1,40
18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	95.028	6	9,57
19.	Partai Damai Sejahtera	75.487	6	7,60
20.	Partai Golongan Karya	252.407	16	25,42
21.	Partai Patriot Pancasila	26.371	1	2,66
22.	Partai Syarikat Indonesia (PSI)	28.008	1	2,82
23.	Partai Persatuan Daerah	59.347	3	5,98
24.	Partai Pelopor	20.262	0	2,04
	Jumlah		56	

Sumber : KPU Provinsi Papua Tahun 2005.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kekuatan partai politik berbasis Islam maupun partai yang mengandalkan basis suara Islam, seperti PKB dan PAN memiliki kekuatan 15,23 persen dari peta suara pemilih di provinsi Papua atau memperoleh 7 (tujuh) kursi dalam kekuasaan formal di DPRD Provinsi Papua. Selain itu, terdapat politisi-politisi muslim yang berasal dari partai politik berhaluan nasionalis seperti

dari Golongan Karya maupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Misalnya, Komaruddin Watubun adalah politisi muslim sebagai Ketua DPW PDI-P Provinsi Papua dan juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua Periode 2004 – 2009. Sedangkan di tubuh Partai Golongan Karya, terdapat politisi-politisi asal Sulawesi yang didukung oleh paguyuban Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS). Demikian pula, Ketua Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masjid Se-Indonesia (BKPRMI) Wilayah Papua, Abdurahman Bailusi adalah politisi dari Partai Golkar yang duduk sebagai anggota DPRD Kotamadya Jayapura periode 2004 – 2009.

Sedangkan PKS adalah partai berbasis Islam yang muncul secara fenomenal dalam politik Papua. Dengan jaringan struktur partai yang kuat ke akar rumput dan kader-kader partai yang terkonsolidasi rapi, maka kedua faktor tersebut telah berkontribusi dalam memperoleh suara yang relatif signifikan melebihi partai-partai politik Islam lainnya seperti PPP, PKB, PBB, PBR, maupun Partai Persatuan Nadhatul Ummah Indonesia. Secara keseluruhan, PKS menempati nomor 11 perolehan suara terbanyak dari 24 partai politik yang ikut serta dalam Pemilu 2004 di provinsi Papua. Di DPRD Provinsi Papua, PKS merebut 2 kursi, dan menempatkan 3 wakilnya di DPRD Kota Jayapura, yang seringkali dipandang sebagai barometer politik lokal di Papua karena mengingat kota Jayapura adalah "Indonesia Mini" dari kontestasi politik Papua.

Dengan melihat realitas populasi penduduk provinsi Papua yang mayoritas beragama Kristen, maka partai-partai berhaluan Islam maupun partai yang mengandalkan suara umat Islam berupaya melakukan adaptasi politik dengan kondisi lokal. Hal ini ditunjukkan dengan kebijakan partai yang terbuka dengan penduduk Papua non-muslim untuk aktif sebagai pengurus partai maupun sebagai anggota legislatif di DPRD Provinsi dan Kabupaten. Hal ini terlihat pada PAN. Sejak tahun 1998, PAN dipimpin oleh H. Sofyan Wanggai, tokoh muslim Papua, dan digantikan oleh Simon Wanggai, seorang Kristen dan saat ini dipimpin oleh Ohee, seorang Kristen yang berasal dari Sentani, Jayapura. Demikian pula, PKB berhasil mengirimkan 1 wakil di DPRD Provinsi Papua, yakni Watofa, seorang politisi

perempuan asal Yapen Waropen yang beragama Kristen. PKS juga berupaya untuk mendekati tokoh-tokoh Papua yang beragama Kristen untuk aktif dalam kepengurusan partai. Saat ini beberapa tokoh Papua di kawasan Pegunungan Tengah Papua aktif dalam kepengurusan PKS di tingkat kabupaten dan kecamatan.

(5) Keterwakilan Umat Islam dalam Majelis Rakyat Papua (MRP)

Sejak tahun 2005, representasi umat Islam, terutama dari muslim asli Papua, diakomodasi struktur Majelis Rakyat Papua (MRP). Sesuai dengan Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, MRP adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.³⁰ Mohammad Musa'ad, tokoh muslim Papua yang terlibat aktif dalam penyusunan draft RUU Otonomi Khusus Papua menjelaskan bahwa terdapat 6 (enam) alasan yang melatarbelakangi pembentukan MRP, yakni:

- (1) Hak-hak politik orang asli Papua dan kaum perempuan cenderung terabaikan;
- (2) Representasi politik orang asli Papua dan kaum perempuan di lembaga-lembaga politik (parpol/legislatif) tidak cukup signifikan;
- (3) Aspirasi politik orang asli Papua dan kaum perempuan cenderung tidak akomodir;
- (4) Tingkat partisipasi politik orang asli Papua dan kaum perempuan tergolong relatif rendah;
- (5) Komitmen untuk menghormati adat dan budaya, memberdayakan kaum perempuan, dan memantapkan kerukunan hidup beragama;
- (6) Komitmen untuk melakukan rekonsiliasi antara sesama orang asli Papua maupun orang asli Papua dengan penduduk Provinsi Papua.³¹

³⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

³¹ Lihat Mohammad Abud Musa'ad, *Menguak Tabir Otonomi Khusus Papua*, (Bandung: Penerbit ITB, 2004), hlm. 74 – 75.

Sesuai dengan pasal 19 UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua, MRP beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri dari atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP.³² Sedangkan Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua mengatur bahwa anggota MRP jumlahnya tidak lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) jumlah anggota DPRD Papua.³³ Berdasarkan UU No. 21/2001 dan PP No. 54/2004, maka jumlah anggota MRP sebanyak 42 anggota, dimana 14 orang dari kalangan adat, 14 orang dari kalangan agama, dan 14 orang lain dari kalangan perempuan.

Pemilihan anggota MRP dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni (a) pemilihan untuk calon dari wakil adat dan perempuan dilakukan 2 (dua) tahap yakni pemilihan di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota; dan (b) pemilihan untuk wakil agama dilakukan 1 (satu) tahap berdasarkan jumlah pemeluk agama secara proporsional.³⁴ Lebih lanjut, sesuai dengan pasal 16 ayat 1 PP No. 54/2004, calon anggota wakil agama dari setiap agama diajukan oleh masyarakat agama masing-masing. Sedangkan perimbangan jumlah wakil masing-masing agama ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tingkat Provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah pemeluk masing-masing agama (Pasal 16 ayat 5).

Dalam penentuan berapa banyak wakil agama Islam di struktur MRP telah terjadi perdebatan, apakah umat Islam diberikan 3 kursi ataukah 2 kursi di MRP. Mengingat dari sekitar 2,2 juta populasi Papua, jumlah umat Islam hampir mencapai 25 persen. Dengan demikian, pilihan 3 kursi di MRP adalah kebijakan yang proporsional. Dengan skenario 3 kursi ini, maka komunitas umat Islam, terutama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua melakukan koordinasi dengan Nadhatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menentukan wakil Islam. MUI dibawah pimpinan

³² Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

³³ Lihat PP Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua.

³⁴ Lihat Pasal 12 PP Nomor 54 tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua.

Zubair Husein menyiapkan 3 (tiga) calon, yakni nomor 1 adalah H Arobi Ahmad Aituarauw, diikuti oleh Thom Lani, dan Tony Wanggai. Ketiga calon tersebut mencerminkan perbedaan karakteristik budaya yang terdapat di tanah Papua. Aroby Aituarauw berasal dari muslim asal wilayah Fak-fak dan Aroby adalah keturunan salah satu raja atau petuanan di dataran Fakfak. Sedangkan Thom Lani adalah representasi dari muslim asal wilayah Pegunungan Tengah, dimana penduduk di wilayah mendapat hidayah Islam pada tahun 1970-an. Bagi Toni Wanggai, ia adalah muslim yang merepresentasi wilayah utara Papua atau wilayah Teluk Cendrawasih, dimana masyarakatnya telah memiliki ikatan historis dengan kesultanan Tidore.

Namun, dalam perkembangannya, Panitia Pemilihan MRP dan Pemerintah Provinsi Papua menetapkan hanya 2 (dua) kursi kepada wakil agama Islam. Alasan yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan adalah wakil agama Islam ini hanya ditujukan kepada penduduk asli Papua yang beragama Islam, atau dengan kata lain, penentuan kursi ini tidak menghitung populasi umat Islam di Papua yang berjumlah sekitar 25 persen dari keseluruhan penduduk Papua. Penentuan ini hanya terkait dengan penduduk asli Papua yang beragama Islam. Dengan 2 (dua) kursi yang tersedia bagi umat Islam, maka MUI Papua akhirnya menentukan H. Aroby Aituarauw dan Thom Lani sebagai wakil dari komunitas muslim asli Papua.

Sebagai lembaga baru dalam struktur pemerintahan di Provinsi Papua, MRP sedang mencari bentuk yang tepat dalam menyuarakan kepentingan rakyat Papua. Sesuai dengan tugas dan wewenangnya, MRP memberikan beberapa kebijakan, yakni³⁵ : (a) memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPR Papua; (b) memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia utusan daerah provinsi Papua yang diusulkan oleh DPR Papua; (c) memberikn pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang diajukan oleh DPR Papua bersama-sama dengan

³⁵ Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Gubernur; (d) memberikan saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Papua dengan pihak ketiga yang berlaku di Provinsi Papua khusus menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua; (e) memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya; (f) memberikan pertimbangan kepada DPR Papua, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota serta Bupati/Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.

Namun dalam perjalanan selama 3 (tiga) tahun, MRP mendapat kritikan dari publik Papua, karena MRP dipandang tidak berperan dalam membela kepentingan penduduk asli Papua. Pada akhir tahun 2007 berbagai gelombang demonstrasi di kota Jayapura menyoroti peran dan posisi MRP dan menuntut MRP untuk dibubarkan.

(6) Keterwakilan Umat Islam dalam PILKADA

Sejak perubahan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah direvisi menjadi UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana UU 32/2004 ini mengamanatkan pemilihan kepala daerah (Pilkada), baik Gubernur dan Bupati/Walikota dilaksanakan dengan model pemilihan secara langsung oleh rakyat, maka sejak tahun 2004 konstelasi sosial politik di provinsi Papua maupun provinsi Papua Barat mulai memberikan perhatian yang tinggi kepada posisi dan peran umat Islam dalam kancah Pilkada, baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

a. Representasi Umat Islam dalam Pilkada di provinsi Papua Barat

Perhatian kepada umat Islam ini disebabkan oleh perkembangan populasi umat Islam yang pesat di pulau Papua dalam beberapa tahun terakhir ini. Sebagaimana yang diungkapkan dalam sub-bab sebelumnya menyangkut komposisi demografis umat Islam di pulau Papua dibandingkan dengan jumlah umat agama lainnya, khususnya Kristen Protestan dan Katholik. Dari jumlah penduduk sebesar

702.202 jiwa di provinsi Papua Barat, total penduduk yang beragama Islam adalah sebesar 41, 27 persen, sedangkan sisanya adalah umat Kristiani.

Tabel 16. Persentase Pemeluk Agama Islam di Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2005 – 2006

Kabupaten/Kota	Prosentase Umat Islam (%)
Fak-fak	61,63
Kaimana	39,17
Teluk Wondama	8,22
Teluk Bintuni	44,19
Manokwari	36,08
Sorong Selatan	22,04
Sorong	52,11
Raja Ampat	34,84
Kota Sorong	44,90

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat Tahun 2007.

(i) Pilkada Gubernur

Struktur populasi seperti ini mempengaruhi penentuan pasangan dalam Pilkada Gubernur maupun di Kabupaten/Kota. Dalam Pilkada Gubernur di Provinsi Papua Barat, terlihat seluruh pasangan Gubernur-Wakil Gubernur adalah pasangan dengan latar belakang agama Kristen-Islam, dimana Gubernur adalah tokoh yang beragama Kristen dan Wakil Gubernur beragama Islam. Dari Pilkada yang dilaksanakan tersebut, pasangan Abraham Ataruri dan Rahman Kacong meraih kemenangan secara mutlak, yang bersaing dengan pasangan Yorries Raweyai – Muhammad Killian.

Tabel 17. Komposisi Calon Gubernur –Wakil Gubernur dalam Pilkada di Provinsi Papua Barat

No.	Nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
1.	Abraham Ataruri – Rahman Kacong
2.	Asmuruf – Ali Kastela
3.	Yorries Raweyai – Muhammad Killian

Sumber: KPU Provinsi Papua Barat Tahun 2006.

(ii) Pilkada Bupati/Walikota

Demikian pula, konstelasi yang berkembang dalam Pilkada Bupati dan Walikota. Hampir semua pasangan Bupati dan Walikota adalah representasi antara figur yang beragama Kristen-Islam atau Islam-Kristen. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 18. Komposisi Bupati/Wakil Bupati

No.	Kabupaten/Kota	Nama Pemenang Bupati/Walikota
1.	Raja Ampat	Markus Wanma - Indra Arfan ³⁶
2.	Sorong	Drs Stev Malak MSi - Drs Tri Budiarto
3.	Teluk Bintuni	drg Alfons Manibui DESS - Drs H Akuba Kaitam

³⁶ Kemenangan pasangan diusung oleh Partai Damai Sejahtera (PDS) di Kabupaten Raja Ampat. Meski dalam partai ini hanya memiliki dua kursi di DPRD, tanpa berkoalisi dengan siapa pun, calonnya unggul di daerah ini. Pasangan Markus Wanma dan Indra Arfan meraih suara 49 persen sehingga menguasai kursi bupati dan wakil bupati 2005-2010. PDS mampu mengalahkan calon yang diusung dari koalisi Golkar, PPP, dan PBB yang notabene menguasai kursi mayoritas di DPRD. Fakta kemenangan ini telah menjadi bukti bahwa faktor partai pendukung bukanlah hal yang menentukan. Faktor utama yang menentukan pilihan pemilih tetap pada popularitas individu calon. Mencuatnya popularitas individu calon ini dapat dilihat dari data pilkada yang dimenangi parpol kecil. Perolehan suara yang diperoleh calon bupati yang menang dalam pilkada pada umumnya lebih banyak daripada perolehan suara parpol pada pemilu legislatif 2004, lihat Kompas, 30 September 2005.

4.	Fakfak	Wahidin Puarada – Said Hindom
5.	Kaimana	Drs. Hasan Ahmad, Msi - Drs. Mathias Mairuma
6.	Kota Sorong	JA Jumame - Hj Baisara Wael, M.H

Sumber: KPU Provinsi Papua Barat Tahun 2006.

b. Representasi Umat Islam dalam Pilkada di Provinsi Papua

Percaturan politik pada Pilkada di provinsi Papua relatif memiliki kesamaan sebagaimana yang terjadi di provinsi Papua Barat. Artinya figur-figur dari umat Islam dipertimbangkan sebagai pasangan Gubernur maupun Bupati/Walikota. Di tahun 2005 penduduk di provinsi Papua berjumlah 1.875.388 jiwa, dimana pemeluk Islam adalah sebesar 341.057 jiwa, sedangkan pemeluk agama Kristen Protestan sebanyak 1.154.420 jiwa dan pemeluk Kristen Katolik sebanyak 409.722 jiwa.

Tabel 19. Banyaknya Pemeluk Agama Menurut Golongan Agama dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2005

No.	Kabupaten/kota	Protestan	Khatolik	Islam
1.	Merauke	39.907	28.414	98.554
2.	Jayawijaya	51.615	12.529	3.191
3.	Jayapura	192.371	10.321	33.822
4.	Paniai	112.616	38.346	339
5.	Puncak Jaya	109.689	13.454	7.387
6.	Nabire	78.356	22.726	35.000
7.	Mimika	31.497	60.403	39.241
8.	Yapen Waropen	64.471	1.012	4.834
9.	Biak Numfor	98.229	5.536	13.179
10.	Boven Digoel	10.892	28.354	1.542
11.	Mappi	11.779	59.357	1.557
12.	Asmat	16.558	51.905	1.015
13.	Yahukimo	77.273	476	-
14.	Peg. Bintang	27.577	25.579	-
15.	Tolikara	59.875	-	12
16.	Sarmi	35.918	1.478	3.736
17.	Keerom	10.996	18.139	12.994

18.	Waropen	22.994	530	620
19.	Supiori	12.411	25	80
20	Kota Jayapura	89.326	31.138	83.934
Total		1.154.420	409.722	341.057

Sumber :BPS Provinsi Papua, Papua Dalam Angka Tahun 2006

Hal ini berarti bahwa sekitar 61,56 persen penduduk Papua beragama Kristen Protestan, selanjutnya diikuti oleh Katolik sebanyak 21,85 persen dan umat Islam sebanyak 18,19 persen dari penduduk Papua. Struktur penduduk di pulau Papua seperti diatas menyebabkan umat Islam menjadi faktor yang relatif dipertimbangkan dalam percaturan politik formal dalam penentuan calon Gubernur-Wakil Gubernur maupun Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota.

(i) Pilkada Bupati/Walikota

Konstelasi tersebut dapat kita lihat pada Pilkada Gubernur dan Bupati/Walikota di provinsi Papua. Komposisi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 20. Komposisi Bupati/Wakil Bupati

No.	Kabupaten/Kota	Nama Pasangan
1.	Kota Jayapura	Drs. M. R. Kambu, M.Si – H. Sudjarwo, BE
2.	Merauke	Drs Johannes Gluba Gebze - Drs. Waryoto, M.Si.
3.	Keerom	Drs Celcius Watae - Drs. Wagfir Kosasih
4.	Timika	Klemen Tinal, SE,MM –Ir. H. Abdul Muis ³⁷

³⁷ Pilkada di Kabupaten Mimika dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2008. Dari hasil sementara, pasangan Tinal-Abdul Muis memperoleh suara terbanyak. Namun saat ini pasangan lainnya menuntut perhitungan ulang di beberapa TPS. Pilkada di Kabupaten Mimika diikuti oleh pemilih sebanyak 120.090 orang untuk memilih satu dari empat pasang calon bupati dan wakil bupati. Pasangan Yan A. Yoteni-Pdt. Paulus Pakage diusung oleh Koalisi Membangun Dalam Kasih yang merupakan gabungan Partai Damai Sejahtera Merdeka dan Partai Merdeka. Kemudian pasangan Hans Magal-Sutoyo diusung Koalisi Mimika Bangkit yang terdiri dari Partai Keadilan Sejahtera, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Demokrat, Partai PNI Marhaenisme dan Partai PNBK. Selanjutnya pasangan Klemen Tinal-Abdul Muis diusung Koalisi Mimika Untuk Semua, yang merupakan gabungan dari Partai Golongan Karya, Partai Perhimpunan Indonesia Baru, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Bintang Reformasi dan Partai Pelopor. Sedangkan pasangan Yopi Kilangin - Yohanes Helyanan diusung

Demikian pula, Pilkada untuk Kabupaten Jayapura diikuti oleh sejumlah pasangan yang menggandengkan tokoh-tokoh Islam, namun berhasil untuk memenangi Pilkada Bupati Jayapura. Hal ini mengingat *calon incumbent* Habel Suwae menggaet Zadrak Wamebu, seorang tokoh LSM terkemuka di Papua, dan merupakan putra asli kabupaten Jayapura. Menurut Ketua KPUD Kabupaten Jayapura, Mathius Awoitouw, sebanyak 74,23 persen dari 65.868 penduduk yang terdaftar sebagai pemilih tetap telah menggunakan hak pilihnya. Total perolehan suara sah mencapai 48.096 suara. Mathius menjelaskan, dari suara yang masuk pasangan Habel Suwae-Zadrak Wamebu memperoleh 26.735 suara, pasangan Mozes Kallem-Giri Wijyantoro mengumpulkan 8.920 suara, pasangan Zadrak Taime-Petrus Thu Lie Khoy memperoleh 2.558 suara, pasangan Ferdinand Yewi- H Rahim Dg Husein mengumpulkan 5.040 suara dan pasangan Yusak Samonsabra-Kaibu Jigibalom memperoleh 4.843 suara.³⁸

(ii) Pilkada Gubernur Papua

Dalam pertarungan menuju "Papua 1" atau Gubernur Provinsi Papua, tercermin pula kombinasi tokoh beragama Kristen-Islam yang bersaing ketat dengan pasangan-pasangan lainnya. Pada persiapan awal dalam pendaftaran calon Gubernur dan wakil Gubernur di KPUD Papua, terdapat dua pasangan yang bersaing yakni:

Tabel 21. Komposisi Calon Gubernur Provinsi Papua 2006

No.	Calon Pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Papua	Partai Pendukung
1.	Barnabas Suebu, SH – Komaruddin Watubun	PDI-Perjuangan
2.	Lukas Enembe – Drs. Mohammad Musa'ad	PDS – PKS

Sumber: KPU Provinsi Papua tahun 2006.

Koalisi Suara Rakyat yang terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Buruh Sosial Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan Partai Sarikat Indonesia, lihat www.cenderawasihpos.com/detail.php, Jayapura, 19 Mei 2008.

³⁸ Lihat www.tempointeraktif.com/hg/nusa/papua/2006/09/14/brk.20060914-84023.id.html

Namun proses pencalonan Komaruddin Watubun dan Mohammad Musa'ad mendapat tantangan yang keras dari Majelis Rakyat Papua (MRP). Mengingat dalam persyaratan calon gubernur sebagaimana yang ditegaskan dalam UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menegaskan bahwa calon gubernur adalah orang asli Papua.³⁹ Dalam rapat paripurna MRP pada tanggal 18 November 2005, MRP tidak menyetujui Komaruddin dengan alasan bukan orang asli Papua. Selain Komaruddin, nama yang juga dicoret sebagai bakal calon kepala daerah adalah Musa'ad (bakal calon Wagub pasangan Lukas Enembe), karena Musa'ad bukan asli Papua melainkan keturunan Arab (ayah) dan Fakfak (ibu). Hal ini menimbulkan protes dan demonstrasi dari masyarakat dari Pegunungan Tengah yang mengukung calon Lukas Enembe-Muhammad Musa'ad.⁴⁰

Menanggapi keputusan MRP tersebut, Komaruddin, yang juga sebagai Ketua DPW PDI-Perjuangan Provinsi Papua dan Wakil Ketua DPR Papua menegaskan bahwa :

“Dirinya belum menerima hasil keputusan MRP. Saya sendiri belum melihat apa pertimbangan dari keputusan itu. Tapi, saya sudah dengar secara lisan keputusan MRP. Syarat asli Papua tidak identik dengan syarat fisik. Sebab, ada kemungkinan orang yang diterima secara adat bisa mencalonkan diri. Sesuai ketentuan UU Otsus, orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Komaruddin telah diterima secara adat oleh masyarakat Serui, karena

³⁹ Lihat UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

⁴⁰ Lihat, Sinar Harapan, 19 November 2005. Sementara itu Sabtu, 19 November 2005, sekitar 500 massa dari Pegunungan Tengah Papua yang bermukim di Sentani, Abepura dan Jayapura berbondong-bondong mendatangi Hotel Numbai yang terletak di Dok V Jayapura, yang untuk sementara dijadikan Kantor Sekretariat MRP. Mereka memprotes pencoretan nama bakal calon Wagub Muhammad Musa'ad yang berpasangan dengan bakal calon Gubernur Lukas Enembe oleh MRP. Munculnya massa ke Jayapura dengan berbondong-bondong jalan kaki dengan khas teriakan orang pegunungan, suara melengking itu, menarik perhatian warga Kota Jayapura. Di antara massa ada yang berteriak hendak menduduki dan membakar kantor sekretariat MRP, apabila Musa'ad tidak dikembalikan ke posisinya sebagai bakal calon Wagub. Menurut koordinator penggerak massa yang juga tim sukses pasangan Lukas Enembe-Muhammad Musa'ad, mereka tidak akan meninggalkan kantor tersebut sebelum tuntutan mereka dipenuhi.

menjadi anak angkat dari tokoh adat Serui. Maka ia mempertanyakan, apakah hal itu tidak memenuhi rumusan itu, terutama diterima dan diakui sebagai orang asli Papua. Komaruddin juga mengingatkan MRP merupakan lembaga kultural, sehingga jangan mencoret pasangan calon, karena hal itu merupakan wilayah politik. Jangan hal ini sampai HAM dan hak demokrasi dibatasi”⁴¹.

Akhirnya, PDI-Perjuangan mencari calon lain dan mencalonkan Alex Hasegem sebagai calon wakil gubernur yang mendampingi Barnabas Suebu. Demikian pula, Lukas Enembe – mantan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya - yang dicalonkan oleh PDS dan PKS mengajukan calon baru, yakni H Arobi Ahmad Aituarauw, seorang muslim asal kabupaten Fakfak, provinsi Papua Barat.

Dalam perhitungan suara, kedua pasangan saling mengklaim kemenangan. Carolas Bolly, Sekretaris tim sukses pasangan calon Gubernur-Wagub Provinsi Papua Lukas Enembe-H Arobi Ahmad Aituarauw, mengatakan, bahwa pihaknya optimistis memenangi gugatan sengketa hasil Pilkada Papua yang saat ini sudah masuk di tingkat Mahkamah Agung (MA). Timnya optimistis dengan hasil rekap di lapangan yang digunakan dalam persidangan. Menurut Bolly, berita acara hasil rekap perolehan suara di tempat pemungutan suara (TPS) ataupun panitia pemungutan suara (PPS) belum sampai ke KPUD kabupaten. Namun, KPUD kabupaten dan KPUD Provinsi Papua membuat hasil rekap suara.⁴²

Pada tanggal 4 April 2006, KPUD Provinsi Papua mengumumkan hasil pemenang Pilkada Papua.⁴³ KPUD memutuskan Barnabas Suebu-Alex Hasegem sebagai peraih pemilih terbanyak. Namun dalam selisih suara dengan pasangan Lukas Enembe-Aituarauw sangat tipis. Dari pemilih sebanyak 1.126.574 jiwa, pasangan Barnabas Suebu SH - Alex Hasegem, SE menduduki urutan pertama dengan meraih suara terbanyak 354,763 suara. Disusul urutan kedua pasangan Lukas Enembe S.IP-H.Arobi Achmad Aituarau, SE dengan perolehan 333.623 suara, pasangan ketiga

⁴¹ Diolah dari Sinar Harapan, 19 November 2005.

⁴² Lihat, www.suarakarya-online.com/news.html?id, 15 April 2006.

⁴³ Lihat http://web.papua.go.id/berita_det.php/id/527, 4 April 2006.

Drs. John Ibo, MM - Paskalis Kossi, Spd, MM meraih 258.475 suara, posisi keempat pasangan Drh Konstan Karma-Donatus Motte, SE 112.033 suara dan pasangan ke lima Dirk Hein Wabiser-Ir. SP. Inauri, Msi meraih 67.671 suara.

Konstelasi Pilkada Gubernur dan Bupati/Walikota di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat mencerminkan adanya peningkatan posisi dan peran umat Islam dalam kepolitikan lokal di era demokrasi. Artinya, dengan instrumen pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, maka memungkinkan keberadaan umat Islam semakin dipertimbangkan sebagai salah satu kekuatan yang harus diperhitungkan secara proporsional.

(1) Peran MUI dan Gagasan "Papua Tanah Damai"

Di tengah-tengah perubahan sosial politik yang terjadi di Papua sejak tahun 1998, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wilayah Papua juga berperanserta dalam proses perubahan, terutama dalam mempromosikan nilai-nilai perdamaian dan keadilan bagi terwujudnya Papua sebagai Tanah Damai.

Konstelasi sosial politik diwarnai oleh gejolak sosial politik yang menuntut pentingnya penegakkan hak-hak dasar rakyat Papua. Hal ini didukung pula oleh kebijakan otonomi khusus bagi Papua yang mulai diterapkan pada tahun 2001. Namun, gejolak sosial politik ini ditandai pula oleh semakin meningkatnya identitas kelompok, etnis, suku, agama maupun ideologi. Konflik Maluku dan Maluku Utara yang terjadi pada tahun 1999 telah mempengaruhi pula suasana sosial politik yang berkembang di tanah Papua. Hal ini diperburuk lagi oleh kematian Ketua Umum Presidium Dewan Papua (PDP), Theys Elluay, pada tanggal 10 November 2001. Eskalasi kekerasan dan potensi konflik yang berkembang di pusat-pusat kota di tanah Papua, telah mendorong komunitas-komunitas umat beragama untuk merespon dan berupaya mencari jalan keluar yang bersifat damai bagi keberlangsungan pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kemasyarakatan.

Tema besar yang senantiasa dijadikan upaya bersama adalah menjadikan Papua sebagai Tanah Damai. Gagasan yang berkembang di kalangan komunitas

agama maupun komponen masyarakat Papua lainnya ketika mencermati kondisi Papua yang terancam pada aksi kekerasan. Perjuangan secara damai ini awal digaungkan oleh Presidium Dewan Papua, Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya (Foreri), Gugus Tugas Perdamaian, maupun Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura. Secara khusus, SKP adalah lembaga dibawah gereka Katolik yang secara utama mempromosikan gerakan perdamaian secara berkelanjutan. Di SKP terdapat tokoh-tokoh seperti Uskup Leo Laba Ladjar OFM, J. Budi Hernawan OFM, dan Theo van den Broek.⁴⁴

Dalam pandangan Direktur Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura, J. Budi Hernawan OFM, paham Papua Tanah Damai bukan dilahirkan oleh SKP Keuskupan Jayapura, melainkan oleh sekitar empatpuluh unsur kunci yang menentukan gerak langkah kehidupan di Tanah Papua. SKP menyelenggarakan Lokakarya "Membangun Budaya Damai Menuju Papua Tanah Damai", yang bertempat di Hotel Sentani Indah, Jayapura, pada 25 – 30 November 2002. Lokakarya dihadiri oleh unsur-unsur kunci dari kalangan LSM seperti LBH, Elsham, YPPWP, LP3A, YPMD, LP3BH, Pt.PPMA, ALDP; dari kalangan pemerintah adalah 2 (dua) anggota DPRD dri Komisi F; dari kalangan organisasi masyarakat adat yakni LMA Mandobo, Lemasko/Lemasa; dari kalangan organisasi keagamaan, yakni Katolik, Protestan, Muslim, Hindu dan Budha; dan dari kalangan media massa adalah Timika Pos, Jubi, dan Nurani Papua. Sedangkan dari lembaga pendidikan adalah UNCEN, STT-GKI, dan IPI.⁴⁵ Pada kesempatan tersebut, SKP

⁴⁴ Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura berdiri pada tahun 1998 adalah lembaga di bawah Gereja Katolik Keuskupan Jayapura yang memiliki lima bidang perhatian utama, yaitu: (1) Lobi dan advokasi HAM; (2) Penelitian dan dokumentasi serta penyebaran informasi mengenai keadaan di Papua; (3) Membangun budaya damai di Papua; (4) Membangun dialog antar - agama yang konstruktif; dan (5) Menjaga keutuhan ciptaan. Bentuk-bentuk pelayanan diarahkan dalam bentuk pelatihan, materi-materi training, pelatihan dalam pengembangan organisasi, pertukaran informasi, kolaborasi proyek, dukungan teknis, dan jaringan kerja. Jaringan kerja di Indonesia antara lain dengan ALDP, LP3AP, SKP Merauke, SKP Sorong, maupun jaringan internasional dengan Amnesti Internasional dan Franciscous International. Lihat, http://www.direktori-perdamaian.org/ina/org_detail.php?id=202, 25 Juni 2008.

⁴⁵ Lihat Theo van den Broek, di dalam J. Budi Hernawan, *Papua Land of Peace: Addressing Conflict Building Peace in West Papua*, SKP Jayapura, 2005, hlm. 1.

Keuskupan Jayapura memainkan peran sebagai pemrakarsa dan pengolah proses analisis, refleksi, dan diskusi mengenai konflik di Papua dan cara-cara penanganannya. Lebih lanjut, Hernawan OFM menyampaikan bahwa hasil lokakarya tersebut dikembangkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan lokakarya menjadi upaya bersama untuk menangani konflik dan membangun budaya damai serta rekonsiliasi di Tanah Papua.⁴⁶

Upaya bersama antara komunitas agama di Tanah Papua diwujudkan dalam bentuk pernyataan bersama, seruan-seruan, seminar bersama, maupun pertunjukan budaya yang mengikutsertakan berbagai pemeluk agama, termasuk MUI Papua, yang diketuai oleh H. Drs. Zubaer D. Hussein. Beberapa pernyataan bersama tersebut antara lain⁴⁷ :

1. Pernyataan Sikap Pemimpin-Pemimpin Agama di Papua untuk Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus yang Lebih Konstruktif bagi Provinsi Papua, 2003.
2. Seruan Para Pemimpin Agama di Papua untuk Upaya Menghindari Konflik di Tanah Papua, 5 Agustus 2005.
3. Pemikiran dan Sikap Pemimpin-Pemimpin Agama se-Tanah Papua atas Pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP), 25 Agustus 2005.
4. Pernyataan Bersama Tokoh-Tokoh Agama se-Tanah Papua tentang Agama-agama Sebagai Pembawa Misi Keadilan dan Perdamaian.
5. Pernyataan Damai Pemimpin Agama-agama di Tanah Papua tentang Mewujudkan Perdamaian dan Keadilan di Tanah Papua, dalam rangka memperingati Hari Damai Internasional 21 September 2005.
6. Seruan Para Pemimpin Agama di Papua Menanggapi Hasil Penelitian Sejarah Pepera 1969 oleh Institut Kesejarahan Belanda, 15 November 2005.
7. Dialog, Doa Bersama, dan Pawai Damai yang diselenggarakan oleh Forum Konsultasi Para Pemimpin Agama (FKPPA) dalam memperingati masuknya Injil di Tanah Papua, yang secara khusus mengambil tema tentang Pencegahan HIV/AIDS, Jayapura, 4 February 2007.⁴⁸

⁴⁶ Lihat J. Budi Hernawan OFM, di dalam buku, *Membangun Budaya Damai dan Rekonsiliasi Dasar Menangani Konflik di Papua*, SKP Keuskupan Jayapura, 2006.

⁴⁷ Lihat Tim SKP Jayapura, *Membangun Budaya Damai dan Rekonsiliasi Dasar Menangani Konflik di Papua*, (Jayapura: SKP Keuskupan Jayapura, 2006), hlm. 129 – 152.

⁴⁸ Kegiatan ini diketuai oleh Ketua Parisadha Hindu Dharma I Gde Made Sunartha, S.Ag, MM, sedangkan Sekretaris Panitia adalah pengurus MUI (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Papua, yakni Toni Wanggai, S.Ag, MA. Hal ini jelas sangat mencerminkan persatuan dan persaudaraan diantara umat beragama di Papua.

Dinamika dari isu-isu yang diangkat dalam pernyataan bersama dari komunitas beragama tersebut terlihat bahwa isu sangat bervariasi, mulai dari seruan untuk membangun semangat kebersamaan dan perdamaian, isu struktur pemerintahan seperti pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP), isu kegagalan pelaksanaan Otonomi Khusus, maupun isu penanganan HIV/AIDS.

Sebagai contoh seruan pemuka menyangkut upaya menghindari konflik sebagai akibat dari aksi penolakan Dewan Adat Papua (DAP) terhadap kegagalan otonomi khusus. Pemuka yang menandatangani seruan pada tanggal 5 Agustus 2005 adalah H. Zubeir D. Husein (Ketua MUI Wilayah Papua), Pendeta Herman Saud, M.Th (Ketua Sinode GKI di Tanah Papua), Uskup Leo L. Ladjar OFM (Uskup Jayapura), Pandita Arya Bodho Jasmani (Sekretaris Majelis Budhayana Indonesia Provinsi Papua), dan Drs I. Nyomn Sudha (Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Papua). Di dalam seruannya, Ketua MUI Papua dan pemuka lainnya menyeruhkan hal-hal antara lain: Pertama, masyarakat perlu memakai hati nurani dan akal sehat untuk menilai isu dan kabar burung yang tersebar di antara kita. Kita telah puluhan tahun mengalami suasana semacam ini dan janganlah membiarkan diri dibodohi oleh isu dan berita yang tidak memiliki bukti ilmiah dan yuridis; Kedua, Kami mengingatkan kepada semua pihak agar menyadari kembali bahwa perbedaan ras, agama, suku warna kulit, struktur tubuh datang dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Perbedaan itu adalah Anugerah Ilahi yang patut kita syukuri. Karena itu dengan tegas menolak segala upaya oleh pihak manapun yang menyalagunakan anugerah Ilahi untuk kepentingan politik kelompok tertentu; Ketiga, Kami menyeruhkan kepada Pemerintah Pusat untuk secara serius, segera dan sistematis mengambil langkah-langkah untuk melindungi jatidiri dan hak hidup masyarakat Papua sebagai sesama anak bangsa seperti antara lain sudah dituangkan dalam UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus.⁴⁹

⁴⁹ Lihat Tim SKP Jayapura, *Membangun Budaya Damai dan Rekonsiliasi Dasar Menangani Konflik di Papua* (Jayapura, SKP Keuskupan Jayapura, 2006), hlm. 130 – 132.

Selain seruan-seruan yang ditegaskan oleh pemuka-pemuka agama ini, terdapat pula bentuk partisipasi MUI Wilayah Papua melalui sumbangan pemikiran menyangkut pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP). Pada tanggal 25 Agustus 2005 para tokoh agama di tanah Papua, yakni H. Zubeir D. Husein (Ketua MUI Wilayah Papua), Pendeta Herman Saud, M.Th (Ketua Sinode GKI di Tanah Papua), Uskup Leo L. Ladjar OFM (Ketua Umum PGGP/Uskup Jayapura), Pendeta Lipiyus Biniluk (Ketua Persekutuan Injili Indonesia), Pendeta Andreas Ayomi (Persekutuan Gereja-gereja Pantekosta), Pandita Arya Bodho Jasmani (Majelis Budhayana Indonesia Provinsi Papua), dan Drs I. Nyomn Sudha (Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Papua) menegaskan bahwa para pemuka agama sangat mendukung keberadaan MRP sebagai representasi kultural dan mendorong semua pihak mempertahankan karakter MRP tersebut. Mengingat keterwakilan dari komponen adat, agama, dan perempuan, sehingga MRP bersifat kultural, dan bukan politis.⁵⁰ Lebih lanjut, para tokoh tersebut menegaskan sikap bahwa :

”Mencermati proses dalam penghadiran MRP sampai dengan saat ini (Agustus 2005), kami menilai pemikiran-pemikiran yang telah kami sampaikan diatas tidak mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua, khususnya Pansus Perdasi MRP. Kami mencermati dan menilai ada kecenderungan penyelewengan terhadap karakter kehadiran MRP sebagai representasi kultural orang asli Papua...Atas kecenderungan demikian, kami pimpinan agama enggan untuk masuk menjadi anggota MRP dan tidak akan menentukan quota wakil masyarakat agama. Seperti kita semua tahu, urusan politik itu, secara profesional telah tertampung pada lembaga DPRP. Karena itu masalah-masalah politik seperti kasus Irian Jaya Barat dan Pilkada itu sepantasnya diselesaikan DPRP, tanpa mengagendakan sebagai masalah yang harus ditangani MRP.”⁵¹

⁵⁰ Lihat Tim SKP Jayapura, *Membangun Budaya Damai...*, hlm. 133 – 134.

⁵¹ Lihat Tim SKP Jayapura, *Membangun Budaya Damai...*, hlm. 134.

Demikian pula, konflik yang terjadi di daerah lainnya diperhatikan pula oleh MUI Wilayah Papua. Dalam merespon konflik Poso, Ketua MUI Provinsi Papua, H. Zubeir Hussein dan pemimpin umat Katolik Keuskupan Jayapura, Uskup Leo Laba Ladar, OFM meminta segenap umat beragama di wilayah paling timur dari kepulauan Nusantara ini agar tidak terpancing kasus Poso karena apa yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah itu bukanlah percecokan antarumat beragama. H. Zubeir Hussein menyerukan agar "Umat beragama di Papua ini diharapkan tidak terpancing dengan konflik di Poso yang telah menelan korban jiwa. Persoalan Poso bukanlah pertikaian antarumat beragama tetapi kelompok tertentu yang memanfaatkan sentimen keagamaan untuk memecahbelah kerukunan dan persudaraan antarumat beragama di wilayah itu dan di Indonesia pada umumnya"⁵². Lebih lanjut, H. Zubeir mengatakan kepada umat Muslim, pihaknya selalu meminta agar tetap meningkatkan jalinan persaudaraan, melanjutkan silaturahmi dengan umat beragama Kristen, Katholik, Hindu dan Budha di wilayah Papua ini.

(2) Forum Komunikasi Muslim Jayawijaya (FKMJ)

Forum Komunikasi Muslim Jayawijaya (FKMJ) adalah wadah bagi mahasiswa dan pelajar muslim yang berasal dari wilayah Pegunungan Tengah, khususnya dari kabupaten Jayawijaya. Forum ini berdiri pada tanggal 3 Maret 2003, yang diketuai oleh Hamzah Yelipele dan Imron Asso. Sedangkan saat ini, FKMJ diketuai oleh Thoha Mode Asso, SE dan Pontoh Yelipele, S.Pd sebagai sekretaris. Menurut Pontoh Yelipele, FKMJ berdiri atas latar belakang kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan yang dialami oleh masyarakat muslim Wamena. Mereka memandang adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam pengembangan muslim Wamena. Untuk itu, komunitas muslim Jayawijaya berupaya untuk mengkonsolidasi potensi dalam wadah FKMJ ini.

⁵² Lihat <http://www.kapanlagi.com/h/0000140588.html>, 25 Oktober 2006.

FKMJ ini tidak terlepas dengan perkembangan dakwah Islam di wilayah Pegunungan Tengah Papua, khususnya di kabupaten Jayawijaya sejak akhir tahun 1960-an. Pada tahun-tahun terakhir 1960-an, terdapat penduduk transmigrasi dari Jawa dan para perantau (urban asal Indonesia Timur, terutama orang Bugis, Buton, Makasar dan Madura atau Jawa Timur. Dalam kehidupan sosial terjadi interaksi sosial antara perdagangan antara para pendatang dan penduduk asli. Muslimin Yelipele menjelaskan bahwa perkembangan Islam disiarkan pula secara intensif oleh para urban dari Indonesia Timur di Suku Dani Palim Tengah dan Palim Selatan dari Moiety : Asso-Lokowal Asso-Wetipo, Lani-Wetapo, Wuka-wetapo, Wuka-Hubi, Lagowan-Matuan dan Walesi. Dari sejumlah saksi mengatakan bahwa Esogalib Lokowal adalah orang paling pertama dari Palim Selatan yang masuk agama Islam. Kemudian Harun Asso (dari Hitigima/Wesapot), Yasa Asso (dari Hepuba/Wiaina), Horopalek Lokowal, Musa Asso (dari Megapura/Sinata), Donatus Lani (dari Lanitapo).⁵³

Dalam tahun 1960-an akhir, interaksi Islam di daerah-daerah seperti Megapura, Hitigima/Wesapot, Hepuba, Woma, Pugima dan Walesi (kini di Walesi clan Asso-Yelipele seluruh warganya 100% beragama Islam) adalah daerah pertama yang berinteraksi dengan orang Muslim dari berbagai daerah Nusantara. Muhammad Ali Wetipo, misalnya; dari konfederasi Asso-Lokobal dari daerah Hepuba masuk Agama Islam melalui orang Pendatang di Kota Wamena dalam tahun 1967 dan datang sekolah di Panti Asuhan Muhammadiyah AB-Pura Jayapura.

Berbeda dengan daerah lain di Lembah Balim, di Walesi Pada tahun 1975 Merasugun Asso, Firdaus Asso dan Muhammad Ali Asso, adalah generasi pertama yang paling awal masuk Islam dan mengembangkannya menjadi besar sampai dewasa ini. Karena diikuti oleh semua kalangan pemuda dari Konfederasi Asso-Yelipele Walesi misalnya; Nyasuok Asso, Walekmeke Asso, Nyapalogo Kuan, Wurugugi Lani, Heletok Yelipele, Aropeimake Yaleget, dan Udin Asso, sehingga

⁵³ Lihat <http://www.mail-archive.com/reformasitotal@yahoogroups.com/msg02216.html>, 12 November 2007.

memiliki pengaruh sangat besar eksistensi Islam dan Muslim Jayawi Jaya hingga kini.

Namun ada juga yang masuk Islam melalui perkenalan dengan kalangan militer Indonesia yang datang bertugas di Kodim Jayawi Jaya, Misalnya Aipon Asso, (Kepala Suku Besar). Keislaman Aipon Asso dalam tahun 1976 dan mendapat dukungan dari seorang militer berpangkat Kolonel bernama Muhammad Thohir.⁵⁴

Sebagai wadah dari muslim asli Papua, FKMJ terlibat secara aktif dalam mendukung pengembangan kualitas generasi muda muslim asal Jayawijaya. Hal yang dilakukan antara membangun kontak-kontak dengan berbagai organisasi-organisasi Islam, baik di Papua maupun luar Papua dalam mengembangkan pendidikan anak-anak muslim Wamena. Hal yang dilakukan antara lain melakukan pengiriman anak-anak muslim Wamena untuk melanjutkan pendidikan di pondok pesantren di pulau Jawa. Demikian pula, FKMJ melakukan pembinaan internal kepada anak-anak didik muslim Wamena yang sedang melanjutkan pendidikan, baik di kota Jayapura, maupun kota-kota lanilla di pulau Jawa.

FKMJ juga ikutserta secara aktif dalam aspek sosial dan politik di provinsi Papua. Hal-hal yang dilakukan antara lain seruan-seruan bersama dalam merespon penutupan gereja di Bandung, isu pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP), maupun dalam pengembangan Majelis Muslim Papua (MMP). Dalam merespon penutupan gereja di Bandung, FKMJ yang diwakili Ketua Umum FKMJ M.Thaha Mude Asso serta Sekjen FKMJ Ponto Yelipele S.pd mengaku prihatin dengan aksi penutupan beberapa Gereja dan tempat ibadah tersebut karena dianggap telah menyalahi hak-hak dasar manusia dalam kebebasan menjalankan ibadah. Yelipele menegaskan bahwa :

⁵⁴ Lihat <http://www.mail-archive.com/reformasitotal@yahoogroups.com/msg02216.html>, 12 November 2007.

"Kami atas nama masyarakat muslim dari Jayawijaya merasa prihatin dan dengan tegas menolak aksi penutupan dan pemalangan tersebut. Permasalahan pluralisme seharusnya tidak perlu terjadi di era semacam ini dengan beragam budaya dan agama yang lebih mengedepankan asas kebebasan dalam memilih sesuatu yang dianggap benar selagi tidak melanggar Undang-Undang. Kami dengan tegas menentang perbuatan yang dilakukan oleh mereka (pelaku penutupan/penyegehan) tempat Ibadah entah dari agama apa saja, karena hal tersebut sudah jelas salah".⁵⁵

Demikian pula, FKMJ turut merekomendasikan salah satu calon anggota di Majelis Rakyat Papua (MRP). Sesuai dengan pasal 19 UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua, MRP beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri dari atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP. Dalam hal ini, FKMJ mencalonkan Tom Lani untuk mewakili muslim asli Papua yang berasal dari wilayah Jayawijaya. Anak-anak muda muslim Jayawijaya ini membangun komunikasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah untuk mendukung Tom Lani sebagai anggota MRP periode 2005 – 2010.

Terkait dengan pendirian Majelis Muslim Papua (MMP), FKMJ adalah salah satu komponen utama dalam pendirian MMP. Menurut H. Arobby A. Aituarauw bahwa kehadiran Majelis Muslim Papua tidak dimaksudkan untuk membangun jamaah yang eksklusif, tidak juga untuk melancarkan islamisasi, apalagi untuk membangun fundamentalisme agama serta menjurus pada gerakan-gerakan radikal. Kehadiran lembaga ini, lanjutnya, adalah untuk bergandengan tangan dengan Pemerintah Daerah untuk menegakkan keadilan dan kemakmuran rakyat. Disamping itu, kehadiran majelis ini adalah untuk bahu-membahu bersama pemimpin agama dan pemimpin gereja, yang selama ini telah bekerja keras menjadikan Papua sebagai

⁵⁵ Lihat <http://www.freelists.org/archives/ppi/09-2005/msg00032.html>

tanah damai. Itulah sebabnya, sikap dasar, yang sekaligus menjadi platform Majelis Muslim Papua, yaitu moderat, toleran, tegak, seimbang dan dialog.⁵⁶

Dalam prakteknya, FKMJ mendukung pelajar dan mahasiswa muslim Wamena dalam melanjutkan pendidikan di Jayapura dan kota-kota lainnya. FKMJ juga ikutserta secara aktif untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dikalangan pelajar dan mahasiswa muslim Jayawijaya maupun ikutserta dalam memberikan advokasi persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan umat Islam di Papua.

(3) Dari Solidaritas Muslim Papua Menuju Majelis Muslim Papua (MMP)

Kebutuhan untuk mempercepat pengembangan kualitas penduduk asli Papua yang beragama Islam dan upaya yang sistematis dan terkonsolidasi secara baik, telah mendorong aktivis-aktivis muslim asli Papua untuk mendirikan wadah bersama, yang disebut Majelis Muslim Papua (MMP). Pada tanggal 10 April 2007 Solidaritas Muslim Papua menyelenggarakan Muktamar I Majelis Muslim Papua yang diselenggarakan di kota Jayapura, Papua. Pelaksanaan Muktamar I Majelis Muslim Papua, di Gedung Olah Raga Cenderawasih, diikuti sebanyak 300-an lebih peserta dari 27 kabupaten/kota se-Papua dan Papua Barat, minus 2 kabupaten, yakni Puncak Jaya dan Teluk Wandama yang berhalangan hadir. Ketua Penyelenggara kegiatan, M. Rifai Darus, SH, yang juga sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua, dalam laporannya mengatakan, tujuan pelaksanaan muktamar adalah melakukan silaturahmi guna mempertegas visi dan misi, menyatukan pokok-pokok garis besar organisasi, melakukan konsolidasi organisasi, membuat rekomendasi tentang pelaksanaan pembangunan daerah, serta mempertegas kembali peran Majelis Muslim Papua kedepan.⁵⁷

Pada pembukaan Muktamar, Wakil Gubernur Papua Alex Hasegem berpesan para peserta Muktamar untuk menjaga Tanah Papua agar aman untuk siapa saja.

⁵⁶ Lihat, http://www.papua.go.id/berita_det.php/id/1260, 11 April 2007.

⁵⁷ Lihat, http://www.papua.go.id/berita_det.php/id/1260, 11 April 2007.

Hasegem menyerukan kepada Solidaritas Muslim Papua beserta segenap warga Muslim di Tanah Papua untuk bekerja sama dengan Pemerintah Daerah membangun Papua, mewujudkan Papua sebagai tanah damai serta ikut berproses memberantas KKN yang telah merugikan masyarakat. Hasegem tegaskan :

"Sudah cukup kita menyaksikan peristiwa berdarah di Poso melalui media-media yang ada. Cukup...! Dan tidak boleh terjadi di tanah Papua. Papua harus menjadi tanah damai untuk siapa saja, agama apa saja, dan tidak boleh ada perbedaan. Dalam kesempatan ini, saya mengajak lembaga Majelis Muslim Papua dan seluruh komponen masyarakat islam di tanah ini untuk menyatukan pikiran, kita jaga tanah Papua aman bagi semua. Kita juga berharap lembaga ini untuk bersama-sama dengan Pemerintah Daerah membangun Papua mewujudkan Papua sebagai tanah damai serta ikut memberantas KKN yang telah merugikan masyarakat."⁵⁸

Sementara itu, Ketua Solidaritas Muslim Papua, H. Arobby A. Aituarauw, SE, MM dalam sambutannya pada Muktamar I MMP mengatakan bahwa kehadiran Majelis Muslim Papua tidak dimaksudkan untuk membangun jamaah yang eksklusif, tidak juga untuk melancarkan islamisasi, apalagi untuk membangun fundamentalisme agama serta menjurus pada gerakan-gerakan radikal. Kehadiran lembaga ini, lanjutnya, adalah untuk bergandengan tangan dengan Pemerintah Daerah untuk menegakkan keadilan dan kemakmuran rakyat. Disamping itu, kehadiran majelis ini adalah untuk bahu-membahu bersama pemimpin agama dan pemimpin gereja, yang selama ini telah bekerja keras menjadikan Papua sebagai tanah damai. Itulah sebabnya, sikap dasar, yang sekaligus menjadi platform Majelis Muslim Papua, yaitu moderat, toleran, tegak, seimbang dan dialog."⁵⁹

Dalam wawancara di Radio Netherland Wereldomroep, Thaha Mohammad Al-Hamid, seorang tokoh muslim Papua, menyatakan bahwa :

⁵⁸ Lihat, http://www.papua.go.id/berita_det.php/id/1260, 11 April 2007.

⁵⁹ Lihat, http://www.papua.go.id/berita_det.php/id/1260, 11 April 2007.

”Muslim Papua, yang sekarang ini tergabung di dalam Majelis Muslim Papua adalah masyarakat Papua, masyarakat asli yang beragama Islam dan tumbuh dalam semangat religiusitas, yang moderat, yang ada di dalam pelataran budaya bersama-sama dengan saudara-saudaranya yang beragama Nasrani. Demikian juga sebaliknya pada saudara-saudara yang beragama nasrani yang memang tumbuh dalam semangat Papua bersama-sama dengan masyarakat muslim, tanpa membangun itu perbedaan-perbedaan. Ini terbukti sekian puluh tahun tidak pernah ada ketegangan, tidak pernah ada konflik”.⁶⁰

Koordinator Steering Committee Solidaritas Muslim Papua, Sayid Fadhal Alhamid, mengatakan peran dari komunitas lain di Papua lebih menonjol daripada peran umat muslim Papua. Umat Islam Papua diharapkan lebih konkrit menyikapi situasi riil di Papua, dan dapat merumuskan perannya dalam menciptakan Papua sebagai tanah damai. "Jadi perannya (muslim Papua) belum kelihatan. Harus dilakukan kerja keras oleh semua komunitas muslim di Papua untuk lebih berperan dalam memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan perdamaian"⁶¹. Menurut Alhamid, selama ini komunitas-komunitas lain di Papua sudah melakukan banyak hal untuk umat muslim Papua. Alhamid melanjutkan bahwa organisasi Solidaritas Muslim Papua tidak akan mengambil peran yang sudah dijalankan oleh organisasi-organisasi Islam lainnya di Papua. Solidaritas Muslim Papua akan mengerjakan hal-hal yang selama ini belum digarap oleh oragnisasi-organisasi Islam yang sudah ada di Papua. Karena itu, Majelis Muslim Papua nanti tidak akan membuat panti asuhan, mengingat Muhammadiyah telah melaksanakan kegiatan tersebut. Solidaritas Muslim Papua adalah organisasi kerja yang akan melengkapi pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan oleh semua organisasi mulim yang ada.

⁶⁰ Lihat http://www.ranesi.nl/arsipaktua/indonesia060905/papua_konflik_agama20080617, 17 Juni 2008.

⁶¹ Lihat, <http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/papua/2007/04/05/>, 5 April 2007.

Hal yang digarap antara lain tentang manajemen tingkat masjid maupun advokasi tentang pelanggaran HAM.⁶²

E. Problematika Hubungan Umat Islam dan Kristen di Papua

Perkembangan umat Islam di Tanah Papua pasca pemerintahan Orde Baru, sebenarnya memberikan dampak, baik yang bersifat positif dan negatif bagi peran serta umat Islam dalam kehidupan sosial politik di Tanah Papua. Disatu sisi, iklim keterbukaan politik dan kebijakan desentralisasi telah membuka ruang publik yang semakin meluas kepada umat Islam guna memperjuangkan tujuan dan kepentingan Islam, baik diranah sosial, ekonomi, maupun politik. Namun disisi lain, iklim keterbukaan ini memunculkan menguatnya identitas primordial, baik etnis, agama, suku, dan ideologi. Beberapa contoh kasus yang merupakan tantangan dalam kehidupan antarumat beragama di Papua adalah:

⁶² Lihat, <http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/papua/2007/04/05/>, 5 April 2007. **Samsul Alam**, delegasi dalam acara Mukhtamar I Majelis Muslim Papua dari daerah Asmat. Ia mengatakan bahwa ISLAM masuk ke Kabupaten asmat sejak tahun 1980 yang dibawa oleh para pedagang dari Sulawesi. Diantara warga Asmat tertarik dengan gema azan yang berkumandang ketika itu. Apalagi pemahaman mereka pun sudah berubah, dimana masuknya para pendatang akan membawa perubahan ekonomi yang lebih baik. Dan seiring waktu, pada tahun 1982, sekelompok masyarakat dari rumpun (Par) Bisman memeluk ISLAM. Dan untuk menambah ilmu agamanya, mereka berangkat ke Tual, Maluku Tenggara karena yang lebih dekat dengan daerah mereka. Di Kabupaten Asmat, ISLAM tersebar di 3 Kampung, yaitu Kampung Per, Kampung Us dan Kampung Beritem. Mereka ini terdiri dari 5 rumpun Par, yaitu Par Simai, Par Sapan, Par Bismuk, Par Jarot dan Par Binuk. Dan mereka yang memeluk ISLAM sudah diakui oleh Lembaga Masyarakat Adat. Jumlah mereka saat ini sekitar 129 orang. Rata – rata mata pencahariannya adalah nelayan dan berburu. Meskipun jumlahnya hanya 129, tapi di Kabupaten Asmat terdapat 3 Masjid dan 9 Musholla yang tersebar di 6 Distrik (Baca: Kecamatan). Adapun untuk kegiatan –kegiatan keagamaan dilakukan di Ibukota Kab. Asmat di Agats. Mereka sangat berharap bahwa kegiatan keagamaan seperti pengajian dan da'wah bisa menjangkau terpencil. Mereka juga mengeluh bahwa lembaga – lembaga ISLAM dan pendidikan ISLAM seperti SMP dan SMA belum ada disana. Jika pun ada, hanya tingkat TK atau TPA, itupun hanya ada di Ibukota Kab. Asmat, Agats. Ia juga mengatakn bahwa saat ini ada beberapa msyarakat Asmat yang ingin memeluk ISLAM, tapi, Muslim di Kab. Asmat belum bisa berbuat banyak, sebab disatu sisi, sistem pembinaan terhadap kaum Muslim disana baru bersifat individual (baca: da'wah fardiyah), lihat <http://jsattaubah.multiply.com/journal/item/353>, 4 Desember 2007.

1. Kontroversi Kehadiran Laskar Jihad

Kontroversi kehadiran Laskar Jihad⁶³ di pulau Papua mencerminkan perkembangan populasi umat Islam di provinsi Papua dan di provinsi Papua Barat akan mendorong hadirnya berbagai paham, aliran atau kelompok agama. Hal tersebut tidak dapat dihindarkan dalam kondisi sosial politik yang berubah dengan cepat maupun perkembangan fenomena Islam di tingkat global.

Ketua I Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Ahlusunah Wal Jama'ah (FKAWJ), Ayip Syafruddin, mengakui saat ini (tahun 2002) terdapat 200 anggota Laskar Jihad di 6 (enam) kabupaten di tanah Papua antara lain Sorong, Jayapura, Manokwari, Biak dan Timika. Namun Ayip menegaskan bahwa ketakutan masyarakat Papua dengan datangnya Laskar Jihad itu dinilai sangat tidak beralasan. Ia berpendapat ketakutan hanya terjadi di Sorong yang selama ini menjadi salah satu tujuan pengungsi dari Ambon.⁶⁴

Panglima Laskar Jihad, Jafar Umar Thalib, membenarkan Laskar Jihad telah mengirimkan 200 anggotanya ke Papua sejak enam bulan lalu atau sekitar Oktober 2001. Tujuannya untuk memberikan pembekalan ilmu agama bagi masyarakat Muslim yang ada di Papua.⁶⁵ Jafar Umar Thalib juga membantah bahwa Laskar Jihad yang dikirim ke tanah Papua berjumlah 3.000 orang. Lebih lanjut, Panglima Laskar Jihad ini menyatakan bahwa :

”Ternyata yang mereka (muslim di Papua) butuhkan adalah pembekalan keagamaan, karena kondisi keagamaan umat Islam yang ada di sana sangat memprihatinkan. Investigasi tersebut dilakukan di 7 (tujuh) kota antara lain Jayapura, Timika, Fak-fak, Nabire, Manokwari dan Sorong. Bila ada pihak yang mengatakan ada 3.000 anggota Laskar Jihad di Papua, itu hanya penafsiran orang saja. Kami hanya kirim 200 orang, selebihnya adalah penduduk asli Papua seperti dari Timika dan

⁶³ **Laskar Jihad**, or *Holy War Warriors*, is an Indonesian Jihadist organization formed in 2000 by Jafar Umar Thalib, who studied in Pakistan and fought with the mujahadeen in Afghanistan in the late 1980s. (http://en.wikipedia.org/wiki/Laskar_Jihad).

⁶⁴ Lihat Sinar Harapan, 24 Mei 2002.

⁶⁵ Lihat <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0203/25/nas10.html>, 25 Maret 2002.

Nabire. Mungkin ketika melihat banyak yang berkumpul saat ada kegiatan, orang kemudian menyimpulkan ada 3.000 orang. Dukungan penduduk yang terlalu besar, bukan jumlah kami yang banyak. Jumlah 200 itu pun, sudah cukup dan tidak akan ditambah lagi. Kedatangan anggota Laskar Jihad tidak ada hubungannya dengan isu kerusuhan yang akan melanda Papua. Nggak ada hubungannya kita dengan kerusuhan, tujuan kami murni untuk berdakwah.⁶⁶

Kehadiran Laskar Jihad di tanah Papua mendapat perhatian yang tinggi dari berbagai pihak, baik yang berasal dari Papua maupun dari luar negeri, diantaranya Radio BBC Inggris⁶⁷ dan Radio Netherland. Di dalam wawancara dengan Radio Netherland, Panglima Laskar Jihad kembali menegaskan pandangan bahwa tujuan Laskar Jihad di wilayah Indonesia adalah dalam rangka untuk menebarkan dakwah kepada Al Quranun Sunnah di kalangan kaum muslimin. Kegiatan dakwah ini tentunya mendapat sambutan yang baik dari penduduk asli di Sorong, Fakfak, Timika, maupun Jayapura. Ja'far menambahkan bahwa biaya hidup dan kegiatan 200 anggotanya di Papua dikirim dari Laskar Jihad pusat. Jafar menilai masyarakat Papua pada umumnya memang telah merasakan kehadiran Laskar Jihad di wilayah mereka. Sejauh ini mereka bisa menerima kehadiran kelompok yang biasa berjubah, bersorban dan berjanggut ini.⁶⁸

Dari kalangan aktivis organisasi non-pemerintah seperti Lembaga Studi Hak Asasi Manusia (Elsham) Papua memperkirakan, jumlah Laskar Jihad di Papua sudah mencapai ribuan orang. Tiap Minggu 70-an orang bertampang Indonesia dan asing

⁶⁶ Lihat <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0203/25/nas10.html>, 25 Maret 2002.

⁶⁷ Laskar Jihad is also reported to have stepped up its activities in Papua province, formerly known as Irian Jaya. Papua is home to one million Christians and animists, with a small Muslim minority. Indonesian Christian leaders have repeatedly accused the security forces of turning a blind eye to Laskar Jihad. Some people believe the military may even be arming them as well. Lihat Radio BBC News, Who are Laskar Jihad ? (<http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1956007.stm>), 28 April 2002.

⁶⁸ Warta Berita Radio Netherland, *Sepak Terjang Laskar Islam di Papua*, 22 Maret 2002, lihat <http://www.mail-archive.com/berita@mw.nl/msg00542.html>.

tiba di Sorong dengan kapal-kapal kayu yang berlayar dari daerah Maluku dan Maluku Utara. Selain menggunakan kapal kayu, mereka juga bisa mengikuti kapal penumpang besar seperti Dobon Solo, Umsini, Rinjani dan Sinabung.⁶⁹ Demikian, pandangan kekhawatiran terhadap Laskar Jihad diungkapkan oleh Presidium Dewan Papua (PDP). Moderator Presidium Dewan Papua (PDP), Herman Awom, menegaskan "kondisi Papua saat ini sudah terbangun solidaritasnya setelah Theys Elluay terbunuh. Namun mereka khawatir dengan banyaknya "pasukan terlatih" di Papua dan sekitar 3.000 anggota Laskar Jihad. Jumlah ini masih akan bertambah 3.000 lagi untuk dikirim ke Papua dalam waktu dekat"⁷⁰

Berbagai pandangan negatif yang muncul dari kalangan aktivis NGO maupun PDP tersebut ditanggapi oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua, H Zubair Hussein. Zubair mengaku terkejut dengan informasi ribuan Laskar Jihad telah masuk ke Papua. Selama ini pihaknya sudah menghubungi MUI Sorong yang mengatakan sepuluh orang sudah berada di Sorong selama enam bulan. Kegiatannya sudah dideteksi Polda Papua, dan mereka menyatakan hanya melakukan ceramah-ceramah agama. Mereka datang hanya untuk melakukan ceramah dan berdakwah keislaman, tidak ada maksud yang lain. Tetapi saya mengerti dengan keresahan masyarakat, terutama karena isu akan adanya kerusuhan besar di Papua. Ketua MUI juga telah mengharapkan bantuan aparat keamanan untuk memantau kegiatan kelompok Laskar Jihad agar tidak membuat onar. Jika kemudian hari mereka berulah, maka MUI Papua dengan tegas akan menolak kehadiran mereka.⁷¹

Kekhawatiran terhadap kelompok agama yang berhaluan radikal seperti Laskar Jihad di tanah Papua menimbulkan perhatian yang berlebihan dari berbagai kelompok masyarakat di internal Papua maupun komunitas asing yang berkepentingan dengan urusan Papua.

⁶⁹ Warta Berita Radio Nederland, *Sepak Terjang Laskar Islam di Papua*, 22 Maret 2002.

⁷⁰ Lihat <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0203/25/nas10.html>, 25 Maret 2002.

⁷¹ Lihat <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0203/25/nas10.html>, 25 Maret 2002.

2. Munculnya "Islam baru" dan "Kristen baru".

Seiring dengan dinamika pembangunan di Papua dan arus migrasi spontan yang mengalir ke Tanah Papua, maka hal ini memberikan implikasi sosial yang cenderung membenturkan pemeluk agama yang satu dengan yang lain. Salah satu persoalan yang muncul adalah hadirnya kelompok-kelompok berbasis agama, baik Islam dan Kristen, yang beraliran fundamental atau radikal. Benturan antara agama ternyata menjadi perhatian dunia internasional. International Crisis Group (ICG) melaporkan bahwa:

Indonesian Papua has seen periodic clashes between pro-independence supporters and government forces, but conflict between Muslim and Christian communities could also erupt unless rising tensions are effectively managed. Violence was narrowly averted in Manokwari and Kaimana in West Papua province in 2007, but bitterness remains on both sides. The key factors are continuing Muslim migration from elsewhere in Indonesia; the emergence of new, exclusivist groups in both religious communities that have hardened the perception of the other as enemy; the lasting impact of the Maluku conflict; and the impact of developments outside Papua.⁷²

Kekhawatiran terhadap potensi konflik antaragama di Papua disebabkan oleh perubahan struktur demografi pemeluk agama yang bergeser, dimana menempatkan populasi Islam relatif seimbang di Provinsi Papua Barat, yakni sekitar 41 persen dari sekitar 700.000 jiwa pada tahun 2006. Demikian pula di Provinsi Papua, terdapat 18 persen penduduk beragama Islam. Namun, di beberapa kota di pesisir seperti di kota Sorong, kota Jayapura, Kaimana, Fakfak, Timika, Manokwari, dan Merauke, terlihat bahwa struktur yang seimbang antara Islam dan Kristen.

Dalam sebuah wawancara dengan Radio Nederland, Thaha Mohammad Alhamid, Sekjen Presidium Dewan Papua, bahwa dalam beberapa waktu belakangan

⁷² Lihat International Crisis Group, *Indonesia: Communal Tensions in Papua*, Asia Report, 16 Juni 2008, source: <http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5485&l=>

ini, berdatangan apa yang disebut orang kristen baru dan muslim baru. Mereka ini beraliran keras dan bisa menyulut konflik seperti yang pernah terjadi di Maluku.⁷³ Lebih lanjut, Thaha menyampaikan bahwa konflik ini belum terlihat secara terbuka, namun potensi konflik selalu ada. Menurut Thaha Al-Hamid:

”Dalam sepuluh tahun terakhir, kita kenal mungkin istilah yang pas adalah Islam baru dan kristen baru, yang ada di Papua memang menunjukkan gejala-gejala atau tanda-tanda yang jelas bahwa ruang perbedaan itu semakin tajam, semakin terbuka. Kita lihat tiba-tiba tumbuh di tanah Papua ini berbagai kelompok pengajian yang eksklusif kemudian ada juga gereja-gereja seperti di Sorong ada gereja yang sangat mewah dan tidak banyak masyarakat Papua yang masuk di situ. Kemudian juga ada pesantren-pesantren yang tiba-tiba bermunculan bahkan banyak dipertanyakan. Kenapa ada pesantren di komunitas yang non muslim. Juga organisasi seperti Hizbut Tahrir, kemudian juga ada kelompok-kelompok Salafi dan lain-lain. Itu sangat jelas sekali di Sorong, di daerah-daerah seperti Manokwari juga di Fak-Fak, di Kaimana dan Jayapura.⁷⁴

Jika konstelasi seperti ini tidak dikelola dengan baik, hal ini merupakan potensi konflik yang terpendam. Dalam konteks ini, diperlukan upaya yang bersifat mempromosikan nilai-nilai damai yang bersifat universal antarumat beragama. Salah satu ikhtiar yang dilakukan, menurut Thaha Al-Hamid, adalah mendirikan Majelis Muslim Papua (MMP) yang memiliki platform, baik yang mencakup moderat, toleran, dialog, partisipasi dari masyarakat adat. Diharapkan MMP melakukan peran sebagai jembatan hubungan antar subkultur maupun antarpemeluk agama di Tanah Papua.

⁷³ Radio Nederland Wereldomroep, *Papua Terancam Konflik Agama*, 17 Juni 2008, http://www.ranesi.nl/arsipaktua/indonesia060905/papua_konflik_agama20080617

⁷⁴ Radio Nederland Wereldomroep, *Papua Terancam Konflik Agama*, 17 Juni 2008, http://www.ranesi.nl/arsipaktua/indonesia060905/papua_konflik_agama20080617

3. Kontroversi pembangunan masjid raya dan Islamic Centre di Manokwari

Sejak tahun 2003-2004 kalangan umat Islam di Manokwari telah melaksanakan pembangunan masjid raya dan Islamic Centre di Manokwari yang letaknya berdekatan di bandar udara Rendani Manokwari, diatas tanah seluas 1 hektare. Pembangunan masjid dan islamic centre menimbulkan kritikan dan protes dari kalangan gereja.. Pada tanggal 17 November 2005, sekitar 5000 orang berdemo untuk memprotes pembangunan mesjid raya tersebut. Mereka terdiri dari mahasiswa Kristen, warga g gereja dan pemimpin-pemimpin gereja yang berasal dari 30 denominasi gereja, berdemonstrasi ke kantor DPRD Provinsi Papua Barat. Pada saat itu, demonstran diterima oleh Ketua DPRD Provinsi Papua Barat yang didampingi Bupati Manokwari, Kapolres dan Dandim setempat. Pada waktu itu juga para pendemo mendesak membentuk Perda Manokwari kota Injil, namun tetap setuju dengan mengikut sertakan kelompok agama-agama lain, agar ada saling pengertian dan rasa saling bertoleransi, serta memiliki persepsi yang sama mengenai Manokwari sebagai kota injil. Mereka juga berharap, pembangunan tempat-tempat ibadah mesti memperhatikan keberadaan Manokwari sebagai kota injil, sehingga peristiwa pembangunan mesjid raya yang menimbulkan rasa terancam umat Kristen itu tidak akan terulang lagi.⁷⁵

Nampaknya alasan ketakutan terhadap Islam diungkapkan oleh kalangan gereja. Menurut Pdt. Dimara, Gembala Sidang GKI Elim Koala -gereja kedua yang dibangun setelah Gereja GKI di pulau Mansinam-, ia menyatakan bahwa:

”...posisinya yang sangat strategis, dekat lapangan Udara manokwari, setiap orang yang akan memasuki kota Manokwari tentunya akan melihat mesjid raya yang besar itu, jika jadi dibangun. Kehadiran Mesjid raya itu juga akan melampaui besarnya gereja-gereja Kristen yang adalah agama mayoritas di Manokwari, itu tentu saja

⁷⁵ Binsar A Hutabarat, S.Th., M.C.S, *Kontroversi Perihal Perda Manokwari Kota Injil*, 21 Mei 2008, http://www.in-christ.net/perda_manokwari_kota_injil

menimbulkan perasaan terpinggirkan dari masyarakat Kristen yang adalah mayoritas.”⁷⁶

4. Kontroversi Rancangan Peraturan Daerah Manokwari sebagai Kota Injil

Kalangan gereja di Papua senantiasa menyebut Manokwari adalah kota Injil. Sebutan ini bukanlah sesuatu yang baru, namun hal ini terkait dengan peristiwa historis masuknya Injil ke tanah Papua, dan penyebutan ini dipromosikan sejak kebijakan otonomi khusus diberlakukan pada tahun 2001. Dalam catatan sejarah, dilaporkan bahwa dua orang missionari Jerman, pada tanggal 5 Februari 1855, bernama Johann Gottlob Geissler dan Carl Wilhelm Ottow pertama kalinya menjejakkan kaki di pulau Mansinam, pulau yang berada di Kabupaten Manokwari. Kedua penginjil ini diantar oleh pasukan dari Kesultanan Tidore.

Hal ini berawal ketika Pemerintah dan DPRD Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat merancang peraturan daerah (Raperda) tentang Pembinaan Mental dan Spiritual berbasis Injil. Raperda ini dimunculkan kali pertama pada 7 Maret 2007. Di antara isi pasal Raperda itu adalah melarang pemakaian busana Muslimah di tempat umum, melarang pembangunan masjid di tempat yang sudah ada gereja. Dibolehkan dibangun masjid atau mushala, asalkan disetujui tiga kelompok masyarakat (terdiri atas 150 orang) dan pemerintah setempat terlebih dulu. Raperda juga melarang azan, dan membolehkan pemasangan simbol salib di seluruh gedung perkantoran dan tempat umum.

Dari Raperda, tercermin pasal-pasal yang diskriminatif yakni seperti Butir 14 Ketentuan Umum: Injil sebagai kabar baik. Pasal 25 menyebutkan pembinaan mental memperhatikan budaya lokal yang menganut agama Kristen. Pasal 26: Pemerintah dapat memasang simbol agama di tempat umum dan

⁷⁶ Binsar A Hutabarat, S.Th., M.C.S, *Kontroversi Perihal Perda Manokwari Kota Injil*, 21 Mei 2008, http://www.in-christ.net/perda_manokwari_kota_injil

perkantoran. Pasal 30: Melarang pembangunan rumah ibadah agama lain jika sudah ada gereja. Pasal 37: Melarang busana yang menonjolkan simbol agama di tempat umum.⁷⁷

Menyikapi polemik tersebut, Wakil Ketua DPRD Manokwari, Amos H May, menegaskan bahwa julukan Manokwari sebagai Kota Injil baru sebatas wacana. Usulan Raperda tersebut merupakan pokok pikiran yang diartikulasikan unsur gereja dan sejumlah pakar. Bentuknya baru berupa pokok pikiran, bukan raperda karena tidak diusulkan eksekutif dan legislatif. Namun, Amos May mengakui bahwa usul tersebut sudah diserahkan ke eksekutif. Walau, ada sejumlah pasal yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, terutama terkait cara peribadatan.⁷⁸

Raperda ini memunculkan reaksi yang beragam dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, kalangan tokoh-tokoh muslim, maupun tokoh-tokoh kristen. Wakil Presiden Yusuf Kalla menyatakan bahwa:

"Saya tidak terlalu yakin kalau ada aturan supaya tidak boleh berpakaian Muslim. Di Eropa saja tidak ada aturan seperti itu. Aturan berpakaian Muslim itu hanya untuk orang Muslim, bukan untuk non Muslim. Itu juga sebenarnya ada di Aceh dan yang di Manokwari itu bukan untuk membalas yang di Aceh. Bukan seperti itu. Yang saya dengar sebetulnya hanya ingin menjadikan Manokwari sebagai Kota Injil karena sejarahnya."⁷⁹

Dari kalangan tokoh-tokoh Kristen pun tidak sependapat dengan Raperda tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Badan pimpinan nasional Gereja Katolik

⁷⁷ Lihat: *Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari, Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Mental Spritual*, Manokwari: 7 Maret 2007.

⁷⁸ Lihat, Manokwari Godok Raperda Berbasis Injil <http://forum.swaramuslim.com/more.php?>, 25 Maret 2007.

⁷⁹ Lihat <http://www.antara.co.id/arc/2007/6/8/wapres-minta-dpr-adil-soal-interpelasi>, 8 Juni 2007.

dan Gereja Protestan. Pendeta Weinata Sairin, Wakil Sekretaris Umum PGI, mengatakan bahwa PGI menolak Perda atau Raperda yang berbasis agama, karena hal tersebut menimbulkan diskriminasi. Demikian pula, Pastor Antonius Benny Susetyo, Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan KWI, mengungkapkan pendapat serupa. Pada dasarnya KWI menolak setiap perda yang berbasis agama, termasuk Raperda Kota Injil di Manokwari.⁸⁰ Pastor Susetyo, Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan KWI, menyebutkan agar pihak yang berwenang hendaknya mencabut Raperda tersebut. Alangkah baiknya nilai-nilai Injil ditanamkan melalui keluarga, sekolah, dan gereja. Tidak perlu harus diatur pada tingkat formal yang akan merusak agama itu sendiri. Menurut pejabat Katolik itu, "tugas yang paling penting sekarang adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena banyak orang yang masih miskin."⁸¹

5. Kontroversi pembangunan STAIN Al-Fatah

Pembangunan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Al-Fatah yang berlokasi Bumi Perkemahan Pramuka, Waena, Jayapura menimbulkan reaksi dari kalangan gereja dan masyarakat adat setempat. Namun, hal ini merupakan representasi dari seluruh kalangan gereja di Jayapura.

Pendirian kampus STAIN Al-Fatah berawal dari status dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Fatah Jayapura yang telah berdiri sejak tahun 1989. Pendirian STAIN ini telah mendapat rekomendasi dari Gubernur Provinsi Papua, Kanwil Depag Papua, DPRP, Rektor Uncen, dan Ketua Badan Pekerja Sinode GKIT Papua. Perjuangan untuk pembangunan STAIN ini akhirnya mendapat persetujuan dari Presiden RI, Megawati Soekarnoputri. Pada tanggal 18 Oktober 2004 STAIN Al-Fatah Jayapura resmi berdiri.

Dengan bantuan dana dari Pemerintah Kota Jayapura, pada tahun 2007 STAIN membeli tanah adat di Bumi Perkemahan (Buper) Waena, milik Suku Kaigere

⁸⁰ Lihat <http://www.jamaahmuslimin.com/dakwah/Artike1113.htm>, 13 Juni 2007.

⁸¹ Lihat <http://www.swaramuslim.net/gallery/papua/index.php?page=070403>, 3 April 2007.

seluas 10 Ha dengan harga Rp 3 Milyar dengan disertai upacara pelepasan adat. Namun, setelah pembebasan lahan tersebut, muncul aksi penolakan pelepasan tanah adat ini dari Ondoafi Besar Hedam Dasim Klebeuw, Asosiasi Pendeta Indonesia (API), Badan Pekerja GKIT Klasik Sentani, dan Forum Hak Ulayat Masyarakat Adat Sentani.⁸² Pada tanggal 29 Januari 2007, API melalui surat yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua menyatakan penolakan pembelian tanah adat. API merupakan organisasi yang beranggotakan para pendeta di seluruh Indonesia. Ketua DPD API Papua adalah Pdt Kirenius Bole yang berasal dari Kupang NTT. Terdapat beberapa alasan yang dikemukakan oleh API, antara lain: Pertama, tidak sesuai dengan Perdasus tentang Hal Ulayat Tanah Adat yang tertuang dalam UU Otsus Papua; Kedua, area tanah adat di sekitar Buper Waena merupakan tempat cagar alam (penghijauan); Ketiga, pembangunan Universitas Islam Negeri atau *Islamic Center* tidak membawa manfaat langsung bagi generasi muda Papua baik dari segi penyediaan SDM maupun bagi pemberdayaan iman Kristen sebagai agama mayoritas orang asli Papua; Keempat, pembangunan Universitas Islam Negeri atau *Islamic Center* merupakan program Islamisasi di Papua untuk menjadikan Indonesia Negara dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam.⁸³

Reaksi dari sebagian kelompok gereja dan adat ini kemudian diklarifikasi oleh pihak STAIN. Ketua Majelis Wali Amanah STAIN Al-Fatah, Thaha M. Alhamid, bersama Pimpinan Solidaritas Muslim Papua bertemu dengan Gubernur Barnabas Suaebu pada tanggal 1 Maret 2007 guna menjelaskan pembangunan Kampus STAIN. Penjelasan dari STAIN ini ditujukan pula kepada Ketua MRP dan Ketua DPRP. Diharapkan DPRP memfasilitasi perjumpaan dengan API guna menjernihkan keberatan organisasi ini. STAIN menjelaskan beberapa hal, antara lain: Pertama, jika penolakan yang datang dari masyarakat adat setempat (Masyarakat Adat Klebeuw) dan semata-mata didasarkan pada kehendak untuk melindungi tanah adat, maka pihak

⁸² Cahyo Pamungkas, *Papua Islam dan Otonomi Khusus: Kontestasi Identitas di Kalangan Orang Papua* (Jakarta, Thesis, Program Pasca Sarjana Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Juni 2008), hlm. 155.

⁸³ Cahyo Pamungkas, *Papua Islam...*, hlm. 156.

STAIN akan mendukung. Namun pada kenyataannya, penolakan datang dari masyarakat adat di luar lokasi tersebut (Ondoafi Besar Hedam Dasim Klebeuw). Penolakan datang dari API dengan alasan-alasan yang menurut MWA sangat provokatif dan bersifat menuduh. Kedua, upaya pembangunan kampus STAIN bukan untuk tujuan Islamisasi atau memaksakan Syariat Islam. Hal tersebut didasarkan pada tradisi anak-anak Muslim Papua berasal dan tumbuh dari kehidupan kampung-kampung tradisional yang harmonis. Pandangan teologis anak-anak Muslim Papua sangat menentang pendangkalan iman yang seringkali diekspresikan dengan sebutan Islam fundamental atau Islam radikal. Dinyatakan juga bahwa Muslim Papua sangat menjunjung agama keluarga dan prinsip-prinsip yang diyakini adalah Islam bersandar pada visi *rahmatan lil 'alamin* secara khusus *rahmatan lil Papua*.⁸⁴

⁸⁴ Cahyo Pamungkas, *Papua Islam...*, hlm. 157-158.

BAB VII

P E N U T U P

Bertolak dari belum terungkapnya sejarah Islam di Papua hingga saat ini, maka disertasi ini berupaya untuk membuka tabir tersebut. Walaupun dengan keterbatasan data dan informasi yang ada, namun hal tersebut merupakan tantangan untuk menggali catatan sejarah Islam di Papua, sejak abad pertengahan (XV) hingga tahun 2007 ini. Dengan demikian, disertasi bertujuan untuk menggambarkan dinamika yang terjadi dalam perkembangan umat Islam di Papua, khususnya di kalangan penduduk asli muslim Papua dari waktu ke waktu.

A. Kesimpulan

Dari aspek waktu masuknya Islam di Papua, disertasi ini mengungkapkan adanya perbedaan pandangan dari para ahli sejarah tentang waktu kedatangan Islam di pulau Papua. Setelah menganalisa berbagai dokumen yang tersedia, penulis menemukan terdapat 7 (tujuh) versi tentang masuknya Islam di Tanah Papua, baik menyangkut siapa yang membawa, kapan, dan dimana agama Islam berkembang pertama kali. Berbagai versi mengenai kedatangan Islam di Papua adalah berasal dari Papua sendiri, Aceh, Arab, Jawa, Banda, Bacan, dan Tidore/Ternate,

Dari berbagai versi kedatangan Islam di atas, disertasi ini menyimpulkan bahwa kedatangan agama Islam ke pulau Papua berasal dari Kesultanan Bacan, Maluku Utara, yang dibawa oleh Sultan Bacan, yang diperkirakan terjadi pada pertengahan abad XV. Didukung faktor ekonomis dan geografis dimana letak kesultanan Bacan lebih dekat dengan Pulau Papua, tepatnya di kepulauan Raja Ampat. dibandingkan dengan ketiga kesultanan lainnya di Malauku (Ternate, Tidore dan Jailolo). Selanjutnya agama Islam dikembangkan oleh para pedagang muslim dari Arab, Aceh, Jawa, Bugis, Makssar, Buton, Banda, Seram, Goram dan lain-lain.

Sebelum kedatangan Sultan Tidore ke Tanah Papua, Kesultanan Bacan telah menguasai pulau tersebut. Sebagaimana diberitakan sebuah catatan sejarah “Kesultanan Tidore “Museum Memorial Kesultanan Tidore Sinyene Mallige” yang menyebutkan bahwa pada tahun 1443 M Sultan Ibnu Mansur (Sultan Tidore X atau dikenal sebagai Sultan Papua I) memimpin ekspedisi kedaratan tanah besar (pulau Papua). Setelah tiba di wilayah pulau Misool, Raja Ampat (daerah Sorong), maka Sultan Ibnu Mansur mengangkat Kaicil Patra War putera Sultan Bacan dengan gelar Komalo Gurabesi (Kapita Gurabesi). Kapita Gurabesi kemudian dikawinkan dengan puteri Sultan Ibnu Mansur bernama Boki Tayyibah. Kemudian berdiri empat kerajaan di kepulauan Raja Ampat tersebut adalah Kerajaan Salawati, Kerajaan Misool/Kerajaan Sailolof, Kerajaan Batanta dan Kerajaan Waigeo.

Islamisasi awal di Tanah Papua pada abad pertengahan XV, juga dikatakan oleh van der Leeden dan J.R. Mansoben. Menurut keduanya Islam diterima melalui hubungan perdagangan antara kerajaan-kerajaan di kepulauan Maluku dengan kerajaan-kerajaan di kepulauan Raja Ampat pada abad XV. Karena itu maka pemeluknya hanya terbatas pada kelompok-kelompok yang terlibat dalam kegiatan perdagangan. Selanjutnya dengan masuknya Islam sejumlah penguasa kerajaan, terjadilah hubungan antara penguasa dari satu kerajaan dengan kerajaan lainnya. Karena itu maka kesamaan agama para penguasa di kepulauan Raja Ampat dan para penguasa di kepulauan Maluku Utara menyebabkan kemudian faktor agama menjadi legitimasi dan simbol kekuasaan. Implikasinya ialah agama Islam dijadikan sumber legitimasi bagi kekuasaan di kalangan para penguasa di kepulauan Raja Ampat.

Sementara itu, disertasi ini mengungkapkan bahwa sumber-sumber sejarah lisan Papua yang mengatakan bahwa Islam telah datang pada XIII di Tanah Papua, dipandang lemah. Karena berdasarkan sumber-sumber tentang Maluku, pada abad itu kehidupan masyarakat Maluku masih primitif, bagaimana mungkin mereka dapat menyampaikan dakwah Islam ke Tanah Papua. Kemudian baru pada pertengahan abad XV, ajaran Islam mulai dipelajari dan berkembang luas di kalangan bangsawan dan masyarakat Maluku, sehingga Islam mulai melembaga ke dalam struktur

kerajaan-kerajaan di Maluku. Jadi dengan semakin kuatnya kesultanan-kesultanan di Maluku, maka mereka semakin terdorong untuk memperluas daerah kekuasaannya ke Papua, sekaligus memperkenalkan Islam di Papua.

Diterimanya Islam sebagai agama oleh penduduk di Tanah Papua dilakukan dengan cara-cara damai, tanpa adanya paksaan. Bukti dengan jalan damai, ini terlihat di beberapa tempat seperti Biak dan Yapen walaupun pengaruh politik dan budaya Tidore sangat kental tapi mereka tetap memeluk agama lokal (saat ini mayoritas memeluk agama Kristen). Sementara itu, terdapat informasi yang mengatakan bahwa Sultan Tidore pernah memerangi suku-suku dan kerajaan-kerajaan di Papua, bukan karena mereka tidak mau memeluk Islam, tetapi dengan alasan pemimpin atau raja-raja di Papua tidak menyerahkan upeti. Diterima Islam juga karena adanya kesamaan dan kedekatan budaya serta etnik antara orang Papua dan Maluku, jauh sebelum datangnya Islam. Agama Islam semakin berkembang setelah Raja-raja Papua secara politik tunduk di bawah kesultanan Tidore. Jalur perdagangan juga sangat menentukan berkembangnya Islam di Papua, dengan datangnya para pedagang muslim dari Arab, Bugis, Makassar, Buton, Banda, Seram, Goram dan lain-lain. Sebagian para pedagang muslim ada yang menetap, sehingga terjadi hubungan perkawinan dengan penduduk setempat. Karena kepandaian mereka dalam ilmu agama Islam, maka penduduk Papua mengangkat mereka sebagai imam dan pemimpin.

Penguasaan Kesultanan Bacan atas Papua, juga dikatakan Thomas W. Arnold bahwa suku-suku di daratan Papua serta pulau-pulau sebelah barat lautnya seperti Waigeo, Misool, Waigama, dan Salawati. Pada abad XVI pulau-pulau tersebut dan juga Semenanjung Onin pada tahun 1606 M. di barat laut daratan Papua telah tunduk kepada Sultan Bacan (Sultan Zainal Abidin 1521 M), salah seorang Raja Maluku. Melalui pengaruh Raja Bacan ini maka para pemuka masyarakat pulau-pulau tadi memeluk Islam dan meskipun masa rakyat pedalaman masih tetap menganut animisme, tetapi rakyat pesisir adalah Islam.

Sedangkan Islam mulai melembaga ke dalam struktur kekuasaan di Papua sekitar abad XVI, setelah pemimpin-pemimpin Papua mengunjungi kerajaan Bacan pada tahun 1596 M. Dari kunjungan tersebut terbentuklah kerajaan-kerajaan Islam mini di kepulauan Raja Ampat, Sorong dan Semenanjung Onin, Fakfak. Wilayah Kepulauan Raja Ampat terdiri dari kerajaan Islam: (1) Kerajaan Waigeo dengan pusat pemerintahannya di Weweyai, Pulau Waigeo; (2) Kerajaan Salawati dengan pusatnya di Sailolof, pulau Salawatati Selatan; (3) Kerajaan Misool dengan pusatnya di Lilinta, Pulau Misool; (4) Kerajaan Batanta. Sementara di wilayah Fakfak dan Kaimana kerajaan-kerajaan (*petuanan*) Islam terbagi dalam sembilan petuanan, yakni: (1) Petuanan Pattipi; (2) Petuanan Rumbati; (3) Petuanan Fatagar; (4) Petuanan Ati-Ati; (5) Petuanan Wertuar; (6) Petuanan Namatota; (7) Petuanan Sekar; (8) Petuanan Komisi; dan (9) Petuanan Arguni. Kerajaan-kerajaan Islam di Papua adalah merupakan kerajaan Islam kecil di bawah kekuasaan Sultan Tidore, yang rajanya diberi gelar seperti *Kolano* atau *Kapitan Laut*, dan lain jabatan lainnya dalam struktur kerajaan. Kerajaan-kerajaan tersebut juga harus menyeter upeti secara periodik kepada Sultan Tidore yang pada abad XVII kesultanan Tidore secara resmi mengambil alih kekuasaan pulau Papua dari kesultanan Bacan.

Menyangkut bukti-bukti peninggalan Islam di Tanah Papua, dari hasil penelitian ini, ditemukan bukti arkeologis tertua berupa masjid Tunasgain di kampung Tunasgain, Fakfak Timur yang diperkirakan berdiri pada tahun 1587 M. Jadi usia masjid ini sekitar 415 tahun, dibuktikan dengan masih tersimpannya 8 buah tiang alif (dari kayu merbau) yang dipasang di atas atap masjid yang diperkirakan pergantiaanya setiap 50 tahun. Menurut cerita lisan dari masyarakat Fakfak dan luar Papua bahwa Masjid Tunasgain dibangun oleh seorang sufi bernama Syarif Muaz al-Qathan dari negeri Arab (Hadramaut Yaman) dengan gelar Syekh Jubah Biru. Arsitektur masjid ini mirip dengan Masjid Agung Demak. Di Kokas Fakfak, juga terdapat Masjid Agung Patimburakh masjid berdiri pada tahun 1870 M. Masjid ini telah dijadikan situs bersejarah oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Jenis arsitektur bangunan masjid ini, berkubah

dan pintu masuknya dibuat dengan ciri khas gereja, secara arsitektur Masjid ini mirip gedung gereja-gereja Protestan di Maluku.

Sementara itu, makam-makam Islam yang terdapat di Kepulauan Raja Ampat maupun Fakfak sulit teridentifikasi karena nisan terbuat dari kayu dan telah rusak. Di daerah Fakfak ada dua makam Islam tua yaitu makam Syekh Iskandar Syah asal Samudera Pasai berada di Pulau Kokorop, kecamatan Kokas, kabupaten Fakfak. Menurut sejarah lisan setempat mengatakan ia wafat abad XIII. Di kampung Rumbati, Fakfak ada sebuah makam mubaligh asal Aceh yang bernama Abdul Ghaffar yang menurut tradisi lisan, ia wafat sekitar abad XIV, namun kesemuanya sulit dibuktikan secara arkeologis. Di desa Saonek, kecamatan Waigeo, kabupaten Raja Ampat ada 2 makam yang terbuat dari tembok setinggi 50 cm, makam-makam yang lain berupa tumpukan batu yang disusun persegi panjang, tetapi tidak di temukan data sejarah yang jelas, karena nisan yang terbuat dari kayu yang telah rusak. Dari informasi penduduk semua guru-guru agama berasal dari Tidore dan Ternate. Tokoh-tokoh ulama yang dimakamkan Arif Saefudin, Hambali, makam keluarga Lagat (diperkirakan meninggal abad XIX atau XX) dan Abdurrahim Rafana, yang meninggal tahun 1942.

Peninggalan manuskrip tertua juga masih tersimpan 5 (lima) buah manuskrip yang katanya telah berumur 800 tahun berbentuk kitab dengan berbagai ukuran yang diamanahkan kepada Raja Patipi XVI (H. Ahmad Iba). Menurut cerita lisan manuskrip-manuskrip itu dibawa Syekh Iskandar Syah dari Aceh pada abad XIII. Manuskrip tersebut berupa mushaf al-Qur'an yang berukuran 50 cm X 40 cm. Bertulis tangan di atas kulit kayu yang dirangkai menjadi seperti kitab zaman sekarang. Empat lainnya, salah satunya bersampul kulit rusa, merupakan kitab hadits, ilmu tauhid dan kumpulan doa. Ada tanda tangan dalam kitab itu berupa gambar tapak tangan dengan jari terbuka. tapak tangan yang sama juga dijumpai di Teluk Etna (Kaimana) dan Merauke. Sedangkan tiga manuskrip berikutnya dimasukkan ke dalam buluh bambu dan ditulis di atas daun koba-koba, pohon asli Papua yang kini mulai punah. Ada pula manuskrip yang ditulis di atas pelepah kayu, mirip manuskrip

daun lontara (Fakfak: daun pokpok). Namun kelima naskah ini harus diteliti secara filologis, apakah benar ditulis pada abad XIII. Di Kampung Ugar, Fakfak juga terdapat kitab barzanji yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno bertanggal 5 Ramadhan tahun 1622 Miladiyah, teks khutbah berhuruf Arab berbahasa Melayu bertarikh tanggal 28 Rajab tahun 1319 M, dan Kitab Maulid Geser yang dibeli oleh Raja Rumbati Muhammad Sidik Bauw abad XV. Sedangkan dari pulau Waigeo, Raja Ampat, terdapat teks-teks purba yang telah lama menjadi teks baku. Hal ini dapat diperhatikan dari penulisan teks khotbah tersebut yang umumnya berasal dari akhir abad XIX atau awal abad XX., teks-teks tersebut berasal dari Kota Baru, Kabla Kauja (Perak, Malaysia) cetakan tahun 1326 H/1908 M dan Mekkah.

Dari kampung Ugar, Fakfak terdapat Dokumen Silsilah Raja-Raja Ugar, tertulis sebuah Surat Keputusan tertanggal 5 November 1929 M. Surat Keputusan itu menggunakan bahasa Belanda dan Melayu berstempel cap Kesultanan Tidore yang bertuliskan huruf Arab yang diberikan Sultan Tidore kepada Maidama atau Moi Damar Ugar sebagai Kepala Kampung Ugar dengan gelar jabatan Kapitan. Moi Damar Ugar merupakan generasi V dari turunan Raja-Raja Ugar.

Di Manokwari terdapat salinan naskah manuskrip tertanggal 3 Mei 1952 bertulis tangan, aslinya berbahasa Tidore, salinan ke-4 berbahasa Indonesia milik keluarga Rumander. Dalam naskah ini menceritakan bahwa utusan Sultan Tidore pada tanggal 18 Agustus 1812 M./17 Rajab 1217 H yang bernama Dano Sech Muhammad Alting bersama adiknya bernama Dano Muhammad Hasan dan seorang penerjemah Tolowo Warwe bergelar Kasim Raja dari Sorong Dom beserta beberapa anak buah perahu Ternate mengunjungi pulau Mansinam-Manokwari.

Pengaruh Islam terhadap penduduk pesisir barat Papua (Kepulauan Raja Ampat, Fakfak, Kaimana, Babo dan Teluk Bintuni), maka pranata-pranata kehidupan sosial budaya memperoleh warna baru. Keadaan ini terjadi karena penerimaan mereka kepada Islam sebagai agama, tidak terlalu banyak mengubah nilai-nilai, kaidah-kaidah kemasyarakatan dan kebudayaan yang telah ada sebelumnya. Apa yang dibawa oleh Islam pada mulanya datangnya, hanyalah urusan-urusan

'ubudiyah (ibadat) dan tidak mengubah lembaga-lembaga dalam kehidupan masyarakat yang ada. Islam mengisi sesuatu dari aspek kultural mereka, karena sasaran utama dari pada penyebaran awal Islam hanya tertuju kepada soal iman dan kebenaran tauhid.

Walaupun penduduk asli Papua telah memeluk agama Islam maupun Kristen, tetapi disamping itu mereka masih mempertahankan agama lokal. Penduduk muslim Papua di pedesaan, seperti di Salawati Selatan masih mempercayaimon (jin) yang setiap tahun diadakan upacara pesta *mon*. Di pantai Utara sampai titik timur Papua penduduk mempunyai kepercayaan pada *mansren*, seorang penyelamat dunia. Mereka juga percaya pada seorang makhluk yang maha kuasa yakni Uri, yang mengambil peranan besar dalam mythos masyarakat Papua..

Disertasi juga mengungkapkan bahwa perkembangan Islam di Papua berjalan mulai marak sejak Irian Jaya (Papua) berintegrasi ke Indonesia dibandingkan perkembangan Islam di era penjajahan Belanda. Di era penjajahan Belanda, konsolidasi penyebaran Islam lebih terkonsentrasi di wilayah pesisir Barat pulau Papua, yakni di Fak-fak, Sorong, maupun Raja Ampat. Di wilayah tersebut hidup dan berkembang struktur raja-raja di masyarakat Islam, seperti pertuanan Raja Wertuar, pertuanan Raja Fatagar, pertuanan Raja Komisi, dan pertuanan Raja Namatota. Para pertuanan raja-raja ini yang memainkan peran penting dalam dakwah baik melalui perdagangan, pendirian mesjid, perkawinan, maupun peperangan. Khususnya dalam hal peperangan, seperti pertuanan Raja Namatota yang gigih menentang Belanda dengan tidak mau menyeter uang tambang minyak kepada Belanda. Akibatnya raja Namatota dipenjara di Hollandia (Jayapura). Demikian pula, pada masa pertuanan raja-raja Islam ini, penjajah Belanda mulai menyebarkan agama Kristen dan Khatolik. Dengan masuknya agama tersebut, mereka mendirikan sekolah-sekolah Kristen yang juga banyak menerima anak-anak Islam putra daerah asli Papua. Namun, seiring dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia yang juga bergaung di Papua, disertasi juga mengungkapkan peran dari para pejuang-pejuang Indonesia yang dibuang di Tanah Merah, Boven Digoel, yang terletak di selatan Papua.

Pergerakan Hizbul Waton maupun Muhammadiyah muncul di Digul. Demikian, pula beberapa tokoh Islam di Fak-fak mendirikan partai-partai lokal yang berbasis Islam pada era akhir tahun 1950-an.

Di era integrasi Papua ke dalam negara Indonesia sejak tahun 1963, pergerakan dakwah Islam semakin marak dan dinamis. Muncul berbagai institusi atau individu-individu di Papua yang berasal dari luar Papua telah mendorong cepatnya penyebaran Islam di seluruh kota-kota di pulau Papua. Banyak muslim perantau dari Jawa, Bugis, Makassar, maupun Buton, apakah sebagai pedagang, pegawai negeri, maupun guru yang melakukan dakwah Islam dengan berbagai pola. Demikian juga, sejalan dengan program transmigrasi, maka masyarakat transmigran yang berasal dari Jawa mendiami wilayah-wilayah perdesaan Papua dan berimplikasi pada komposisi penduduk di Papua. Pada tahun 1995, umat Islam di Papua berjumlah sekitar 417.186 jiwa dari total penduduk Papua sebesar 2.031.620 jiwa. Ini berarti umat Islam sekitar 20,53 persen dari populasi penduduk Papua. Sejaak tahun 1963 banyak hadir organisasi-organisasi keagamaan Islam di Papua. Mulai dari Muhammadiyah, Nadhatul Ulama, Yayasan Pendidikan Islam, Hidayatullah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Daruud Dakwah Wal Irsyad, maupun pesantren-pesantren dengan tradisi ahli sunnah wal jamaah.

Demikian pula, dalam sejarah kontemporer Islam di pulau Papua, disertai ini menemukan bahwa kejatuhan presiden Soeharto pada pertengahan 1998 membawa dinamika baru dalam konstelasi sosial politik di tanah air, tak terkecuali di pulau Papua. Pertanyaannya adalah bagaimana dampaknya bagi umat Islam di Papua? Bagaimana respon dan peran serta umat Islam di era otonomi daerah, khusus di era otonomi khusus?

Perubahan konstelasi sosial politik di Tanah Air telah berimplikasi pula bagi perubahan sosial politik di pulau Papua. Lahirnya kebijakan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada tahun 2001 telah membawa pengaruh bagi segala aspek kehidupan di provinsi Papua. Secara makro, terdapat 3 (tiga) fenomena yang muncul seiring dengan perubahan politik di Papua, yakni sebagai berikut:

Pertama, adanya ruang publik yang terbuka secara kuat yang memberikan hak-hak politik kepada rakyat Papua untuk menuntut perbaikan kehidupan, termasuk menuntut kemerdekaan Papua. Iklim keterbukaan telah mendorong aktivis-aktivis Papua untuk membentuk Dewan Adat Papua, Presidium Dewan Papua, maupun komunitas lainnya yang bersifat progresif dalam memperjuangkan hak-hak dasar rakyat Papua.

Kedua, seiring dengan era desentralisasi, otonomi daerah, dan otonomi khusus, terdapat implikasi yang bersifat politik etnis, dimana hadirnya semangat 'Papuanisasi' atau tuntutan yang lebih besar kepada penduduk asli Papua untuk mengambil peran di berbagai bidang dan tingkatan. Disatu sisi, Papuanisasi dapat merupakan kebijakan khusus yang berfungsi mendorong percepatan pembangunan sumber daya manusia Papua. Namun disisi lain, hal ini menyebabkan dampak negatif bagi interaksi sosial antara etnik di Papua maupun antara suku-suku penduduk asli di Papua sendiri.

Ketiga, tuntutan liberalisasi politik yang terjadi pada tahun 1998 telah memberi ruang kepada peran partai politik yang lebih kuat maupun hadirnya pola pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Kondisi ini berimplikasi bagi semakin luasnya akses umat Islam dalam konstelasi sosial politik di pulau Papua, sebagaimana keterwakilan dalam politik formal di legislatif, Pilkada Gubernur dan Bupati/Walikota dan keterwakilan di MRP. Demikian pula, dengan hadirnya Majelis Muslim Papua (MMP) sebagai simbol dari kesadaran penduduk muslim asli Papua untuk berpartisipasi secara menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan di pulau Papua.

B. Saran-Saran

1. Penelitian ini masih jauh dari sempurna untuk mengungkap Sejarah Islam di Tanah Papua, karena masih ada beberapa situs-situs sejarah Islam di beberapa tempat di Papua yang perlu diteliti lebih serius. Kendala utama adalah sumber-sumber primer yang sulit ditemukan beberapa abad lalu dan juga peninggalan arkeologis yang tidak bertanggal, baik itu *live monument* maupun *dead monument*. Penelitian sejarah Islam di Tanah Papua membutuhkan dana besar, waktu yang panjang, karena pulau Papua yang begitu luas dan transportasi menjadi hambatan. Oleh karena itu perlu dibentuk sebuah tim penelitian sejarah Islam di Tanah Papua, yang didukung Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sehingga dapat diungkap jejak-jejak historis Islam di Tanah Papua secara lebih komprehensif.
2. Sejarah Islam di Tanah Papua perlu dimasukkan ke dalam penulisan sejarah (historiografi) Islam di Nusantara. Karena selama ini berkembang persepsi bahwa penduduk Papua yang identik dengan pemeluk agama Kristen dan Katholik. Padahal Islam telah datang ke Tanah Papua sekitar abad XV, sedangkan Kristen dan Khatolik baru dikenalkan para zending dan missionaris pada pertengahan abad XIX. Sejarah Islam di Papua juga perlu dijadikan kurikulum lokal di lembaga-lembaga pendidikan Islam maupun Kristen di Tanah Papua. Sehingga sejak dini mereka dapat mengenal dan memahami sejarah dan berkembangnya Islam serta interaksinya dengan agama-agama lain di Tanah Papua. Hal ini sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran umat Islam maupun umat Nasrani. Karena Islam masuk ke Papua bukan dengan kekerasan dan peperangan, tetapi lebih pada pendekatan kultural dan adat.. Belakangan ini mulai muncul kelompok Islam yang lebih formalistik-syari'ah yang menentang adat masyarakat setempat, sehingga terjadi ketidakharmonisan baik sesama umat Islam maupun umat agama lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Primer

- Aa, PJB. Robide van der, *Reizen naar Nederlandsch Nieuw-Guinea, met Geischied en Aardrijkskundige Toelichtingen*, The Hague, 1879.
- Corteseo, Armando (ed.), *The Suma Oriental of Tome Pires: An Account of the East from The Red Sea To Japan, written in Malacca and India in 1512-1515, and the book of Francisco Rodrigues*, London: Hakluyt Society, 1944, Vol I dan II.
- Collin, J.T., *Linguistic Research in the Maluku: A Report of Recent Fieldwork*, *Oceanic Linguistics* 21, 1981.
- Kamma, F.C., *The Corery Messianic Movement in the Biak Numfor Culture Area*, 1972.
- , "De Vewrhouing Tussen Tidore en de papoea Einladen in Legende en Historie". the Hague: Martinus Nijhoff, 1947.
- , *Dit Wonderlijke Werk*, terj. "Ajaib di Mata Kita: Masalah Komunikasi antara Timur dan Barat Selama Seabad Perkabaran Injil Di Irian Jaya, alih bahasa Koesalah Soebagyo Toer, Jakarta: Gunung Mulia, (3 Jilid), 1993.
- Haga, A., *Nederlandsch Nieuw Guinea en Papoesche eilanden*, vol. 2, Denhaag, 1884.
- Hirth, F., & W.W. Rockhil, *Chau Yu Kua: His Works on the Chinese and Arab Trade in the Twelfth and Thirteenth Centuries, Entitled Chu-fan-chi*, St. Petersburg: Imperial Academy of Sciences, 1911.
- Hubert, Th.Th.M. Jacobus,S.J., *A Treatise on the Moluccas (c.1544) Probably the Preliminary version of Antonio Galvoa's lost Historia das Moluccas*. Edited, Annotated, and Translate into English from the Portuguese manuscript in the Archivo General de Indias Seville, Sources and Studies for the the History of the Jesuit, Rome-Italy and St. Louis University, USA. 1970/1971.
- Italian Embassy, *Il Marcopolo*, No.13-14, Jilid V, Juli-Desember, 1963.
- Ma Huan, *Ying-Yai Sheng-Lan: The Overall Survey of the Ocean's Shores*, alih babasa: J.V.G. Mills, Cambridge: Cambridge University Press, 1970.

- Naskah Kesultanan Tidore pada tanggal 18 Agustus 1812 M./17 Rajab 1217 H. Berisi perjalanan utusan Sultan Tidore yang bernama Dano Sech Muhammad Alting bersama adiknya bernama Dano Muhammad Hasan ke pulau Mansinam-Manokwari. Naskah aslinya berbahasa Tidore, salinan ke-4 berbahasa Indonesia tertanggal 3 Mei 1952 milik keluarga Rumander. Disalin kembali oleh Rumbobiar, M.S., & Brawery, S.M., dalam *Buku Sejarah Sultan: Masuknya Islam di Munukwar*, Manokwari, 1 Juli 1994.
- Kern, H., *Het oud Jaavansche Lofdicth Negarakertagama van Prapanca 1365 A.D.*, 's - Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1972.
- Klein, W.C., *Aanwijezingen voor bestuurspenetratie met behulp van linchtuaart, Verkregen bij een goud expedite op Nieuw-Guinea*, 's -Gravenhage 1946.
- , *Nieuw Guinea, De Ontwikkeling Op Economisch, Sosial, En Cultureel Gebeid*, In *Nedherland Nieuw Guinea, Deel I*, S'Gravenhage: Drukkerij-en Uitgeverijbedrijf, 1953.
- Robertson, J.A., *Magelhan's Voyage Around the World by Antonio Pigafetta*, Claveland, 1906.
- Roelofsz, M.A.P, Meilink, *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 an about 1630*, Haque, Martinus Neijhoff, 1962.
- Rouffaer, G.P.R. & J.W.Y. Ijzerman, *DeErste Scippvaart der Nederlanders naar Oost Indie onder Conelis de Houtman, 1995-1597.*, (1925)
- Rumbobiar, M.S., & Brawery, S.M., dan *Buku Sejarah Sultan: Masuknya Islam di Munukwar*, Manokwari, 1 Juli 1994.
- Surat Keputusan tertanggal 5 November 1929 M yang diberikan Sultan Tidore kepada Maidama atau Moi Damar Ugar sebagai Kepala Kampung Ugar dengan gelar jabatan Kapitan. Moi Damar Ugar merupakan generasi V dari turunan Rarja-Raja Ugar. Surat Keputusan itu menggunakan bahasa Belanda dan Melayu berstempel cap Kesultanan Tidore yang bertuliskan huruf Arab.
- Sollewijn Gelpke, "Report of Miguel Roxo Debrito of His Voyages in 1851-1852 to Raja Ampat, The Mac Cleur Gulf and Seram", in *Bijdragen tot de Taal Land en Volkenkunde*, Vol. 150, Leiden: 1994.
- Soekino dkk, *Sejarah Pendidikan Islam Yapis Irian Jaya*, Jayapura : Yapis Irian Jaya, 1999.

- Stirling, M.W., *The Native Peoples Of New Guinea*. Smitsonian Institution War Background Studies, 1943.
- Valentijn, Francois *Oud en Nieuw Oost-Indien met aantekeningen, volledige Inhoudsregisters, chronologische lijsten enz.*, vol. I, Uitgegeven door Dr. S. Keijzer, derde deel, Amsterdam: 'S-Gravenhage, 1858.
- van der Aa, Robide, P.J.B., *Reizen naar Nederlandsch Nieuw Guinea, met Geschied en Aardrijkskundige Toelichtingen*, The Hague. 1879.
- van der Veur, Paul W, *Deutch New Guinea: Encyclopedia of Papua and New Guinea*, MUP, 1972.
- van Der Crap, P., *Geschiedenenis Van ternate in Ternateanschen an Maleischen teks Beschreven door den Ternatean Naidah met Vertaling en aantekeningen*, dalam Tijdschrift van het koninklijk Institut, Jilid II, 1985.
- van Schouwerburg, N. G. J., *Het Geestelijk en Maatschappelijk werk der Zending, Oost en West*, November 1955.
- Stirling, M.W., *The Native Peoples Of New Guinea*. Smitsonian Institution War Background Studies, 1943.
- Yamin, Mohammad., *Kedaulatan Indonesia Atas Irian Barat yaitu Uraian tentang Tuntutan Rakyat terhadap Wilayah Indonesia Bagian Barat*, Bukittinggi Jakarta-Medan: Nusantara, 1956.
- Yayasan Pondok Karya Pembangunan, *25 Tahun Kiprah Yayasan Pondok Karya Pembangunan Bumi Cendrawasih Irian Jaya*, Jayapura: YPKP, 2000.

B. Sumber Sekunder

- Abdullah, Taufik, (ed.), *Sejarah Lokal di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjamada University Press, 1946.
- , *Agama, Etos, dan Perkembangan Masyarakat*, Jakarta: LP3ES, 1979.
- , *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Asia Tenggara*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002, Jilid V.
- , *Sejarah Umat Islam Indonesia*, Jakarta: MUI & Yayasan Pustaka Umat, 2003.

- Alua, Agus A., *Karakteristik Dasar Agama-Agama Malanesia*, Jayapura: STFT Fajar Timur, 2006.
- , *Papua Barat Dari Pangkuan ke Pangkuan, Suatu Ikhtisar Kronologis*, Jayapura: Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Biro Penelitian STFT Fajar Timur, 2006.
- Ambary, Hasan Muarif, (ketua Tim), *Survei Kepurbakalaan Islam di Kabupaten Sorong, Irian jaya*, Kerjasama Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Proyek Penelitian Purbakala Irian Jaya , 1995.
- , *Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Historis Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 2001.
- Anceaux, J.C. "Language of the Bomberay Peninsula, Outline of a Liguistic Map" in *Nieuw Guinea Studien*, Den Haag: 1958.
- Arnold, Thomas W., *The Preaching of Islam: A History of the Propagation of the Muslim Faith*, New Delhi: Low Price Publications, 1995.
- Athwa, Ali, *Islam atau Kristenkah Agama Orang Irian?* Jakarta: Pustaka Da'i, 2004.
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Bandung: Mizan, 1994.
- , *Renaissans Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan kekuasaan*, Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2000.
- , *Historigrafi Islam Kontemporer: Wacana, aktualitas, dan Aktor Sejarah*, Jakarta: Gramedia, 2002.
- Bambang Soerjono Wresniwiro, dkk., *Lembaga Kerapatan Adat Kabupaten Fakfak*, Fakfak: tp., 1994.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Irian Jaya, *Irian Jaya Dalam Angka 1998*, Jayapura: BPS Provinsi Irian Jaya, 1999.
- Badan Pusat Statistik, *Statistics Indonesia : Indonesia's 2000 Population Census*, Bangkok : 29 November 2000.
- Badan Pusat Statistik & Bappeda Provinsi Papua, *Papua dalam angka 2001*, Jayapura, 2001.
- Badan Pusat Statitistik Provinsi Papua, *Papua Dalam Angka 2002*, Jayapura, 2003.

- Badan Pusat Statistik Provinsi, *Papua Dalam Angka Tahun 2004* Jayapura, BPS Provinsi Papua, 2004.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, *Papua Dalam Angka 2006*, Jayapura: BPS Provinsi Papua, 2007.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, *Papua Barat Dalam Angka 2007*, Manokwari: BPS Provinsi Papua Barat, 2008
- Bappenas, (Draf Akhir), *Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara, Buku Rinci di Provinsi Papua*, Jakarta: Bappenas 2006.
- Burger, D.H., *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, Jilid II, Djakarta, Pradnya Paramita dan J.B. Walters, 1960.
- Clercq, F.S.A., *Bijdragen tot de Kennis der Residentie Ternate*, Leiden: Brill, 1890.
- Collins, J.T., *Linguistic Research in Maluku: A Report of Recent Fieldwork*, *Oceanic Linguistic* 21, 1982.
- Crawfurd, John., *A Descriptive Dictionary of Indian Islands and adjacent Countries*, London: 1856.
- Dinas Kependudukan dan Permukiman Provinsi Papua, *Profil Pembangunan Transmigrasi dan Penataan Permukiman Penduduk Lokal di Provinsi Papua*, Jayapura : Dinas Kependudukan dan Permukiman Provinsi Papua, 2007.
- de Graaf, H.J., "South Asian Islam to the Eighteenth Century" dalam Hofl (*et.al*), *Cambridge History of Islam*, Jilid 2, London: the Cambridge University Press, 1970.
- , & Th. G. Th. Pigeaud, *Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa*, Jakarta: Grafiti Pers, 1985.
- Des Alwi, *Sejarah Maluku: Banda Naira, Ternate, Tidore dan Ambon*, Jakarta: Dian Rakyat, 2005.
- Djajadiningrat, P.A., *Achmad Herineringen van Pangeran Aria Ahmad Djajadiningrat*, Amsterdam-Batavia, 1936.
- Djopari, John R.G., *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, Jakarta: PT Grasindo, 1993.

- Elizabeth Bahba, "Profil Keagamaan di Kabupaten Fakfak dan Implikasinya Bagi Gereja Kristen Injili di Irian Jaya", *Skripsi*, Malang: Sekolah Tinggi Teologia "I-3" Batu Malang, 1997.
- Flassy, Don A.L., *Vademecum Perjuangan & Rendez-Vous dengan Tiuntutan Papua Volken* (Sebuah deskripsi psikohosomatis), Port Numbay: Jayapura: 1989.
- Gottchalk, Louis, *Understanding of History, Mengerti Sejarah*, terj. Jakarta: Notosusanto, Jakarta: UI Press, 1983.
- Graghan, Gilbert S.J., *A. Guide to Historical Method*, New York: Fordham University Press, 1975.
- Grunebaum, G.E. von, & Roger Caillos, *The Dream and Human Societies*, Los Angeles & Barkeley; University of California Pres, 1966.
- Kartodirjo, Sartono, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Kong Yuanzhi, *Muslim Tionghoa Cheng Ho, Misteri Perjalanan Muhibah Nusantara*, Alih Bahasa: M. Hembing Wijayakusuma, Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2007.
- Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Hasymy, A., *Sejarah Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia*, Bandung: al-Ma'arif, 1993.
- Hasan, Abdul Hamid, *Aroma Sejarah dan Budaya Ternate*, Ternate: Antara Pustaka Utama, 2001.
- Hernawan, Budi, *Membangun Budaya Damai dan Rekonsiliasi Dasar Menangani Konflik di Papua*, Jayapura: SKP Keuskupan Jayapura, 2006.
- Hutagaol, Luksan dkk., *Peta Sejarah Di Tanah Papua*, Jayapura: Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Papua, 2007.
- Ijje, Origenes Reagen, *Kongres Rakyat Papua II, Merupakan Resolusi Dasar Menuju Papua Merdeka*, Jakarta : PT. Bumi Intitama Sejahtera, 2003.
- Irza Arnyta Djafaar, *Jejak Portugis Di Maluku Utara*, Jogjakarta: Penerbit Ombak, 2006.

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003* tentang Percepatan Pelaksanaan UU No. 45/1999 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Timur.
- Katoppo, E., *Perjuangkan Irian ke Dalam Wilayah Indonesia*, Bandung: Kilat dan Maju, 1955.
- , *Nuku Perjuangan Kemerdekaan di Maluku Utara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1984.
- Kelompok Peneliti Etnografi Irian Jaya, *Etnografi Irian Jaya Panduan Sosial Budaya*, Jilid I, Jayapura: t.p., 1993.
- Koentjaraningrat, (et.al.), *Penduduk Irian Barat*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1963.
-, *Irian Jaya: Membangun Masyarakat Majemuk* Jakarta: Djambatan, 1994.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1994.
- Lapidus, Ira M., *A History of Islamic Societies*, Cambridge: University Press, 1993.
- Lapian, Adrian B., "Bacan and the Early History of Maluku", dalam L.E. Visser (ed.), *Halmahera and Beyond: Social Science Research in the Moluccas*, Leiden: KITLV Press, 1994.
- Leirissa, Richard.Z., *Halmahera Timur dan Raja Jailolo*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- , *Ternate Bandar Jalur Sutera*, Ternate: LlnTas, 2001.
- Mampioer, A., *Jayapura Ketika Perang Pasifik*, Jayapura: Labor, 1972.
- Mandowen, Willy, *Papua Barat dan Hak Menentukan Nasib Sendiri: Sebuah Tantangan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia*, dalam Theodor Rathgeber (ed.), *Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Buaya di Papua Barat, Studi Realitas Sosial dalam Perspektif Politis*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.
- Mansoben, "Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya, Indonesia: Studi Perbandingan" *Disertasi*, Leiden; University of Leiden, 1994.
- Mansinambow, F.K.M., *Halmahera dan Raja Ampat, Konsep dan Strategi Penelitian*, Jakarta: Leknas-LIPI, 1980.

- Mas'ood, Mohtar, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966 – 1971*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Microb, Halwany dkk., "Konsep Studi Kelayakan Masjid Agung Kokas Irian Jaya," Fakfak: Proyek P3SP Irian Jaya 10 September, 1984.
- Musa'ad, Mohammad Abud, *Menguak Tabir Otonomi Khusus Papua*, Bandung: Penerbit ITB, 2004.
- Nachrawy, Herry Rd., *Peranan Ternate Tidore Dalam Pembebasan Irian Barat*, Ternate: Yayasan Kie Raha, 2004.
- Nor Huda, *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Onim, Jusuf Frederik, *Sejarah Pertemuan Gereja dan Islam di Kabupaten Fakfak Irian Jaya*, Jayapura: Fajar Timur, 1997.
- , *Islam & Kristen Di Tanah Papua: Meniti Jalan Bersama Hubungan Islam-Kristen Dalam Sejarah Penyebaran dan Perjumpaannya di Wilayah Semenanjung Onin Fakfak*, Bandung: Jurnal Info Media, 2006.
- Pamungkas, Cahyo, *Papua Islam dan Otonomi Khusus: Kontestasi Identitas di Kalangan Orang Papua* (Jakarta, Tesis, Program Pasca Sarjana Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Juni 2008).
- Pemerintah Daerah Irian Jaya, *35 Tahun Irian Jaya Membangun*, Jayapura: Pemda Provinsi Irian Jaya, 1997.
- Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, *Evaluasi Pelita V Propinsi daerah Tingkat I Irian Jaya Tahun 1989/1990 – 1993/1994*, Jayapura: Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, 1994.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak, *Sejarah Masuknya Islam di Fakfak*, Fakfak: Pemda Kabupaten Fakfak, 2006.
- Putuhena, Shaleh, *Struktur Pemerintahan Kesultanan Ternate dan Agama Islam*, Jakarta: Leknas LIPI, 1981.
- , *Historiografi Haji Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2007*. Tentang Perubahan nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi provinsi Papua Barat melalui
- Pigay, Decki Natalis, *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua (Sebelum, Saat dan Sesudah Integrasi)*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.

- Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari, Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Mental Spritual, Manokwari: 7 Maret 2007.*
- Raffles, Thomas Stamford, *The History of Java*, alih bahasa Eko Prasetyaningrum (*et.al*), Yogyakarta: Narasi 2008.
- Ramenday, Frits Bernard, (ed.), *Profil Otonomi Khusus Papua*, (Jakarta, AJI-Papua, 2005.
- Raweyai, Yorrys T.H., *Mengapa Papua Ingin Merdeka*, Jakarta: Desanti Grafika, 2002.
- Reid, Anthony, *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680. Vol Two: Expansion and Crisis*, Chiangmai: Silkworm Books, 1993.
- Republik Indonesia, *Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Di Depan Sidang DPR, 16 Agustus 1997, Pelaksanaan Tahun Ketiga Repelita VI* (Jakarta, Republik Indonesia, 1997.
- Ricklefs, M.C., *A History of Modern Indonesia*, London: The Macmillan Press Ltd., 1983.
- , *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
- Rumere, Z., & J.F.Onim, *Dengarlah Ottow Berbicara*, Jayapura: Penerbit Deiyai, 2005.
- Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Pendekatan Metodologi Sejarah*, Jakarta : Gramedia 1993.
- Sewang M, Ahmad., *Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Soe Kham, Khoe, (*et.al.*), *Mengenal Sebagian Dari Tanah Air Kita Irian Barat*, Jakarta : Staf Penguasa Perang Tertinggi, 1962, Jilid I, II & III.
- Soedjatmoko (*et.al.*), *Historiografi Indonesia Sebuah Pengantar*, Jakarta : Gramedia, 1995.
- Sumule, Agus (ed.), *Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Syahril Muhammad, *Kesultanan Ternate Sejarah Sosial Ekonomi dan Politik*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004.

- Thamrin, Tarmidzy, *Boven Digul Lembaga Perlawanan Terhadap Kolonialisme*, Surabaya: CISCOS, 2001.
- Titik Pudjiastuti, "Naskah-Naskah Kuno Maluku Utara Koleksi Perpustakaan Nasional " dalam M. Jusuf Abdulrahman (et.al.), *Ternate Bandar Jalur Suterah*, Ternate: LInTas, 2001.
- Tjandrasasmita, Uka (ed.), *Sejarah Nasional Indonesia III, "Jaman Perutumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia"*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975.
- , *Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-Kota Muslim di Indonesia dari Abad XIII sampai XVIII Masehi*, Kudus: Menara Kudus, 2000.
- , *Penelitian Arkeologi Islam di Indonesia Dari Masa ke Masa*, Kudus: Menara Kudus, 2000.
- Undang-Undang No. 45 Tahun 1999* tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, dan Provinsi Irian Jaya Timur.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001* tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2002* tentang Pmbentukan 14 kabupaten baru di provinsi Papua, yakni: Keerom, Sarmi, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Boyen Digoel, Asmat, Mappi, Kaimana, Teluk Bintuni, Puncak Jaya, Teluk Wondama, Sorong Selatan, dan Raja Ampat.
- van den Broek, Theo, dalam J. Budi Hernawan, *Papua Land of Peace: Addressing Conflict Building Peace in West Papua*, SKP Jayapura, 2005.
- van, der Leeden, A.C., "The Raja Ampat Island: A Brief General Description" dalam E.K.M. Mansinambow (ed.), *Halmahera dan Raja Ampat Konsep dan Strategi Penelitian*, Jakarta: Bharata-Karya Aksara, 1980.
- van Leur, J.C, *Indonesia Trade and Society: Essays in Asia Social and Economic Histry*, The Hague: W. van Hoeve Ltd, 1955.
- Vansina, Jan, *Oral Tradition: A Study nin Historical Methodology*, Chicago: Aldine, 1965.
- Vesser, Leontine, (ed.), *Halmahera Beyond: Social Science Research in the Moluccas*, Leiden: KITLV Press, 1994.

West Pac, *Kronologi Sejarah, Seri Pemahaman Papua Barat Vol.I*, Jakarta: West Papua Community, 1999.

Wonda, Sendius, *Tenggelammnya Rumpun Malenesia: Pertarungan Politik NKRI di Papua Barat*, Yogyakarta: Galangpress, 2007.

Zollner, Siegfried, "Budaya Papua dalam Transisi : Ancaman Akibat Modernisasi – Jawanisasi dan Diskriminasi", di dalam Dr. Theoder Rathgeber (ed.), *Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Papua Barat*, Jakarta: Sinar Harapan, 2006.

C. Laporan Penelitian, Majalah dan Koran.

Ambary, Hasan Muarif, (ketua Tim), *Survei Kepurbakalaan Islam di Kabupaten Sorong, Irian jaya*, Kerjasama Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Proyek Penelitian Purbakala Irian Jaya, 1995.

Laporan Penelitian Arkeologi Islam di Kec. Kakos, Kab. Fak-Fak Irian Jaya, Jayapura: Proyek Penelitian Purbakala Irian Jaya, 1996-1997.

Majalah Ilmu-Ilmu sastra Indonesia, Jakarta: Bharatara, Juni 1978/1979, Jilid VIII No. 1 & 2.

Majalah Rahmah, Jayapura : Yayasan Dakwah Islam al-Falah, Jumadil Akhir 1419 H./1998, No.7.

Majalah Sabili, "Perjalanan Sebuah Mushaf Tua", Jakarta: NO. 01 TH. XVI 24 JULI 2008/21 RAJAB 1429.

Mansoben, *Sistem Poltik Tradicional di Irian Jaya*, Jakarta: LIPI-RUL Series, 1995.

Press Release, Komunitas Muslim Asal Irian Jaya, *Pokok-Pokok Pemikiran Alternatif dalam Penyelesaian Permasalahan di Daerah Irian Jaya*, Istana Negara, Jakarta, 20 Desember 2000. Press release ini secara lengkap dimuat pada harian Cendrawasih Pos, 22 Desember 2000.

Seri Papua Aktual No. 5, Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura, Jayapura, Juni, 2006.

Slump, F., *De Zending Op West Nieuw Guinea*, Oegstgeest: Zendings Bureau, 1930.

Soerat Chabar Pejoeloeh, 8 September 1946.

Sollewijn Gelpke JHF, *“On the Origin of the name Papua”*, BKI, 1993.

Wasarakah, Z.A. dkk. (Tim Perumus), *“Sejarah Masuknya Islam dan Perkembangan di Irian jaya”*, Fakfak: 23 Juni 1997.

Yusuf, Idris, *“Lahirnya Nama Irian Jaya “Warta Irian Jaya, Jayapura: Biro Humas Sekwilda Irian Jaya, edisi 31/32, 1998.*

Press Release, Komunitas Muslim Asal Irian Jaya *Pokok-Pokok Pemikiran Alternatif dalam Penyelesaian Permasalahan di Daerah Irian Jaya*, Istana Negara, Jakarta, 20 Desember 2000.

Cendrawasih Pos, 22 Desember 2000.

Detik.com, 20 Desember 2000.

InfoPapua.Com, 20 Desember 2000.

Kompas, 21 Desember 2000. & 30 September 2005.

Sinar Harapan, 24 Mei 2002 & 19 November 2005..

Suara Pembaruan, 21 Desember 2000.

D. Makalah

Bauw, Ismail A., *“Tata Hukum dan Pemerintahan Pola Perkembangan Islam di Irian Jaya”*, *Makalah*, Fakfak 1997.

La Ode Jiru Baadiah, *“Risalah Masuknya Agama Islam di Pulau di Pulau Misool”*, *Makalah*, Sorong: LPTQ Kabuputen Sorong, 1996.

La Pona, *“Program Pembangunan Transmigrasi Era Otonomi Khusus Di Papua”*, *Makalah*, Jayapura, 20 Juni 2008.

Musa’ad, Ya’cub Ibnu, *”Menelusuri Jejak Historis Masuknya Islam di Tanah Papua”*, *Makalah*: disampaikan dalam Seminar Sejarah Masuknya Islam di Fakfak dan MTQ II Papua Barat, tanggal 23 April 2008.

Suwiryadi, Kasibi *“Sejarah Da’wah Islam Islam di Irian Jaya”* *Makalah* Disampaikan Dalam Sarasehan Sejarah Islam di Irian Jaya di Merauke Juni 2000.

- , "Sejarah Dakwah Islam Di Tanah Papua", Dalam Surat Laporan Kepada Ketua LPTQ/Ketua Khalifah STQ Kabupaten/ Kota se Provinsi Papua, 3 Juni 2002.
- , "Sejarah Masuknya Islam di Tanah Papua", Makalah disampaikan dalam Seminar Dinamika Kerukunan Hidup Umat Beragama dari Berbagai Daerah, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Muhammadiyah Jayapura kerjasama dengan Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Departemen Agama, 2004.
- , "Sejarah Singkat Muhammadiyah di Papua", Jayapura: Naskah makalah yang disiapkan untuk disajikan pada kegiatan DAD IMM Jayapura, 2004.
- Rahanwarat, Lukman, *Islam di Kabupaten Fakfak: Suatu Tinjauan Historis*, Makalah disampaikan Dalam Sarasehan Sejarah Islam di Irian Jaya, Merauke: Juni 2000.
- Seiler, W., "The Spread of Malay to Kaiser Wilhelmsland", dalam Rainer Carle (et.al), *Gasva, Studies in Austronesia Language and Culture*, Veröffentlichungen des Seminars für Indonesische und Südseesprachen der Universität Hamburg, vol. XVII, Berlin Reimer Verlag, 1982.
- Wanggai, Toni Victor, M., "Sejarah Islam di Tanah Papua", Makalah disampaikan dalam Rapat Kerja LPTQ, 19 Juni 2006.
- , "Rekonstruksi Sejarah Islam di Tanah Papua", Makalah disampaikan dalam Seminar Masuknya Islam di kabupaten Fakfak & MTQ II Papua Barat, Fakfak, 23 April 2008.

E. Wawancara

- Aituarauw, Hakim Ahmad (Putra Mahkota Raja Komisi) Fakfak, 7 Oktober 2006.
- Aituaraw, Ahmad Robi, (Ketua majelis Muslim Papua, Jayapura, 13 Maret 2007.
- Asso, Thoha Mode, (Ketua Forum Komunikasi Muslim Jayawijaya) Jayapura, 11 Januari 2007.
- Al-Hamid, M. Thoha, (Sekjen Dewan Presidium Papua), Jayapura, 3 Desember 2007.
- Bauw, Umar, Al-Bintuni, (Pegawai Kanwil Depag Papua), Jayapura, 19 September 2004.

Duosid (Ketua GP.Anshor Wilayah Papua), Jayapura, 15 Juni 2005.

Fadzlan Garamatan, (Ketua Yayasan Al-Fatih Nusantara/ Anak Keturunan Raja Patipi-Fakfak, Jakarta: 10 Juli 2008.

Fimbay, Udin (ustadz & anak Kepala Suku di Teluk Bintuni Manokwari, 26 April 2008.

Herembu, Musa N.P., generasi X dari Raja Wetuar, Fakfak: 15 November 2006.

Komarudin (Sekretaris Nahdhatul Ulama Wilyah Papua), 9 Pebruari 2008.

Musa'ad, Ya'cub Ibnu, (pemeharti sejarah Islam Papua, keturunan Arab-Fakfak), Fakfak, 24 April 2008.

Musa'ad, (Muhammad Ketua ICMi Papua/ Direktur Demokrasi Center UNCEN Jayapura, Juni 2008.

Muharram, A., (Mantan Kepala Kanwil Depag Papua), 21 Mei 2008.

Soddik Ismail (Mantan Kadolog Propinsi Irian Jaya tahun 1979-1982), Jakarta 8 Desember 2008.

Suwiryadi, Kasibi (Mantan Ketua Muhammdiyah Papua), Jayapura, 22 September 2004 & 15 Maret 2008.

Zubeir Daeng Hussein (Ketua MUI Papua/Ketua Umum Yapis Papua), Jayapura, 5 Desember 2007.

F. Website

<http://www.papuaweb.org/gb/peta/index.html>

<http://www.papuaweb.org/gb/peta/sejarah/collingridge/index.html>

<http://www.papuaweb.org/gb/peta/index.html>

<http://www.papuaweb.org/gb/peta/sejarah/collingridge/index.html>

http://www.muhammadiyah.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=35, 1 Juni 2008

<http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammadiyah> 1 Juni 2008.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammadiyah> 1 Juni 2008.

http://www.muhammadiyah.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=35, 20 Juli 2008.

<http://www.nu.or.id/page.php>.

<http://www.indonesia.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?start=0&t=5348> 12 September 2006.

www.cenderawasihpos.com/detail.php Jayapura, 19 Mei 2008.

www.tempointeraktif.com/hg/nusa/papua/2006/09/14/brk_20060914-84023.id.html

www.suarakarya-online.com/news.html?id 15 April 2006.

http://web.papua.go.id/berita_det.php/id/527, 4 April 2006.

http://www.direktori-perdamaian.org/ina/org_detail.php?id=202 25 Juni 2008.

<http://www.kapanlagi.com/h/0000140588.html>, 25 Oktober 2006.

<http://www.mailarchive.com/reformasitotal@yahoogroups.com/msg02216.html> 12 November 2007

<http://www.freelists.org/archives/ppi/09-2005/msg00032.html>

http://www.papua.go.id/berita_det.php/id/1260, 11 April 2007.

http://www.ranesi.nl/arsipaktua/indonesia060905/papua_konflik_agama20080617 17 Juni 2008.

<http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/papua/2007/04/05/>, 5 April 2007.

<http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/papua/2007/04/05/>, 5 April 2007.

<http://jsattaubah.multiply.com/journal/item/353> 4 Desember 2007.

http://en.wikipedia.org/wiki/Laskar_Jihad

<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0203/25/nas10.html>, 25 Maret 2002.

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1956007.stm>, 28 April 2002.

<http://www.mail-archive.com/berita@rnw.nl/msg00542.html> 22 Maret 2002,

<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0203/25/nas10.html>, 25 Maret 2002.

<http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5485&l=16> Juni 2008

http://www.ranesi.nl/arsipaktua/indonesia060905/papua_konflik_agama20080617

http://www.in-christ.net/perda_manokwari_kota_injil 21 Mei 2008.

<http://forum.swaramuslim.com/more.php?>, 25 Maret 2007.

<http://www.antara.co.id/arc/2007/6/8/wapres-minta-dpr-adil-soal-interpelasi> 8 Juni 2007.

<http://www.jamaahmuslimin.com/dakwah/Artikel113.htm> 13 Juni 2007.

<http://www.swaramuslim.net/galery/papua/index.php?page=070403> 3 April 2007.



BIODATA

Nama Lengkap : **Dr. TONI VICTOR MANDAWIRI WANGGAI, S.Ag, MA.**
NIP : 150 361 741
Tempat Tanggal Lahir : Jayapura, 06 Agustus 1970
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS Dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar DPK pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIS) Yapis/Universitas Yapis Papua (UNİYAP) Jayapura
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIS) YAPIS Jayapura (2004-2006)
Dekan Fakultas Agama Islam UNİYAP Jayapura tahun 2006-2011
Alamat Rumah : Jl. Lembah II Angkasa Indah No.11 Jayapura-Papua
Telepon : (0967) 542281; mobile : 085244578870
Alamat Kantor : Fakultas Agama Islam Universitas Yapis Papua (UNİYAP) Jayapura
Jl. DR. Sam Ratulangi No.11 Dok V Jayapura-Papua
Telepon/Fax. : (0967) 534012
Keluarga :
Ayah : H. Sofyan Wanggai (Almarhum)
Ibu : Ita Nurita
Istri : Meily Indriyati (menikah, Bogor 1 Juni 1997)
Anak : 1. Muhammad Amin Rais Wanggai (10 Tahun)
2. Tita Dwi Fatimah Wanggai (9 Tahun)
3. Chelsea Alyda Tsalisyah Wanggai (3 Tahun)

Pengalaman Pendidikan :

1. Sekolah Pascasarjana (S-3) Universitas Islam Negeri Jakarta, Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam (tahun 2002-2008).
2. Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Negeri Jakarta, Program Studi Tafsir Hadis (Lulus tahun 2002)
3. Program Strata Satu (S-1) STAI Al-Amin, Sumenep Madura (Lulus tahun 1997)
4. Program Diploma I Metodologi Pengajaran Bahasa Arab di Lembaga Ilmu Pegetahuan Islam dan Arab (LIPIA) tahun 2001.
5. Tarbiyatul Mu'allimin Islamiyah Ponpes Al-Amin, Sumenep Madura (1991-1994)
6. SMAN 2 Jayapura (Lulus 1989)
7. SMPN 1 Jayapura Utara (Lulus tahun 1986)
8. SDN Inpres Angkasapura Jayapura (Lulus tahun 1983)

Pengalaman Pekerjaan :

1. Guru Bahasa Inggris SMU MUQRI Sumenep, Madura (tahun 1994-1996)
2. Dosen Luar Biasa FISIP Universitas Cenderawasih (UNCEN) tahun 1998-1999
3. Dosen Tetap Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar DPK FAI Universitas Yapis Papua (UNIYAP) Jayapura (tahun 1998-sekarang)
4. Dosen STIMIK 10 Nopember Jayapura

Penelitian dan Karya Ilmiah

1. Peran Ulama dalam Pembangunan Gerakan Keluarga Sejahtera di Desa Prenduan Sumenep Madura (Skripsi:1996)
2. Konsep Dzikir Dalam Al-Qur'an, Kajian Tafsir Mawdu'î (Tesis:2002)
3. Sifat-Sifat Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an (Makalah,2000)
4. Shiddiq dalam Perspektif Hadist (Makalah,2001)
5. Metode Penulisan Kitab Sejarah *al-Bidayah wa al-Nihayah* (Makalah,2003)
6. Kualitas Hadist dalam Kitab Tafsir Ibnu Katsir (Makalah,2003)
7. Sejarah Masuknya Islam di Tanah Papua (Makalah,2004)
8. Peran Perguruan Tinggi Agama Islam dalam Membangun Moral Bangsa (Jurnal,2005)
9. Problematika Pendidikan Islam di Tanah Papua (Jurnal,2006)
10. Penanggulangan HIV/AIDS dalam Pandangan Islam (Makalah,2007)
11. Peran Umat Islam dalam Pembangunan di Tanah Papua (Makalah,2008)

Pelatihan-Pelatihan :

1. Pelatihan Manajemen Masjid dan Zakat di Malaysia dan Singapura (Juni,2005)
2. Pelatihan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif bagi Dosen PT AIS di Makassar (2006)
3. Pelatihan Metode Pengajaran Dosen di Makassar (2007)
4. Pelatihan TOT HIV/AIDS bagi Tokoh Lintas Agama di Turki (2008)

Pengalaman Organisasi :

1. Ketua Bidang Ukhuwah Islamiyah MUI Provinsi Papua masa khidmat tahun 2006-2011
2. Ketua Bidang Pendidikan Majelis Muslim Papua, periode tahun 2007-2012
3. Ketua GEMA NUSA Wilayah Papua periode tahun 2006-2011
4. Ketua Divisi Pendidikan Ikatan Da'î Indonesia (IKADI) Provinsi Papua Periode tahun 2006-2011
5. Wakil Ketua I Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Jayapura tahun 2006-2009
6. Tim kerja Forum Konsultasi Para Pimpinan Agama di Tanah Papua (FKPPA) tahun 2006-2008
7. Anggota Dewan Pakar ICMI Orwil Papua periode tahun 2007-2011
8. Dewan Pembina Yayasan BILAL Papua (2000-sekarang)
9. Pendiri Yayasan As-Syifa Sejati Papua (2006-sekarang)
10. Anggota Tim Seleksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Tahun 2007-2008
11. Ketua Bidang Pendidikan Tinggi Yayasan Pendidikan al Ma'arif Jayapura Tahun 2008-2012